

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sesuai kewenangannya yang telah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diwajibkan menyusun Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tanggal 27 Nopember 2024 Kabupaten Sumedang telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan serentak secara nasional. Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka ditetapkan pasangan Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M. sebagai Bupati dan M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn sebagai Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2025 - 2029 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin kesinambungan Pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat, baik pada aspek Pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan Masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pelaksanaan konsultasi publik. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang bertujuan pada percepatan pembangunan daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Lebih lanjut, secara substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan tematik holistik bermakna dilakukannya penanganan menyeluruh dan terfokus pada pencapaian

program prioritas sehingga kegiatan yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh program yang saling memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna program prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada Masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025 – 2029.

Adapun tata cara yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 selain berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tata cara penyusunan RPJMD meliputi: persiapan penyusunan; pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik; penyusunan rancangan awal; pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; penyusunan rancangan; pelaksanaan musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Sehingga, penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 berfokus pada perincian substansi perencanaan pembangunan lima tahunan tahap pertama RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD);
3. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai;
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappppeda;
5. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

- tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
 24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
 27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan

- Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya *Sunda* (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJM Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Hal ini dilakukan menyelaraskan kinerja dan periodisasi serta mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.



Gambar 1.2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045

(Sumber : Perda RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045)

Pada Tahap Pertama ini adalah merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Adapun upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten telah sejalan dengan arah pembangunan terutama dalam mendukung target kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2030. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan suatu perencanaan yang berkualitas dengan mengintegrasikan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah serta mencapai visi dan misi Bupati.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya;
3. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

4. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang;
5. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
7. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
8. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) yaitu Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum serta hasil evaluasi capaian Pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir. Gambaran Keuangan Daerah yang meliputi realisasi APBD, Neraca Daerah Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030; Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah Tahun 2025-2030. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V : Penutup

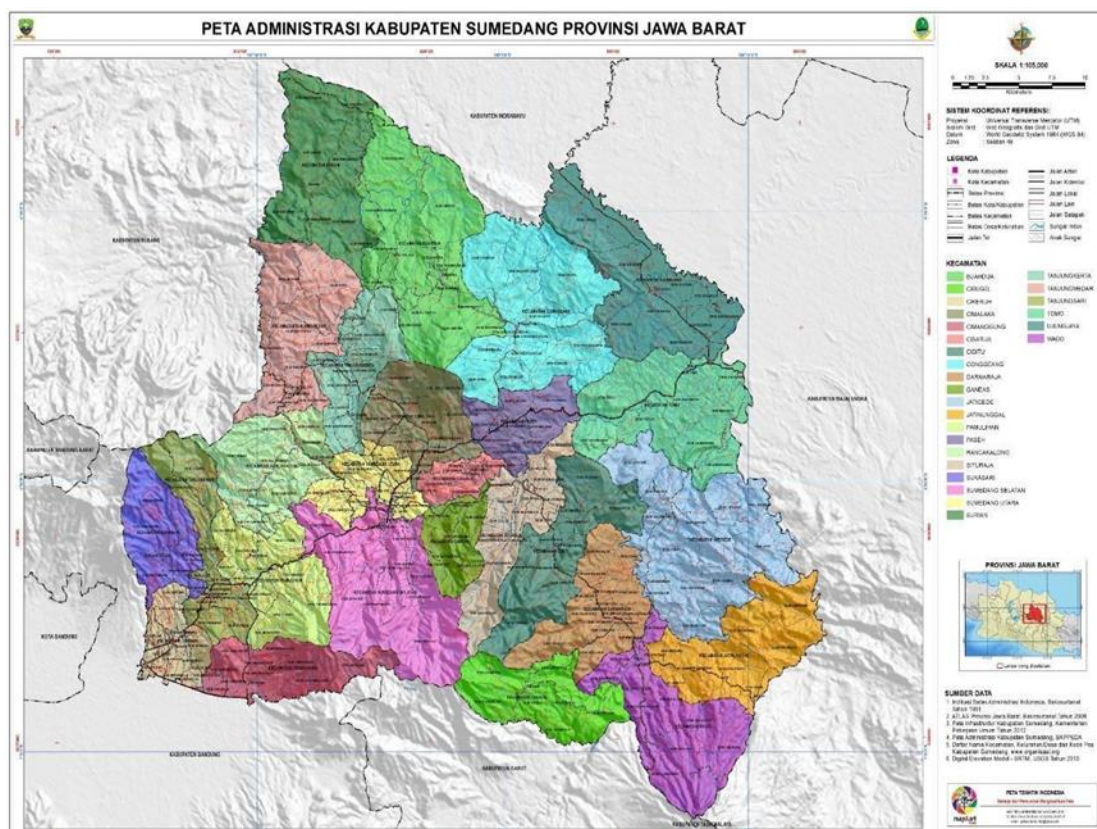
Bab ini berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum kondisi Daerah

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034'46,18"-7000'56,25" Lintang Selatan dan 107001'45,63"-108012'59,04" Bujur Timur (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan
- d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar

11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.452 Ha. Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
1	Wado	7.334	10		4,71%
2	Jatinunggal	6.311	9		4,05%
3	Darmaraja	5.403	12		3,47%
4	Cibugel	4.999	7		3,21%
5	Cisitu	6.398	10		4,10%
6	Situraja	5.666	15		3,64%
7	Conggeang	11.220	12		7,20%
8	Paseh	3.382	10		2,17%
9	Surian	7.645	9		4,90%
10	Buahdua	11.149	14		7,15%
11	Tanjungsari	4.319	12		2,77%
12	Sukasari	3.899	7		2,50%
13	Pamulihan	5.367	11		3,44%
14	Cimanggung	4.298	11		2,76%
15	Jatinangor	2.562	12		1,64%
16	Rancakalong	5.596	10		3,59%
17	Sumedang Selatan	9.659	10	4	6,20%
18	Sumedang Utara	3.132	10	3	2,01%
19	Ganeas	2.525	8		1,62%
20	Tanjungkerta	4.3 93	12		2,82%
21	Tanjungmedar	6.688	9		4,29%
22	Cimalaka	4.755	14		3,05%
23	Cisarua	1.450	7		0,93%
24	Tomo	7.592	9		4,87%
25	Ujungjaya	8.738	9		5,61%
26	Jatigede	11.392	11		7,31%
Jumlah		155.872	270	7	100%

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

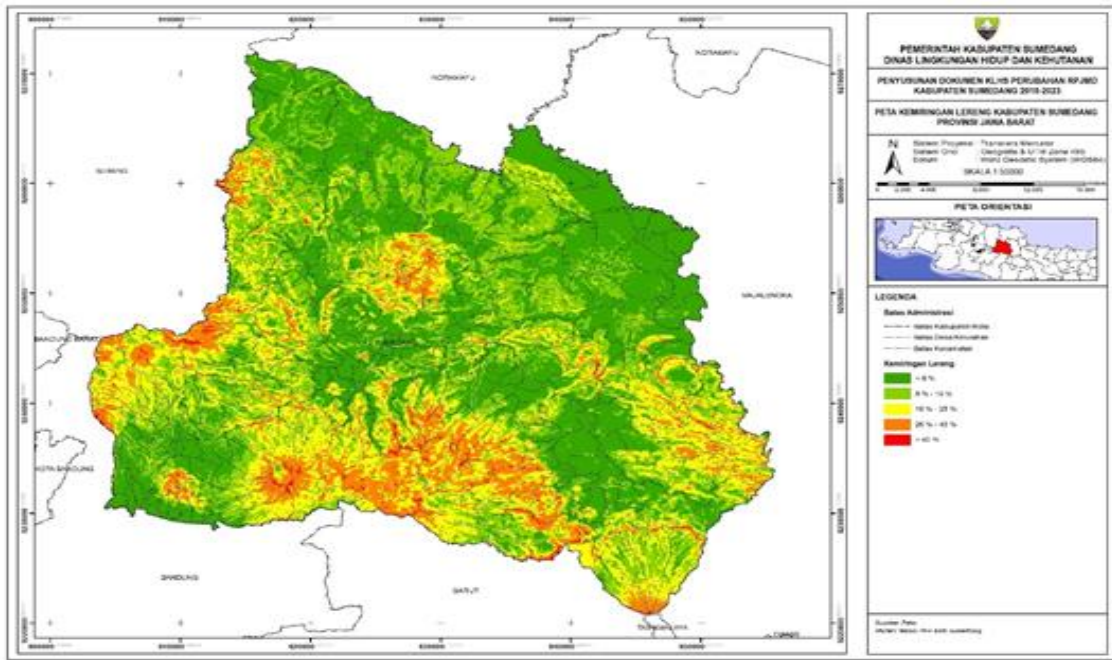
2.1.1.1 Aspek Geografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Dataran paling rendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang

ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta Kawasan per kabupaten-an;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038)

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;
2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);
4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038)

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS, yaitu:

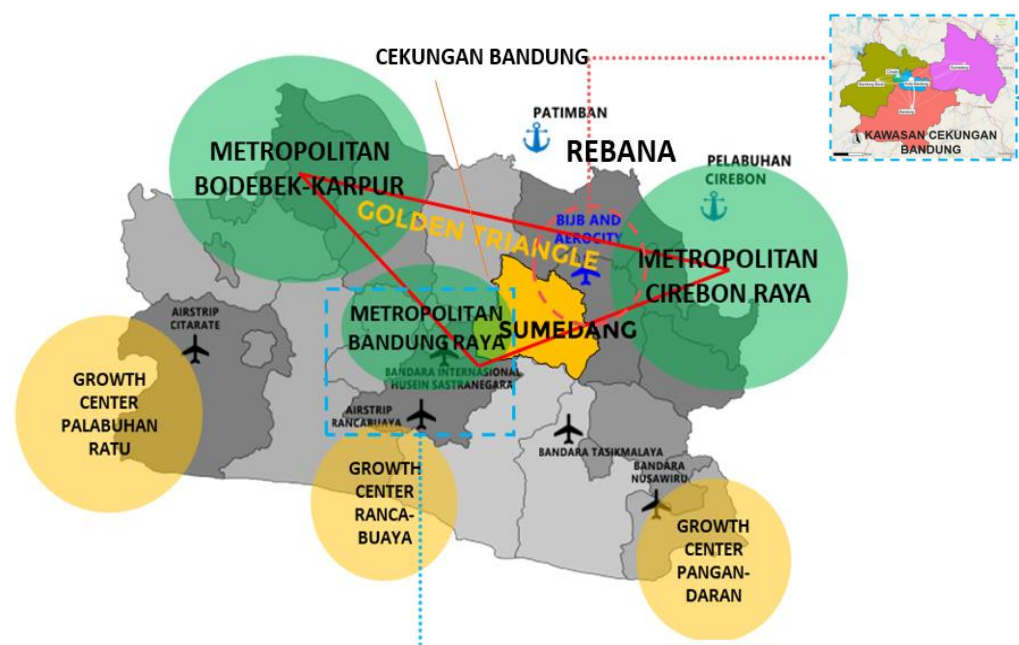
1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

2.1.1.1.1 Posisi Strategis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki kondisi *geo-economy* yang terletak di koridor ekonomi Jawa yaitu diantara 3 (tiga) kota metropolitan meliputi Jakarta Raya, Bandung Raya dan Cirebon Raya, yang merupakan posisi strategis bagi Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang juga berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan juga sebagai penyangga Ibukota Provinsi.

Kabupaten Sumedang juga masuk kedalam kawasan pengembangan baru berbasis perkotaan Inti Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut REBANA yang didalamnya meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang dan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan.



Gambar.2.4 Posisi Strategis Kabupaten Sumedang

Seiring dengan Pembangunan berbagai proyek strategis di Kabupaten Sumedang, maka saat ini Kabupaten Sumedang mempunyai posisi strategis terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Keberadaan Waduk Jatigede telah menjadi potensi sumber daya air dengan peran antara lain:

- 1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon, Indramayu).
- 2. Sumber air baku untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya.
- 3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penumpu ketahanan pangan nasional.

2.1.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Secara umum ada dua pandangan terhadap sumberdaya alam yakni yang pertama adalah pandangan konservatif yang disebut juga sebagai

pandangan pesimis atau perspektif Malthusian dan pandangan eksploitatif atau perspektif Ricardian (Fauzi A, 2010). Perspektif Malthusian memandang bahwa risiko akan terkurasnya sumberdaya alam sehingga sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi pada sumberdaya alam untuk generasi mendatang. Sedangkan perspektif Ricardian memandang bahwa sumberdaya alam :

- a. Dianggap sebagai “mesin pertumbuhan” yang mentransformasikan sumberdaya ke dalam “*manmade capital*” yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dimasa yang akan datang;
- b. Adanya keterbatasan dari sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi;

Jika sumberdaya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya baik harga output maupun biaya ekstraksi per satuan output. Meningkatnya harga output akibat meningkatnya biaya per satuan output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam. Di sisi lain peningkatan harga output menimbulkan insentif kepada produsenb sumberdaya alam untuk meningkatkan suplai. Namun karena ketersediaan sumberdaya yang terbatas , kombinasi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari sumberdaya substitusi dan peningkatan daur ulang. Selain itu kelangkaan juga akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti pencarian deposit baru, peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan teknologi daur ulang sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap pengrusakan sumberdaya alam.

Terkait dengan hal di atas potensi sumberdaya alam dapat diartikan sebagai segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhn hidup manusia yang meliputi sumberday hayati, non hayati, energi, ruang dan waktu.

Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam, diantaranya adalah potensi di sektor pariwisata, kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.

A. Pariwisata

Kabupaten Sumedang saat ini sudah memiliki Perencanaan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 sebagai upaya mendorong pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata sehingga bisa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Sumedang.

Wisata alam sebagai salah satu wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya sebagai Daya Tarik Wisata cukup dominan di Kabupaten Sumedang disamping wisata lain seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata minat khusus. Keberadaan pariwisata wisata alam di Kabupaten Sumedang tersebar di beberapa kecamatan, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel. 2.2
Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wisata Alam
1	Buahdua	2
2	Cibugel	1
3	Cimalaka	3
4	Cimanggung	8
5	Cisarua	-
6	Cisitu	5
7	Conggeang	2
8	Darmaraja	1
9	Ganeas	1
10	Jatigede	3

11	Jatinangor	-
12	Jatinunggal	-
13	Pamulihan	1
14	Paseh	-
15	Rancakalong	-
16	Situraja	4
17	Sukasari	1
18	Sumedang Utara	-
19	Sumedang Selatan	10
20	Surian	-
21	Tanjungkerta	1
22	Tanjungmedar	1
23	Tanjungsari	5
24	Tomo	-
25	Ujungjaya	-
26	Wado	-

Sumber. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2014-2023 menunjukkan trend meningkat terutama pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah pengunjung puncaknya terjadi tahun 2021 dimana terjadi puncak pandemi Covid-19.

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Tahun	Mancanegara	Domestik	Total
2019	4.148	810.790	814.938
2020	7.784	874.038	881.822
2021	-	648.004	648.004
2022	11.410	1.248.543	1.293.963
2023	12.023	1.803.403	1.815.426

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sumedang (2024)

B. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun kewenangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

Potensi kehutanan di Kabupaten Sumedang berupa Taman Hutan Raya (Tahura), yaitu Tahura Gunung Palasari dan Tahura Gunung Kunci yang merupakan salah satu kawasan konservasi di Sumedang dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua gunung tersebut menjadi kawasan taman hutan rakyat pada Tahun 2004 sehingga status kawasan Gunung Kunci dan Gunung Palasari berubah fungsinya dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/Menhut-II/2009, kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya. Adapun luas Gunung Kunci sebesar 3,2 hektar sedangkan Tahura Gunung Palasari luasnya 32,89 hektar. Saat ini Tahura di Kabupaten Sumedang merupakan tempat tumbuh dan pelestarian alam beberapa spesies flora seperti akasia (*Acacia mangium*), Eboni (*Diospyros celebica*), Jati (*Tectona grandis*) dan Pinus (*Pinus merkusii*) serta beberapa spesies fauna seperti Burung Kutilang (*Pycnonotus sp.*), Elang, Ular Bido (*Spilornis cheela*) dan Tekukur.

Selain Kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari, di kabupaten Sumedang, Kawasan hutan yang potensial untuk dikembangkan adalah Kawasan hutan yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan RI. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022 – 2042, terdapat beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Sumedang. Tabel 2.4 merupakan daftar kawasan konservasi beserta luasannya di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.4 Kawasan Konservasi di Kabupaten Sumedang

No.	Kawasan Konservasi	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Cagar Alam Gunung Jagat	1. Kecamatan Jatigede 2. Kecamatan Jatinunggal	133,64 Ha (Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor 3585 Tahun 2014)
2	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	1. Kecamatan Cibugel	12.420,70 Ha
		2. Kecamatan Cimanggung 3. Kecamatan Cisitu 4. Kecamatan Darmaraja 5. Kecamatan Ganeas 6. Kecamatan Pamulihan 7. Kecamatan Situraja 8. Kecamatan Sumedang Selatan	(Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 298 Tahun 1998)
3	Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci	Kecamatan Sumedang Selatan	Gunung Palasari: 31,22 Ha Gunung Kunci: 3,67 Ha (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2011)
4	Taman Wisata Alam Tampomas	1. Kecamatan Buahdua 2. Kecamatan Cimalaka 3. Kecamatan Conggeang 4. Kecamatan Tanjungkerta	1.250 Ha (Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423 Tahun 1979)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029

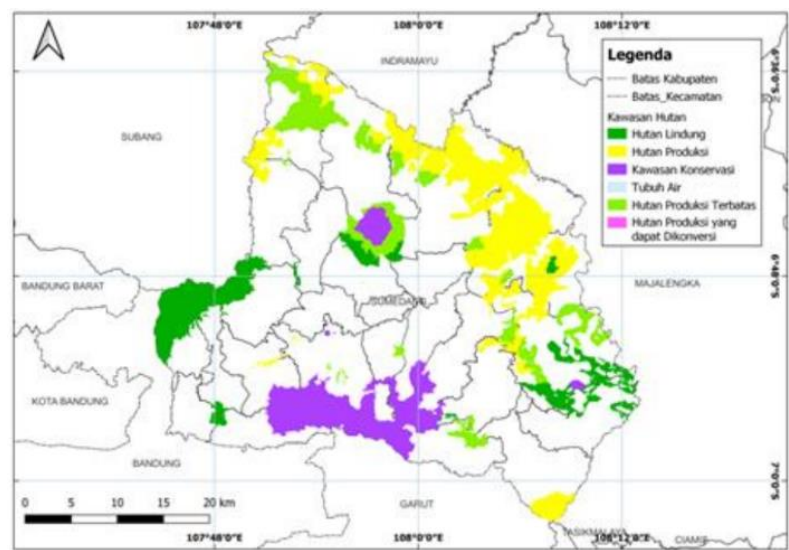
Cagar Alam Gunung Jagat ditetapkan sebagai Cagar Alam seluas 133,64 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3585/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014. CA Gunung Jagat ini berlokasi di Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Jatinunggal. Jenis tumbuhan di CA Gunung Jagat terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok berkayu, kelompok Semak belukar, dan golongan liana dan epiphyt. Beberapa contoh tumbuhan yang terdapat di CA Gunung Jagat adalah Teureup (*Artocarpus elastica*), Kiara (*Ficus septica*), Manglid (*Manglietia glauca*), Burahol (*Stelechocarpus burahol*), Bungur (*Lagerstroemia indica*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Mindi (*Melia azedarach*), Harendong

(*Melastoma malabathricum*). Kelebahe (*Liquidum clociatum*), Owar (*Flagellatia indica*), Areuy Gember (*Vibraurea chololeuca*), Anggrek Merpati (*Phalaenopsis amabilis*), Kadaka (*Drynaria* sp), dan Ketongkeng (*Telosna cordata*). Sementara itu, beberapa satwa liar yang ada di Cagar Alam Gunung Jagat diantaranya Macan Kumbang (*Panthera pardus*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Kancil (*Tragululus javanica*), Jelarang (*Ratufa bicolor*), Kalong (*Pteropus vampyrus*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Trachypitecus auratus*), Trenggiling (*Manis javanica*), dan Elang Ruyuk (*Spilomis cheela bido*).

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) adalah satu-satunya kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Taman Buru di Pulau Jawa, dengan luas 12.420,70 ha, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 298/Kpts-II/998 tanggal 27 Februari 1998 (KSDAE KLHK, 2018). Taman Buru ini berada di bagian selatan Kabupaten Sumedang, mencakup Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Garut, Cibugel, Situraja, Cisitu, dan Kecamatan Darmaraja. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di TBMK adalah Rasamala (*Altingia excelsa*), Huru Dapung (*Actinodaphne glomerata*), Beurying (*Picus fistulosa*), Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Puspa (*Schima wallichii*), Manglid (*Magnolia blumei*), dan Mara (*Macaranga rhizinoides*). Sementara itu, beberapa jenis satwa yang terdapat di TBMK adalah Kijang (*Muntiacus muntjak*), Meong Congkok (*Felis bengalensis*), Owa jawa (*Hylobates moloch*), Burung gosong (*Megapodius reinwaratii*), Saeran (*Dicrurus leucophaeus*), Musang (*Priomodon linsang*), Macan Tutul (*Panthera pardus ssp. Pardus*), dan Macan Kumbang (*Panthera pardus ssp. Melas*).

Adapun Kawasan Hutan Gunung Tampomas ditunjuk sebagai taman wisata alam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 423/Kpts/Um/7/1979, tanggal 5 Juli 1979, dengan luas 1.250 Ha (BKSDA Jabar, 2023). TWA ini berada di tengah agak utara Kabupaten Sumedang, mencakup Kecamatan Buahdua, Cimalaka, dan Kecamatan Conggeang. Beberapa jenis flora di TWA Tampomas adalah Pasang (*Quercus* sp.), Puspa (*Schima wallichii*), Rasamala (*Altingia excelsa*), dan Saninten (*Castanea argentea*). Sementara beberapa jenis satwa yang ditemukan di TWA Tampomas adalah Kancil (*Tragullus javanicus*), Lutung (*Trachypithecus auratus*), Owa jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Bultok (*Megalaema zeylanica*), dan Elang jawa (*Spizaetus bartelsi*). Selain itu, Kabupaten Sumedang juga

memiliki Taman Hutan Raya Gunung Gunung Palasari dan Gunung Kunci seluas 31,22 Ha, serta hutan lindung seluas sekitar 9.204 Ha. Sebaran kawasan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 3.39.



Gambar 2.5 Peta persebaran kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya tahun 2023 (Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

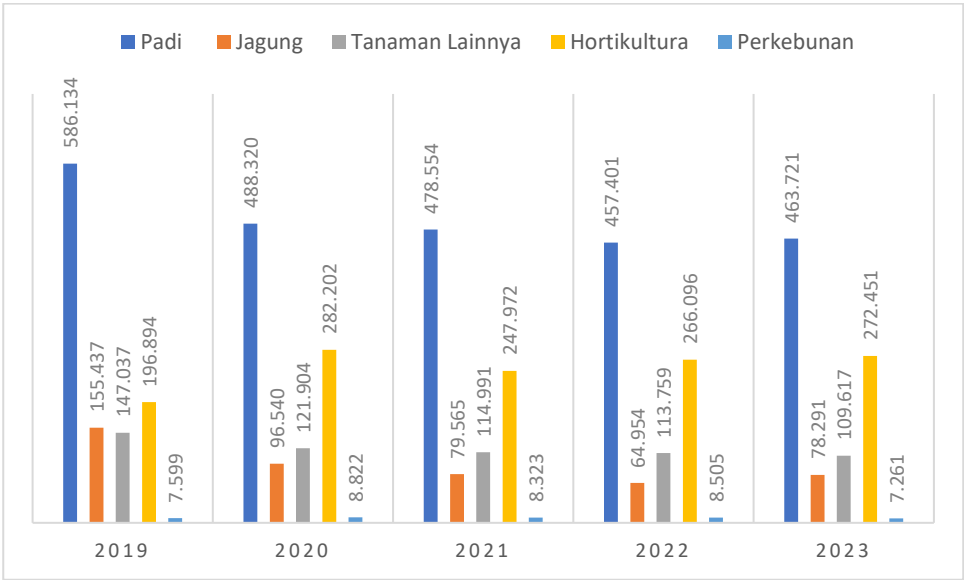
Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari jasa lingkungan yang mendukung keanekaragaman hayati dengan klasifikasi tinggi dan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.40. Secara umum, lokasi dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi di Kabupaten Sumedang berada di sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung. Wilayah- wilayah ini meliputi penutup lahan seperti hutan rimba, perkebunan/kebun, dan semak belukar. Potensi keanekaragaman hayati ini membentuk sebuah kesatuan kawasan, sehingga sangat diperlukan kerja sama dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang dalam pengelolaannya. Contohnya adalah hutan lindung di barat Kabupaten Sumedang yang merupakan satu kesatuan dengan hutan lindung di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang.

C. Pertanian

Pertanian dan peternakan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Secara sub sektor, urusan pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Urusan pertanian di Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang besar karena didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian.

Selain itu juga sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor utama yang berperan terhadap kontribusi perekonomian di Kabupaten Sumedang mengingat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.

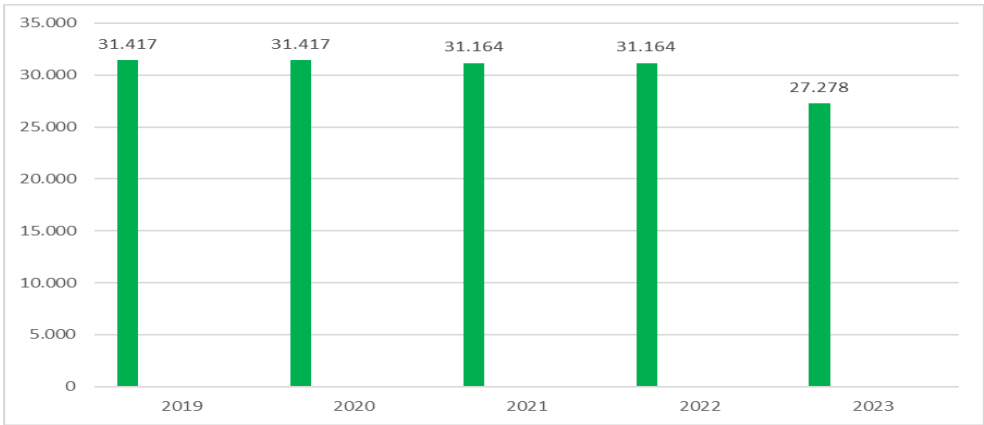
Grafik 2.1
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang

Dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2028 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2028-2038 luas lahan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 30.069 Ha yang didalamnya meliputi lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.2
Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang (Ha)
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (2024)

Pada sektor pertanian, Kabupaten Sumedang telah membuat kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah.

Tabel 2.5
Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
1	Buahdua	2.188,90	91,85	1.283,02	24,53
2	Cibugel	576,32	912,10	346,68	555,33
3	Cimalaka	838,22	107,11	639,03	14,65
4	Cimanggung	390,16	797,13	330,78	644,96
5	Cisarua	461,45	6,95	384,39	6,67
6	Cisitu	984,53	313,39	690,94	179,23
7	Conggeang	1.676,11	150,56	1203,03	93,51
8	Darmaraja	755,39	67,46	246,33	1,10
9	Ganeas	592,17	39,95	356,93	1,41
10	Jatigede	1011,92	306,10	330,66	77,20
11	Jatinangor	346,78	392,91	106,02	123,47
12	Jatinunggal	2325,23	275,17	1174,14	40,23
13	Pamulihan	627,85	1.399,42	536,00	1.041,38
14	Paseh	1.072,34	38,71	836,85	23,74
15	Rancakalong	1.012,58	406,78	890,55	337,49
16	Situraja	1.166,39	129,00	899,47	91,13

No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
17	Sukasari	525,40	837,05	356,04	111,70
18	Sumedang Selatan	1.307,08	298,05	647,20	80,29
19	Sumedang Utara	720,14	99,17	355,77	30,76
20	Surian	805,45	166,47	343,74	109,76
21	Tanjungkerta	1.505,54	93,49	1.224,56	65,42
22	Tanjungmedar	1.315,79	1.100,29	1.070,22	818,41
23	Tanjungsari	578,88	627,08	334,22	363,46
24	Tomo	1.007,35	112,97	480,89	33,88
25	Ujungjaya	2.587,53	77,90	16,26	0
26	Wado	899,34	883,39	538,86	633,41
Total		27.278,85	9,730,43	15.649,61	5.503,13

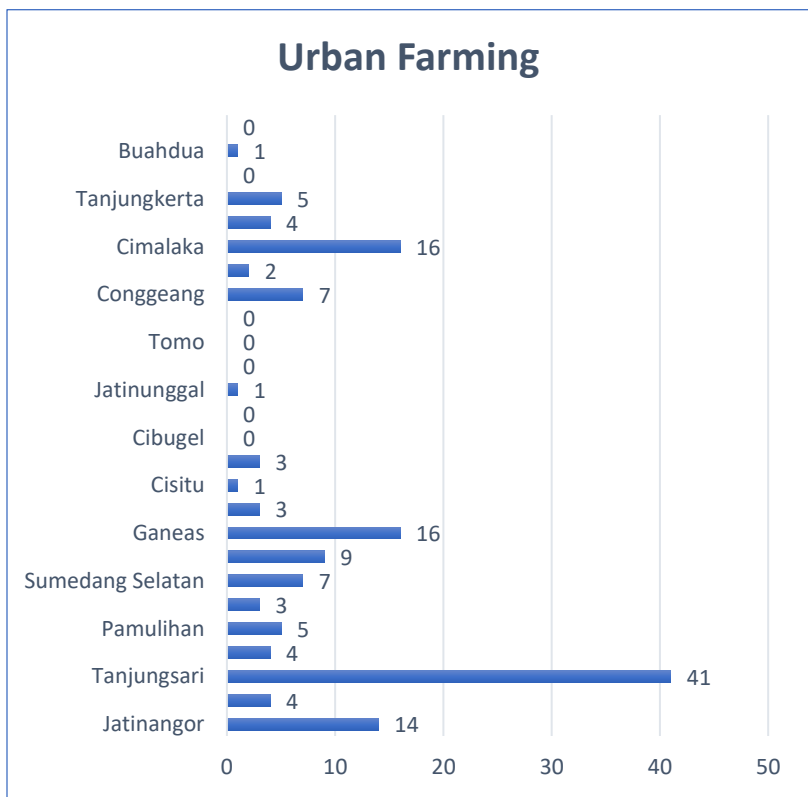
Sumber. Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, 2024

Lahan pertanian di perkotaan semakin sempit seiring dengan pertambahan penduduk perkotaan, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi hasil pertanian cukup tinggi. Wilayah perkotaan memiliki ketergantungan hasil pertanian dari daerah lain, sehingga urban farming menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus membantu pengendalian inflasi, mengembangkan ekonomi lokal, efisiensi biaya transportasi, meningkatkan partisipasi masyarakat/komunitas, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Beberapa aktivitas yang tergolong urban farming antara lain berkebun sayuran di taman kota, atap bangunan, atau dalam ruang tertutup seperti rumah kaca. Kegiatan yang dilakukan pada urban farming selain budidaya tanaman, dapat juga berupa usaha peternakan. Meski hanya dilakukan di beberapa wilayah perkotaan, pelaku usaha urban farming cukup banyak, yaitu sebesar 146 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 146 unit Usaha Pertanian Perorangan (UTP). Kegiatan urban farming tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pelaku

kegiatan urban farming paling banyak berada di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 41 RTUP dan 41unit UTP.

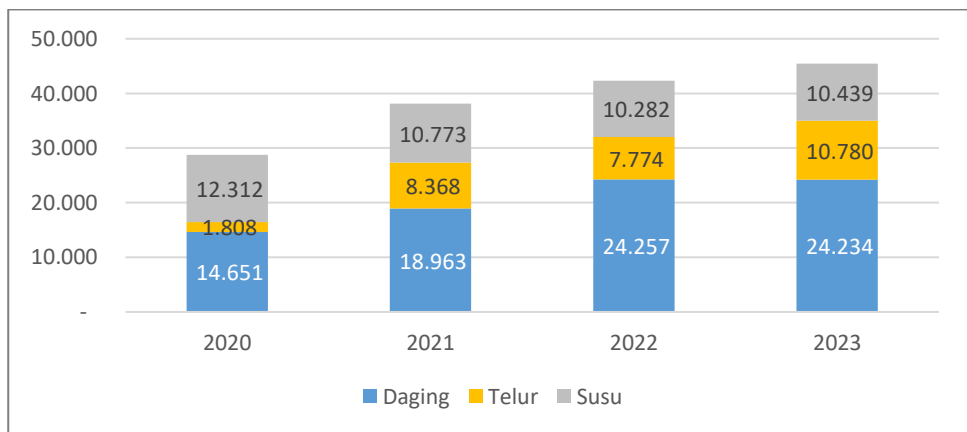
Grafik 2.3
Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2023



Sumber : Sensus Pertanian, BPS (2023)

Selain sub sektor pangan, sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang juga pada periode tahun 2020-2023 secara total menghasilkan komoditas daging, telur dan susu yang terus meningkat.

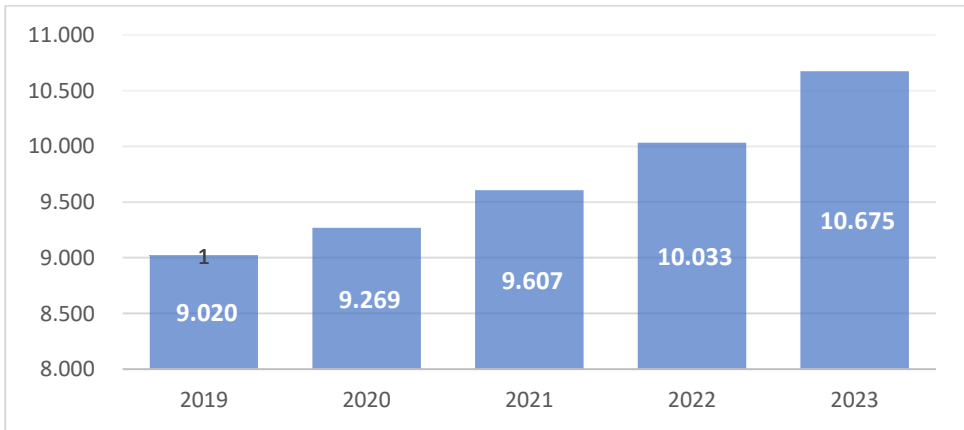
Grafik 2.4
Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang

Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Sumedang juga pada periode tahun 2019-2023 menghasilkan komoditas ikan konsumsi yang terus meningkat.

Grafik 2.5
Produksi Komoditas Ikan Konsumsi (Ton)
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang

E. Geothermal (Panas Bumi)

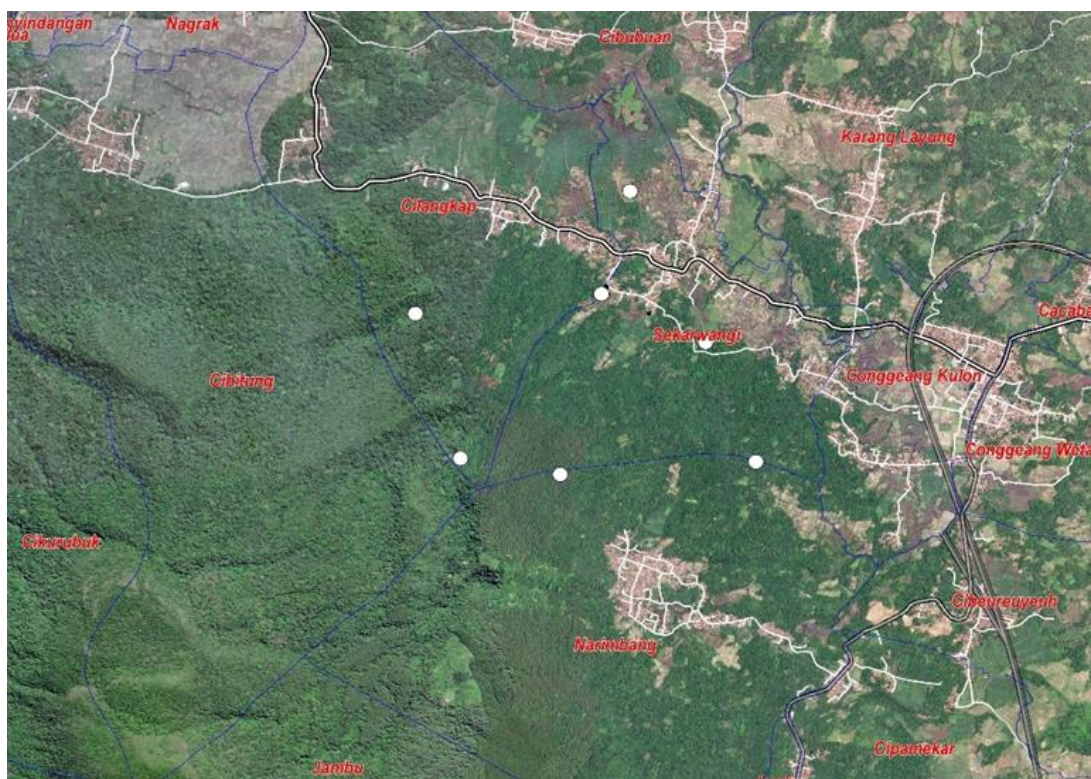
Panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan yang ada di Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Negara yang memiliki kapasitas kebangkitan dari PLTP yang besar adalah sebagai berikut (Bertani, 2012): (1) Amerika Serikat, dengan kapasitas PLTP sebesar 3093 MW, (2) Philipina, dengan kapasitas PLTP sebesar 1904 MW, dan (3) Indonesia, dengan kapasitas PLTP sebesar 1197 MW.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan Bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu system Panas Bumi. Dickson & Fanelli (2004) mendefinisikan panas bumi adalah panas yang terkandung dalam bumi yang terjadi akibat fenomena geologi.

Secara umum pemanfaatan panas bumi terdiri atas dua jenis, yaitu pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Panas bumi telah dimanfaatkan sampai dengan saat ini, baik untuk pemanfaatan langsung maupun pemanfaatan tidak langsung yaitu untuk pembangkit listrik (Fridleifsson, 2001). Pemanfaatan langsung panas bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, antara lain **pertanian, perikanan dan wisata**. Pemanfaatan langsung panas bumi temperatur 20

°c hingga lebih dari 100 °C. Sesuai perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan langsung panas bumi ini dapat juga untuk pembangkit listrik. Air panas yang berasal dari manifestasi panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi panas bumi yang signifikan, terutama di wilayah Gunung Tampomas. Kajian Badan Geologi menunjukkan bahwa Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 megawatt (MW) dengan rencana pengembangan PLTP sebesar 55 MW. Gunung Tampomas telah ditetapkan menjadi salah satu wilayah kerja panas bumi (WKP) di Jawa Barat. Pemerintah telah merencanakan tahap eksekusi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang juga menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.6 Lokasi Geothermal (Panas Bumi) Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang

Sumber : Bappppeda Sumedang 2024 (diolah)

F. Sumberdaya Air

Wilayah Kabupaten Sumedang terbagi habis oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni DAS Cimanuk yang berada bagian di Timur dan DAS Citarum yang berada di bagian barat Kabupaten Sumedang dengan kewenangan pengelolaanya untuk DAS Cimanuk di bawah Balai Besar

Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan DAS Citarum oleh BBWS Citarum.

Saat ini di kedua DAS tersebut sudah terbangun 3 bendungan besar yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan di DAS Cimanuk terdiri dari :

1. Bendungan Jatigede : Untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian seluas+90.000 Ha di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka Pengendalian banjir seluas +14.000 Ha dan sumber pemasok PLTA sebesar 110 MW (Jawa – Bali)
2. Bendungan Cipanas : mempunyai kapasitas 190,52 juta m³ dengan luas genangan 1.315,95 hektar, dibangun untuk meredam banjir hingga 487,75 m³/detik. Bendungan ini juga mengairi 9.273 hektar irigasi, menyuplai 850 liter/detik air baku (250 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu dan 600 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang), serta potensial untuk menghasilkan listrik 3 MW dan fungsi lainnya.

Adapun untuk bendungan di DAS Citarum yakni di sungai Cipunagara telah berdiri Bendungan Sadawarna yang sangat potensial bisa mengairi areal irigasi seluas 4500 ha, air baku 0,12 m³/dt, dan mereduksi banjir 117 m³/dt. Ketiga bendungan tersebut di atas memiliki potensi besar untuk dikembangkan, selain untuk irigasi dan air baku juga untuk pengembangan perikanan, energi Listrik, solar cell (*renewable energy*) dan pariwisata.

2.1.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Kinerja Layanan Ekosistem/ Jasa Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Keduanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah kapasitas sumber daya yang tersedia cukup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya dukung lingkungan atau *carrying capacity* dimaksudkan sebagai total maksimum populasi manusia yang dapat di dukung oleh suatu lingkungan tertentu secara tak terbatas tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (Feachmen, 1973 dalam Johan Iskandar, 2009), sedangkan daya tampung lingkungan adalah merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya tampung lingkungan mengacu pada batas maksimum

beban yang dapat ditoleransi oleh lingkungan tanpa mengalami degradasi atau kerusakan serius. Konsep ini penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk memastikan bahwa pembangunan dan aktivitas manusia tidak melebihi kapasitas lingkungan

Gambaran umum yang dapat digunakan untuk melihat kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan di suatu daerah adalah dengan menghitung Jasa Lingkungan Hidup (JLH). Jasa Lingkungan hidup/Jasa ekosistem adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangible*). Dengan demikian daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah kapasitas JLH dalam mendukung kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ecoregion. Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi antara alam dengan manusia yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hal di atas menegaskan bahwa Ekosistem dengan kualitas yang baik serta telah menyediakan jasa lingkungannya berdasarkan fungsi ekoregionnya maka akan membuat nilai DDDTLH pada suatu ekoregion semakin tinggi (Riqqi, et al., 2019).

Terdapat 4 (empat) jenis JLH, yaitu layanan penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Klasifikasi keempat JLH dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel.2.6. Klasifikasi Jasa Lingkungan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>): jasa/produk yang didapat dari lingkungan		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>energi/fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
5	Sumber daya genetik	Penyediaan sumber daya genetik termasuk flora dan fauna

Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>): manfaat yang didapatkan dari pengaturan lingkungan		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>): manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari lingkungan		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>): jasa lingkungan yang diperlukan manusia		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Habitat dan keanekaragaman hayati

Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment* (2005); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2011)

Di Kabupaten Sumedang, telah dilakukan perhitungan nilai JLH berdasarkan data bentang lahan, vegetasi alami, dan penutup lahan. Perhitungan nilai JLH dilakukan menggunakan bobot dari *expert judgement* atau penilaian ahli untuk masing-masing data tersebut. Hasil perhitungan nilai JLH akan bervariasi dengan nilai maksimal 5, sesuai dengan bobot dari para pakar. Hasil penilaian tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sangat rendah (<1,8), rendah (1,8 – 2,6), sedang (2,6 – 3,4), tinggi (3,4 – 4,2), dan sangat tinggi (4,2 – 5).

Pada Tabel 2.7. dapat dilihat luasan masing-masing JLH pada tiap kelasnya. Angka luasan dengan cetak tebal menunjukkan klasifikasi dengan luasan tertinggi di JLH tersebut. Tidak ada satupun jenis JLH yang memiliki luas dominan di klasifikasi JLH sangat tinggi. Sementara itu, terdapat tujuh jenis JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi rendah. Ketujuh JLH tersebut adalah JLH pembentukan lapisan tanah, JLH pemeliharaan udara, JLH pendukung keanekaragaman hayati, JLH pengaturan iklim, JLH penguraian limbah, JLH penyediaan serat, dan JLH penyediaan sumber daya genetik. Selain itu, terdapat pula enam JLH yang luasnya dominan di klasifikasi sedang, seperti JLH mitigasi bencana, JLH pengaturan tata air dan banjir, JLH pengendalian hama, JLH penyediaan air, JLH penyediaan pangan, dan JLH penyerbukan alami. Hanya terdapat dua JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi tinggi, yaitu JLH pendukung produksi primer dan JLH pendukung siklus hara.

Tabel 2.7. Luas Jasa Lingkungan Hidup pada masing-masing klasifikasi dalam Ha

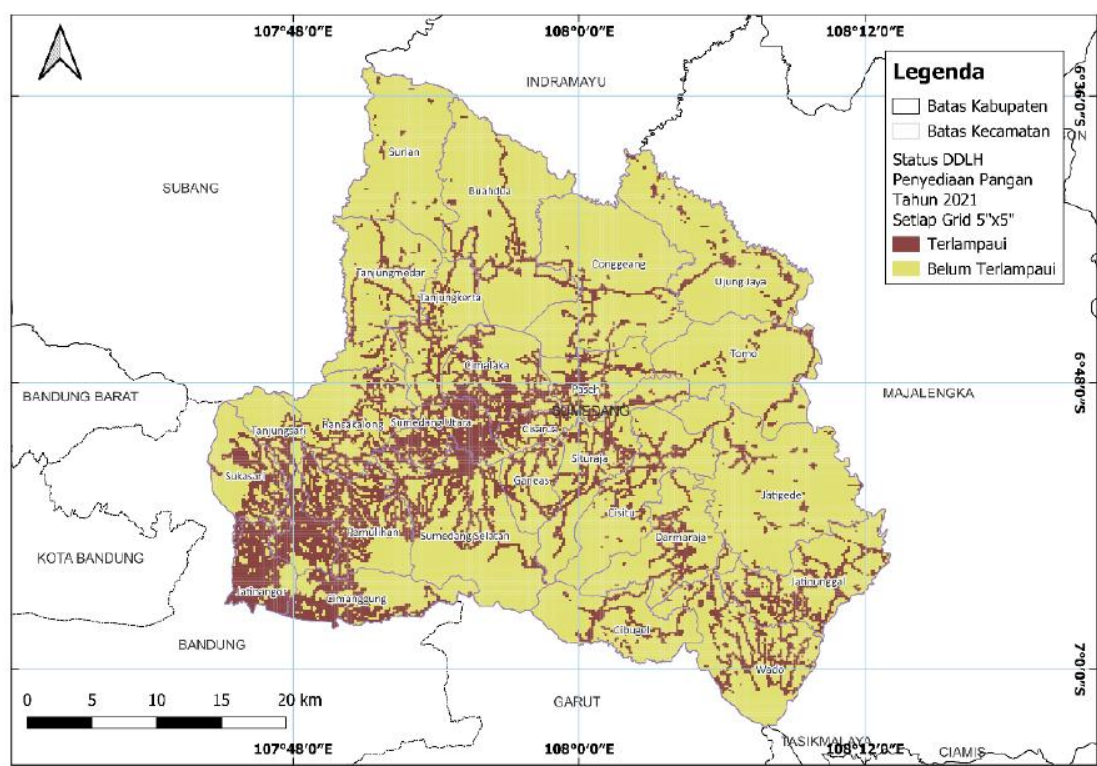
Klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Mitigasi Bencana	0,00	48.859,49	63.426,33	3.531,07	39.750,95
Pembentukan Lapisan Tanah	2.055,61	80.817,50	34.320,18	6.663,46	31.711,09
Pemeliharaan Udata	4.888,91	107.396,91	6.792,59	4.782,60	31.706,83
Pendukung Keanekaragaman Hayati	6.528,46	62.956,88	42.832,14	11.589,83	31.660,52
Pendukung Produksi Primer	2.584,23	12.741,71	44.873,76	70.146,61	25.221,53
Pendukung Siklus Hara	1.340,06	7.793,95	42.749,08	90.014,15	13.670,61
Pengaturan Iklim	4.888,91	83.699,26	30.509,38	4.763,46	31.706,83
Pengaturan Tata Air dan Banjir	0,00	30.766,09	86.361,02	1.951,31	36.489,42
Pengendalian Hama	4.888,91	44.097,45	63.926,30	366,35	42.288,83
Penguraian Limbah	1.378,96	101.219,49	51.095,13	1.874,26	0,00
Penyediaan Air	1.712,64	54.482,16	94.692,76	2.229,74	2.450,53
Penyediaan Pangan	1.844,05	48.947,19	67.219,72	12.238,94	25.317,94

Penyediaan Serat	6.528,46	106.003,17	7.062,37	35.973,84	0,00
Penyediaan Sumber Daya Genetik	3.786,32	61.103,00	54.602,36	6.529,71	29.546,45
Penyerbukan Alami	4.888,91	44.097,45	63.299,46	6.340,83	36.941,18

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, Tahun 2025-2045

b. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Pada **Gambar 2.7**, dapat dilihat hasil analisis status DDLH penyedia pangan Kabupaten Sumedang tahun 2021. Hampir semua wilayah di Kabupaten Sumedang (77,6% wilayah Kabupaten Sumedang) memiliki status daya dukung penyedia pangan yang belum melampaui.



Gambar 2.7 Status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang tahun 2021 dalam sistem grid 5"x5"
(Sumber: Hasil analisis, 2024)

Apabila ditinjau di setiap kecamatan, akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan luasan yang belum melampaui ambang batas penyedia pangan di Kabupaten Sumedang terdapat pada **Tabel 2.8**. Berdasarkan hasil akumulasi tersebut, Kecamatan Surian memiliki luasan yang belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan yang paling luas (97,3% luas wilayahnya), diikuti dengan Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Conggeang dengan masing-masing 94,1% dan 92,4% wilayahnya belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan. Sementara itu, luasan terkecil wilayah yang belum melampaui DDLH pangannya adalah Kecamatan Jatinangor sebesar 21,6% dan

Kecamatan Sumedang Utara sebesar 29%. Hanya kedua kecamatan tersebut yang memiliki luas status DDLH pangan belum melampaui kurang dari 50% dari total luas wilayahnya karena merupakan wilayah padat penduduk, pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Sumedang. Selain itu, 24 dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki status DDLH penyedia pangan yang baik dan belum melampaui ambang batas.

Tabel 2.8 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021

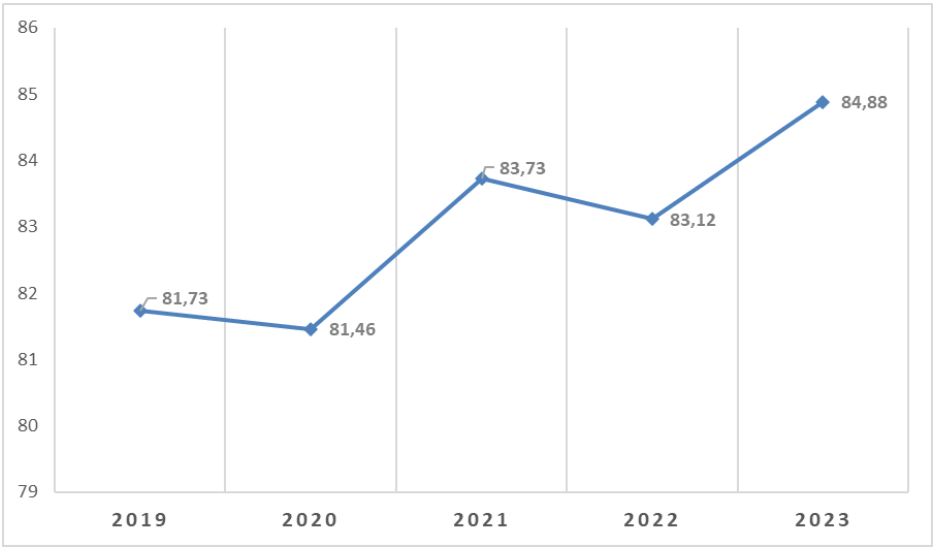
Kecamatan	Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (juta kkal/tahun)	Selisih Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas wilayah yang Belum Melampaui (%)	Status DDLH Pangan
BUAHDUA	75.784	25.325	50.460	96.294	90,9%	Belum Melampaui
CIBUGEL	33.669	18.701	14.967	42.960	84,9%	Belum Melampaui
CIMALAKA	31.125	48.971	-17.846	39.490	58,2%	Belum Melampaui
CIMANGGUNG	28.215	69.195	-40.980	35.868	56,2%	Belum Melampaui
CISARUA	10.138	15.927	-5.789	12.922	53,4%	Belum Melampaui
CISITU	40.598	23.823	16.774	51.839	86,2%	Belum Melampaui
CONGGEANG	68.003	22.279	45.724	86.544	92,4%	Belum Melampaui
DARMARAJA	37.541	28.101	9.440	47.985	82,2%	Belum Melampaui
GANEAS	16.538	19.929	-3.391	21.109	69,6%	Belum Melampaui
JATIGEDE	65.699	17.137	48.562	83.885	94,1%	Belum Melampaui
JATINANGOR	16.891	76.873	-59.981	21.555	21,6%	Melampaui
JATINUNGGAL	42.285	35.395	6.890	53.677	72,0%	Belum Melampaui
PAMULIHAN	35.714	49.194	-13.481	45.438	47,9%	Belum Melampaui
PASEH	22.225	29.406	-7.181	28.254	68,0%	Belum Melampaui
RANCAKALONG	37.038	31.326	5.711	47.101	70,3%	Belum Melampaui
SITURAJA	36.352	32.779	3.573	46.490	73,7%	Belum Melampaui
SUKASARI	27.391	25.682	1.709	34.827	64,4%	Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN	61.015	62.005	-990	78.116	73,3%	Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA	20.604	77.665	-57.061	26.251	29,0%	Melampaui
SURIAN	46.667	8.666	38.001	59.507	97,3%	Belum Melampaui
TANJUNGKERTA	32.533	26.641	5.891	41.337	75,0%	Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR	43.888	20.615	23.274	55.763	85,8%	Belum Melampaui
TANJUNGSARI	28.457	67.897	-39.439	36.131	50,9%	Belum Melampaui
TOMO	50.840	18.232	32.608	64.550	91,8%	Belum Melampaui
UJUNG JAYA	66.793	24.746	42.048	84.864	91,5%	Belum Melampaui
WADO	51.796	33.999	17.797	65.864	76,5%	Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG	1.027.799	910.509	117.290	1.308.621	77,6%	Belum Melampaui

Sumber: Hasil analisis, 2024

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

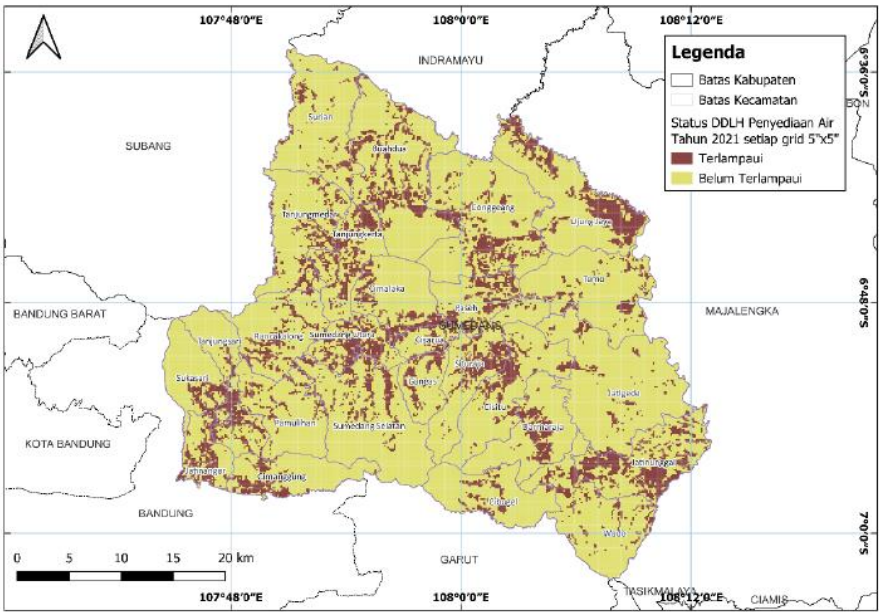
Grafik 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

c. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Berdasarkan hasil analisis status DDLH penyedia air (**Gambar 2.8**) wilayah dengan status telah melampaui ambang batas sangat sporadic dan terdiri dari petak-petak kecil. Wilayah dengan status DDLH penyedia air telah melampaui paling luas terdapat di Kecamatan Jatinunggal, Paseh, dan Ganeas. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang besar. Sebaran dan luasan wilayah yang memiliki status belum dan sudah melampaui ambang batas dapat diketahui dengan pendekatan kuantitatif dan penggunaan sistem grid.



Gambar 2.8 Status DDLH penyedia air terhadap ambang batas tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat dalam sistem grid 30"x30"
(Sumber: hasil analisis, 2024)

Tabel 2.9 memperlihatkan nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas populasi, dan luasan berstatus belum melampaui per

kecamatan secara akumulatif di Kabupaten Sumedang tahun 2021. Secara umum, 92,8% wilayah di Kabupaten Sumedang belum melampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan air. Hal tersebut berarti bahwa sebagian kebutuhan air masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan air di tiap wilayah itu sendiri.

Tabel 2.9 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia air di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021

Kecamatan	Ketersediaan Air (ribu m3/tahun)	Kebutuhan Air (ribu m3/tahun)	Selisih Ketersediaan Air (ribu m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk	Luas Wilayah yang Belum Melampaui (%)	Status DDLH Air
BUAHDUA	1,220,337.3	82,432.3	86,135.1	1,028,803	94.7%	Belum Melampaui
CIBUGEL	262,272.0	31,553.6	43,457.2	526,421	94.5%	Belum Melampaui
CIMALAKA	320,708.5	30,659.3	38,684.4	509,973	93.5%	Belum Melampaui
CIMANGGUNG	500,725.9	24,669.2	38,190.1	530,052	97.4%	Belum Melampaui
CISARUA	78,972.3	14,440.9	8,145.5	114,562	89.6%	Belum Melampaui
CISITU	316,245.8	42,405.7	48,041.8	586,096	89.7%	Belum Melampaui
CONGGEANG	1,556,260.8	72,898.4	78,604.9	937,787	89.9%	Belum Melampaui
DARMARAJA	292,437.0	29,918.3	53,719.8	657,278	93.1%	Belum Melampaui
GANEAS	128,825.0	21,107.4	15,737.0	207,443	85.4%	Belum Melampaui
JATIGEDE	511,779.6	50,043.5	96,327.4	1,136,270	96.9%	Belum Melampaui
JATINANGOR	302,946.1	21,641.7	15,990.6	282,986	96.9%	Belum Melampaui
JATINUNGGAL	329,390.3	68,776.5	25,430.3	339,252	78.6%	Belum Melampaui
PAMULIHAN	306,558.3	35,920.3	43,646.5	567,636	97.8%	Belum Melampaui
PASEH	173,129.6	34,243.4	15,272.3	214,148	78.7%	Belum Melampaui
RANCAKALONG	312,792.6	39,195.1	43,321.4	541,118	92.8%	Belum Melampaui
SITURAJA	283,169.9	44,580.9	36,406.7	462,973	87.6%	Belum Melampaui
SUKASARI	491,248.9	25,628.7	35,394.8	442,093	95.8%	Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN	485,083.2	50,043.4	85,892.5	1,072,808	96.2%	Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA	160,530.1	31,781.4	14,122.1	262,371	89.3%	Belum Melampaui
SURIAN	616,314.5	45,485.9	58,483.4	687,551	94.6%	Belum Melampaui
TANJUNGPURBA	425,262.5	48,147.4	24,332.2	315,449	87.0%	Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR	579,617.8	54,412.2	43,366.6	527,824	89.1%	Belum Melampaui
TANJUNGSARI	346,456.3	29,080.1	34,319.8	483,569	94.8%	Belum Melampaui
TOMO	396,029.8	40,448.6	72,817.4	865,819	99.7%	Belum Melampaui
UJUNG JAYA	666,919.5	80,380.7	68,427.6	823,261	99.6%	Belum Melampaui
WADO	402,846.3	46,660.6	68,555.0	836,398	97.1%	Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG	11,466,859.9	1,096,555.5	1,192,822.4	14,959,941	92.8%	Belum Melampaui

Sumber: Hasil analisis, 2023

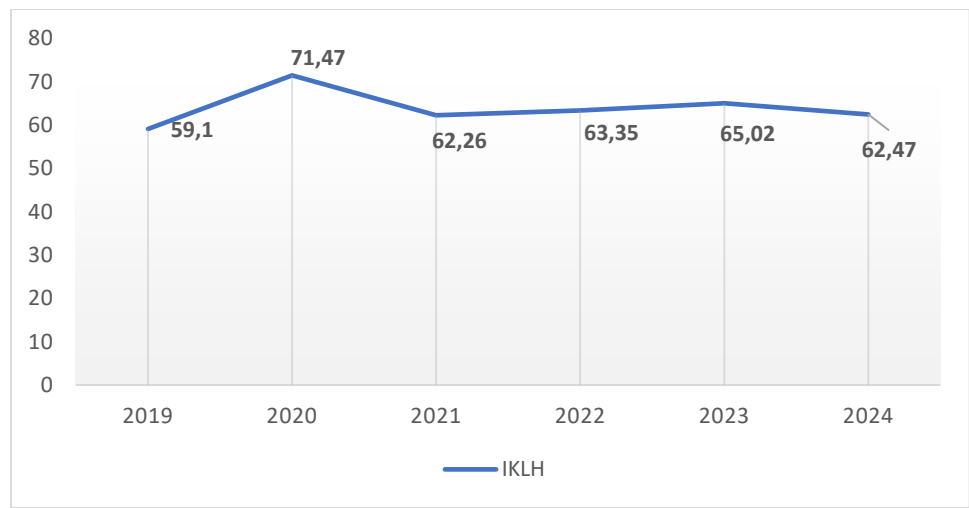
2.1.1.1.4 Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Pemanasan global dan perubahan iklim sampai sekarang masih menjadi permasalahan utama yang harus diperhatikan karena dapat memberikan dampak pada berbagai sektor. Pada sektor pertanian perubahan iklim akan mempengaruhi pola tanam, menurunkan hasil tanaman, merubah intensitas tanam, tingkat serangan hama penyakit dan lain-lain; dan lain sebagainya (DLH, 2019).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan hutan, belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah, peningkatan bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan dengan runtuhannya yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa, penataan tata ruang wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana akan menyebabkan tingkat kerentanan semakin tinggi. Kerentanan (*vulnerability*) adalah kondisi yang ditentukan berdasarkan faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang meningkatkan kerawanan (*susceptibility*) suatu komunitas untuk terkena dampak bahaya (DLH, 2019). Semakin tinggi

tingkat kerentanan maka akan berisiko pada semakin tingginya potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Grafik 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2025)

Pengurangan risiko dan dampak, baik untuk perubahan iklim atau bencana pada umumnya, dapat dilakukan dengan melakukan kajian terkait potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan/atau kapasitas adaptasi suatu wilayah. Seperti yang dilakukan oleh BNPB di mana membahas terkait Kajian kerentanan yang dapat diperoleh pada portal InaRISK dengan keterangan bahwa tahun dasar yang digunakan pada kajian tersebut adalah tahun 2023, serta divisualisasikan per Kecamatan.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana

banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

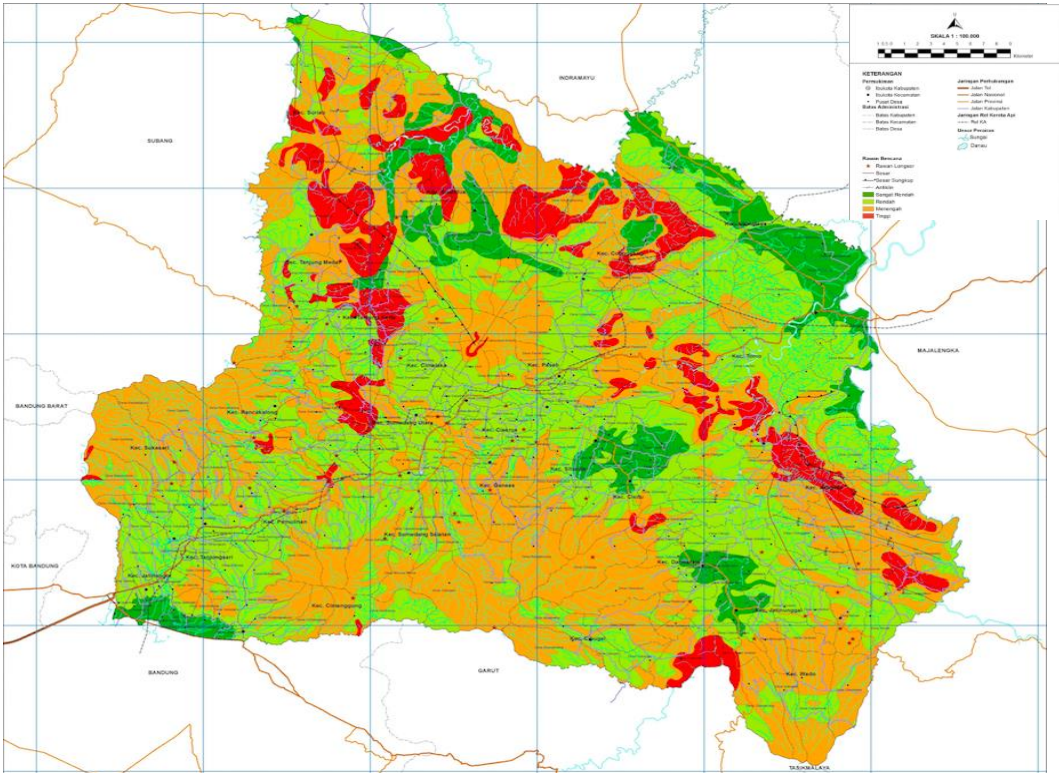
Tabel 2.10 Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Kabupaten, terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal	Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	Terjadi akibat dari drainase yang kurang memadai, tutupan lahan, dan peningkatan debit air di beberapa titik lintasan sungai.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja;	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini:



Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038)

Berdasarkan data yang bersumber dari InaRISK BNPB Tahun 2023, Wilayah yang Rentan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

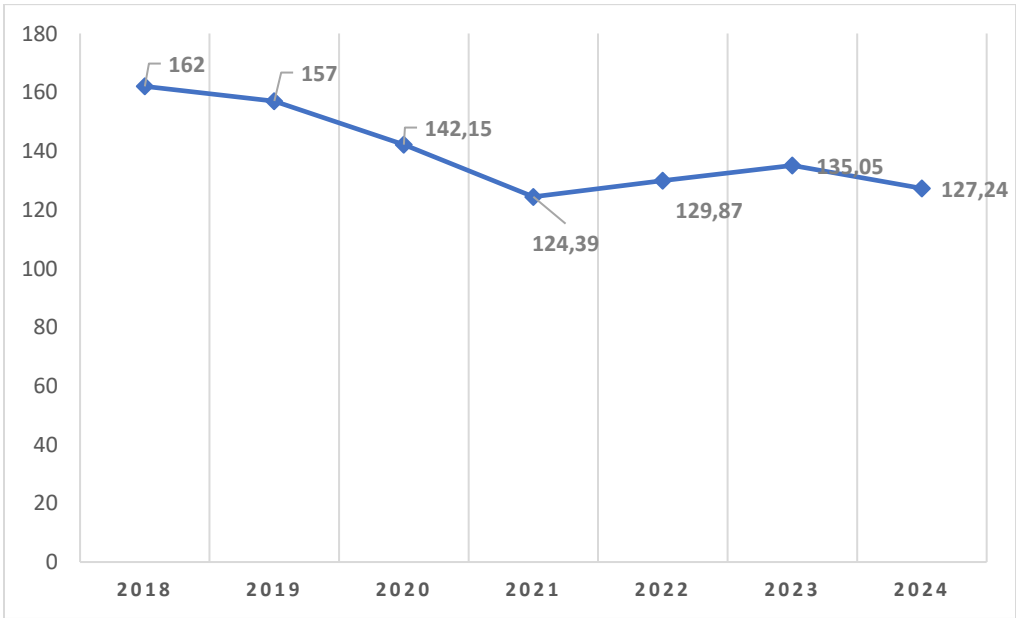
Tabel 2.11 Wilayah yang Rentan Per Kecamatan pada Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrem
Buahdua					
Cibugel					
Cimalaka					
Cimanggung					
Cisarua					
Cisitu					
Conggeang					
Darmaraja					
Ganeas					
Jatigede					
Jatinangor					
Jatinunggal					
Pamulihan					
Paseh					
Rancakalong					
Situraja					
Sukasari					
Sumedang					
Selatan					
Sumedang Utara					
Surian					
Tanjungkerta					
Tanjungmedar					
Tanjungsari					
Tomo					
Wado					
Ujung Jaya					

Sumber : InaRISK BNPB, 2023

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2023 menunjukkan tren meningkat namun kembali menurun pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.8
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024



Sumber : BPBD Kabupaten Sumedang (2025)

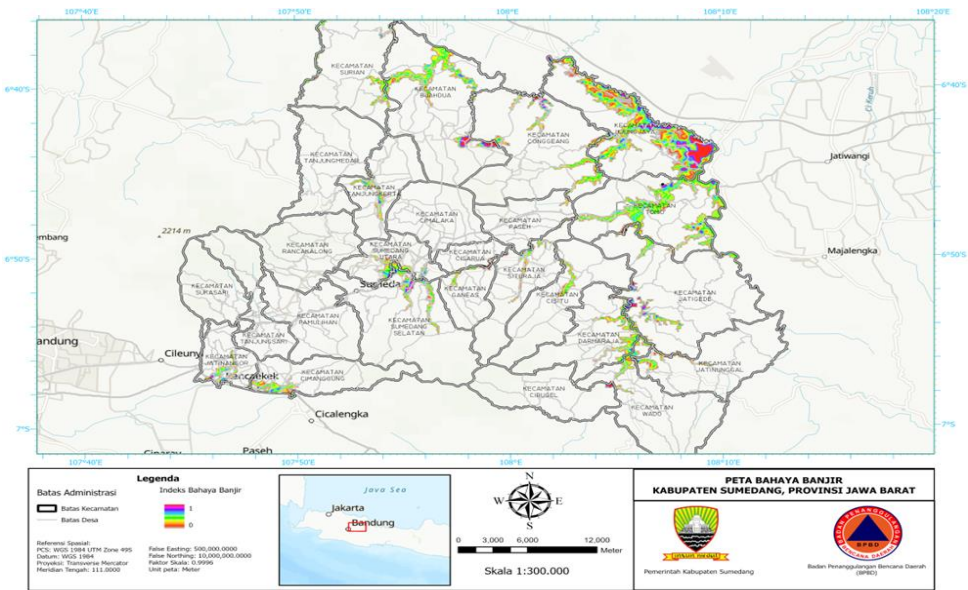
Beberapa potensi kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) komponen yaitu komponen sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Dari analisis keempat komponen

tersebut dapat digambarkan kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Kerentanan Bencana Banjir

Kerentanan banjir cenderung tinggi di wilayah pinggiran sungai utama, terutama Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Ujungjaya. Di wilayah bagian utara Kabupaten Sumedang berpotensi mengalami bencana banjir lebih tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan pesisir sungai.

Gambar 2.10
Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang

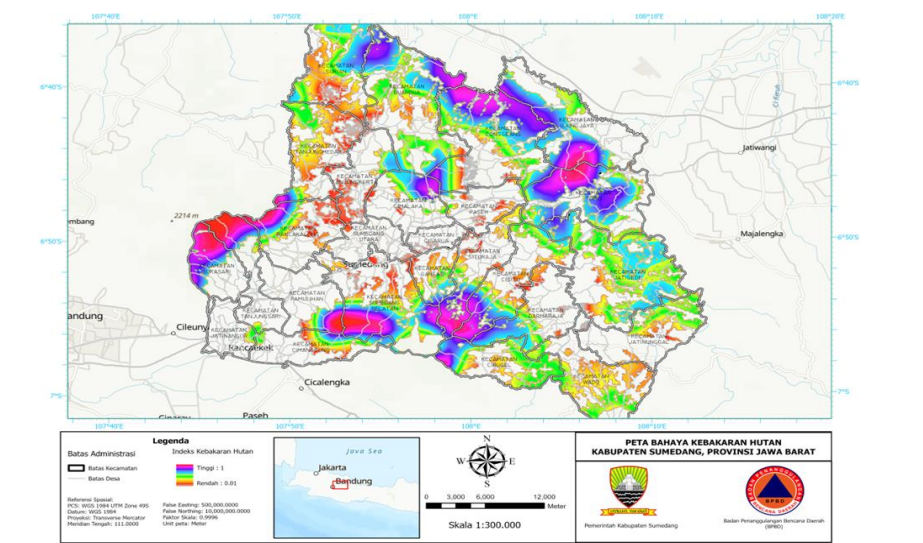


Sumber. KLHS RPJMD, 2024 (InaRISK BNPB, 2023)

2. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Sumedang terdapat 4 (empat) area yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan yang tinggi yang tersebar secara merata di seluruh area Kabupaten Sumedang. Tingkat kerentanan bencana dibedakan berdasarkan klasifikasi warna, dan wilayah dengan tingkat kerentanan kebakaran hutan dan kekeringan tinggi ditunjukkan dengan warna merah keunguan sesuai dengan gambar berikut.

Gambar 2.11
Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten Sumedang

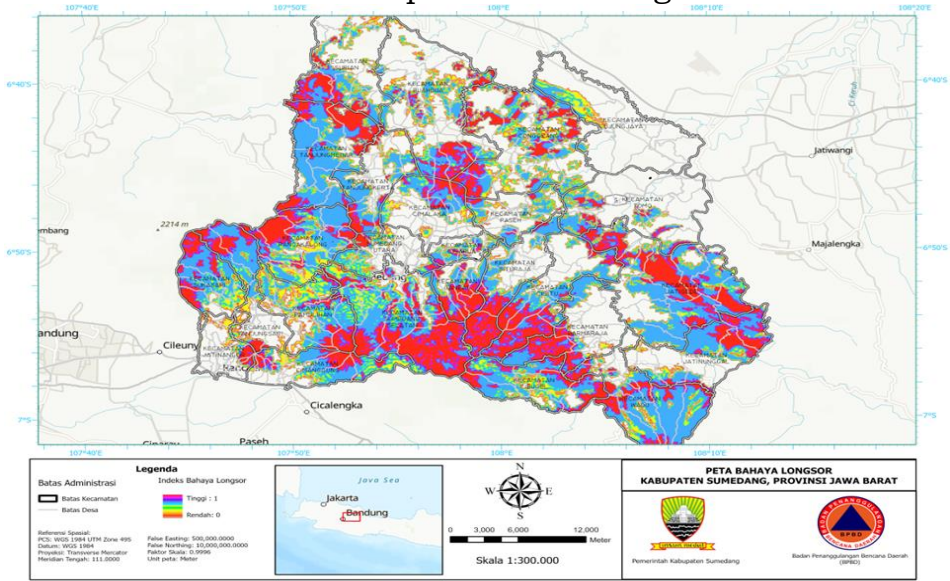


Sumber. Laporan KLHS RPJMD, 2024 (InaRISK BNPB, 2023)

3. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Secara keseluruhan Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor dari klasifikasi sedang sampai tinggi. Area yang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor tinggi paling luas terdapat di bagian selatan wilayah Sumedang, sebagaimana terlihat dari gambar berikut.

Gambar 2.12
Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor
di Kabupaten Sumedang



Sumber. Laporan KLHS RPJMD, 2024

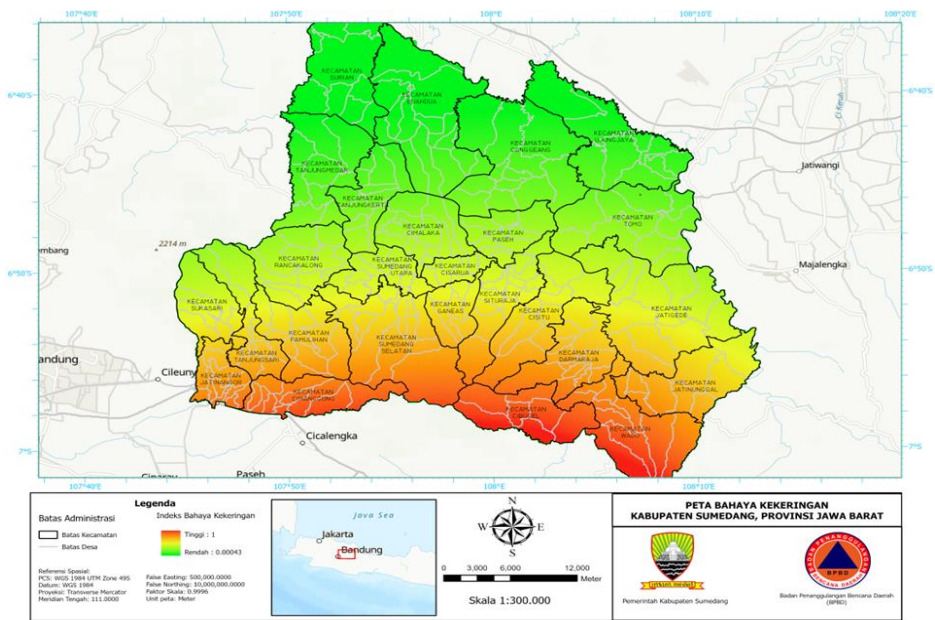
4. Kerentanan Bencana Kekeringan

Berdasarkan data BNPB visualisasi untuk menggambarkan tingkat kekeringan di Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) warna

yaitu hijau untuk kerentanan kekeringan rendah, kuning untuk kerentanan kekeringan sedang, oranye untuk kerentanan kekeringan sedang menuju tinggi dan warna merah untuk menggambarkan tingkat kerentanan kekeringan tinggi.

Wilayah Kabupaten Sumedang dengan tingkat bencana kekeringan sedang hingga tinggi berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Sumedang, seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini.

Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumedang

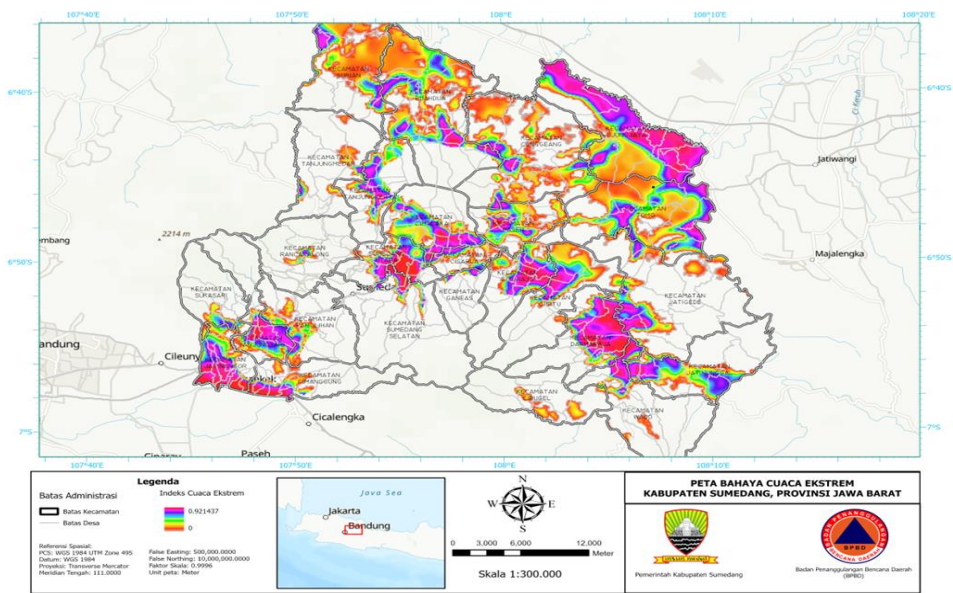


Sumber. Laporan KLHS RPJMD, 2024

5. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem

Tingkat klasifikasi kerentanan cuaca ekstrem memiliki 7 (tujuh) tingkatan, dan Kabupaten Sumedang memiliki kerentanan terhadap bencana cuaca ekstrem dengan skala relatif tinggi hampir di seluruh wilayahnya seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem
di Kabupaten Sumedang



Sumber. Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang, 2023

6. Kerentanan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Sumedang saat ini menjadi daerah yang rawan terhadap bencana Gempa Bumi. Kejadian gempa Bumi yang menimbulkan kerusakan terjadi pada awal tahun baru 2024 dengan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Seiring ditemukannya sesar baru di wilayah kabupaten Sumedang menyebabkan Kabupaten Sumedang cukup rentan terhadap Bencana Gempa Bumi.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2024 semester II yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.226.660 jiwa yang terdiri atas 619.513 jiwa penduduk laki-laki dan 607.147 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian angka sex ratio Kabupaten Sumedang adalah 102,04.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

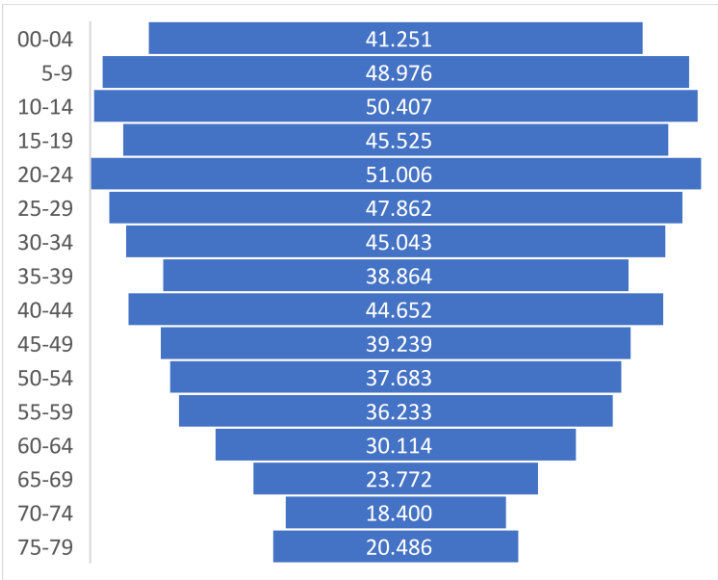
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
1	Wado	46.842	84,27	556	840
2	Jatinunggal	47.423	72,12	658	(45)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
3	Darmaraja	38.360	49,38	777	472
4	Cibugel	26.383	59,52	443	583
5	Cisitu	31.329	65,03	482	(114)
6	Situraja	43.389	43,23	1.004	(202)
7	Conggeang	29.600	106,98	277	(241)
8	Paseh	39.611	31,62	1.253	248
9	Surian	12.411	70,88	175	187
10	Buahdua	34.188	107,68	317	167
11	Tanjungsari	91.015	44,86	2.029	2.494
12	Sukasari	36.149	41,82	864	937
13	Pamulihan	67.968	50,70	1.341	2.286
14	Cimanggung	96.120	55,55	1.730	3.258
15	Jatinangor	96.329	31,60	3.048	2.693
16	Rancakalong	43.477	55,07	789	972
17	Sumedang Selatan	83.998	92,51	908	1.042
18	Sumedang Utara	104.874	30,40	3.450	2.695
19	Ganeas	26.728	22,90	1.167	475
20	Tanjungkerta	36.003	43,72	823	239
21	Tanjungmedar	28.064	60,67	463	678
22	Cimalaka	65.505	43,29	1.513	1.203
23	Cisarua	21.710	17,71	1.226	350
24	Tomo	23.903	84,74	282	(49)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
25	Ujungjaya	32.211	86,23	374	(155)
26	Jatigede	23.070	106,24	217	(38)
Total Kabupaten		1.226.660	1.558,72	787	20.975

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2.15 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025))

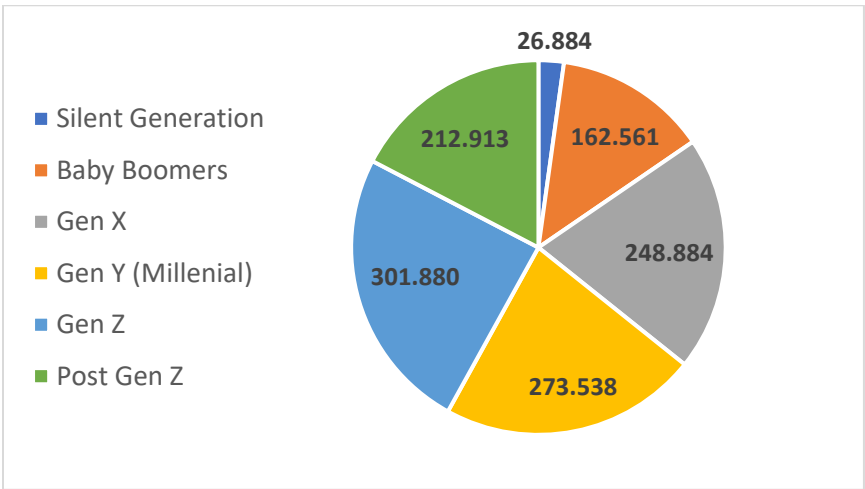
Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 22.21 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 67,37 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 10,41 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan

menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2023 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48,42%. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2023 sebesar 55 persen.

Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Grafik 2.9 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024

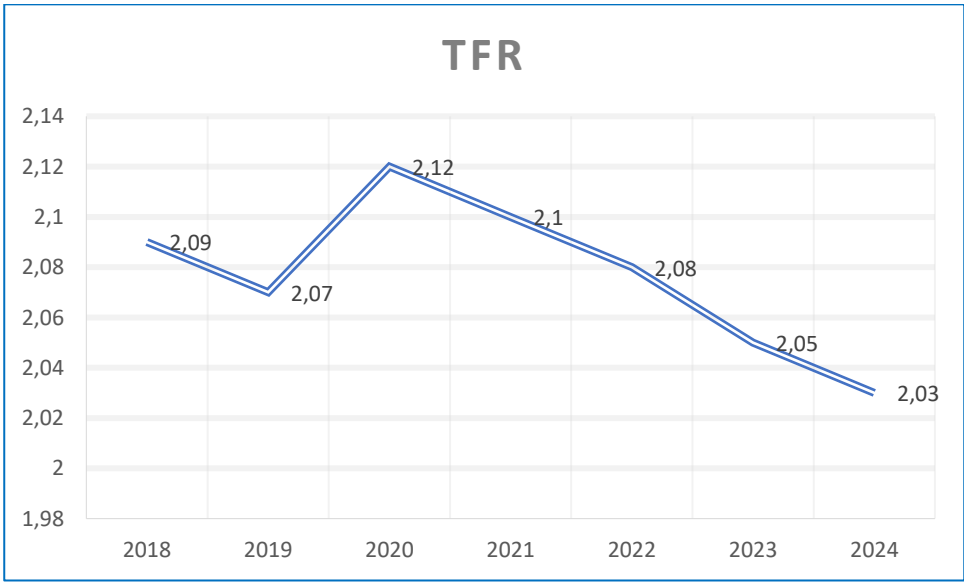


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 2.9 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau tahun kelahiran 1998-2013 sebanyak 301.880 orang atau 24,61% dari jumlah total penduduk dengan kisaran usia 12 sampai dengan 27 tahun. Maka dari itu Pemerintah Daerah menyediakan banyak program untuk generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan sehingga diharapkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan. Program yang disediakan di antaranya adalah program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang mempunyai aktivitas menyediakan pelatihan kerja secara gratis bagi angkatan kerja.

Upaya pengendalian penduduk di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari angka *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 tahun). Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah angka ini menunjukkan makin terkendalnya jumlah kelahiran penduduk. TFR di bawah 2,1 dapat mengindikasikan bahwa populasi suatu wilayah cenderung menurun dalam jangka panjang (tanpa migrasi masuk), sementara TFR di atas 2,1 menunjukkan potensi pertumbuhan populasi.

Grafik 2.10
TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sumedang

Berdasarkan grafik diatas, kelahiran total di Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah TFR Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah 2,05. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah 2,04 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target nasional sudah mencapai 99,51%. Sementara untuk tahun 2024 TFR Kabupaten Sumedang adalah 2,03. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi di daerah bukan hanya tentang angka statistik. Ia menyangkut kualitas hidup masyarakat—akses terhadap pekerjaan layak, pendapatan yang cukup, layanan publik yang adil, dan peluang untuk berkembang. Sayangnya, **ketimpangan antara pusat dan daerah** masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

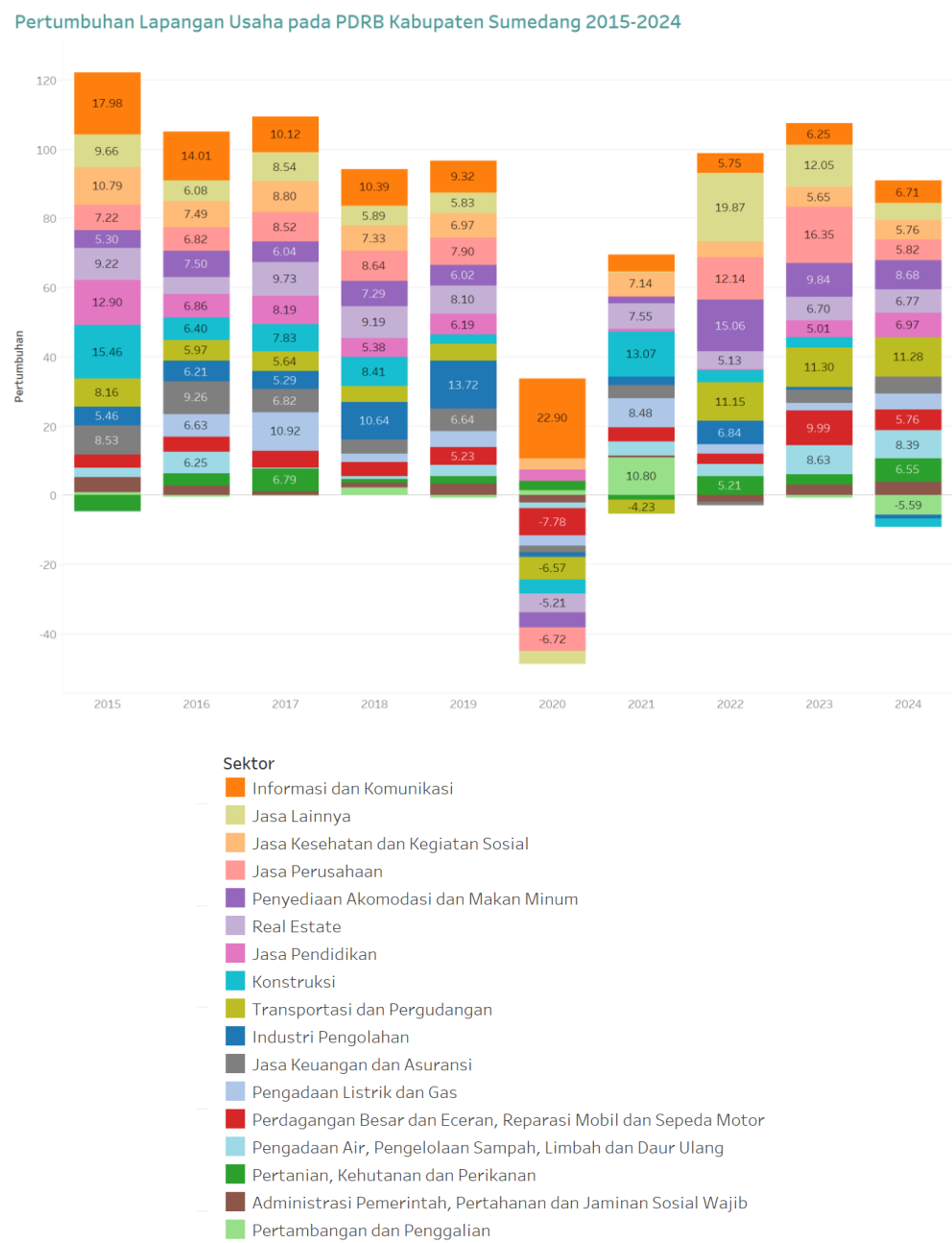
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur sejauh mana kemajuan sebuah negara atau wilayah dalam meningkatkan kapasitas produksinya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukan hanya dipandang dari segi angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan juga menciptakan landasan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidaklah seragam di seluruh sektor ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana sektor-sektor ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini membawa kita pada pembahasan mengenai pertumbuhan sektoral, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, industri, dan jasa, yang memiliki peran berbeda dalam mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024, yang mengilustrasikan bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah selama periode tersebut. Secara umum, sektor-sektor utama dalam perekonomian Sumedang menunjukkan variasi dalam tingkat pertumbuhannya.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sektor Informasi dan Komunikasi (warna oranye) mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 22,90%, mencerminkan adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan digitalisasi dan teknologi. Meskipun pada tahun tersebut sektor lainnya seperti Pertanian dan Industri Pengolahan (warna hijau dan merah) mengalami penurunan yang tajam akibat gangguan pandemi, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang paling resilient, mencatatkan pertumbuhan 22,90% pada 2020.

Grafik 2.11 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024



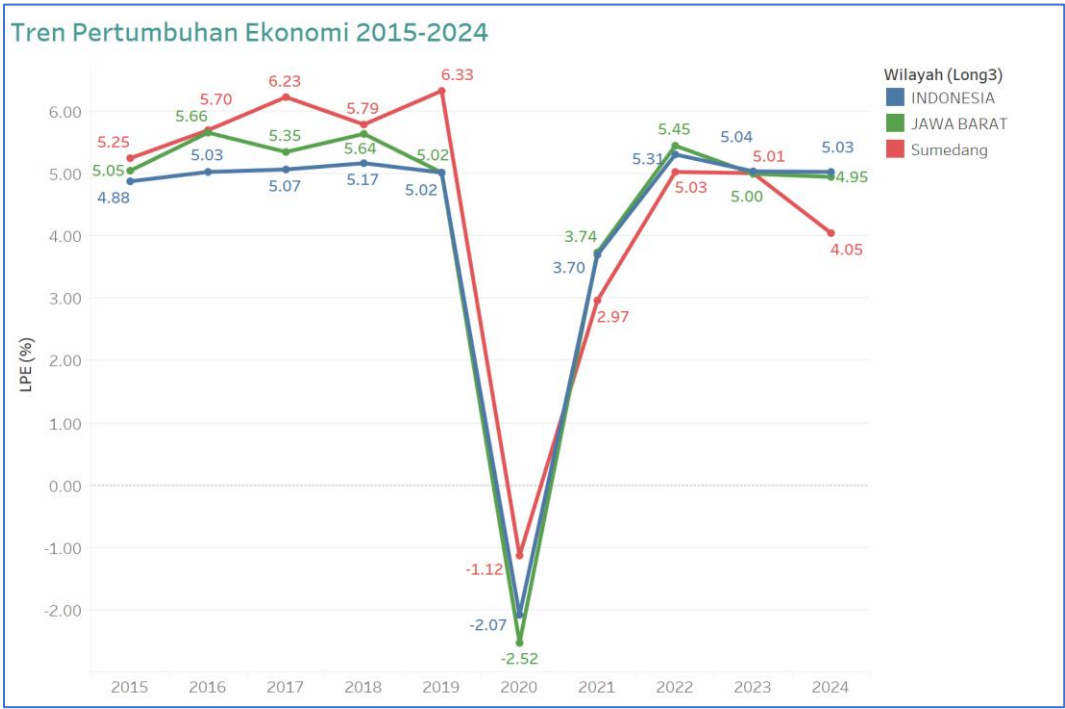
Sektor Jasa Lainnya, yang mencakup berbagai kegiatan non-produktif dan jasa, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, juga mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2020, dengan kontribusi besar dalam mengisi gap yang ditinggalkan oleh sektor lainnya yang terpuruk akibat pandemi. Jasa Pendidikan (warna hijau muda) juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik, meskipun sempat menurun tajam pada 2020 akibat penutupan sementara fasilitas pendidikan selama pandemi.

Setelah tahun 2020, grafik menunjukkan pemulihan yang relatif kuat pada beberapa sektor, seperti Pertanian (warna hijau), yang mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan keberlanjutan sektor ini sebagai pilar ekonomi Sumedang. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan pemulihan pasca-pandemi, meskipun lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, dengan kontribusi yang tetap signifikan.

Pertumbuhan lapangan usaha di Sumedang menunjukkan cepatnya pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa, seperti Informasi dan Komunikasi, dibandingkan sektor yang lebih tradisional seperti Pertanian dan Industri Pengolahan. Sektor-sektor yang lebih terdiversifikasi dan berbasis teknologi menunjukkan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi global, sementara sektor-sektor tradisional lebih rentan terhadap guncangan eksternal seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami dinamika dalam 10 tahun terakhir. Pada awal periode, sekitar tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencatatkan angka sekitar 5,25% hingga 6,33%. Namun, saat memasuki tahun 2020, dampak besar dari pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam grafik.

Grafik 2.12 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2024

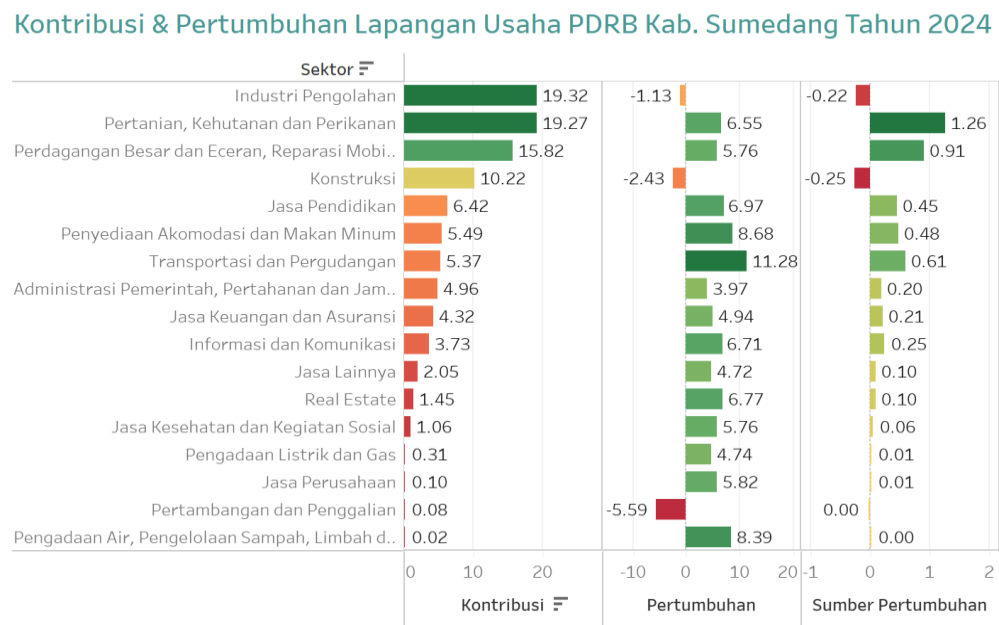


Sumber: BPS, (diolah 2025)

Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan ekonomi Sumedang mengalami penurunan tajam menjadi -1,12% pada tahun tersebut, mencerminkan krisis ekonomi global yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi. Penurunan ini sangat mencolok, meskipun tidak seburuk beberapa wilayah lain di regional Jawa Barat dan nasional, namun tetap menjadi tantangan berat bagi ekonomi daerah. Setelah mengalami penurunan yang dalam pada 2020, ekonomi Kabupaten Sumedang mulai menunjukkan pemulihan namun menjadi tertinggal dibandingkan Jawa Barat secara umum dan nasional. Bahkan, di tahun 2024 LPE Sumedang semakin tertinggal karena mengalami perlambatan menjadi 4,05%.

Meskipun Sumedang mengalami tantangan dalam mengejar ketertinggalannya, sektor-sektor seperti pertanian dan perdagangan masih menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah ini, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.

Grafik 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2024

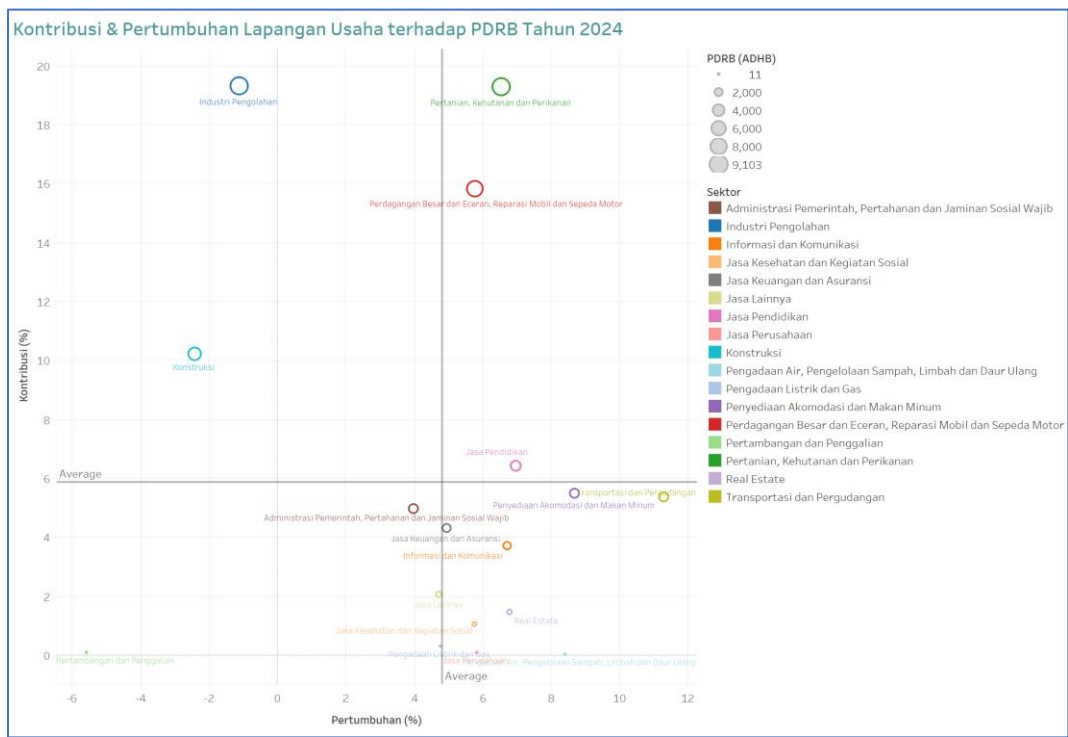


Sumber; BPS, diolah 2025

Grafik di atas menunjukkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, beserta dampak pertumbuhannya, yang memberikan gambaran tentang dinamika sektor-sektor utama dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumedang tercatat sebesar 4,05%, dengan sektor-sektor tertentu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan, sementara beberapa sektor mengalami kontraksi yang mengurangi laju pertumbuhan secara keseluruhan.

Secara khusus, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi besar terhadap LPE, dengan 1,26% dari total pertumbuhan yang disumbangkan oleh sektor ini. Sektor pertanian yang dominan ini menunjukkan pentingnya sektor primer dalam perekonomian Sumedang, meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor industri. Kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.

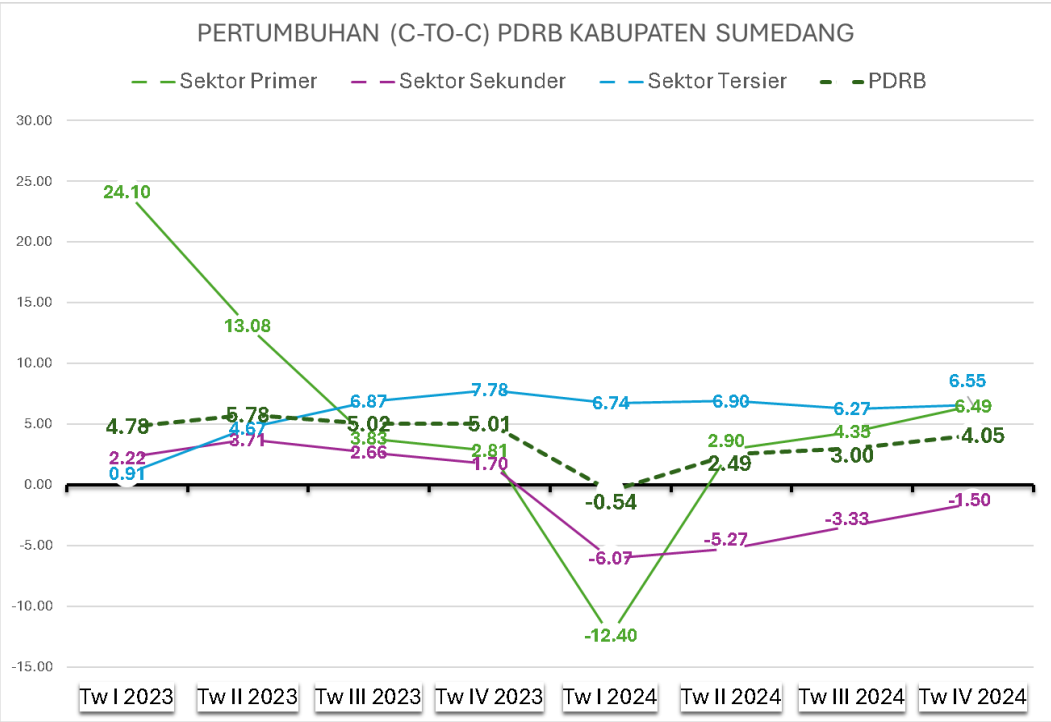
Grafik 2.15 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2024



Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami kontraksi pada tahun 2024. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Sumedang, mencapai 29,49% dari total PDRB, namun penurunan di kedua sektor ini mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan industri lokal, menunjukkan tanda-tanda perlambatan akibat faktor eksternal maupun perubahan dalam pola investasi.

Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini, Sumedang perlu mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan industri untuk mempercepat pemulihan. Terlepas dari itu, sektor Pertanian tetap menjadi sumber pertumbuhan yang stabil, dengan sektor lainnya, seperti Perdagangan dan Jasa Pendidikan, turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung ekonomi lokal. Keseimbangan antara sektor primer dan sektor industri serta jasa akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Grafik 2.16 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024



Sumber: BPS 2025 (diolah)

Perlambatan ekonomi di Sumedang sudah mulai terlihat, terutama pada sektor sekunder, sejak Triwulan I 2024. Pada sektor sekunder (digambarkan dengan garis warna ungu), yang mencakup sektor industri dan konstruksi, terdapat penurunan tajam sejak Triwulan I 2024, dengan angka -6,07% pada Triwulan I 2024 dan -5,27% pada Triwulan II 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan konstruksi yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumedang mulai mengalami perlambatan yang signifikan.

Sebaliknya, sektor primer (warna hijau) menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih fluktuatif. Pada Triwulan I 2024, sektor ini mengalami penurunan sebesar -12,40%, tetapi mulai menunjukkan pemulihan dengan angka positif pada Triwulan II dan III 2024. Sektor tersier (warna biru), yang mencakup sektor jasa, juga mengalami penurunan ringan, tetapi secara keseluruhan kontribusinya terhadap PDRB Sumedang lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi tajam seperti sektor sekunder.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan konstruksi, yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumedang, kini mulai menghadapi tantangan, yang mungkin dipicu oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, keterbatasan investasi, atau masalah dalam rantai pasokan. Sementara itu,

sektor pertanian dan jasa masih mampu memberikan kontribusi positif meskipun ada penurunan di sektor sekunder.

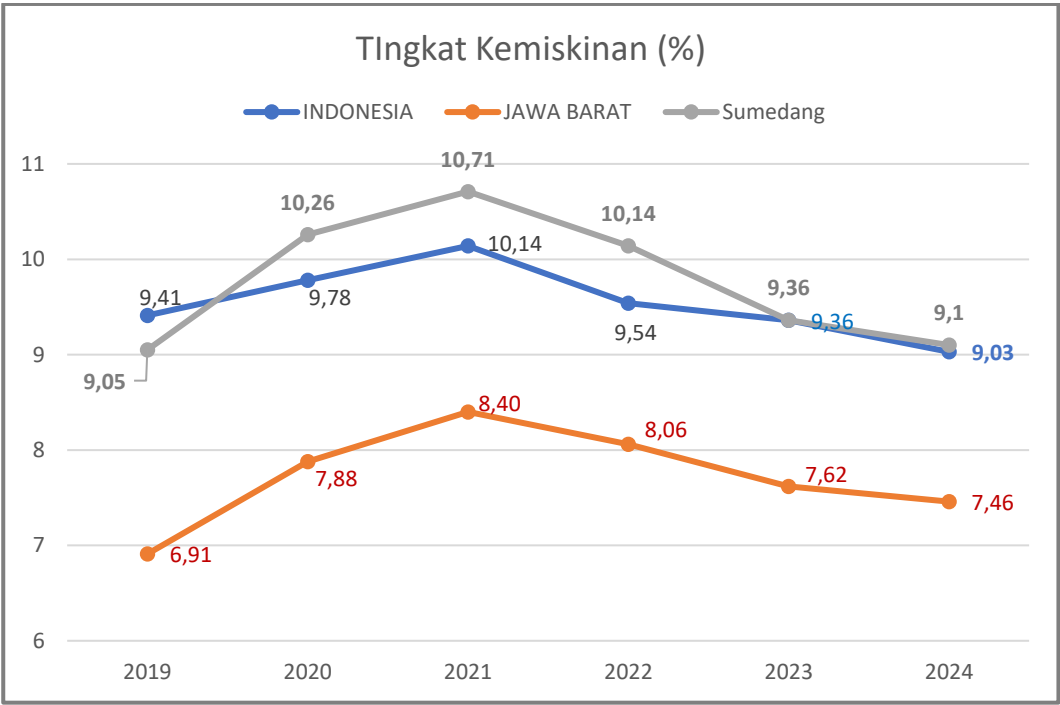
Dengan demikian, perlambatan ekonomi Sumedang pada awal 2024 lebih jelas terlihat pada sektor-sektor yang bergantung pada industri dan konstruksi, dan ini harus menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan antar sektor.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,26 persen. Angka ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 10,71 persen, yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,14 persen, dan berlanjut pada tahun 2023 yang mencatat penurunan cukup signifikan sebesar 0,78 persen, sehingga tingkat kemiskinan turun ke angka 9,36 persen. Penurunan ini mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan mulai berfungsinya program-program pemulihan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, pada tahun 2024, penurunan tingkat kemiskinan tercatat hanya sebesar 0,26 persen, dengan angka kemiskinan berada di angka 9,10 persen. Penurunan yang relatif lebih lambat ini menunjukkan adanya tantangan dalam menurunkan kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah, terutama dalam menghadapi kemiskinan struktural dan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan jangka panjang.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukkan trend menurun pada dua tahun terakhir Dimana sebelumnya mengalami kenaikan salah satunya akibat dampak Pandemi Covid-19 pada periode tahun 2020-2021.

Grafik 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024

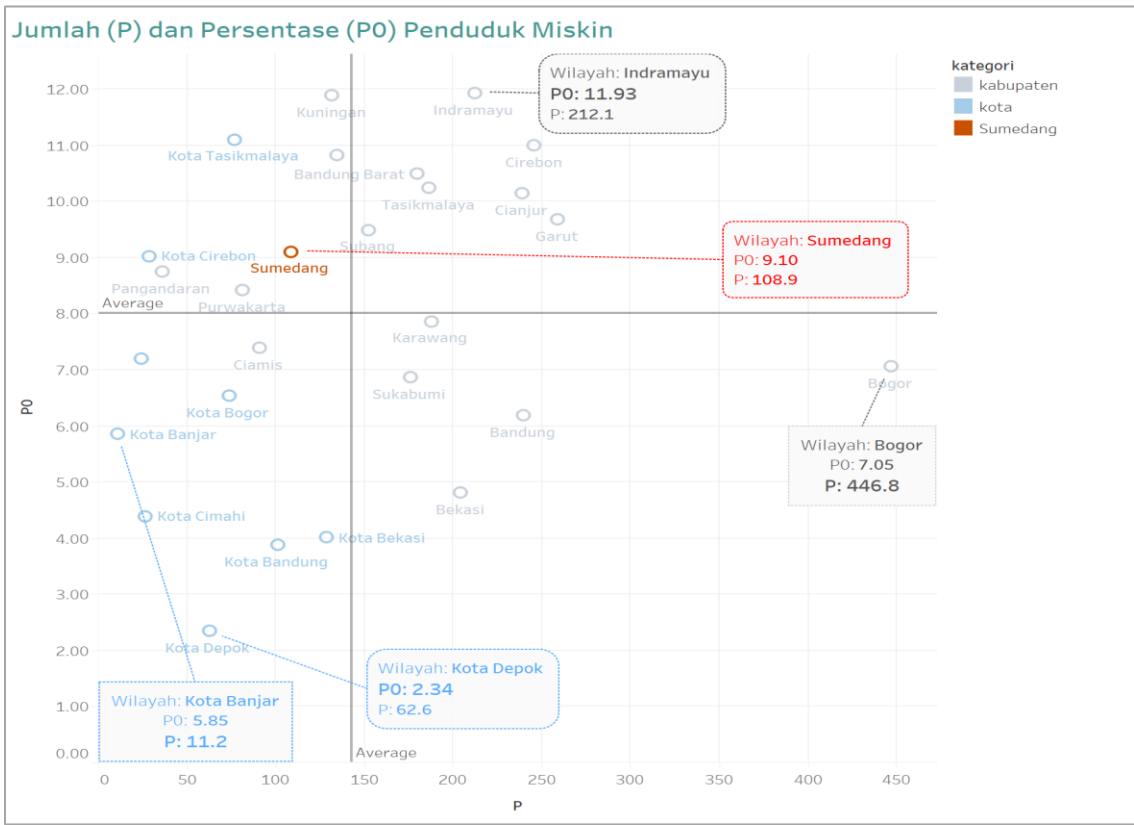


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang

Melihat gambar diatas, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sumedang merupakan tantangan dalam sektor pertanian, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya lapangan kerja yang layak. Namun, upaya pemerintah Sumedang dalam menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tampaknya telah memberikan hasil yang positif dimana Kabupaten Sumedang mampu menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan kabupaten kota di Jawa Barat.

Gambar 2.16

Komparasi Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

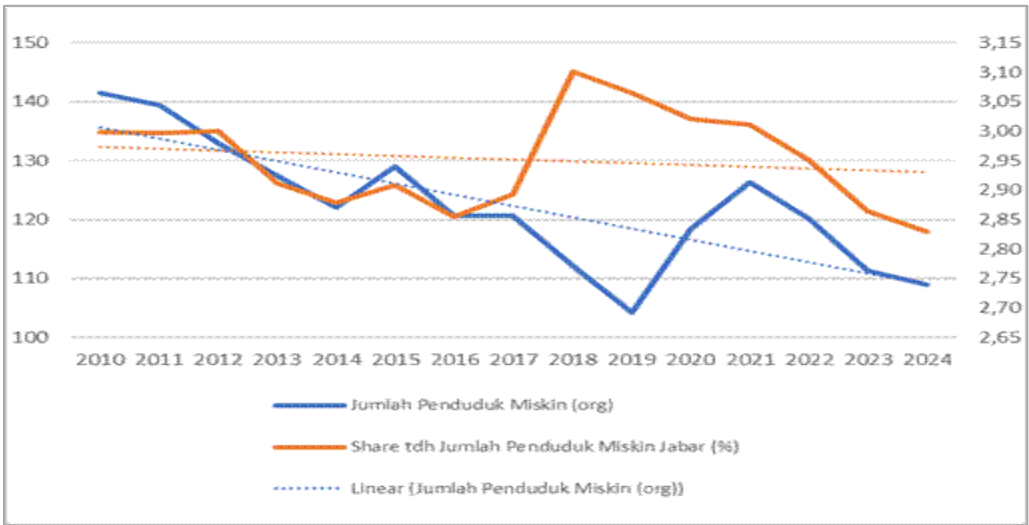


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi lokal, tetapi juga memberikan gambaran tentang kontribusi wilayah tersebut terhadap total jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Dalam analisis ini, data menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, kontribusinya terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin menurun.

Penurunan kontribusi jumlah penduduk miskin dari Kabupaten Sumedang terhadap jumlah keseluruhan penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Sumedang. Meskipun tingkat kemiskinan mungkin masih tinggi, penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di tingkat lokal telah memberikan dampak positif yang signifikan.

Grafik 2.18
Komparasi Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhannya
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

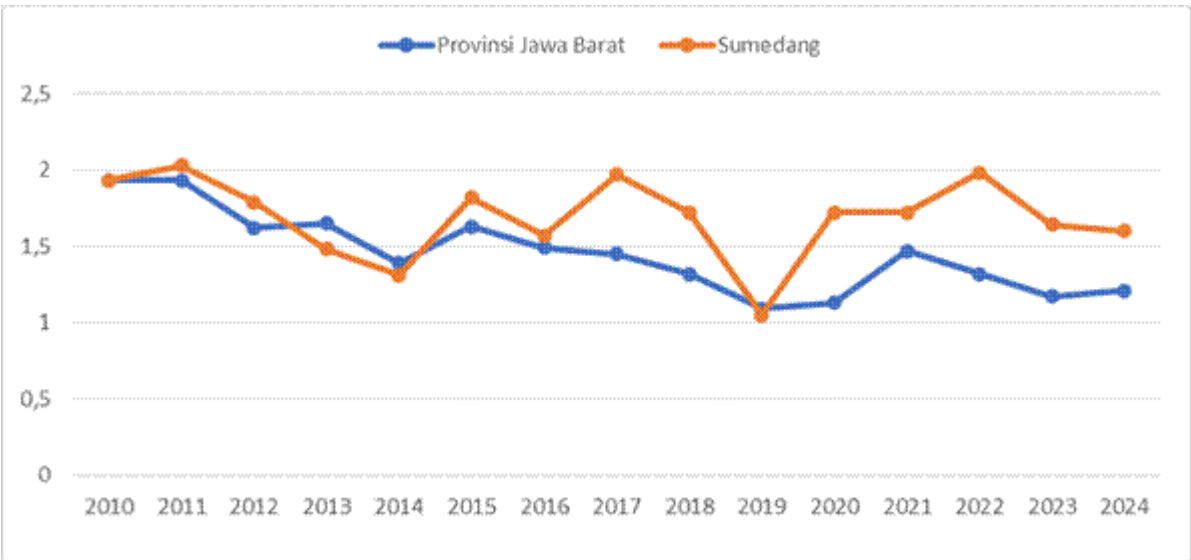


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selain tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Kedalaman kemiskinan mengacu pada seberapa jauh individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut berada di bawah ambang batas tersebut, atau seberapa jauh pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan relatif.

Grafik 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumedang



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Implikasi dari kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara umum, masih ada tantangan yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Kedalaman kemiskinan yang lebih besar dapat mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat lokal, yang dapat mengakibatkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengatasi kedalaman kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Diperlukan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan inklusif, serta kebijakan sosial yang mendukung seperti program bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan.

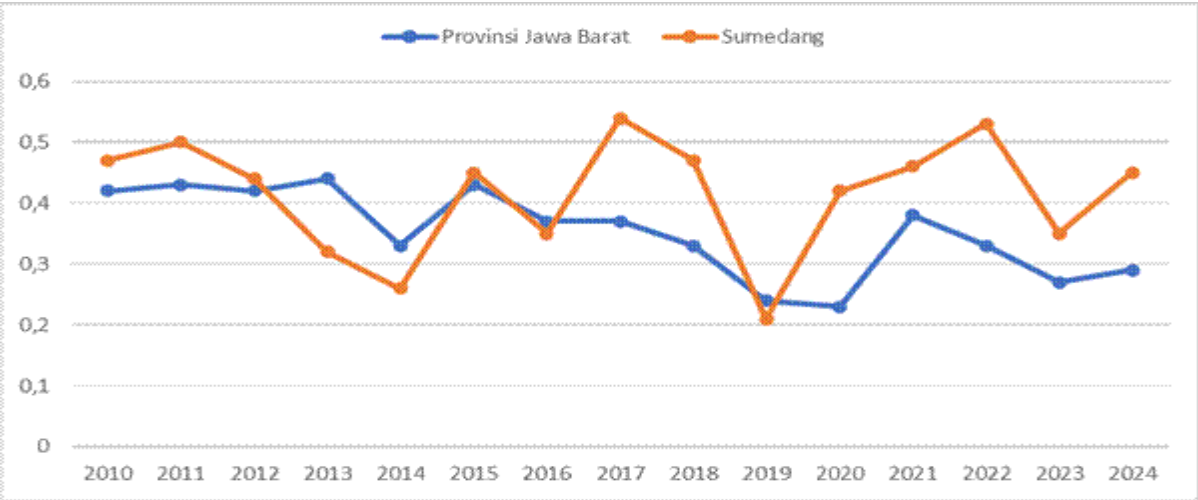
Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain tingkat dan kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Keparahan kemiskinan mengacu pada tingkat kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Implikasi dari keparahan kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung mengalami kondisi hidup yang lebih sulit daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Tingkat keparahan kemiskinan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang rendah dan akses terhadap layanan dasar yang

terbatas mengakibatkan kondisi hidup yang tidak stabil dan berisiko bagi keluarga yang terkena dampak.

Grafik 2.20
Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sumedang



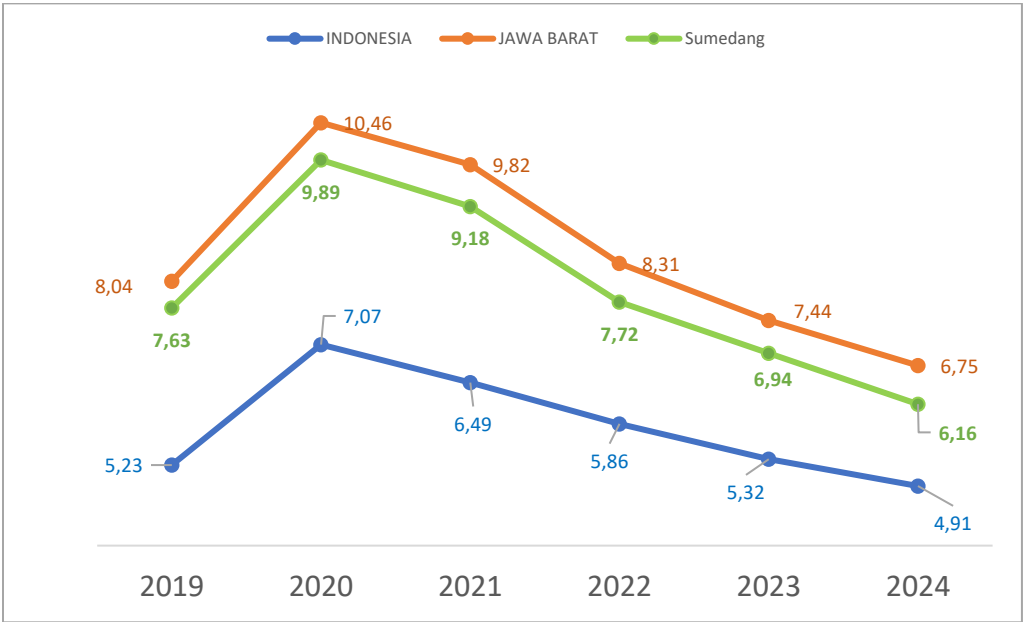
Sumber Data: BPS, 2024

Keparahan kemiskinan yang tinggi juga dapat mencerminkan kurangnya resiliensi atau ketahanan ekonomi di Kabupaten Sumedang, yang membuat masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi atau krisis keuangan. Ini dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kemiskinan kronis dan peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi keparahan kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan, serta mendukung upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perlunya pengembangan program-program sosial yang menyasar kelompok rentan dan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga menjadi penting.

Perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren yang terus menurun pada empat tahun terakhir.

Grafik 2.21
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024

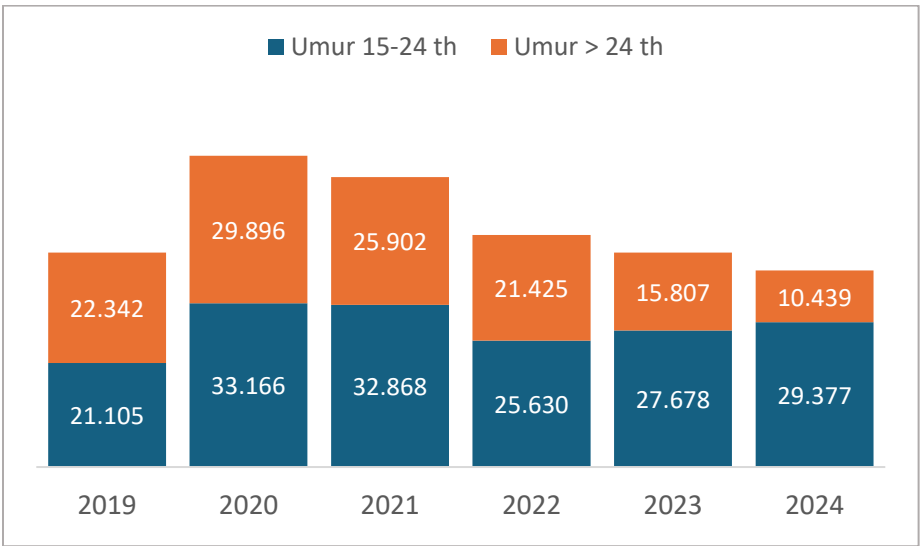


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan TPT Jawa Barat tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan TPT Nasional. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penciptaan lapangan kerja formal untuk meningkatkan stabilitas ekonomi

Apabila dilihat dari usia, Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang didominasi oleh usia muda antara 15-24 tahun.

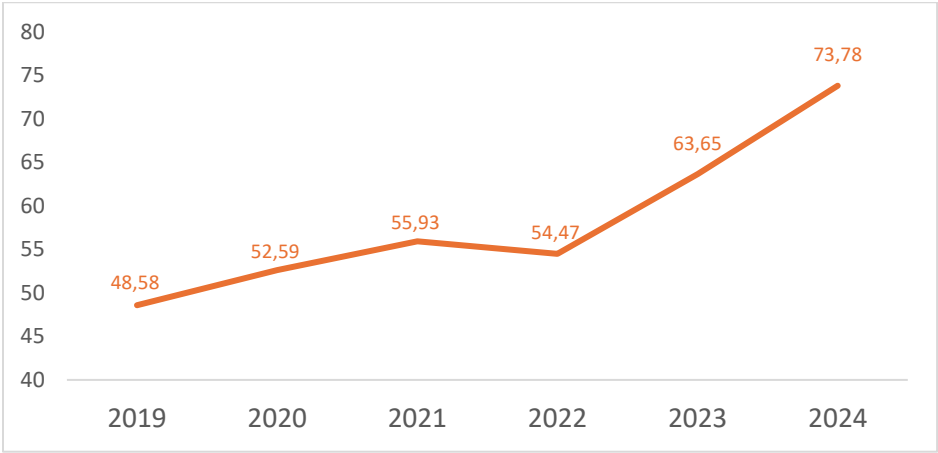
Grafik 2.22 Komposisi TPT berdasarkan Umur
di Kabupaten Sumedang Tahun 2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, ditengah kondisi TPT yang terus menurun dari tahun 2021-2024, Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menunjukkan tren meningkat pada tahun 2023 dan 2024.

Grafik 2.23 Tren Proporsi TPT Usia Muda (15-24 Tahun) di Kabupaten Sumedang Tahun 2024



Sumber: BPS,2024 (diolah)

Secara umum indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat digambarkan sebagaimana table berikut.

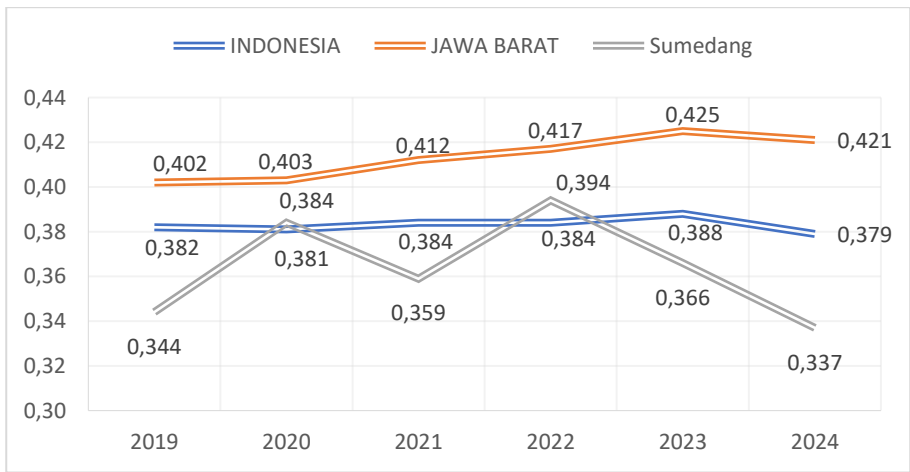
Tabel 2.13
Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang

Variabel	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	Orang	637,668	639,867	609,471	626159	646,454
Bukan Angkatan Kerja	Orang	286,961	294,136	333,498	297,915	287,169
TPAK	Persen	68.96	68.51	64.63	67.76	69.24
TPT	Persen	9.89	9.18	7.72	6.94	6.16
Jumlah Pengangguran	Orang	63,062	58,770	47,055	43,485	39,816
Penduduk Bekerja	Orang	574,606	581,097	562,416	582,674	606,638
Penduduk Usia Kerja	Orang	924,629	934,003	942,969	924,074	933,623

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang terus menurun pada dua tahun terakhir. Nilai Gini Ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebesar 0,337. Kondisi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan gini ratio Nasional dan Jawa Barat. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pascapandemi di Sumedang berhasil menekan kesenjangan pendapatan khususnya di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan terjadi fluktuatif.

Grafik 2.24
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2019-2024

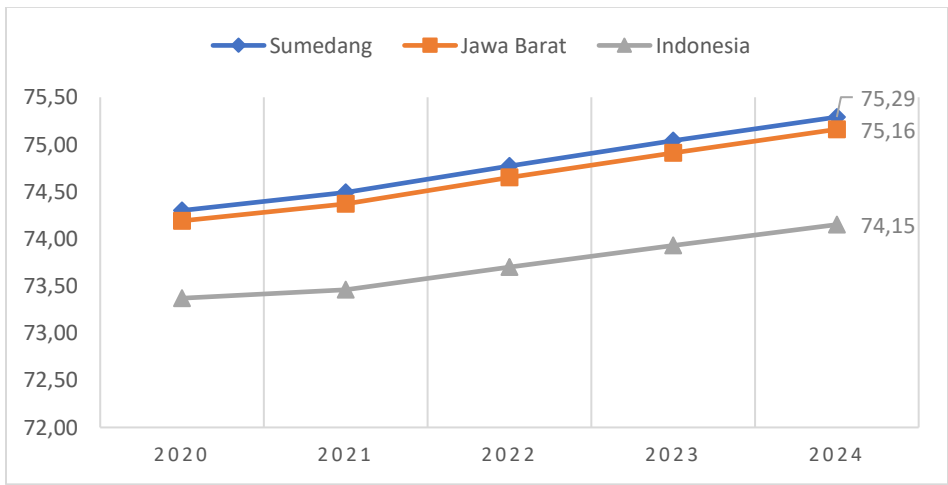


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan pola yang sedikit berbeda. Secara nasional, UHH di Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dari 71,5 tahun pada tahun 2019 menjadi 74,15 tahun pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Grafik 2.25 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025

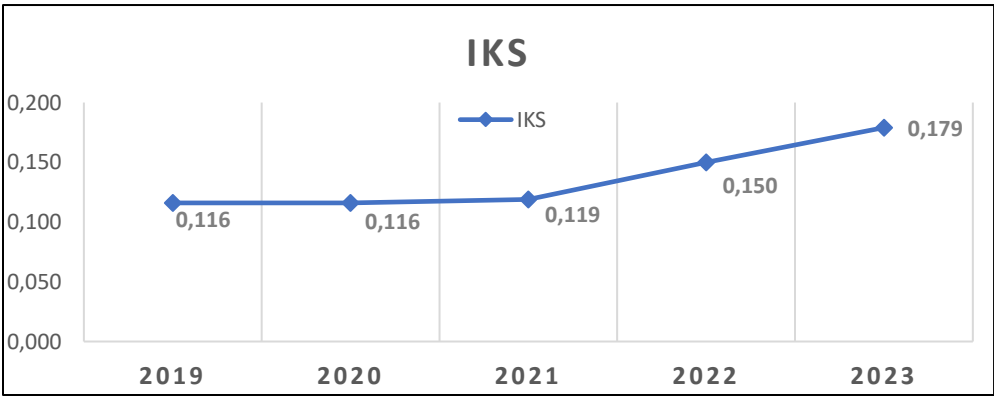
Di tingkat provinsi, Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang lebih baik dalam hal UHH. Pada tahun 2019, UHH Jawa Barat berada di sekitar 73,5 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 75,16 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang lebih signifikan ini menunjukkan efektivitas

program kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menunjukkan capaian UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi. Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 75,29 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata nasional. Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2024, UHH Sumedang mencapai 75,04 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan jauh di atas rata-rata nasional.

Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan di Sumedang yang mungkin lebih terfokus dan efektif. Program kesehatan masyarakat yang komprehensif, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan inisiatif lokal yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan signifikan ini.

Secara keseluruhan, meskipun UHH Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, tren peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan dan program kesehatan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian UHH-nya di masa depan. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya peran program dan kebijakan lokal dalam mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 2.26 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2019-2023 semakin baik. Bahkan pada tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 merebak tidak sampai menurunkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.14 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Prevalensi Stunting (SSGI)	32,2	24,43	-	22	27,6	-	-
2	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	32,2	24,43	17,5	10,99	8,27	7,89	7,32
3.	Prevalensi Stunting (Survei Kesehatan Indonesia)	-	-	-	-	-	14,4	-
3	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	155	134	137	161	212	148	187
4	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	16	13	21	36	17	22	21

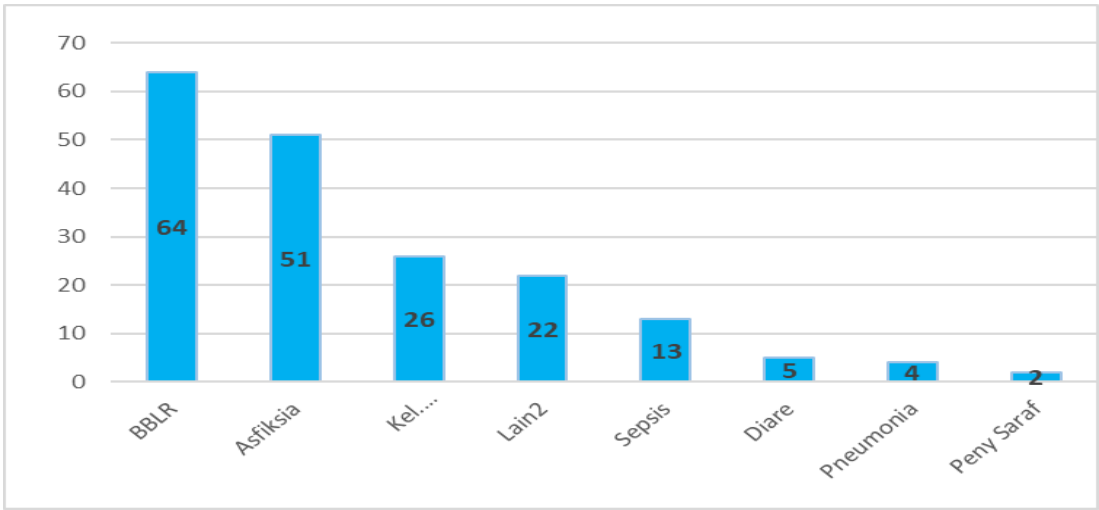
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan. Survei Kesehatan Indonesia merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 balita pada tahun 2023.

Data jumlah kematian bayi tahun 2024 bertambah 39 menjadi 187 bayi dari 148 bayi pada Tahun 2023 dengan penyebab kematian terbesar karena BBLR. Penyebab kematian bayi digambarkan pada grafik di bawah ini.

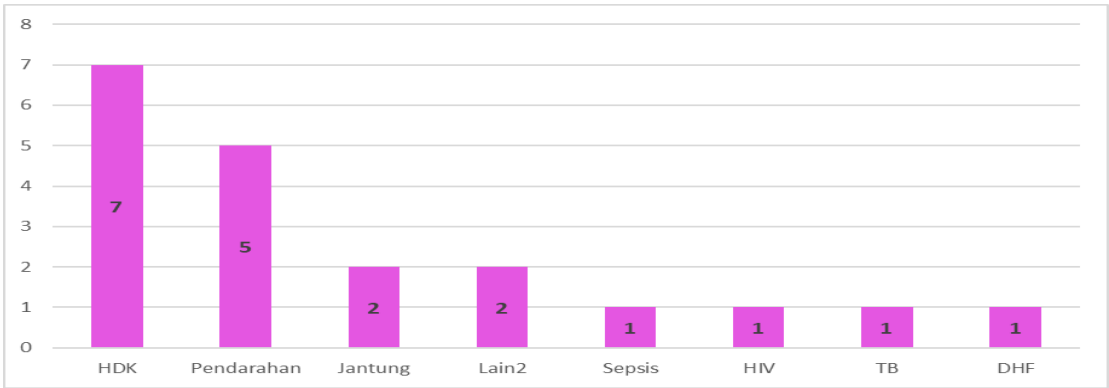
Grafik 2.27 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2022 turun pada angka 17 orang. Penyebab kematian ibu digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 2.28 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

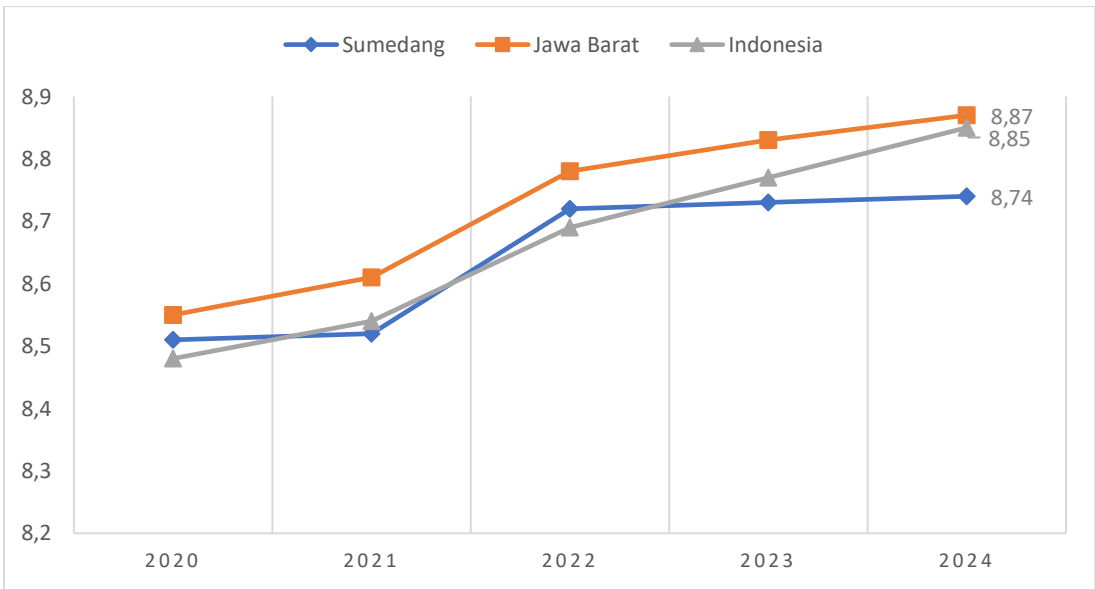
2.1.2.3 Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Secara nasional, RLS di Indonesia mengalami kenaikan dari 8,30 tahun pada tahun 2019 menjadi

8,85 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperpanjang masa pendidikan di tingkat nasional, menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam RLS. Pada tahun 2019, RLS Jawa Barat berada di sekitar 8,40 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,87 tahun pada tahun 20234 Kinerja Jawa Barat ini menggambarkan efektivitas dari program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, termasuk upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Grafik 2.19 Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (2025)

Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2020-2024 selalu diatas angka RLS Kabupaten Sumedang dan angka RLS Nasional. Nilai RLS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah 8,55 tahun meningkat terus hingga sebesar 8,87 tahun pada tahun 2024. Fenomena yang menarik adalah perbandingan angka RLS Kabupaten Sumedang dan Nasional. Dimana di tahun 2020 angka RLS Kabupaten Sumedang 8,51 tahun lebih tinggi dari angka RLS Nasional yang hanya 8,48 tahun, dan tahun 2022 dengan posisi yang sama angka RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,72 tahun lebih tinggi dibandingkan angka RLS

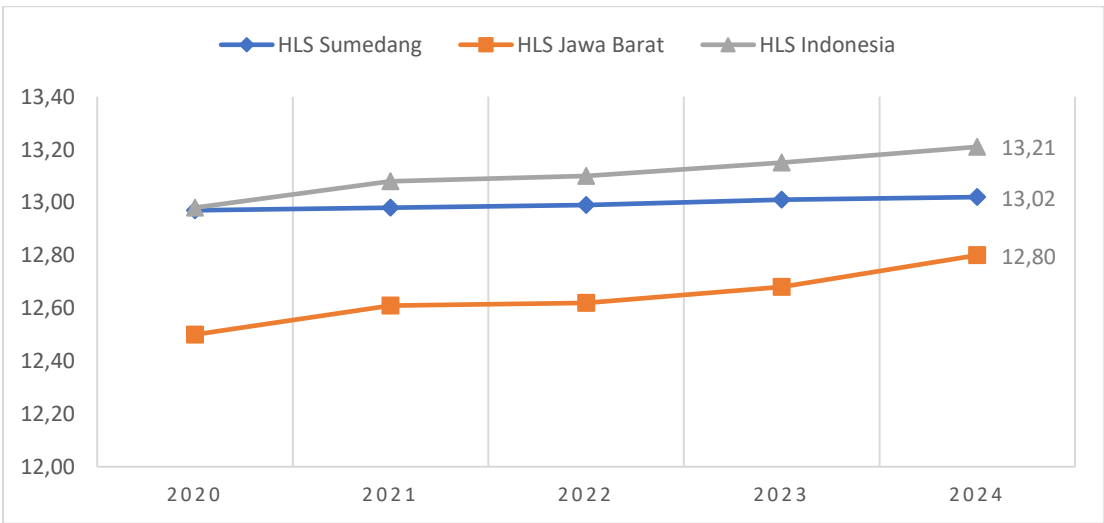
Nasionla dengan 8,69 tahun. Sedangkan pada tahun 2021, 2023 dan 2024 angka RLS Nasional lebih tinggi dari angka RLS Kabupaten Sumedang.

Secara keseluruhan, meskipun RLS Sumedang silih berganti posisi dengan angka RLS Nasional, tren yang terus meningkat yang kuat menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan pendidikan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat mencapai dan bahkan melampaui rata-rata nasional di masa depan. Analisis ini juga menekankan pentingnya peran program dan kebijakan lokal dalam meningkatkan indikator pendidikan di tingkat kabupaten.

Dalam grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) periode tahun 2020-2024 dibawah, kita dapat melihat posisi Kabupaten Sumedang yang selalu dibawah angka HLS Nasional tetapi di atas angka HLS Provinsi Jawa Barat. Fenomena yang terlihat di grafik ini, ketiga wilayah ini mengalami tren yang terus meningkat, tetapi angka HLS Kabupaten Sumedang peningkatannya tren peningkatan tiap tahunnya yang paling rendah, dengan garis grafik yang landai dan moderat dibandingkan angka HLS Nasional dan HLS Provinsi Jawa Barat yang lebih cepat peningkatannya.

Angka-angka HLS Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2020-2024 ini trennya terus meningkat hanya kenaikannya 0,01 tiap tahunnya kecuali dari tahun 2022 ke 2023 naik 0,02 poin. Tahun 2020 12,97 tahun, naik di tahun-tahun berikutnya menjadi 12,98; 12,99; 13,01; dan 13,02 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 2.30 Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Di Kabupaten Sumedang Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sumedang memiliki HLS yang cukup baik pada awal periode, peningkatan di tingkat Jawa Barat dan nasional menunjukkan tren yang lebih kuat dan stabil. Sumedang perlu memperhatikan dan mungkin mengadopsi beberapa kebijakan atau strategi dari tingkat provinsi dan nasional untuk lebih meningkatkan HLS-nya.

Era globalisasi ditandai dengan tuntutan bagi setiap masyarakat untuk memiliki berbagai kompetensi atau kemampuan agar mampu bersaing. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah kemampuan literasi dan numerasi. Dengan demikian pada Tahun 2021 evaluasi belajar siswa yang disebut Ujian Nasional (UN) digantikan dengan sistem Asessmen Nasional (AN).

Pelaksanaan AN menggunakan sistem sampel dengan jumlah peserta yang terbatas dari setiap sekolah, akan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil melalui 3 (tiga) bagian aspek pelaksanaan, salah satunya adalah Asessmen Kompetensi Minimal (AKM) yang dirancang dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dari hasil belajar kognitif pada bidang literasi dan numerasi.

Kompetensi literasi adalah kemampuan siswa untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks. Asessmen literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah.

Kompetensi numerasi adalah untuk memahami dan menggunakan angka dan simbol matematika dasar, serta menganalisis informasi dalam grafik, tabel dan bagan atau untuk mengaplikasikan bilangan atau keterampilan hitung untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan. Kemampuan numerasi yang baik dapat membantu siswa menghadapi tantangan matematika, menyelesaikan masalah dan berpikir secara logis.

Penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga satuan pendidikan, karena penguatan literasi dan numerasi merupakan suatu program pada urusan pendidikan yang akan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang menjadikan

persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum sebagai Indikator Kinerja Daerah.

Berikut target dan realisasi persentase siswa dengan kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Target dan Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2023-2024

No	Indikator	Target		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
1.	Persentase siswa dengan kompetensi literasi	53,53	58,88	56,18	82,67
2.	Persentase siswa dengan kompetensi numerasi	30,11	33,12	49,4	77,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah pendekatan perlindungan sosial yang dirancang untuk bisa merespons dan menyesuaikan diri terhadap berbagai risiko dan guncangan, baik yang bersifat mendadak (seperti bencana alam atau pandemi) maupun yang bertahap (seperti perubahan iklim atau transformasi ekonomi).

Tujuan Utama dari perlindungan sosial yang adaptif adalah meningkatkan ketahanan masyarakat—terutama kelompok rentan—dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, maupun bencana, dengan sistem yang fleksibel dan responsif.

Perlindungan sosial adaptif menggabungkan 3 sistem:

1. Sistem Perlindungan Sosial Reguler seperti PKH, BPNT, JKN, bantuan disabilitas, dll.
2. Manajemen Risiko Bencana : penanganan darurat, evakuasi, pemulihan pasca-bencana.
3. Adaptasi Perubahan Iklim : dukungan terhadap mata pencaharian yang terancam, seperti pertanian terdampak kekeringan atau banjir.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang naik dari 75,32 (Tahun 2022) menjadi 76,95 (Tahun 2023) dan kembali naik menjadi 77,60 (Tahun 2024). Angka 77,60 menunjukkan “pada populasi masyarakat di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang masuk pada kategori kerukunan tinggi.

Tabel 2.16 Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023

No	Dimensi	2022	2023	2024
1	Toleransi	96,40	96,61	95,61
2	Kesetaraan	84,07	82,78	92,71
3	Kerjasama	33,40	51,89	52,13

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumedang, 2025

Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang. Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya local. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 147 Kampung Budaya yang menjadi kekuatan dalam mempertahankan dan melestarikan budaya yang ada Dimana 21 Kampung Budaya diantaranya ada di Kabupaten Sumedang, yaitu: Sakurjaya, Cikuleu, Ujungjaya, Cibuluh, Rancakalong, Cicere, Cibunar, Pasirbiru, Pamekaran, Cigumentong, Sindulang, Karedok, Ungkal, Mekarasih, Cibubuan, Padaasih, Cijolang, Kutamaya, Cijeler, Pajagan dan Cihawir.

Gambar 2.17 Sebaran Kampung Budaya di Jawa Barat



Sumber: DPMD Provinsi Jawa Barat

Sementara itu di Kabupaten Sumedang terdapat 25 Lembaga adat desa yang tersebar di 13 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang

No	Lembaga Adat Desa	Desa	Kecamatan
1	Kampung Pawenang	Pawenang	Jatinunggal
2	Kampung Cikuleu & Ujungjaya	Sukarjaya	Ujungjaya
3	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
4	Kampung Cibuluh	Cibuluh	Ujungjaya
5	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
6	Kampung Dangiag Jagakerti	Cipelang	Ujungjaya
7	Kampung Rancakalong	Rancakalong	Rancakalong
8	Kampung Cijere	Nagarawangi	Rancakalong
9	Kampung Cibunar	Cibunar	Rancakalong
10	Kampung Pasirbiru	Pasirbiru	Rancakalong
11	Kampung Pamekaran	Pamekaran	Rancakalong
12	Kampung Cigumentong	Sindulang	Cimanggung
13	Kampung Sekarwangi	Sekarwangi	Buahdua
14	Kampung Musaraka/kampung adat Karedok	Karedok	Jatigede
15	Kampung Mekarasih	Mekarasih	Jatigede
16	Kampung Ungkal	Ungkal	Conggeang
17	Kampung Cibubuan	Cibubuan	Conggeang
18	Kampung Padasih	Padasih	Conggeang
19	Kampung Congeangkulon	Congeangkulon	Conggeang
20	Kampung Cijolang, Citengah, Cisoloka	Citengah	Sumedang Selatan
21	Kampung Cihawing, Karanganyar	Karangpakuan	Darmaraja
22	Kampung Kutamaya	Padasuka	Sumnedang Utara
23	Kampung Cijeler, Cisambeng, Cibogor, Cigumiwang	Cijeler	Situraja
24	Kampung Pajagan, Cicau	Pajagan	Cisitu
25	Kampung Cinanggerang	Cinanggerang	Pamulihan

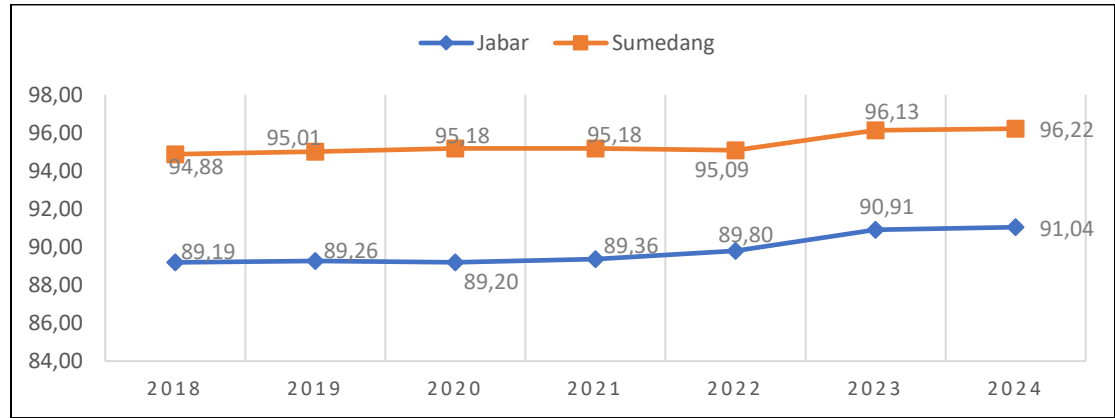
Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang

2.1.2.6 Keluarga berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan

ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Meleak Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, dan pada tahun 2024 menjadi 96,22 poin atau naik 0,09 poin dibanding tahun 2023. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.31 IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024

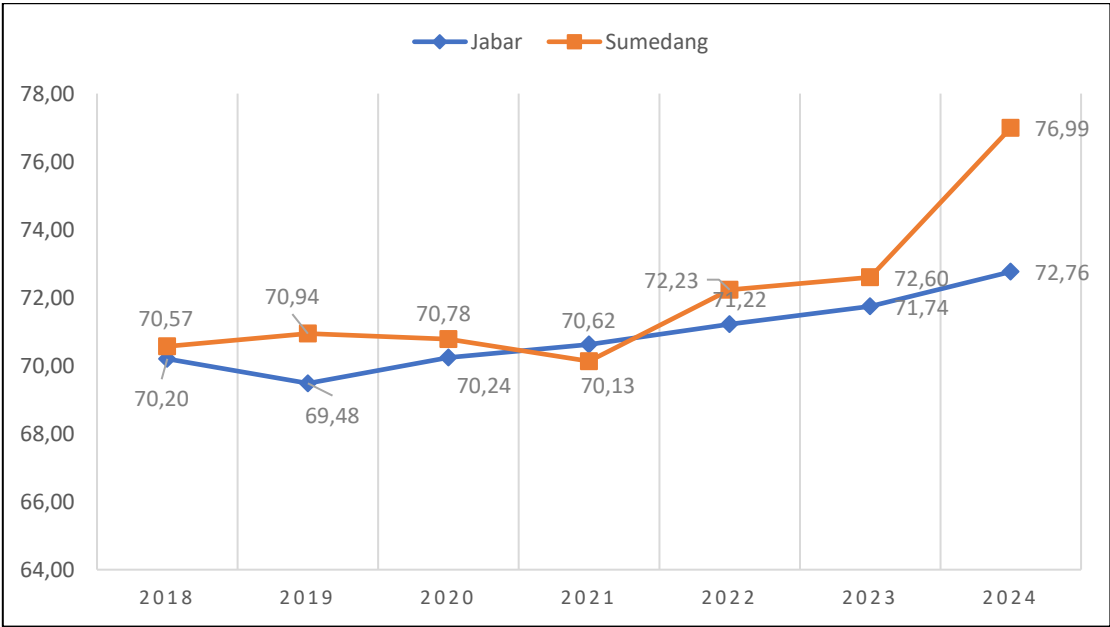


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah, 2025)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar 76,99 meningkat dibanding Tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin. Nilai IDG Kabupaten Sumedang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai 72,76 poin pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.

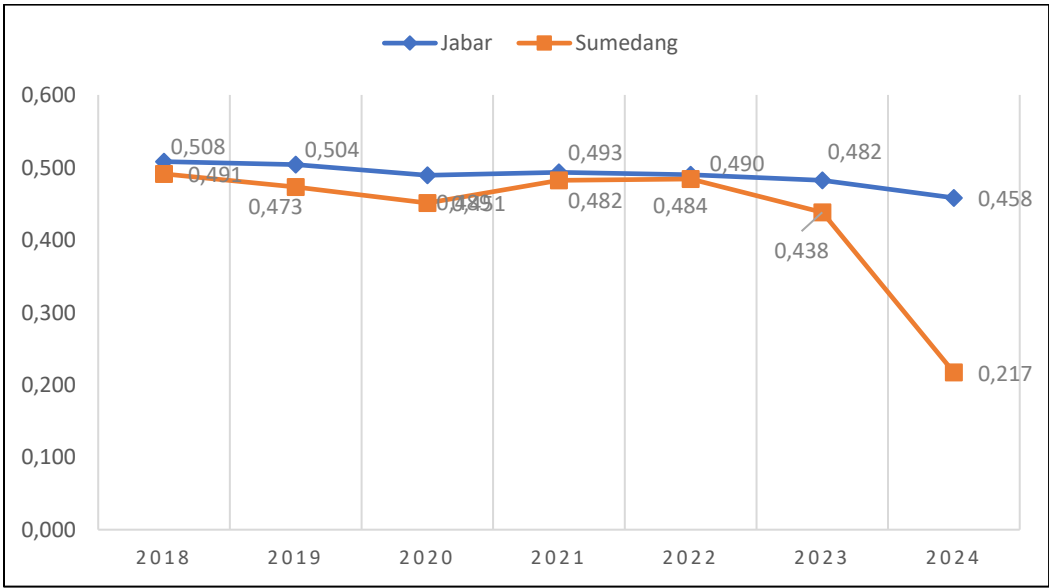
Grafik 2.32 IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah, 2025)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin kecil IKG berarti semakin rendah ketimpangan gender, dan sebaliknya.

Grafik 2.33 IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024

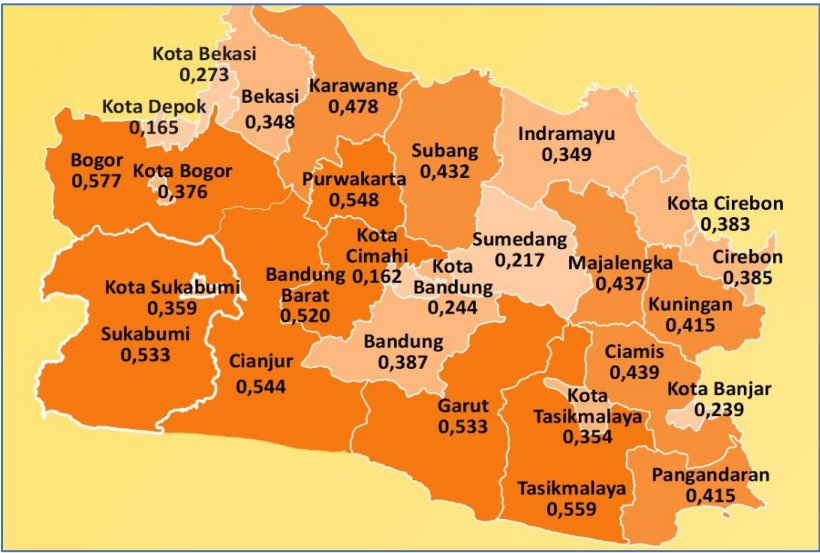


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

IKG dinilai rendah jika nilainya kurang dari 0,399, menengah bawah jika IKG berada dalam interval 0,400-0,449, menengah atas jika IKG berada pada interval 0,450-0,499 dan dinilai tinggi jika IKG di atas atau sama dengan 0,500.

IKG Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan dibanding tahun 2023 yang mencapai 0,438. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458.

Gambar 2.18 IKG Kab/Kota Jabar Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025 (diolah)

Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang yang sudah masuk kategori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan perbaikan dalam berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 3,48 dari hasil pengukuran terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Tahun	Komponen Lingkungan Pendukung					Komponen SDM	Komponen Pasar					Komponen Ekosistem Inovasi		Nilai IDSD
	Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 7: Pasar Produk	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Pilar 9: Sistem Keuangan	Pilar 10: Ukuran Pasar	Pilar 11: Dinamisme Bisnis	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi		
2022	4,45	2,11	3,39	2,66	4,08	3	3,35	2,57	3,34	1,6	5	3,84	3,28	
2023	4,58	2,37	4,58	2,77	4,07	3,24	3,35	2,72	2,6	4,52	3,2	3,79	3,48	
2024	4,62	3,58	4,63	3,62	4,02	3,67	4,41	2,86	2,2	4,55	5	3,92	3,92	

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah BRIN, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024, beberapa pilar masih memiliki nilai yang rendah, yaitu Pilar Infrastruktur (3,58); Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (3,62); Pilar Keterampilan (3,67); Pilar Pasar Tenaga Kerja (2,86); Pilar Sistem Keuangan (2,20) serta Pilar Kapabilitas Inovasi (3,92). Pilar tersebut harus dioptimalkan agar Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang dapat meningkat. Sedangkan pilar yang telah memiliki nilai yang tinggi diantaranya Pilar Institusi (4,62); Pilar Adopsi TIK (4,63); Pilar Kesehatan (4,02); Pilar Pasar Produk (4,41) dan Pilar Ukuran Pasar (4,55). Tingginya nilai pada pilar tersebut didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); jangkauan jaringan internet; tingginya Angka Harapan Hidup; serta tingginya PDRB. Pilar yang memiliki nilai maksimal adalah Dinamisme Bisnis (5,00). Pilar yang meningkat pesat dari Tahun 2023 adalah Pilar Dinamisme Bisnis (meningkat 1,8 point) dan Pilar Infrastruktur (meningkat 1,21 point).

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sumedang tengah menghadapi dinamika kependudukan yang penting untuk diperhatikan, khususnya terkait peningkatan **beban ketergantungan** yang terus menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun. Beban ketergantungan adalah rasio jumlah penduduk usia non-produktif

(di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Berdasarkan grafik proyeksi, rasio ini terus mengalami peningkatan dari angka 45,77 pada tahun 2020 hingga diproyeksikan mencapai 57,16 pada tahun 2045. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara perlahan, proporsi penduduk yang membutuhkan dukungan ekonomi dari kelompok usia produktif semakin besar.

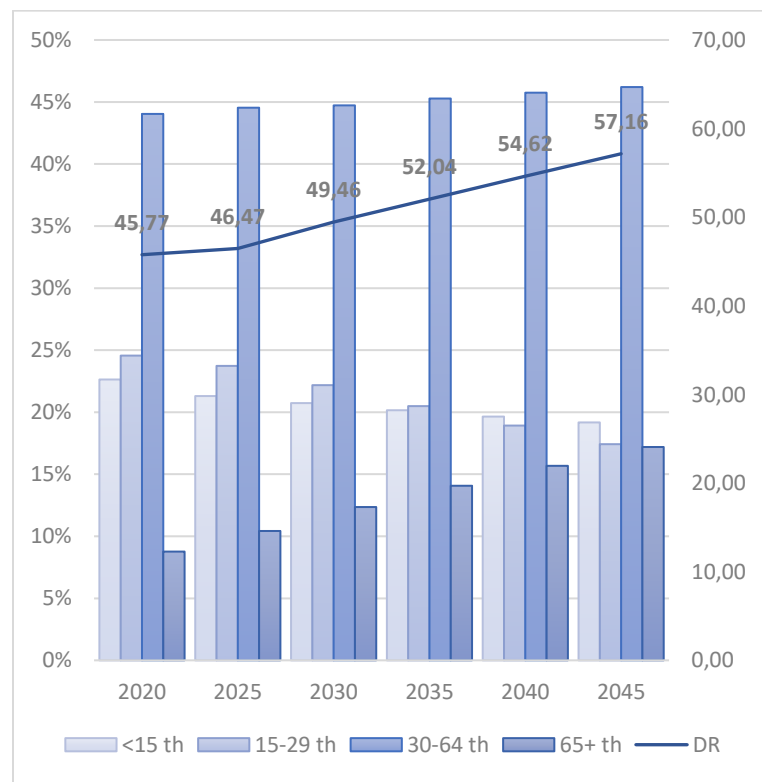
Tahun 2024 menjadi salah satu titik penting dalam transisi demografi Sumedang. Dengan **rasio ketergantungan sebesar 0,4729** atau 47,29%, berarti dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 47 orang yang bergantung pada mereka secara ekonomi dan sosial. Ini menjadi tantangan nyata, karena semakin besar beban ketergantungan, semakin tinggi pula tekanan terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang harus ditanggung oleh angkatan kerja aktif.

Perubahan struktur usia ini juga terlihat jelas dari piramida penduduk antara tahun 2023 dan proyeksi 2045. Jika pada tahun 2023 masih terlihat dominasi usia muda, maka pada 2045 bentuk piramida berubah menjadi lebih gemuk di kelompok usia tengah dan atas, mengindikasikan peningkatan populasi lansia. Kondisi ini mencerminkan bahwa Sumedang akan memasuki fase aging population, di mana penduduk lanjut usia menjadi kelompok signifikan dalam komposisi penduduk secara keseluruhan. Tanpa persiapan yang matang, hal ini dapat menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang harus dimanfaatkan. Penduduk usia muda, terutama kelompok 20–34 tahun yang mendominasi piramida penduduk 2023, merupakan aset potensial yang dapat menopang perekonomian daerah di masa depan. Masa ini merupakan fase **bonus demografi**, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif berada dalam puncaknya. Apabila pemerintah mampu mengelola potensi ini dengan baik—melalui peningkatan keterampilan, pengembangan pendidikan vokasi, serta dukungan terhadap wirausaha dan industri kreatif—maka Sumedang tidak hanya mampu menahan laju beban ketergantungan, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dengan demikian, peningkatan beban ketergantungan harus disikapi bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan transformasi struktural di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Peran pemuda akan sangat menentukan arah dan kekuatan perekonomian Sumedang di masa depan, terutama dalam menjawab tantangan era masyarakat menua (aging society) yang tak terelakkan.

Grafik 2.34 Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan



Sumber: BPS, diolah (2024)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Inovasi

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan

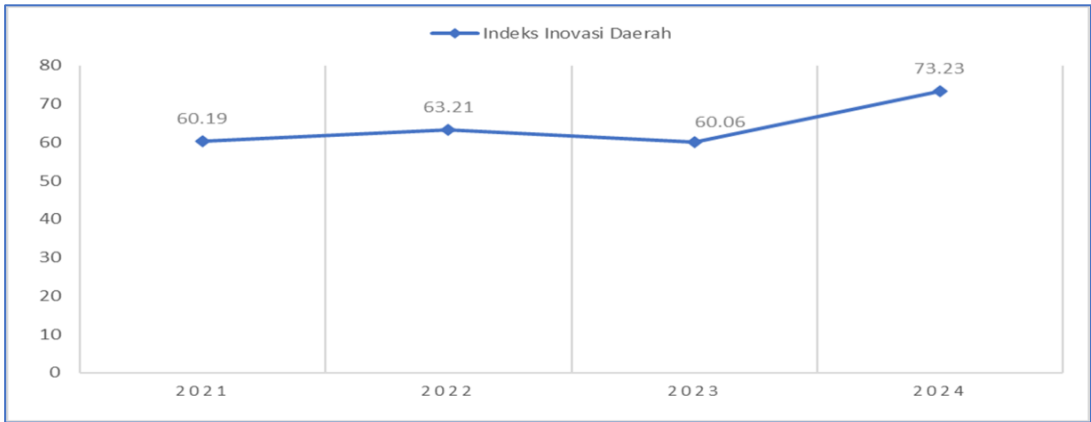
tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Inovasi yang telah disusun oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) setiap tahunnya. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.35 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang



Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori Kabupaten Terinovatif. Adapun hasil Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:

Grafik 2.36 Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024



Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024

Variabel yang memiliki indeks tinggi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (100 point), Ekosistem Inovasi dan Kajian (100 point), Infrastruktur (96,67 point), Output Pengetahuan dan Teknologi (83,33), Institusi (78,33 point), Kecepatan Bisnis Proses (76,19 point). Sedangkan variable yang masih rendah adalah Kecanggihan Produk (66,67 point) dan Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif (59,22 point).

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kabupaten Sumedang memiliki beberapa inovasi unggulan yang menjuarai beberapa event inovasi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya penilaian inovasi tingkat nasional lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi yang lolos menjadi Top Inovasi yaitu Pantasi Mart (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat – Top 40/2017) dan Angka Stunting Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI – Top 45/2023. Sedangkan di tingkat provinsi melalui Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), Kabupaten Sumedang telah menjuarai sebanyak 4 kali berturut-turut. Adapun inovasi tersebut adalah Sakip Desa (Juara 1 KIJB 2020); E Office Kabupaten Sumedang (Juara 1 KIJB 2021); Penurunan stunting melalui Aplikasi SIMPATI (Juara 1 KIJB 2022); dan WA KEPO (Juara 1 dan Best of The Best Innovation KIJB 2023). Sedangkan Tahun 2024, Inovasi Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan (SICAKEP) menjadi TOP 25 KIJB 2024.

Untuk menjaga agar semangat berinovasi tetap tinggi, maka dilaksanakan lomba inovasi tingkat kabupaten melalui Gelar Inovasi Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Inovasi tersebut dinilai secara objektif oleh tim penilai independent. Peserta gelar inovasi terbagi menjadi 3 kategori yang meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang telah mengusulkan inovasinya melalui aplikasi SIKOMPLIT (Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi) pada E-Office Kabupaten Sumedang. Kedepannya, inovasi yang dilombakan tidak hanya terbatas pada 3 kategori tersebut, namun akan diperluas lagi sehingga dapat memotret kondisi inovasi di Kabupaten Sumedang secara lebih komprehensif.

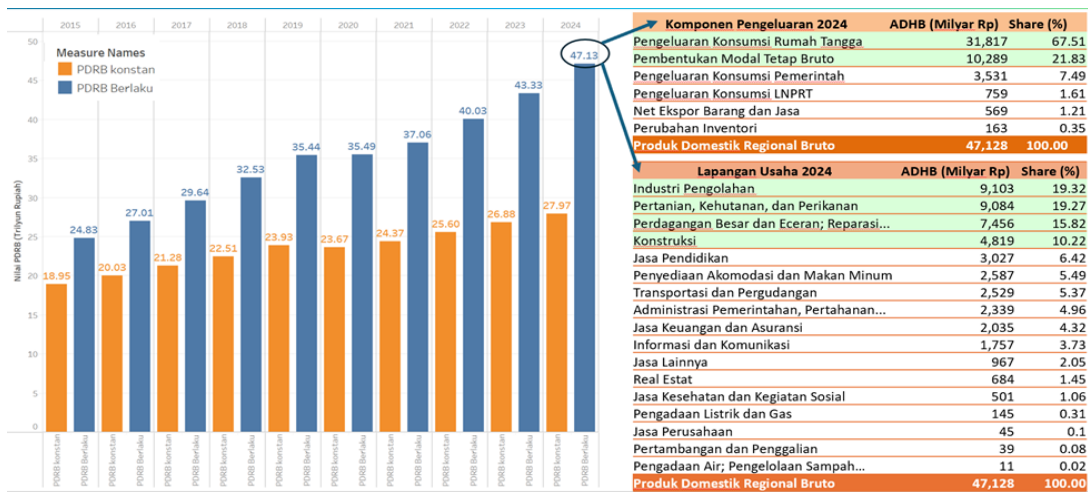
Produktifitas Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan). Di tahun 2024 sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan PDRB. Dari sisi pengeluaran, peran konsumsi rumah tangga sangat menentukan perekonomian Sumedang.

Seiring berfungsinya tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati, serta pengembangan Kawasan wisata Jatigede, Kawasan perkotaan Jatinangor, Sumedang Industrialpolis, Kabupaten Sumedang berpeluang mengakselerasi ekonomi wilayah melalui kegiatan industri, pariwisata,

perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan.

Grafik 2.37 Tren dan Komposisi PDRB Kabupaten Sumedang



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

PDRB Konstan mengalami kenaikan stabil dari tahun 2015 (Rp 18,95 triliun) hingga 2024 (Rp 27,97 triliun). PDRB Berlaku menunjukkan pertumbuhan lebih signifikan karena faktor inflasi, meningkat dari Rp 24,83 triliun pada 2015 menjadi Rp 47,13 triliun pada 2024. Pertumbuhan PDRB berlangsung positif selama periode 2015–2024, dengan PDRB Berlaku tumbuh lebih cepat dibandingkan PDRB Konstan akibat pengaruh inflasi.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah komponen terbesar, menyumbang 67.51% dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi fisik) menyumbang 21.83%, menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan aset tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menyumbang 7.49%, menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui anggaran publik. Net Ekspor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 1.21%, yang relatif kecil, menunjukkan bahwa ekspor belum menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Sumedang.

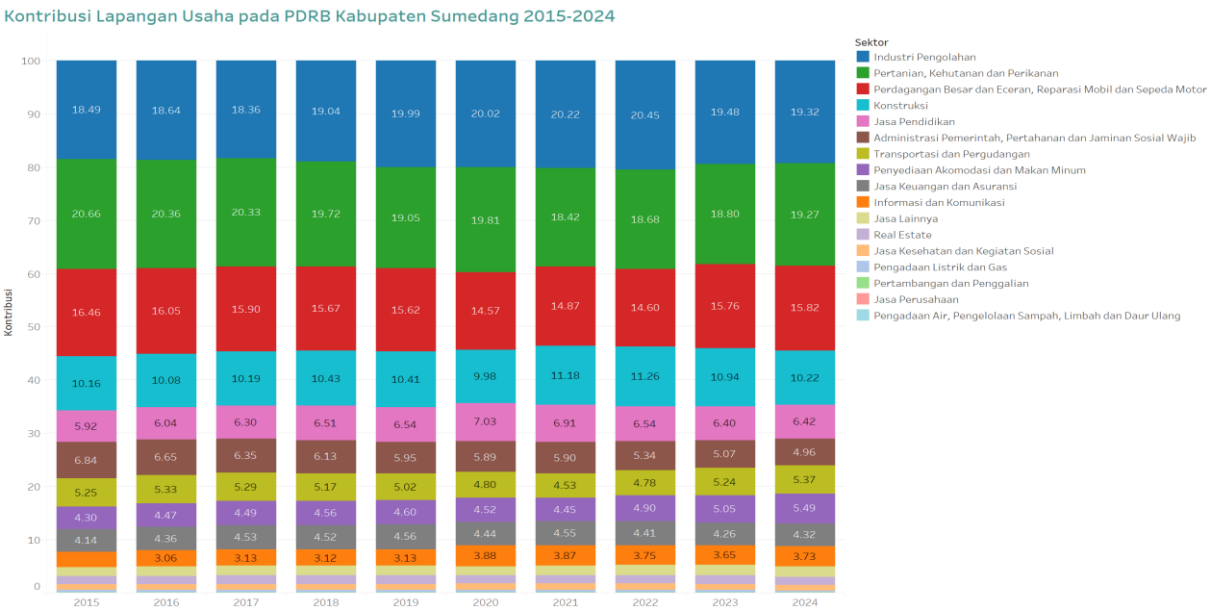
Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi dua lapangan usaha terbesar, masing-masing menyumbang 19.32% dan 19.27% dari total PDRB. Ini menunjukkan pentingnya sektor industri manufaktur dan pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar 15.82% dan

10.22%. Sektor perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan konstruksi mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur. Jasa Pendidikan , Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum , serta Transportasi dan Pergudangan juga memiliki peran penting, masing-masing menyumbang 6.42%, 5.49%, dan 5.37%. Sektor lain seperti Administrasi Pemerintahan , Jasa Keuangan dan Asuransi , serta Informasi dan Komunikasi memiliki kontribusi moderat, sekitar 4%-6%. Sektor Real Estat, Jasa Kesehatan, dan Pertambangan memiliki kontribusi lebih rendah, menunjukkan bahwa mereka belum menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang

Adapun perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

3

Grafik 2.38 Tren Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung stabil atau mengalami peningkatan kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 18.49%, dan pada 2024 meningkat menjadi 19.32%. Sektor ini tetap menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan stabilitas dan potensi industri manufaktur di Kabupaten Sumedang. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cukup stabil, dengan angka antara 19%–21%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 20.66%, dan pada 2024 turun menjadi 19.27%. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan dibandingkan sektor lainnya. Ini menunjukkan

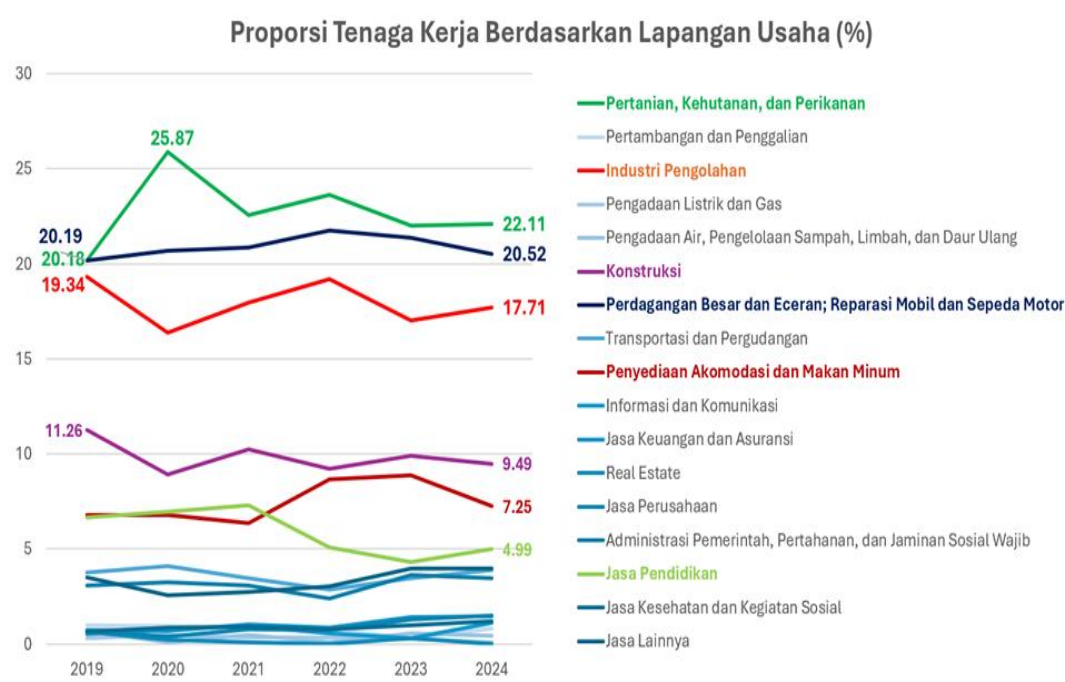
pentingnya diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

Kontribusi sektor perdagangan cenderung stabil, dengan angka sekitar 15%–16%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 16.46%, dan pada 2024 meningkat menjadi 15.82%. Sektor ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, pertumbuhannya tampak stagnan dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan.

Sektor konstruksi memiliki kontribusi yang cukup signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan sektor utama lainnya. Kontribusi sektor konstruksi cenderung stabil, dengan angka sekitar 10%–11%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 10.16%, dan pada 2024 meningkat menjadi 10.22%. Sektor ini mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur dan perkembangan properti di Kabupaten Sumedang. Stabilitas kontribusinya menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan investasi infrastruktur yang terus berlanjut.

Perkembangan proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.39 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: Sakernas BPS, 2019 - 2024

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki proporsi tenaga kerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2019, proporsinya

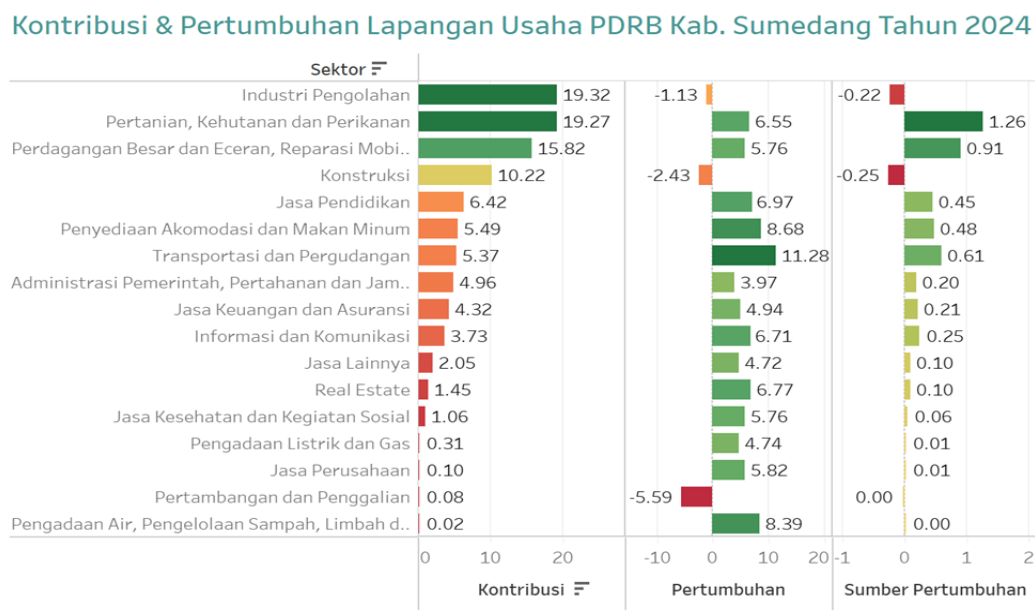
sebesar 20.19%, naik menjadi puncak 25.87% pada tahun 2020, lalu mengalami penurunan perlahan menjadi 22.11% pada tahun 2024. Sektor pertanian tetap menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Kabupaten Sumedang, meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan serapan tenaga kerja setelah mencapai puncak pada 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh transformasi teknologi atau migrasi tenaga kerja ke sektor lain.

Proporsi tenaga kerja dalam sektor Industri Pengolahan cenderung stabil, dengan angka antara 19.34% hingga 17.71%. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 19.34%, turun menjadi 17.71% pada tahun 2024. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan, namun pertumbuhannya relatif stagnan atau mengalami penurunan lemah. Ini bisa disebabkan oleh tantangan seperti kompetisi global, ketidakpastian ekonomi, atau kurangnya investasi baru.

Sektor Konstruksi memiliki proporsi tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dua sektor utama di atas. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 11.26%, meningkat menjadi 10.00% pada tahun 2021, lalu turun menjadi 9.49% pada tahun 2024. Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meskipun tidak sebesar sektor pertanian atau industri. Penurunan proporsi tenaga kerja pada tahun-tahun terakhir mungkin disebabkan oleh perlambatan aktivitas pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek besar.

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih resiliens saat terjadi pandemi Covid-19 yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup lebar.

Grafik 2.40 Kontribusi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2024



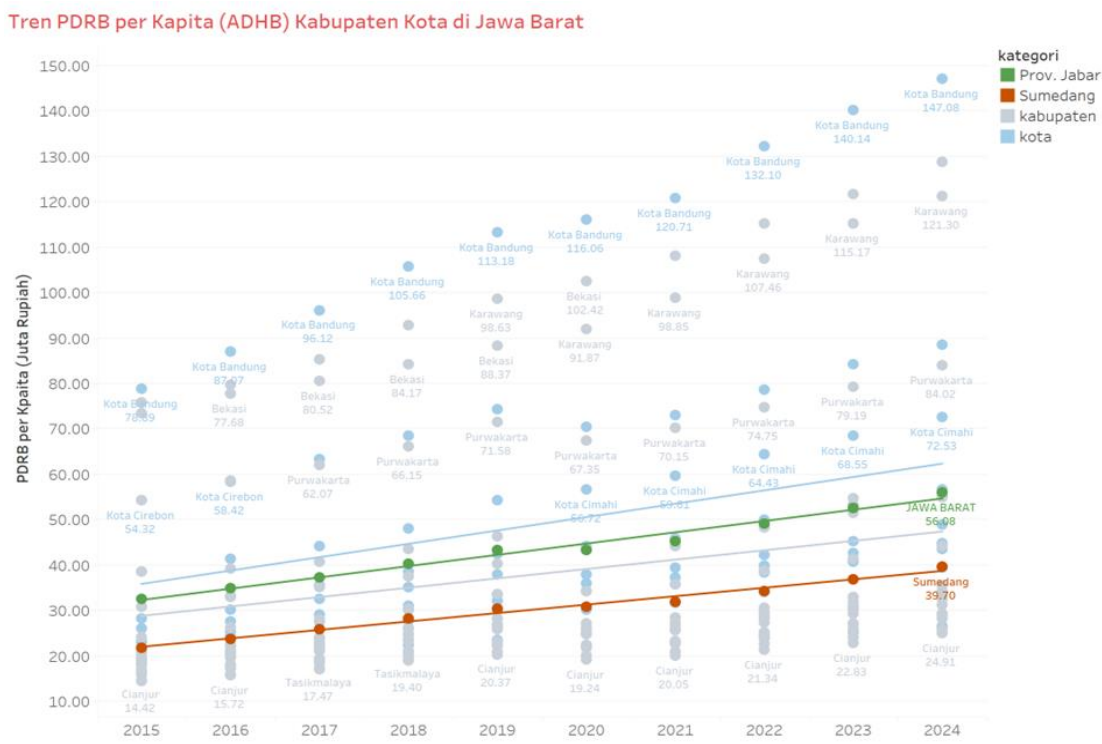
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 19.32% dari total PDRB, menjadikannya salah satu sektor terbesar. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi 19.27%, hampir sama dengan industri pengolahan. Perdagangan Besar dan Eceran berkontribusi sebesar 15.82%, menjadi sektor ketiga terbesar. Sektor yang Tumbuh Positif adalah Transportasi dan Pergudangan dimana mengalami pertumbuhan tertinggi (+11.28%), menunjukkan perkembangan aktif dalam logistik dan distribusi. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan signifikan (+8.39%), mencerminkan perhatian terhadap infrastruktur lingkungan. Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan (+6.97%), menunjukkan pentingnya investasi dalam pendidikan. Sektor seperti Real Estate, Jasa Lainnya, dan Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan positif, meskipun lebih rendah.

Sedangkan sektor yang mengalami kontraksi diantaranya adalah Industri Pengolahan: Mengalami kontraksi (-1.13%), menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur. Konstruksi mengalami kontraksi (-.43%), menunjukkan penurunan aktivitas pembangunan infrastruktur. Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi paling besar (-5.59%).

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.41 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Secara keseluruhan, PDRB per kapita di Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2015 hingga 2024. Kota seperti Bandung, Bekasi, Karawang, dan Cimahi memiliki PDRB per kapita tertinggi, sementara kabupaten seperti Tasikmalaya, Cianjur, dan Sumedang memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah. Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan stabil, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan beberapa kota besar seperti Bandung atau Bekasi. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumedang tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp 56,08 juta pada 2024).

Kabupaten Sumedang terus berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat selama periode analisis. Meskipun mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhan Kabupaten Sumedang lebih lambat dibandingkan beberapa kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang. Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang stabil, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian dan perdagangan, tetapi kurangnya diversifikasi ekonomi dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi tantangan utama. Kabupaten Sumedang memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan

infrastruktur, dan investasi dalam sektor modern seperti teknologi informasi dan pariwisata.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Penerapan **ekonomi hijau dalam pembangunan** berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan kegiatan ekonomi, agar pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Aspek kunci dan ruang lingkup ekonomi hijau yaitu

- menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment).
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon
- Meningkatkan daya dukung SDA dan Lingkungan Hidup

Selain meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek Ekonomi Hijau juga melindungi kesejahteraan untuk jangka panjang.

Konsep Pembangunan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia adalah bahwa Indeks Ekonomi Hijau dikembangkan berdasarkan PRK dengan mengadopsi konsep pembangunan Ekonomi Hijau dengan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas data teknis untuk dapat diproyeksi untuk mendukung proses pengukuran yang berkelanjutan.

Indek Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, penurunan emisi GRK menjadi salah satu sasaran Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan penerapan Ekonomi hijau diintegrasikan sebagai salah satu goal, dan merupakan salah satu indikator makro pembangunan. Ekonomi Hijau merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi, dimana dengan melalui ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada **pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem laut. Ciri-ciri ekonomi biru:

- Pemanfaatan laut untuk perikanan, pariwisata, energi laut, dan bioteknologi laut
- Menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir
- Mengurangi pencemaran laut dan penangkapan ikan yang berlebihan
- Mendorong inovasi berbasis laut

2.1.3.4 Transformasi Digital

Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi di Kabupaten Sumedang telah dimulai secara massif pada saat pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang menuntut layanan public harus tetap berjalan sekalipun di masa pandemi. Pengembangan berbagai aplikasi layanan public dan pengembangan infrastruktur jaringan seperti fiber optic yang sudah sampai di 277 desa dan kelurahan se-kabupaten Sumedang ditunjang dukungan penuh dari Kepala Daerah menjadikan perubahan signifikan pada wajah transformasi digital di Kabupaten Sumedang.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Saat ini telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

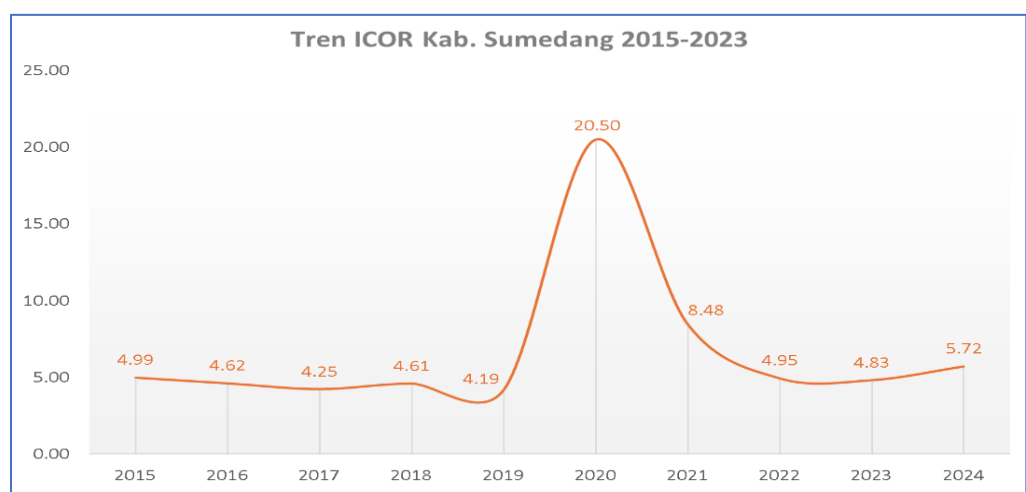
Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum

terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

Grafik 2.42 Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Nilai ICOR Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebesar 5,72 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dimana ICOR tahun 2023 sebesar 4,83. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 5,72 triliun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi. Terkait hal ini beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong investasi antara lain:

1. Meningkatkan Efisiensi Investasi
Pemerintah daerah perlu terus mendorong investasi yang lebih efisien dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan berpotensi tinggi untuk pertumbuhan.

2. Penguatan Infrastruktur.

Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, pengairan, dan digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

3. Diversifikasi Ekonomi

Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap guncangan eksternal.

4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat mendukung produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi investasi.

5. Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Sumedang dapat terus memperbaiki efisiensi investasi dan stabilitas ekonominya, serta membangun daya saing yang lebih kuat di masa mendatang.

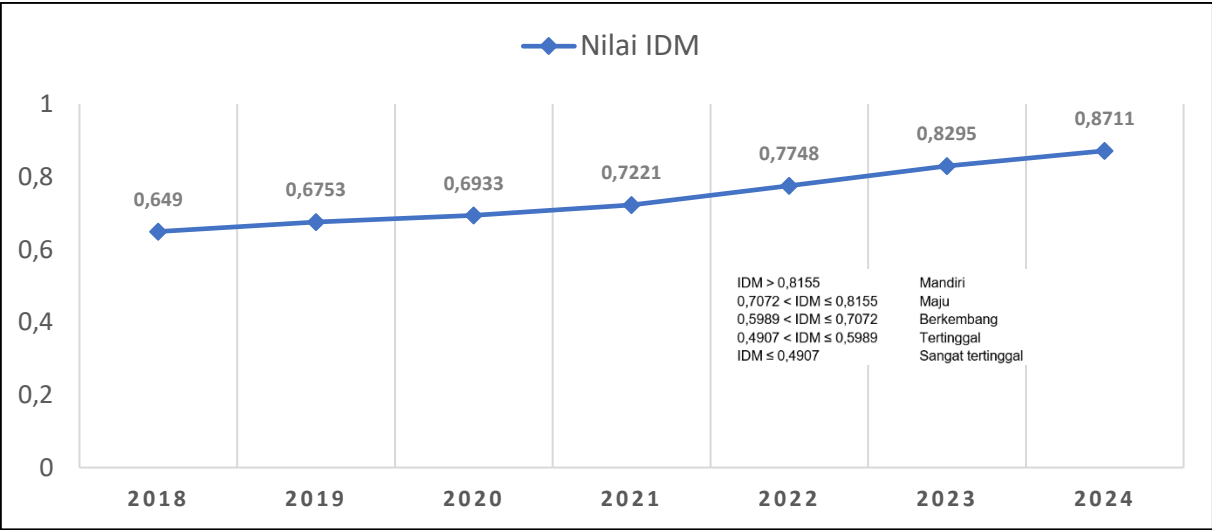
6. Selain dukungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung daya saing iklim investasi. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Terkait dengan Pembangunan Desa, salah satu indikator keberhasilan yang saat ini digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi

pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa.

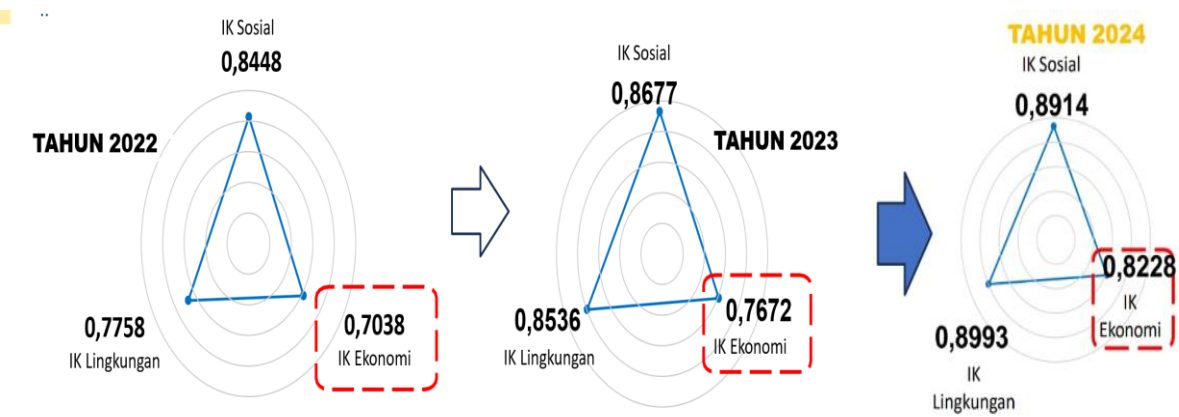
Grafik 2.43 IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024



Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang (2024)

Selama Tahun 2018-2020, IDM Provinsi Kabupaten Sumedang berada pada status berkembang, tetapi tahun pada 2021-2024 sudah mengalami kenaikan status menjadi maju dan pada tahun 2024 menjadi berstatus Mandiri dengan indeks sebesar 0,8711 meningkat dibanding tahun 2023 dari indeks sebesar 0,8295. Jika dilihat dari nilai IDM nya, Kabupaten Sumedang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Gambar 2.19 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024



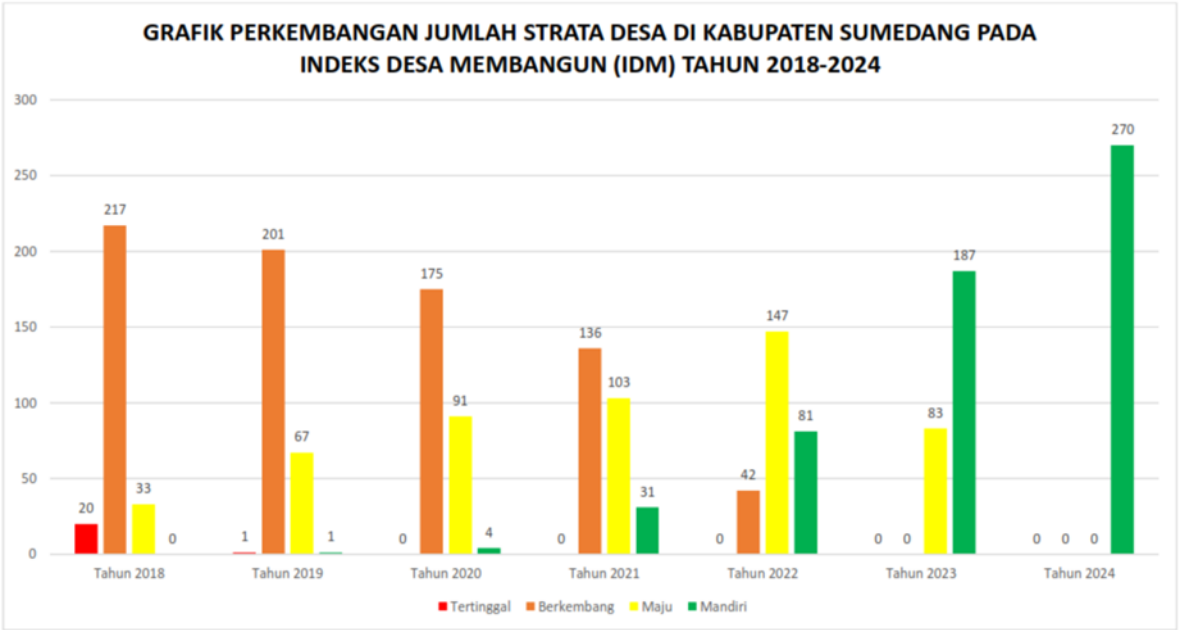
Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang (2025)

Dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2024 Kabupaten Sumedang memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Lingkungan

sebesar 0,8993, nilai Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8914, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,8228. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun stakeholders dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

Status Desa dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Desa tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Status desa di Kabupaten Sumedang terus meningkat, tergambarkan dengan tren positif terkait status desa. Sejak Tahun 2020 sudah tidak ada status Desa tertinggal di Kabupaten Sumedang didukung dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan berbagai faktor mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian dan peternakan, peningkatan layanan kesehatan, memperluas akses teknologi dan pusat informasi sampai peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan. Peningkatan status desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.44 Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024



Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah status desa berkembang dan desa maju terus mengalami penurunan yang diikuti dengan penambahan jumlah status desa mandiri. Tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa berkembang di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan status desa mandiri melalui : 1) peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan meliputi pemeliharaan dan

peningkatan jalan, memperluas jaringan air bersih, meningkatkan akses terhadap listrik; 2) peningkatan kualitas Pendidikan melalui pelatihan vokasi, program beasiswa dan meningkatkan fasilitas sekolah; 3) pengembangan ekonomi dan kewirausahaan dengan melakukan pengembangan berbagai sektor ekonomi baru, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta membantu pengusaha lokal, petani dan nelayan untuk mendapatkan akses pasar; 4) peningkatan layanan kesehatan dan penguatan tata kelola desa.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara berjalan secara seimbang dan berkelanjutan, tanpa gejolak besar yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan iklim investasi. Stabilitas ekonomi makro daerah bukan hanya tugas pemerintah provinsi atau kabupaten. Ia adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah daerah, Dunia usaha, Akademisi dan Masyarakat sipil

Dengan menjaga stabilitas ekonomi lokal, maka akan tercipta fondasi kuat untuk pertumbuhan inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.

Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro daerah :

1. Menjaga Daya Beli Masyarakat

Apabila harga-harga melonjak (terutama pangan dan energi), masyarakat paling bawah akan paling terdampak. Stabilitas harga berarti stabilitas sosial

2. Menarik Investasi

Daerah yang stabil secara ekonomi akan lebih dipercaya oleh investor lokal maupun asing.

3. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan

Tanpa ekonomi yang sehat, program pembangunan akan terhambat karena pendanaan dan daya dukung fiskal yang lemah.

Dalam konteks RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), stabilitas ekonomi makro menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap

dinamika nasional maupun global.Indikator Stabilitas Ekonomi Makro dalam RPJMD:

Tabel 2.19 Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator	Sasaran dalam RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	≥ rata-rata nasional
Tingkat Inflasi Daerah	2–4% (mengikuti target nasional)
Tingkat Kemiskinan	Menurun setiap tahun
Pengangguran Terbuka	<5% (d disesuaikan dengan baseline daerah)
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Berkelanjutan & efisien

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasiyang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokraasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas

birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengagendakan Reformasi Birokrasi mencakup 9 (Sembilan) program, yaitu:

1. Program Manajemen Perubahan;
2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Program Penguatan Pengawasan;
6. Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
8. Program Penataan Tata Laksana; dan
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih;
4. Terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin secara professional;
5. Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
6. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, serta berbasis e-government;
7. Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai;
8. Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mempertahankan opini WTP dari BPK;
9. Penerapan SAKIP dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua Perangkat Daerah, menyempurnakan integrasi perencanaan,

penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan Kepala Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi A; dan

10. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 89,65. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3 (3,395). Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya cukup baik sebesar 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2023 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	Keterangan
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	71,82	81,98	89,65	A (Kementerian PANRB)
2	Nilai SAKIP	Poin	76,15	77,16	77,44	Kategori BB (Kementerian PANRB)
3	Indeks Sistem Merit	Poin	343,5	348	348	Sangat Baik (KASN)
4	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	63,9	83,2	83,75	Meningkat (BKN)
5	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,66	4,19	4,58	Meningkat dibanding Tahun

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	Keterangan
						2023 (Kementerian PANRB)
6	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Poin	79,57	92,35	92,9	A (Ombudsman)
7	Maturitas SPIP	Poin	2,8	3,2	3,395	Kapabilitas APIP Level 3 (BPKP)
8	Nilai MCP KPK	Poin	95,45	91,5	91	Indikator penilaian tiap tahun berbeda

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan berbagai indikator tersebut di atas, tampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat Nasional. Sebuah capaian luar biasa, yang dapat diraih dalam tempo 4 (empat) tahun. Sebelumnya pada tahun 2018, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang terbawah di Jawa Barat. Salah satu contohnya, capaian SAKIP Kabupaten Sumedang 48,58 atau peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan publik di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2023 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan public yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A (opini Kualitas Tinggi). Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

Tabel 2.21 Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan Publik

HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN					
2022			2023		
NILAI	KATEGORI	OPINI	NILAI	KATEGORI	OPINI
79,57	B	KUALITAS TINGGI	92,35	A	KUAITAS TERTINGGI

NO	UNIT LAYANAN	NILAI 2022	NILAI 2023	KATEGORI	OPINI
1.	Dinas Sosial	87,44	91,68	A	Kualitas Tertinggi
2.	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan terpadu Satu Pintu	85,38	93,39	A	Kualitas Tertinggi
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,83	92,61	A	Kualitas Tertinggi
4.	Dinas Pendidikan	79,29	87,52	B	Kualitas Tinggi
5.	UPTD Puskesmas Ranap Situ	80,97	94,64	A	Kualitas Tertinggi
6.	UPTD Puskesmas Ranap Sumedang Selatan	64,53	94,24	A	Kualitas Tertinggi
	Rata-Rata	79,57	92,35	A	Kualitas Tertinggi

UPDATE HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Cimalaka	21.15	32.37	23.02	19.42	95.95
2	Puskesmas Sukamantri	20.53	32.37	23.07	19.42	95.38
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.97	32.37	22.32	19.95	94.60
4	Dinas Pendidikan	18.49	30.00	22.95	19.95	91.38
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.85	30.33	23.27	17.36	90.81
6	Dinas Sosial	17.12	29.48	23.27	19.42	89.29
Nilai Akhir dan Zona		92,90				
Kategori		A				
Opini		KUALITAS TERTINGGI				

Sumber: Ombudsman, 2024 (diolah)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumedang semakin baik berdasarkan hasil penilaian dari pengguna layanan.

Tabel 2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2019-2023				
2019	2020	2021	2022	2023
82,27	83,38	85,60	88,19	88,51

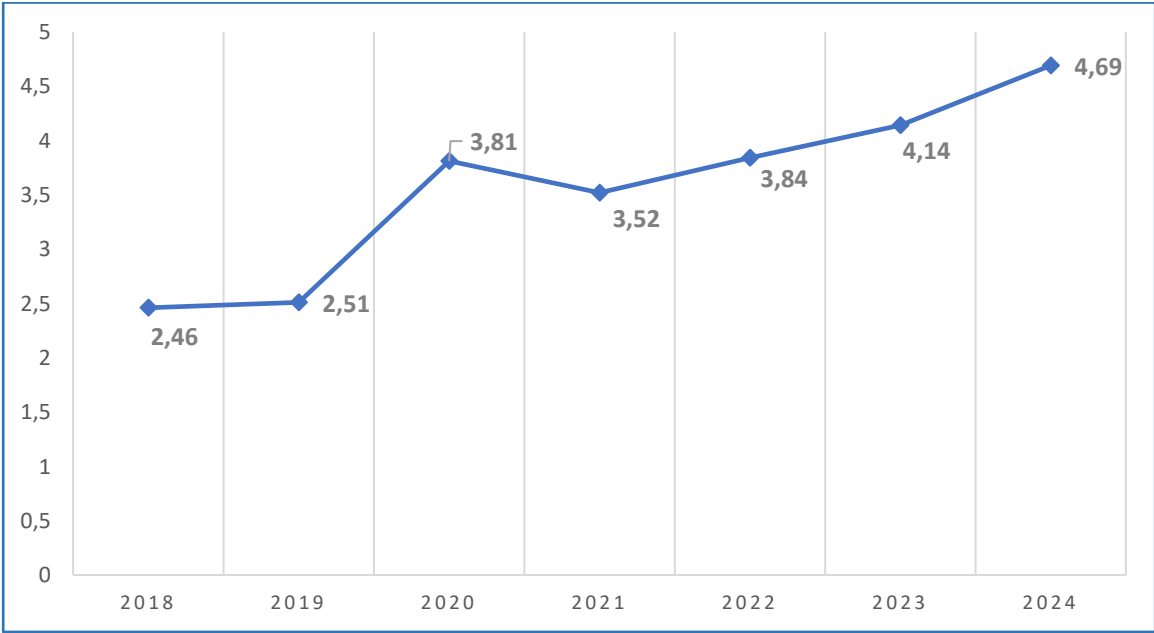
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
89,26 (A)	89,21 (A)	90,34 (A)	90,10 (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Sumedang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Berikut merupakan capaian nilai SPBE Kabupaten Sumedang tahun 2018-2024.

Grafik 2.45 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (2025)

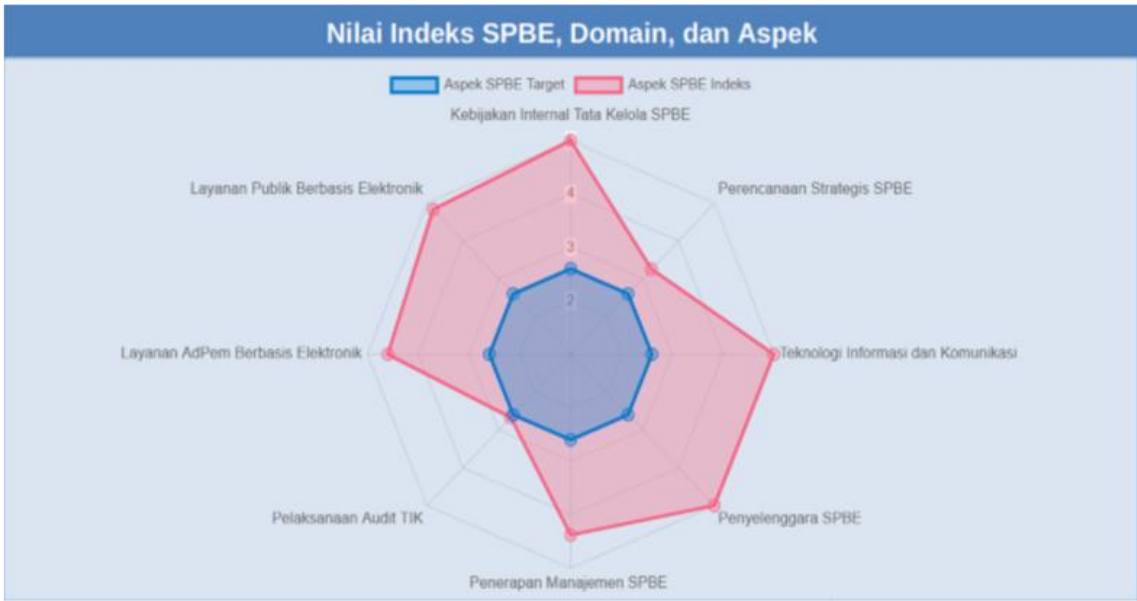
Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperoleh nilai per Domain dan Sub Domain sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Nilai Domain dan Sub Domain SPBE
Kabupaten Sumedang Tahun 2024**

Nama Indeks	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan internal Tata Kelola SPBE</i>	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	4,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	5,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5,00
Domain Manajemen SPBE	3,91
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	4,38
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,69
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025

Gambar 2.20 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025

Perolehan nilai tersebut berkat daya dukung berupa:

1. Telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah secara lengkap memuat berbagai komponen SPBE, Peraturan tersebut telah direview dan ditindak lanjuti;
2. Adanya dokumen lengkap peta Proses Bisnis pada aspek perencanaan strategis;

3. Adanya standar pengembangan aplikasi dan pemanfaatan sistem penghubung layanan pada aspek teknologi dan komunikasi;
4. Adanya kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan SPBE;
5. Terpenuhinya pelaksanaan audit dengan perangkat standar nasional;
6. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum Pusat secara optimal. Pemanfaatan tersebut telah direview dan ditindaklanjuti; dan
7. Tercapainya proses tahapan integrasi pada aspek layanan publik serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan Kabupaten.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indikator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2) Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait adanya keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede.

Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani tren nya menunjukkan ada kenaikan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 87 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 95 kasus yang tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.

Pananganan gangguan akibat anak jalanan, penanganan peredaran minuman beralkohol dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersil tetap menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani pada Tahun 2023. Berikut adalah tren Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani.

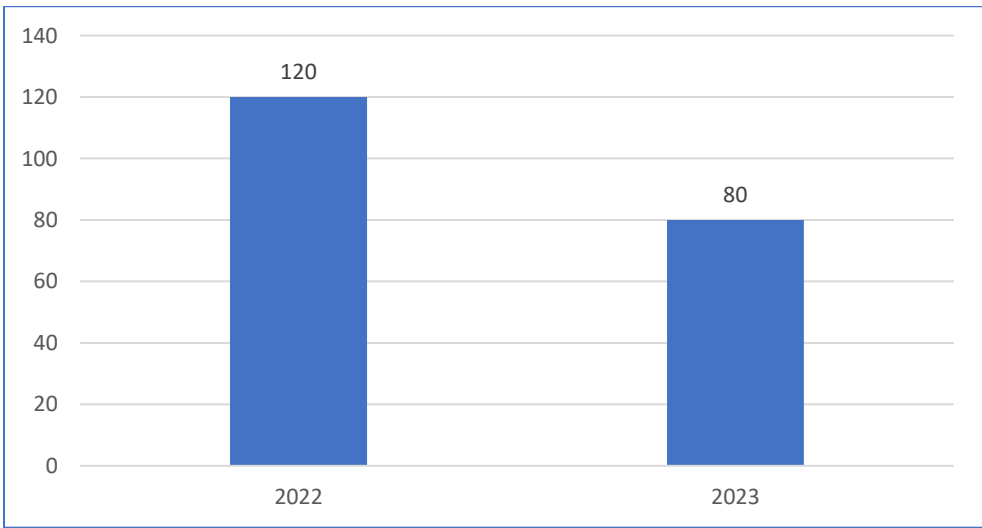
Grafik 2.46 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Selain itu maraknya kasus pelanggaran peredaran rokok ilegal pun menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sumedang. Adanya kasus peredaran rokok ilegal karena dipicu oleh harga rokok yang terus naik. Meskipun demikian propaganda Pemerintah “Gempur Peredaran Rokok Ilegal” berdampak pada jumlah kasus yang terjadi di Tahun 2023 yang turun menjadi 80 kasus dari 120 kasus di tahun sebelumnya. Satpol PP Kabupaten Sumedang berkoordinasi dengan Bea Cukai terus melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kecamatan Wado, Jatinunggal, Ujungjaya dan Cimanggung. Berikut adalah data kasus Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.47 Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Bardaya Gentar Kawasan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar 3,48 dari hasil pengukuran terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan pada table berikut. Dengan skor 3.92, Kabupaten Sumedang mencetak sejarah baru dalam pemeringkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 dengan berhasil menduduki peringkat ke-6 nasional sebagai salah satu kabupaten paling maju di Indonesia, melampaui berbagai daerah lain yang selama ini dikenal lebih unggul secara ekonomi.

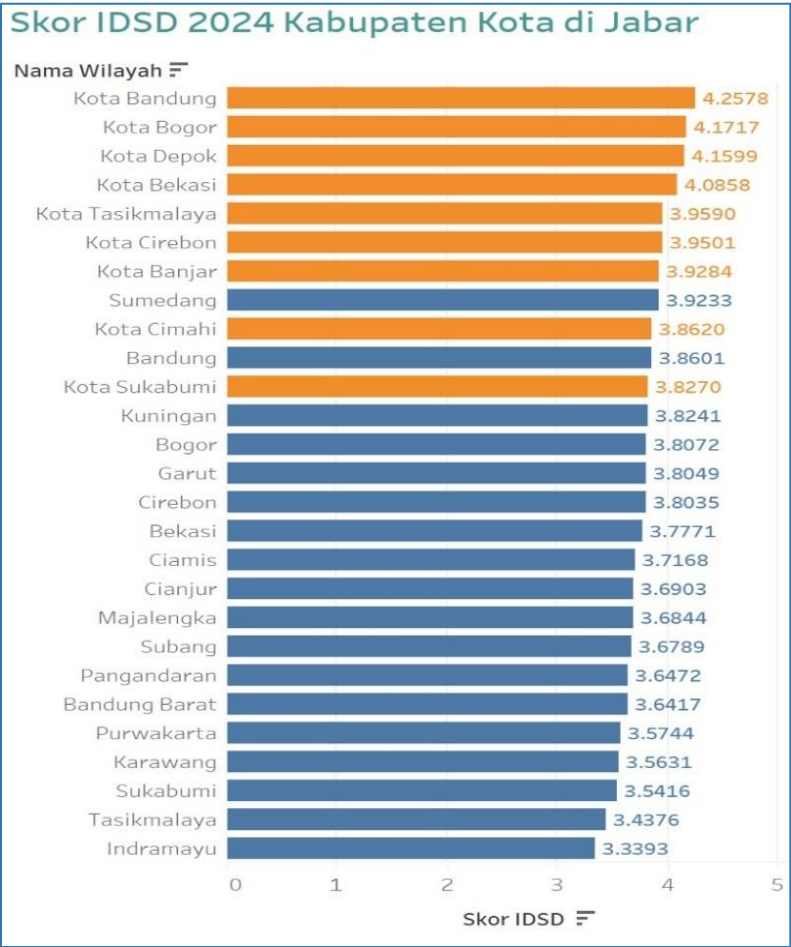
Prestasi ini menempatkan Sumedang dalam posisi strategis, sejajar dengan kabupaten progresif seperti Banyumas dan Semarang, serta lebih unggul dari daerah-daerah seperti Klaten, Sidoarjo, hingga Jombang. Lonjakan daya saing Sumedang didorong oleh peningkatan pesat dalam

beberapa pilar kunci seperti Dinamisme Bisnis, Pasar Produk, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Infrastruktur.

Kemajuan ini mencerminkan semakin kuatnya fondasi ekonomi Sumedang dalam menghadapi tantangan pembangunan serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong reformasi struktural, iklim usaha yang sehat, dan efisiensi pelayanan publik.

Posisi ini juga menempatkan Kabupaten Sumedang ada di Peringkat ke-1 diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-8 dibawah 7 (tujuh) kota yang ada di Jawa Barat.

Grafik 2.48 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BRIN, 2025

Dari 12 pilar utama yang dianalisis, kekuatan utama Kabupaten Sumedang terletak pada pilar dinamisasi bisnis, Adopsi TIK, Institusi, Ukuran Pasar, Pasar Produk serta Kesehatan.

Namun, di balik kekuatan tersebut, Sumedang juga menghadapi tantangan besar yang dapat menghambat peningkatan daya saing secara

menyeluruh. Pilar infrastruktur dan pasar tenaga kerja msih perlu terus didorong. Di samping itu, sektor keuangan juga menunjukkan kondisi masih lemah dengan skor 2.20, terutama karena terbatasnya akses pembiayaan untuk UMKM. Tantangan lainnya hadir dari sektor ketenagakerjaan, yang mencatat skor rendah dalam hal tingkat pengangguran terbuka dan kesulitan menemukan tenaga kerja terampil.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, beberapa rekomendasi strategis telah disusun. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan distribusi air bersih menjadi prioritas utama. Di sisi ekonomi, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas akses kredit bagi UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech, serta menyederhanakan birokrasi perizinan usaha. Selain itu, reformasi di sektor ketenagakerjaan juga perlu dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis industri, kemitraan dengan dunia usaha, dan program sertifikasi tenaga kerja. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di sektor publik dan ekonomi, serta pembangunan ekosistem inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis juga menjadi bagian penting dari strategi penguatan daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, Sumedang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, terutama melalui kekuatan digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang unggul. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah mampu mengatasi hambatan utama yang ada, terutama pada aspek infrastruktur, keuangan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta.

Tabel 2.24 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024

No	Komponen	Pilar	2022	2023	2024
1	Komponen Lingkungan Pendukung	Pilar 1: Institusi	4,45	4,58	4,62
		Pilar 2: Infrastruktur	2,11	2,37	3,58
		Pilar 3: Adopsi TIK	3,39	4,58	4,63
		Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	2,66	2,77	3,62
2	Komponen SDM	Pilar 5: Kesehatan	4,08	4,07	4,02
		Pilar 6: Keterampilan	3,00	3,24	3,67
3	Komponen Pasar	Pilar 7: Pasar Produk	3,35	3,35	4,41
		Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	2,57	2,72	2,86
		Pilar 9: Sistem Keuangan	3,34	2,60	2,20

No	Komponen	Pilar	2022	2023	2024
		Pilar 10: Ukuran Pasar	1,60	4,52	4,54
4	Komponen Ekosistem Inovasi	Pilar 11: Dinamisme Bisnis	5,00	3,20	5,00
		Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	3,84	3,79	3,92
	Nilai IDSD		3,28	3,48	3,92

Sumber : Indeks Daya Saing Daerah BRIN

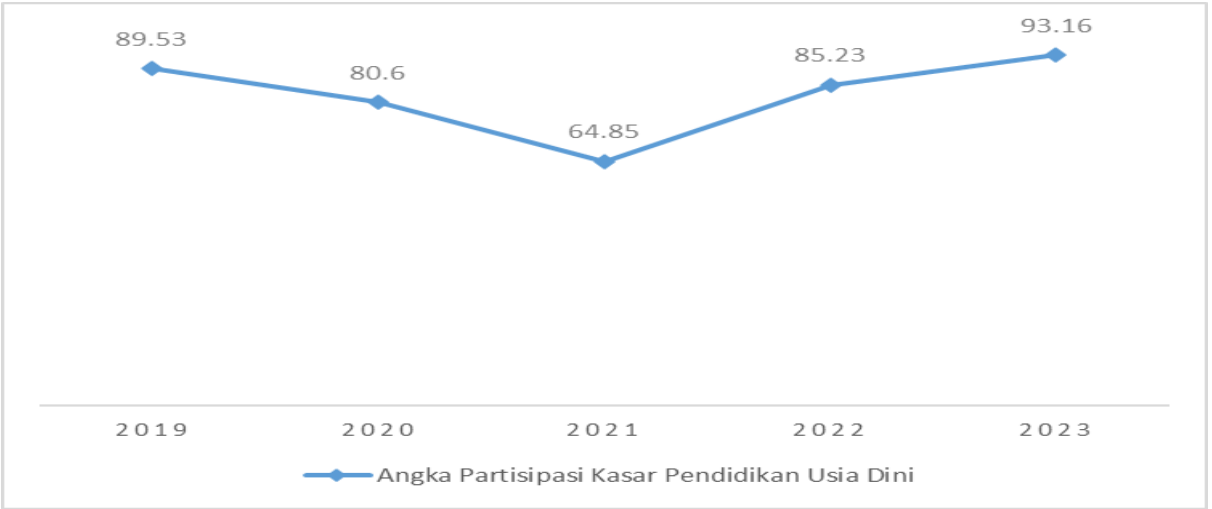
2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

1) Urusan Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam pengembangan potensi anak sejak dini. Sasarannya adalah anak usia dini 1 (satu) tahun pra SD/MI/ sederajat, yang artinya setiap anak usia 5–6 tahun wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6 tahun harus terlayani PAUD yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-6 tahun yang terdaftar di Lembaga PAUD formal maupun non formal (TK, KB, SPS dan TPA).

Pendidikan sangat menentukan perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial dan spiritual anak. Sehingga penyelenggaraan PAUD yang berkualitas memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi karakter dan kecerdasan anak. Cakupan layanan PAUD di Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap tahunnya. Begitu pun dengan capaian partisipasi PAUD-nya seperti yang tergambar pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.49 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (%)



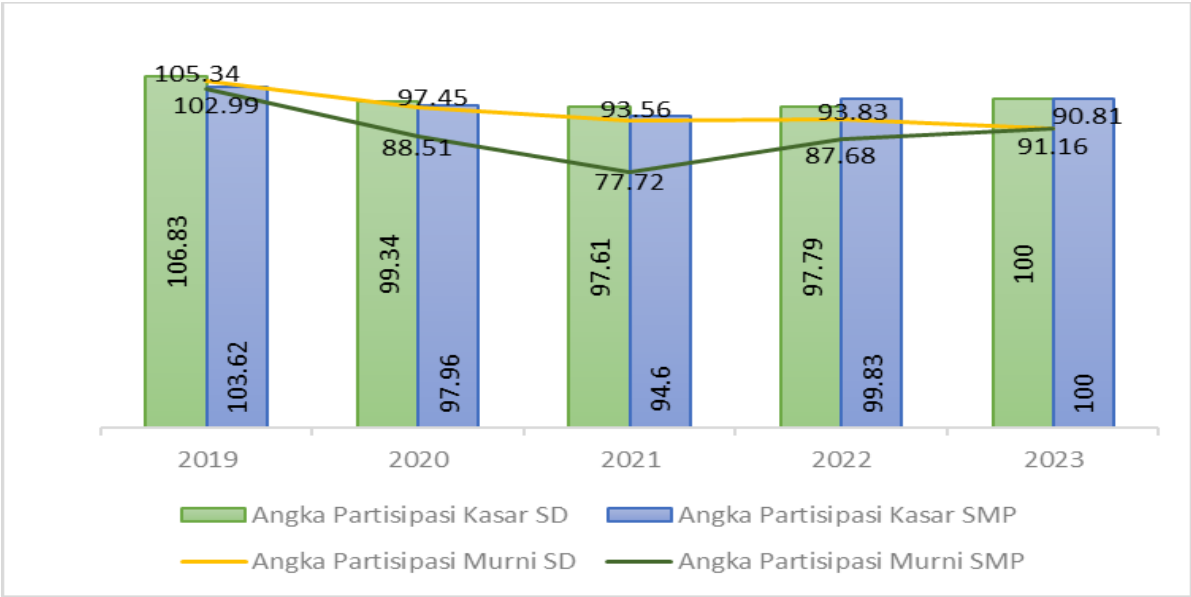
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan PAUD sangat fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2021 akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak mengikutsertakan anak yang berusia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD sehingga angka partisipasi PAUD hanya 64,85%. Namun, dengan semakin membaiknya kondisi pandemi terlihat adanya peningkatan tren angka partisipasi dan puncaknya pada Tahun 2023 APK PAUD mencapai 93,16%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan kognitif, sosial dan emosional anak, meningkatnya kualitas pendidikan, infrastruktur serta jumlah dan penyebaran lembaga PAUD yang lebih merata.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu 1) layanan pendidikan dasar SD/MI/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 7-12 tahun; dan 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan SMP/MTs/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan Pendidikan dasar. Pendidikan dasar tidak hanya berfungsi sebagai jembatan menuju jenjang pendidikan lebih tinggi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, berperilaku disiplin, dan beradaptasi dalam kehidupan sosial. Di Kabupaten Sumedang, pendidikan dasar menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka putus sekolah. Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari %tase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada grafik dibawah.

Grafik 2.50 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan APM salah satunya untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

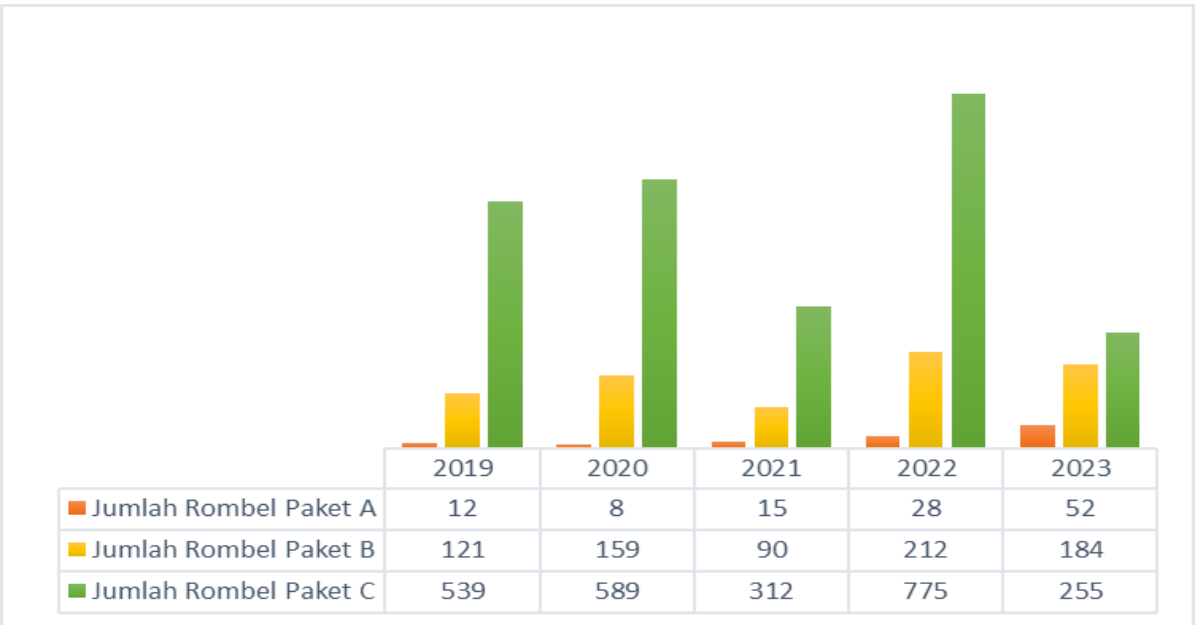
Berdasarkan grafik 2.29 diatas diketahui bahwa baik APK SD maupun SMP telah menunjukkan capaian 100% yang artinya semua anak dalam kelompok usia yang relevan dengan jenjang pendidikan (SD atau SMP) telah terdaftar dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Adapun untuk APM tingkat SD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 3,02% menjadi 90,81% salah satu penyebabnya adalah masih terdapat siswa dengan usia dibawah 7 (tujuh) tahun atau diatas 13 tahun yang bersekolah di tingkat SD serta adanya peserta didik yang berada di wilayah perbatasan yang bersekolah di luar Kabupaten atau dari Kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Sumedang.

Berbeda halnya dengan APM jenjang SMP yang mengalami peningkatan sebesar 3,48% dari tahun sebelumnya atau menjadi 91,16% di Tahun 2023. Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan tersebut diantaranya adalah adanya program-program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada siswa yang membutuhkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, serta meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia 16-21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi, geografis, dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui Pendidikan kesetaraan meliputi : 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket B (setara SMP); dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Berikut Rombongan Belajar untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang.

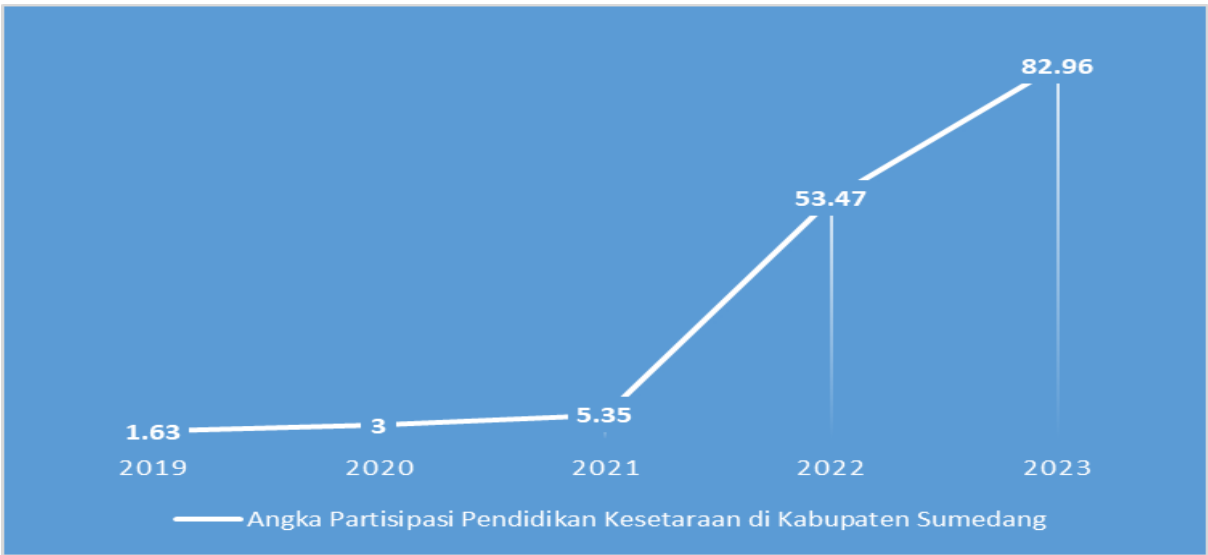
Grafik 2.51 Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan data diatas jumlah rombel baik paket A, B maupun c sangat fluktuatif. Diketahui Tahun 2023 jumlah rombel paket B dan C mengalami penurunan yang signifikan menjadi 184 rombel untuk paket B dari 212 rombel dan 255 rombel paket C dari 775 rombel di Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 1) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang akan diperoleh dari program pendidikan kesetaraan; 2) stigma negatif yang melekat pada pendidikan kesetaraan di masyarakat sehingga mengurangi minat untuk mengikuti program ini; 3) fasilitas dan sumber daya yang terbatas, seperti ruang kelas dan alat bantu ajar; serta masih rendahnya kualitas dan ketersediaan pengajar di wilayah-wilayah tertentu sehingga menghambat pembentukan rombel baru. Namun demikian peningkatan justru terjadi pada jumlah rombel paket A yang semula 28 rombel di Tahun 2022 menjadi 52 rombel di tahun 2023. Adanya dukungan Pemerintah Daerah berupa 1) fleksibilitas dan kemudahan akses dalam pendidikan kesetaraan seperti penawaran jadwal kelas yang fleksibel serta penggunaan teknologi yang memungkinkan peserta didik mengikuti pembelajaran jarak jauh; 2) kebijakan Pemerintah yang mengakui ijazah pendidikan kesetaraan setara dengan pendidikan formal; 3) adanya kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan Non Government Organization (NGO) dan organisasi sosial yang aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Dan hal ini berdampak pada tren angka partisipasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang yang terus mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan grafik berikut.

Grafik 2.52 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

Di era digitalisasi saat ini, kemampuan literasi dan numerasi menjadi kompetensi dasar yang esensial bagi peserta didik. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami informasi secara mendalam, sedangkan numerasi meliputi kemampuan memahami, menggunakan, dan menginterpretasikan angka dan data dalam konteks yang relevan dan bermakna. Indikator literasi dan numerasi menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui Asesmen Nasional (AN) telah menjadikan literasi membaca dan numerasi sebagai bagian penting dari pengukuran capaian pendidikan secara nasional. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Berikut target dan realisasi %tase siswa dengan kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Target dan Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target		Capaian	
		2022	2023	2022	2023
1.	Persentase siswa dengan kompetensi literasi	46,84	53,53	61,50	56,18
2.	Persentase siswa dengan kompetensi numerasi	26,77	30,11	41,69	49,4

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2024

2). Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

Pelayanan Kesehatan

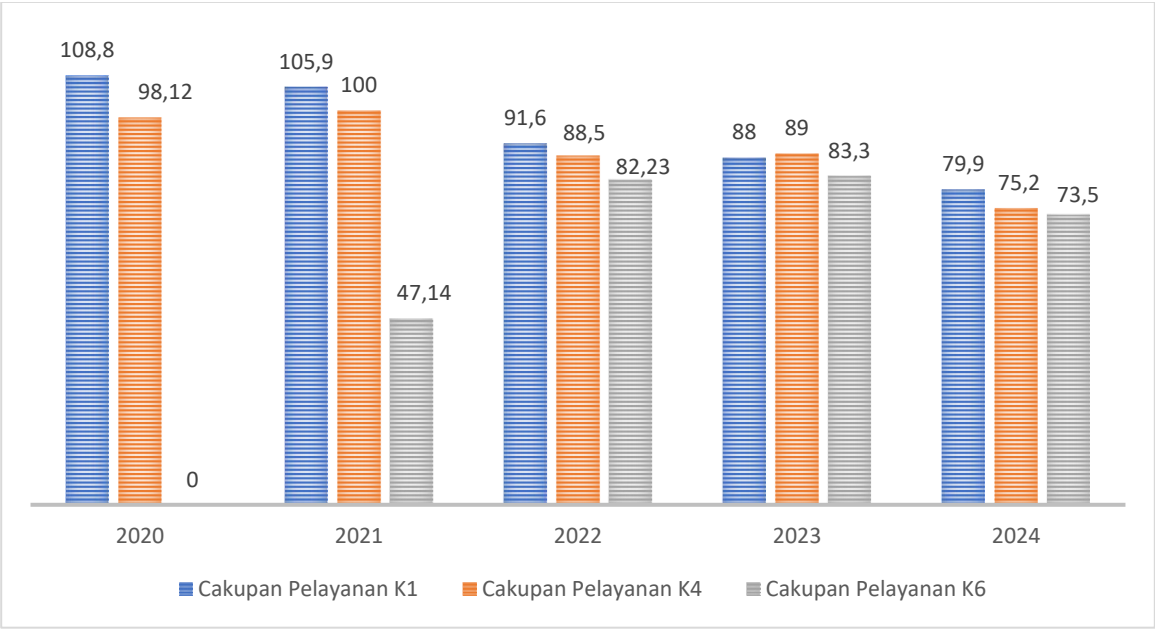
Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah serta menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan baik perorangan, keluarga, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang meliputi beberapa jenis pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) kali pemeriksaan kehamilan (ANC - *Antenatal Care*), yaitu 1 (satu) kali di trimester I, 2 (dua) kali di trimester II dan 3 (tiga) kali di trimester III dan pemeriksaan harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau perawat terlatih).

Pemantauan kesehatan ibu hamil dan kualitas pelayanan ANC dilakukan melalui pelayanan K1, K4 dan K6. Cakupan K1 berfungsi sebagai deteksi dan edukasi awal kehamilan, cakupan K4 merupakan pemantauan berkala kehamilan dan pemeriksaaannya minimal dilakukan 4 (empat) kali kunjungan ANC dan cakupan K6 merupakan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 (enam) kali kunjungan dengan tenaga kesehatan selama kehamilan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan ANC sesuai dengan standar Kemenkes RI tahun 2023. Cakupan pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.53 Cakupan Pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025)

Grafik diatas menunjukkan tren cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang terdiri dari kunjungan pertama (K1), kunjungan keempat (K4), dan kunjungan keenam (K6), selama periode tahun 2020 hingga 2024. Capaian cakupan pelayanan K1 ditahun 2020-2021 menunjukkan capaian kunjungan telah melebihi target, namun terus mengalami penurunan dan di Tahun 2024 capaiannya menjadi 79,9 %. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah menurunnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya pada trisemester pertama. Lain halnya dengan capaian cakupan pelayanan K4 yang sangat fluktuatif, dengan capaian terendah berada di tahun 2024 yaitu 75,2 %.

Kunjungan pelayanan K6 merupakan bagian dari kebijakan baru dalam pelayanan kesehatan ibu hamil yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih intensif pada ibu hamil terkait kesehatan kehamilan, gizi, tanda bahaya, dan persiapan persalinan. Sejak dimulai pencatatan data kunjungan K6 pada tahun 2021 sebesar 47,14 %, capaiannya terus mengalami peningkatan sebelum mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi 73,5 % dari 83,3 % di Tahun 2023.

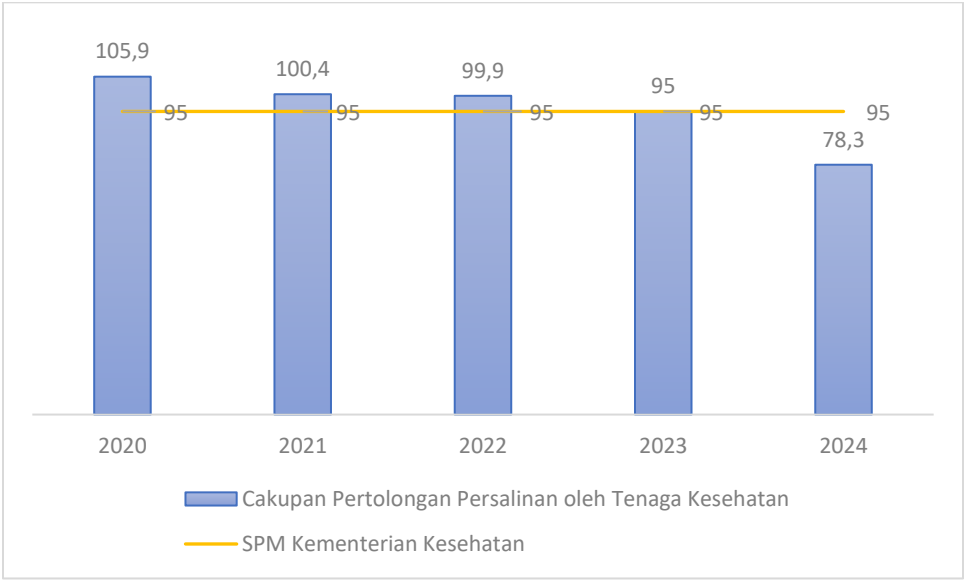
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin

persalinan yang aman, pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan kesehatan ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu 1) Pelayanan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan/perawat); dan 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan standar.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2022 terus mengalami penurunan. Bahkan pada Tahun 2024 terjadi penurunan tajam ke angka 78,3 % dan lebih rendah dari SPM Kemenkes RI yaitu 95 %. Hal ini menandakan adanya ketidaktercapaian dalam memenuhi standar nasional yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penguatan edukasi ibu hamil dan pelayanan kesehatan primer serta peningkatan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di daerah.

Grafik 2.54 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025)

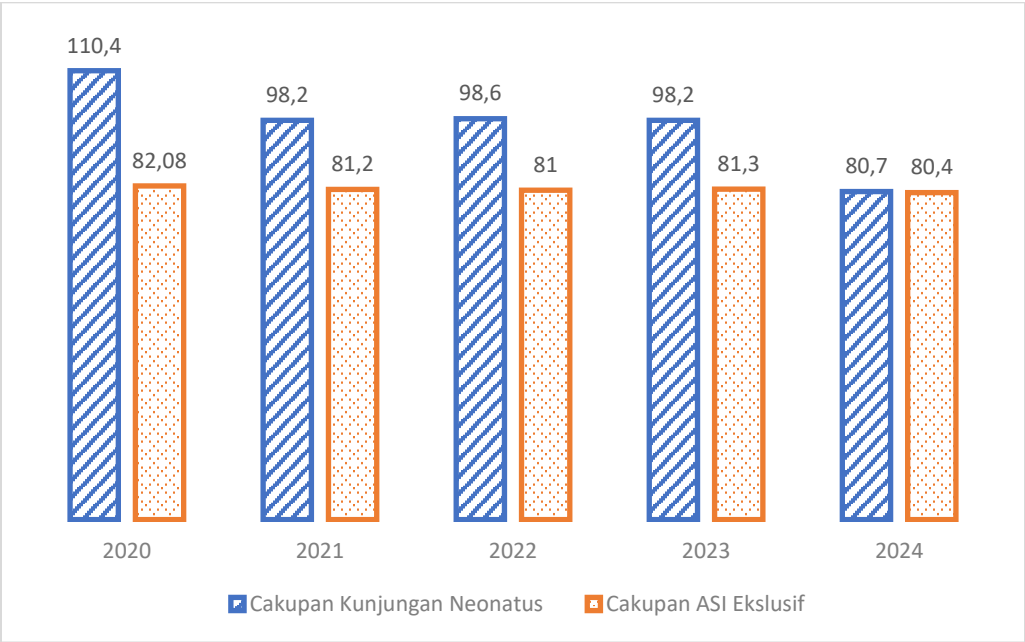
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan

ini merupakan salah satu Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam keadaan sehat dan bertahan hidup, deteksi dini kelainan atau gangguan, dan penanganan dini komplikasi neonatal, serta inisiasi menyusui dini ditandai dengan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 (enam) bulan.

Tren kunjungan neonatus di Kabupaten Sumedang cenderung lebih stabil dari tahun 2021, terdapat kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2024 tren kunjungan menurun cukup signifikan menjadi 80,7 % atau turun 17,5 % dari tahun sebelumnya, sehingga dapat diasumsikan penurunan ini sebagai bagian dari adanya penurunan akses atau kurangnya keterlibatan tenaga kesehatan dalam kunjungan neonatal. Lain halnya dengan pelayanan ASI eksklusif, dari Tahun 2020 tidak pernah mencapai 85 %. Tren nya stabil namun rendah hanya berkisar antara 80,4 % hingga 82,08 %. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam edukasi dan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif, sehingga perlunya intervensi lebih kuat dalam promosi dan dukungan pemberian ASI eksklusif pada bayi.

Grafik 2.55 Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024



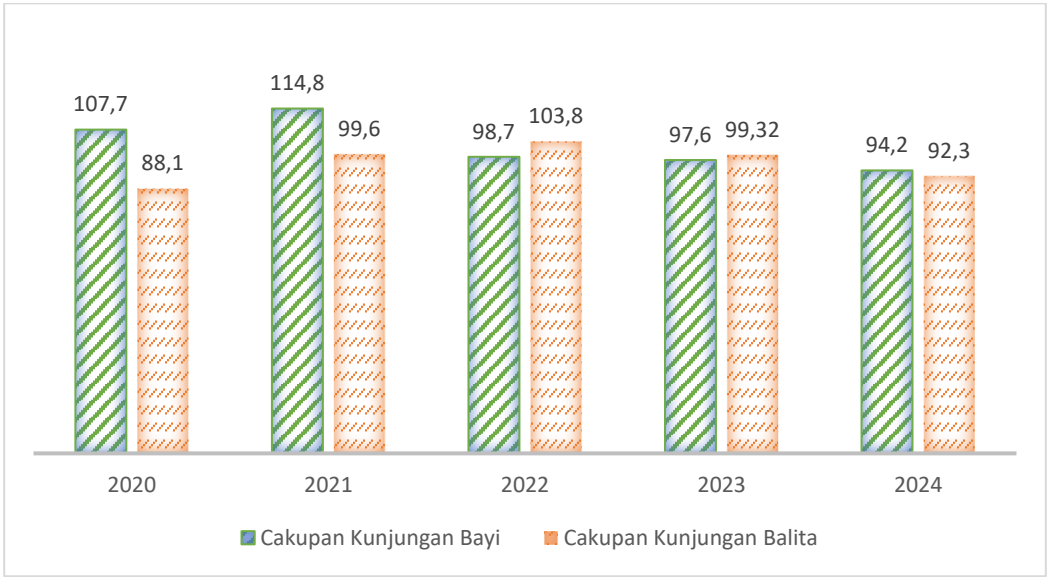
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita merupakan serangkaian upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk memastikan tumbuh kembang anak balita (usia 0–59 bulan) berlangsung secara optimal, sehat, dan bebas dari penyakit, serta untuk menurunkan

angka kesakitan dan kematian pada kelompok usia ini. Pelayanan ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini masalah gizi, tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian balita. Cakupan kunjungan bayi dan balita merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan balita yang dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pada kurun waktu tertentu. Berikut adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.56 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024 (%)



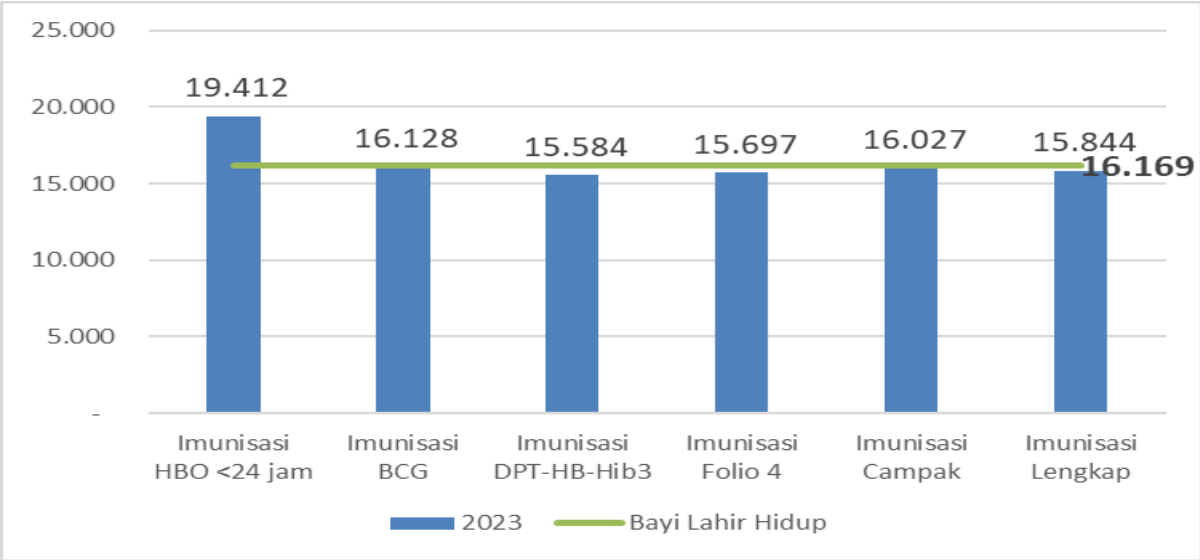
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan di tahun awal yaitu Tahun 2020-2021 untuk kedua kategori cakupan kunjungan. Namun dimulai tahun 2022 cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan yang cukup besar sampai 98,7 % dari cakupan 114,8 % ditahun sebelumnya. Lain halnya dengan cakupan kunjungan balita yang masih mengalami peningkatan di tahun 2022 namun diikuti penurunan di tahun-tahun selanjutnya. Bahkan ditahun 2024 cakupan kunjungan balita lebih rendah dibanding dengan cakupan kunjungan bayi dengan selisih 1,9 %. Faktor potensial penyebab penurunan ini adalah adanya penurunan minat masyarakat terhadap kunjungan rutin, sehingga perlunya peningkatan peran kader atau tenaga kesehatan untuk melakukan kunjungan rumah dalam rangka memastikan kedua kategori cakupan tersebut mengalami peningkatan kembali.

Imunisasi merupakan bentuk pelayanan kesehatan balita lainnya. Tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk melindungi bayi dan balita dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi yang diberikan

pada bayi berupa imunisasi Hepatitis-B0 dengan 2 (dua) kategori pemberian imunisasi yaitu untuk bayi baru lahir kurang dari 24 jam dan bayi berumur 1-7 hari. Namun Imunisasi HBO biasanya segera dilakukan setelah bayi lahir, sehingga tidak ada bayi yang diimunisasi pada umur 1-7 hari. Imunisasi lainnya yang diberikan adalah BCG, DPT -HB-HiB 3, Polio 4 dan Campak Rubela. Dari 16.169 bayi lahir hidup, terdapat 15.844 bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau sebanyak 99%.

Grafik 2.57 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh Tahun 2023

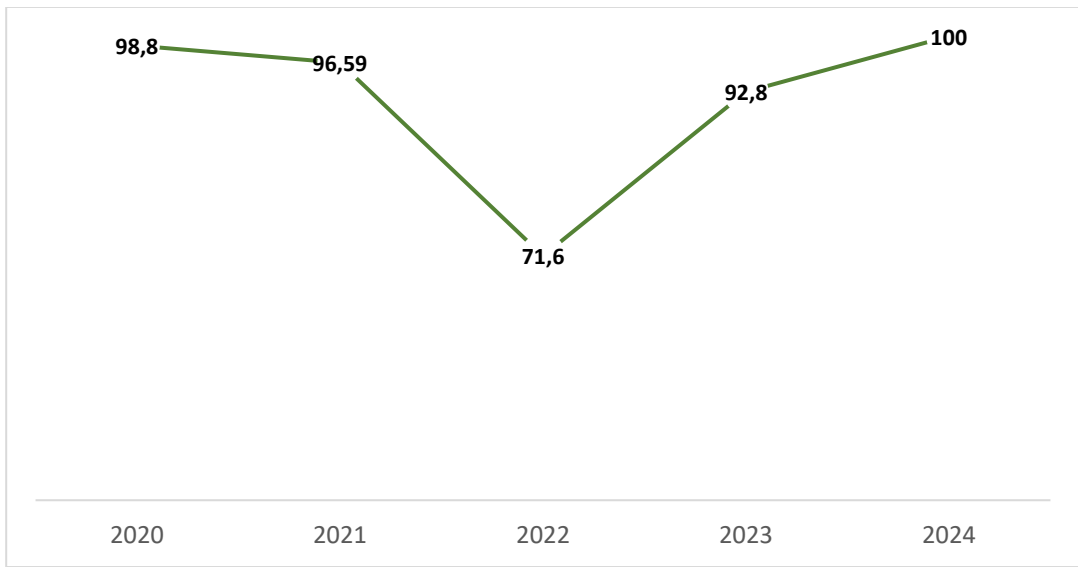


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara rentang usia 6-15 Tahun. Sasaran dari pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkaran kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak. Berikut adalah tren cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan grafik di atas cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Cakupan pelayanan terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 71,4 %. Akan tetapi di tahun 2023 meningkat menjadi 92,8 % dan bahkan di tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 100 %. Peningkatan ini terjadi karena telah optimalnya pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka serta tidak lepas dari peningkatan kolaborasi antar sektor dalam mengupayakan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining kesehatan. Tujuan dari pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental, mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat dilakukan di Puskesmas dan di sekolah atau di tempat kerja dengan jenis pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan fisik, deteksi penyakit dini, edukasi kesehatan reproduksi dan skrining kesehatan. Berikut adalah Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.26 Jumlah Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Jenis Kelamin	Pelayanan Kesehatan	Beresiko
Tahun 2022		
Laki-laki	52.024	83
Perempuan	62.586	318
Tahun 2023		
Laki-laki	251.985	167.214
Perempuan	253.185	176.809
Tahun 2024		
Laki-laki	206.945	182.265
Perempuan	206.984	122.765

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima pelayanan kesehatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2023 baik laki-laki (menjadi 251.985 dari 52.024 tahun 2022) maupun perempuan (253.185 dari 62.586 tahun 2022) peningkatan ini diindikasikan terjadi karena adanya perluasan perluasan skrining kesehatan oleh pemerintah, meskipun di tahun 2024 terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan kesehatan usia produktif pada laki-laki dan perempuan, terjadi lonjakan jumlah kasus berisiko di tahun 2023. Akibat dari adanya perluasan skrining kesehatan sebanyak 167.214 orang laki-laki dan 176.809 orang terdeteksi berisiko. Dan untuk pelayanan kesehatan usia produktif berjenis kelamin laki-laki terus meningkat sampai di tahun 2024 menjadi 182.265 orang, yang artinya hampir 90 % yang dilayani masuk ke dalam kategori berisiko. Lain halnya dengan pelayanan kesehatan usia produktif berjenis kelamin perempuan yang mengalami penurunan walaupun kecil menjadi 122.765 orang, namun jumlah tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan yang diberikan. Ini menunjukkan pentingnya intervensi kesehatan yang lebih spesifik dan intensif untuk usia produktif, terutama pencegahan penyakit tidak menular (PTM), kesehatan mental dan perilaku gaya hidup menuju gaya hidup lebih sehat.

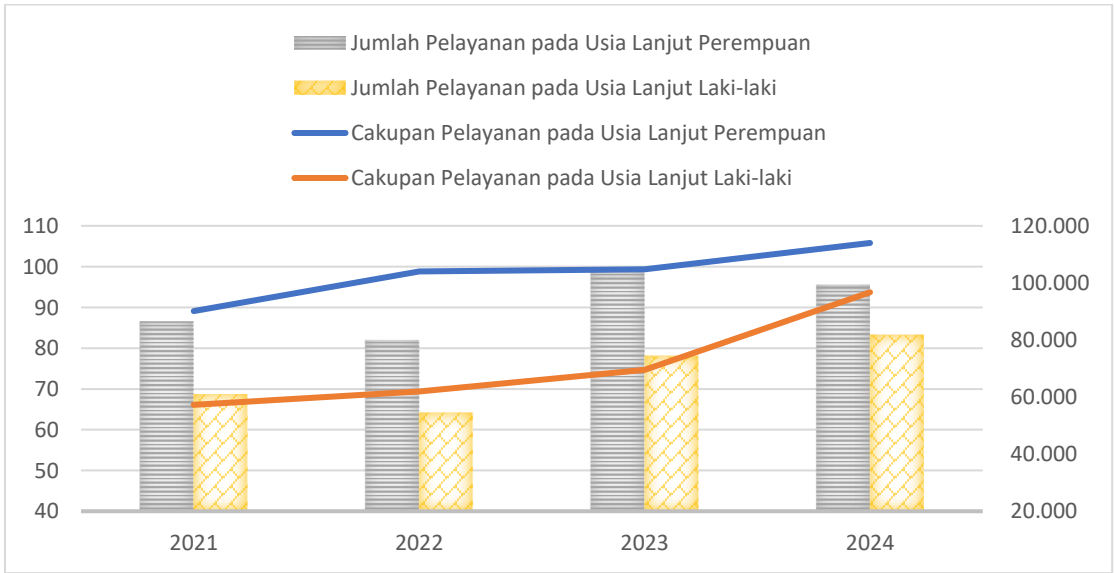
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Jumlah pelayanan kesehatan pada penduduk usia lanjut terus meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua jenis kelamin. Meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan, diasumsikan penurunan jumlah pelayanan ini dipengaruhi oleh kondisi pasca-pandemi. Tren jumlah pelayanan yang terus meningkat untuk kedua jenis kelamin dari tahun 2023-2024 menunjukkan adanya perbaikan akses dan jangkauan layanan. Namun tetap lansia perempuan menjadi kelompok yang lebih terjangkau oleh pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.

Untuk cakupan pelayanan usia lanjut, pelayanan untuk jenis kelamin perempuan secara konsisten memiliki cakupan lebih tinggi dibanding laki-laki setiap tahunnya, bahkan di tahun 2024 melampaui 100 %. Cakupan pelayanan untuk jenis kelamin laki-laki mengalami kenaikan signifikan dari 68% (tahun 2022) menjadi 93,7 % (tahun 2024), ini menunjukkan keberhasilan intervensi atau program yang lebih inklusif terhadap kelompok laki-laki, seperti yang disajikan pada grafik berikut.

Grafik. 2.59 Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

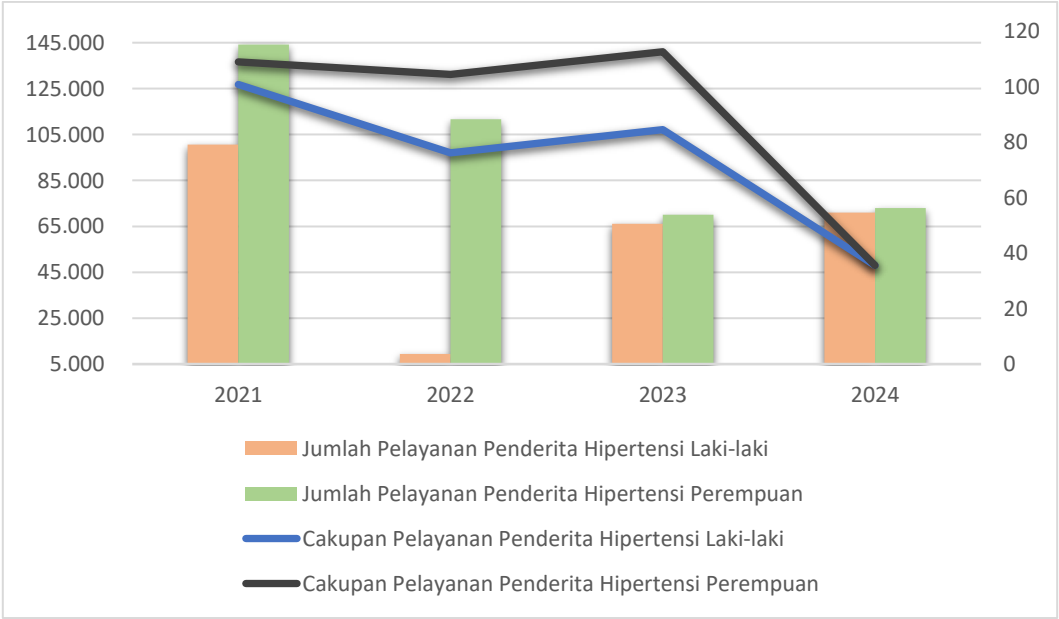


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk menekan angka komplikasi akibat hipertensi, mengendalikan tekanan darah penderita dan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas Masyarakat. Grafik di bawah ini adalah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.60. Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Jumlah pelayanan pada penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang didominasi oleh pelayanan hipertensi pada perempuan. Meskipun terjadi penurunan namun jumlah pelayanannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan pada penderita laki-laki dengan jumlah pelayanan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 144.236 orang. Sedangkan untuk pelayanan hipertensi pada laki-laki sempat menurun di tahun 2022 dengan jumlah pelayanan kurang dari 10.000 orang, dan berangsur mengalami peningkatan di tahun 2023-2024 namun tidak kembali ke level awal. Begitu pun dengan cakupan pelayanan penderita hipertensi. Naik turunnya cakupan pelayanan hipertensi berbanding lurus dengan penurunan jumlah pelayanan hipertensi yang dilakukan, dengan besar cakupan pelayanan penderita hipertensi pada perempuan selalu lebih tinggi

dibandingkan dengan cakupan pelayanan penderita hipertensi pada laki-laki.

Jika dilihat dari grafik diatas, penurunan cakupan pelayanan hipertensi baik pada perempuan ataupun laki-laki terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2024. Diasumsikan penurunan cakupan pelayanan hipertensi pada tahun 2022 dipicu oleh dampak pandemi COVID-19. Adapun untuk cakupan pelayanan hipertensi terrendah terjadi di tahun 2024 (35,58 % untuk perempuan dan laki-laki) padahal terjadi peningkatan jumlah pelayanan hipertensi (70.978 orang laki-laki dan 71.959 orang perempuan). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memberikan pelayanan yang cukup bagi semua penderita hipertensi, karena bisa saja pertumbuhan populasi penderita hipertensi yang lebih cepat daripada peningkatan jumlah pelayanan, mengakibatkan ketidakmampuan sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan karena banyaknya pasien.

Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*

Diabetes Melitus disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita *diabetes melitus* adalah penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah terdiagnosis menderita *Diabetes Melitus* Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke *diabetes melitus*. melalui pelayanan. Pencapaian program pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) Tahun 2024 mencapai 23.184 jiwa atau 100% dari total penderita sebanyak 23.184 jiwa. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024.

Tabel 2.27 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penderita DM	64.920	62.100	20.443	23.184
Penderita DM Dilayani	62.409	61.143	20.008	23.184
Persentase Terlayani	96,1	98,5	98,26%	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DM setiap tahunnya terus mengalami penurunan, yang artinya Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan kesehatan yang memadai seperti pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi dalam upaya

penurunan penderita. Bahkan di tahun 2024 seluruh penderita DM telah menerima pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) termasuk didalamnya psikotik akut dan *skizofrenia* merupakan jenis pelayanan yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan holistik, sebagai salah satu upaya pencegahan sekunder. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melaporkan jumlah sasaran ODGJ Tahun 2023 sebanyak 1.631 orang atau meningkat 17 orang dari tahun sebelumnya, dengan jumlah penderita ODGJ yang terlayani di tahun 2023 sebanyak 1.592 orang atau 97,6 % dari target 100 %.

Belum optimalnya pelayanan penderita ODGJ disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi yaitu 1) perlunya peningkatan kapasitas pengetahuan dokter dan petugas kesehatan jiwa di Puskesmas; 2) belum semua kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM); 3) belum tersedianya ruang khusus untuk kasus ODGJ di Rumah Sakit sehingga kasus ODGJ lebih banyak dirujuk ke RS khusus orang dengan gangguan jiwa. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.28 Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Sasaran ODGJ	1.665	1.614	1631
Penderita ODGJ Dilayani	1.331	1.585	1.592
Persentase Terlayani	80,4	98,2	97,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Disamping pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, derajat kesehatan keluarga pun harus diukur dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keluarga berperan dalam memenuhi standar hidup sehat sehingga mempermudah intervensi program kesehatan yang berbasis keluarga serta mendorong peran aktif kader dan petugas kesehatan dalam pendataan dan promosi kesehatan keluarga. Salah satu cara untuk mengukur derajat kesehatan keluarga adalah dengan mengukur Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Besaran Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS) diukur berdasarkan skor komposit dari 12 indikator kesehatan keluarga yang meliputi 1)

Keluarga mengikuti program KB; 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi lengkap; 4) Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan; 5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita TB paru mendapat pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan rutin; 8) Penderita gangguan jiwa berat mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak merokok; 10) Keluarga memiliki akses air bersih; 11) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat; dan 12) Keluarga menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Adapun kategori standar IKS adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29 Kategori Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Nilai IKS (%)	Kategori	Keterangan
< 50	Tidak sehat	Kurang dari setengah indikator terpenuhi
50 – 79,9	Pra sehat	Sebagian besar indikator terpenuhi
≥ 80	Sehat	Sebagian besar hingga seluruh indikator terpenuhi

Sumber: Permenkes Nomor 39 Tahun 2016

Nilai IKS Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 0,179 poin yang menunjukkan skor komposit dari penilaian seluruh indikator IKS. Jika dikonversi dalam bentuk persen maka nilai IKS Sumedang hanya 17,9 %. yang artinya nilai hanya sekitar 17,9 % saja dari keseluruhan indikator yang telah dipenuhi. Dengan demikian IKS Kabupaten Sumedang masih termasuk ke dalam kategori tidak sehat karena nilainya kurang dari 50%, sehingga menunjukkan bahwa keluarga belum memenuhi standar perilaku dan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan atau dengan kata lain banyak indikator IKS yang masih perlu diperbaiki agar kategori tahun berikutnya dapat meningkat. Berikut adalah capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024.

Tabel 2.30 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

Uraian	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (IKS) (poin)	0,179	0,179

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah terus melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan difokuskan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai strategi diterapkan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, antara lain sebagai berikut :

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi 1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama serta dokter dan bidan praktek mandiri; 2) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit umum, klinik utama; 3) fasilitas pelayanan non rujukan seperti posyandu, poskesdes, puskesmas keliling dan lain-lain. Berikut adalah jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum	3
Puskesmas Rawat Inap	17
Puskesmas Non Rawat Inap	18
Puskesmas Pembantu	65
Klinik Pratama	82
Klinik Utama	11
Tempat Praktek Mandiri Dokter	91
Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi	27
Tempat Praktek Mandiri Dokter Spesialis	0
Tempat Praktek Mandiri Bidan	419
Tempat Praktek Mandiri Perawat	3
Laboratorium Kesehatan	4

Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
Unit Transfusi Darah	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Berikut adalah daftar fasilitas kesehatan yang tersebar di Kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke kecamatan.

Tabel 2.22 Daftar Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Satuan	Fasilitas Kesehatan				
			Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Pustu	Klinik Mandiri	Apotek
1	Buahdua	Jumlah	1	1	6	2	5
2	Cibugel		1		2		1
3	Cimalaka		1		3	2	13
4	Cimanggung			2	1	14	14
5	Cisarua			1	2		2
6	Cisitu		1		3		2
7	Conggeang		1		3		3
8	Darmaraja		1		1	2	7
9	Ganeas			1	2	1	4
10	Jatigede		1		4		
11	Jatinangor		1	1	1	17	23
12	Jatinunggal		1		4	3	7
13	Pamulihan			2	3		5
14	Paseh			1	3	2	7
15	Rancakalong			1	2	3	2
16	Situraja			1	5	2	7
17	Sukasari			1	1	3	
18	Sumedang Selatan			2	2	14	25

No	Kecamatan	Satuan	Fasilitas Kesehatan				
			Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Pustu	Klinik Mandiri	Apotek
19	Sumedang Selatan		2	1	2	13	28
20	Surian		1		1		
21	Tanjungkert		1	1	1	4	5
22	Tanjungmedar			1	3		2
23	Tanjungsari		1	1	2	8	17
24	Tomo		1		3	1	
25	Ujungjaya		1		2	1	4
26	Wado		1		3	2	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, tersebar merata, dan memiliki kompetensi yang sesuai sangat menentukan keberhasilan sistem kesehatan, baik di tingkat fasilitas pelayanan dasar hingga rujukan. Dalam upaya memenuhi standar SDM kesehatan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kompetensinya dilakukan berbagai macam pembinaan dan pelatihan bidang kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan yang telah dilatih dan dibina atau bahkan bersertifikat telah mencapai 310 orang di tahun 2024 atau bertambah 51 orang dari tahun sebelumnya dengan jenis pembinaan atau pelatihan yang diikuti sebanyak 9 (sembilan) pelatihan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah Dibina/Dilatih/Bersertifikat di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Data	Tahun	
		2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah Dilatih/Dibina/Bersertifikasi	259	310
2	Jenis Pelatihan/Pembinaan	5	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Data jumlah SDM bidang kesehatan menjadi landasan penting dalam perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pemetaan dan penguatan terhadap jumlah dan jenis SDM kesehatan yang tersedia. Berikut adalah jumlah SDM Kesehatan di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.34 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	
		Rumah Sakit	Puskesmas
1	Dokter / Dokter Layanan Primer	57	72
2	Dokter Spesialis	72	-

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	
		Rumah Sakit	Puskesmas
3	Dokter Gigi	3	26
4	Dokter Gigi Spesialis	2	-
5	Perawat	500	456
6	Bidan	872	682
7	Tenaga Kefarmasian	51	70
8	Tenaga Apoteker	30	-
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7	46
10	Tenaga Kesehatan Lingkungan	6	37
11	Tenaga Gizi	16	34
12	Ahli Teknologi Laboratorium Medik		42
Jumlah		1.661	1.465

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Fasyankes rujukan merupakan fasyankes yang memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada pasien yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fungsinya adalah memberikan pengobatan, dan perawatan lanjutan yang tidak bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama dan menyediakan tenaga kesehatan spesialis atau subspesialis. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan.

Rumah sakit umum merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) RSU dan terdapat penambahan jumlah di Tahun 2024 menjadi 5 (lima) RSU, yaitu RSUD Wira Hadikusumah Sumedang, RSU Pakuwon, RSU Harapan Keluarga, RSU Padjadjaran dan RSU Cimalaka. Penambahan jumlah RSU ini tentunya akan

berpengaruh juga terhadap penambahan jumlah tempat tidur yang merupakan salah satu indikator penting dalam kapasitas pelayanan. Jumlah tempat tidur yang memadai berpengaruh terhadap kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Tren jumlah tempat tidur RSUD di Kabupaten Sumedang dari tahun 2021-2023 cenderung stagnan dan sempat mengalami penurunan jumlah tempat tidur di tahun 2023 menjadi 556 tempat tidur. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah tempat tidur melonjak menjadi 889 unit, atau meningkat lebih dari 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya intervensi atau penguatan kapasitas layanan kesehatan, salah satunya adalah dengan penambahan jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Sumedang. Data Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.6 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Menurut WHO, idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki *ed to population ratio* 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rasio tempat tidur di Kabupaten Sumedang baru mencapai 0,73 per 1000 penduduk. Sehingga rasio ini masih berada di bawah standar WHO, yang artinya ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih kurang, dan

berisiko menyebabkan keterbatasan pelayanan rawat inap, terutama saat lonjakan kasus (seperti saat pandemi atau bencana).

Berikut adalah data ketersediaan tempat tidur di 5 (lima) rumah sakit umum yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.35 Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Nama Rumah Sakit	Ketersediaan Tempat Tidur
1	Rumah Sakit Umum Daerah	381
2	Rumah Sakit Pakuwon	126
3	Rumah Sakit Harapan Keluarga	63
4	RSU Padjadjaran	200
5	RSU Cimalaka	119
Jumlah		889

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

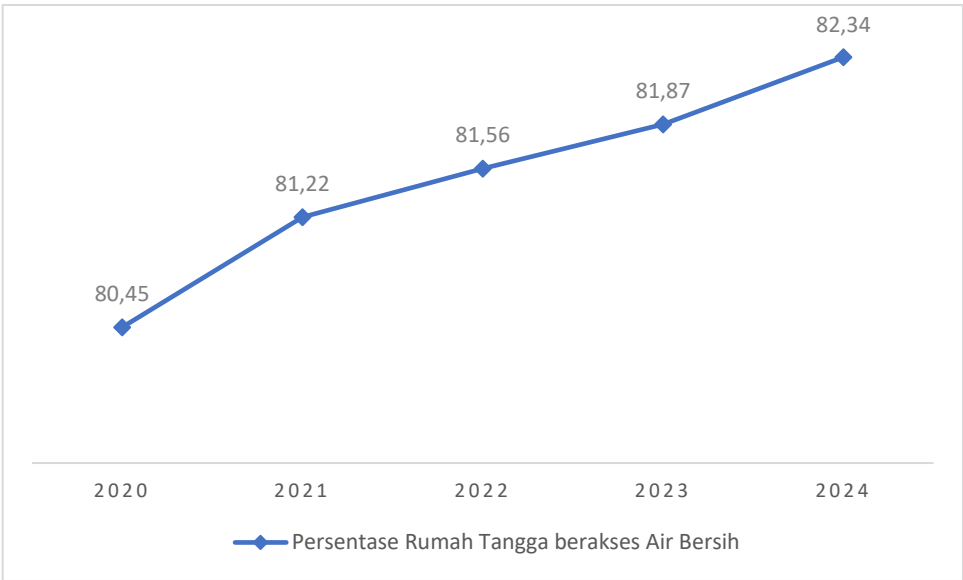
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar masyarakat serta penguatan daya saing wilayah. Kewenangan Kabupaten dalam urusan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten, irigasi, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, serta tata ruang wilayah.

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesehatan. Ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau setiap hari menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas hidup Masyarakat. Di tengah dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan iklim yang memengaruhi sumber daya air menjadi tantangan dalam penyediaan air minum yang layak. Pemantauan terhadap cakupan pelayanan air minum layak sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga dapat menikmati akses terhadap air bersih setiap hari.

Akses rumah tangga terhadap air bersih merupakan salah satu indikator dalam menilai kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Air bersih yang aman diminum idealnya adalah yang aman dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih dari bakteri serta mengandung sejumlah mineral. Berikut adalah Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Grafik 2.62 Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%) Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2025)

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan positif pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama periode lima tahun terakhir. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih terus meningkat setiap tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat namun stabil. Kenaikan rata-rata tahunan sekitar 0,5% menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam penyediaan infrastruktur air bersih melalui pembangunan infrastruktur jaringan distribusi air dan pengolahan air serta sosialisasi perilaku hidup bersih kepada masyarakat.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

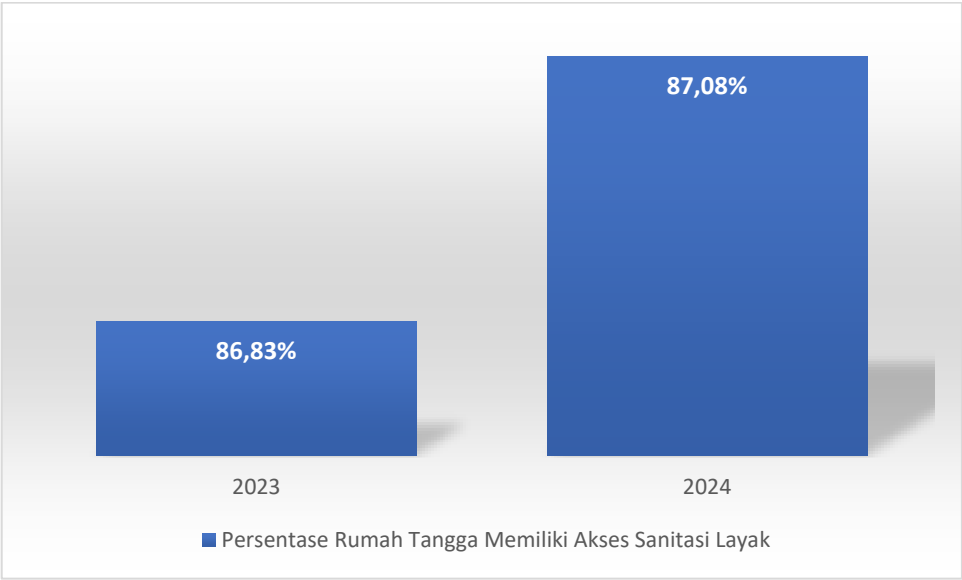
Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bersih. Air limbah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga, permukiman, fasilitas umum, dan komersial, dan umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu air limbah rumah tangga dan air limbah yang berasal dari kotoran manusia. Air limbah domestik ini Berpotensi mencemari air tanah dan permukaan, merusak ekosistem air serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat jika tidak diolah dengan benar, karena itu pengelolaan air limbah domestik sangat

penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat.

Penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik yang terintegrasi dan ramah lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan sistem sanitasi berbasis masyarakat atau rumah tangga bersanitasi. Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai jamban dan akses sanitasi yang layak.

Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%. Meskipun capaian belum mencapai target nasional, namun capaian rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Tahun 2024 capaian rumah tangga bersanitasi meningkat menjadi 87,08% atau naik 0,25 % dari tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan kenaikan yang relatif sangat kecil namun hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi lingkungan permukiman. Selain itu juga peningkatan program edukasi tentang sanitasi dan kebersihan serta pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi seperti jamban sehat pun terus terus ditingkatkan.

Grafik 2.63 Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2025)

Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2020 sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam

Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 (JKP-2), Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal (JLP), Jalan Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal (JLS) dan Jalan Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi menjadi jalan lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km serta penambahan ruas jalan sepanjang 7,000 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah - Cigumentang /Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung), 5,000 km;
2. Ruas Jalan Wado - Cikareo 0,500 km; dan
3. Ruas Jalan Jalan Cikawung - Darmaraja 1,500 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774,606 km menjadi 774,368 km. Pada Tahun 2024 panjang jalan Kabupaten mengalami penambahan menjadi 811.318 Km sebagai akibat dari adanya jalan strategis sehingga kewenangannya menjadi jalan kabupaten.

Berdasarkan kondisinya panjang jalan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi Jalan Baik	422.232	392.495	464.931	524.233	577.014
2	Kondisi Jalan Sedang	173.760	251.878	205.208	159.076	133.192
3	Kondisi Jalan Rusak Ringan	29.326	70.019	61.330	45.969	29.457
4	Kondisi Jalan Rusak Berat	149.050	59.976	42.900	45.090	71.655

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

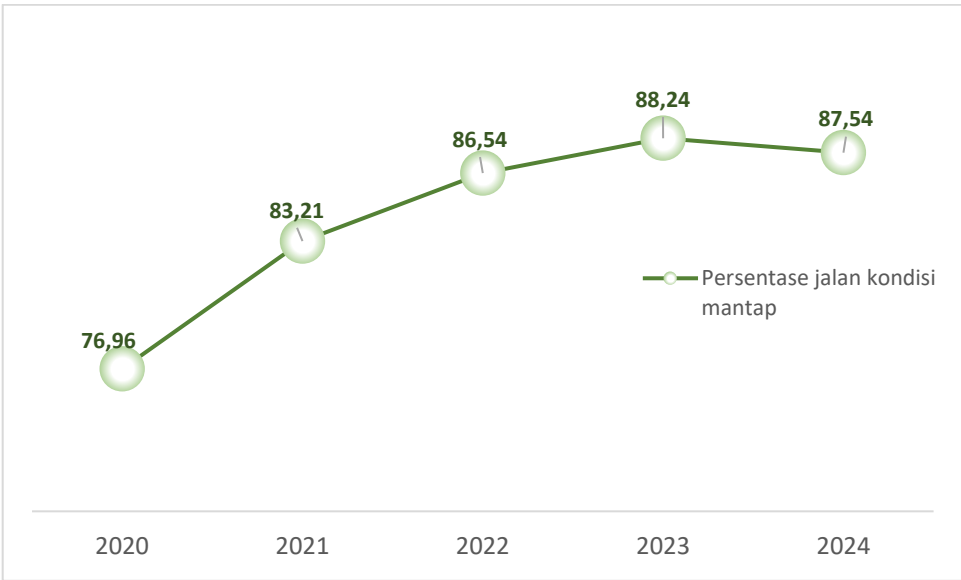
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi jalan (kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat) di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Untuk kondisi jalan baik mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali di tahun 2021 menurun 3,84% dari tahun 2020 menjadi 392.495 km. Ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut penganggaran keuangan lebih dititikberatkan pada penanganan pasca pandemi COVID-19 sehingga untuk perbaikan kondisi jalan lebih difokuskan pada jalan kondisi

rusak berat saja. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat dan pada tahun 2024 mencapai 577.014 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, sempat mengalami penurunan sampai di Tahun 2022 sepanjang 42.900 km, akan tetapi panjang jalan yang rusak berat kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024. Bahkan di tahun 2024 mencapai panjang 71.655 km.

Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang menandakan keberhasilan dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 87,54%. Adanya penambahan ruas jalan baru serta kerusakan akibat bencana alam atau cuaca serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi salah satu faktor penurunan capaian. Tren peningkatan jaringan jalan mantap disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.64 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

Tingkat Kondisi Jembatan Kabupaten Mantap

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya yang dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Panjang jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan infrastruktur yang baik, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Tren panjang jembatan kondisi mantap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Panjang Jembatan Kabupaten Sumedang dalam Kondisi Mantap Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (m)
1	Kondisi Baik	1850,65
2	Kondisi Sedang	968,43
3	Rusak Ringan	156,8
4	Rusak Berat	68,8
	Panjang Total Jembatan dalam Kondisi Mantap	2819,08

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata, berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Komponen utama jaringan irigasi meliputi bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang serta petak yang diairi. Tujuan dari pembangunan irigasi tidak hanya mempermudah petani dalam penggunaan air serta meningkatkan produktivitas hasil produksi dan efisiensi pertanian tetapi juga mengurangi risiko kekeringan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Penilaian kondisi infrastruktur irigasi meliputi kondisi saluran dan pompa. Adapun kondisi cakupan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	62,32	67,02	68,62	70,20	71,40
2	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten (m)	2.115.811	2.115.811	2.115.811	2.115.811	2.115.811
a	Panjang Irigasi Primer (m)	952.115	952.115	952.115	952.115	952.115
	Panjang Irigasi Primer Kondisi Baik (m)	411.759	430.363	446.066	453.996	454.810
	Panjang Irigasi Primer Kondisi Rusak Ringan (m)	241.395	234.845	235.914	232.760	254.525
	Panjang Irigasi Primer Kondisi Rusak Berat (m)	298.961	286.907	270.135	265.360	242.780
b	Panjang Irigasi Sekunder (m)	1.163.696	1.163.696	1.163.696	1.163.696	1.163.696
	Panjang Irigasi Sekunder	503.261	525.999	545.192	554.884	555.879

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kondisi Baik (m)					
	Panjang Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Ringan (m)	295.038	287.033	288.340	284.484	311.087
	Panjang Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Berat (m)	365.397	350.664	330.164	324.328	296.731
3	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	30.069	30.069	30.069	30.069	30.069
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	18.739	20.152	20.633	21.108	21.469
b	Luas Irigasi Kondisi Rusak Ringan (Ha)	5.854	5.268	5.292	5.196	5.196
c	Luas Irigasi Kondisi Rusak Berat (Ha)	5.476	4.649	4.144	3.765	3.404
4	Persentase Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah yang Luasnya Kurang dari 1000 Ha	46	47	48	49	50
5	Rasio Jaringan Irigasi (Rasio)	70,37	70,37	70,37	70,37	70,37
6	Panjang Total Area yang Terlayani Irigasi Teknis	86.032	83.233	81.611	80.436	79.347

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2024)

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai 2.115.811 meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi dengan

kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang terairi irigasi baik dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat sangat fluktuatif. Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi kondisi baik semakin bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di tahun 2023. Hal ini akibat dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan kondisi irigasi yang rusak berat. Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi irigasi dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 3.765 Ha menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan panjang irigasi primer dan sekunder yang mengalami peningkatan panjang irigasi dengan kondisi baik di tahun 2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air. Adapun sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten Sumedang berasal dari 15 titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

Persentase Penataan Ruang/Bangunan/Gedung di Kabupaten Sumedang

Penataan ruang, bangunan dan gedung merupakan salah satu bagian dari upaya menciptakan lingkungan wilayah yang tertata dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penataan ruang ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan, sehingga RTRW menjadi acuan dalam pengelolaan tata ruang guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan mengurangi risiko bencana.

Sebagai salah satu indikator kualitas infrastruktur dan bangunan publik, persentase bangunan gedung dalam kondisi baik menjadi perhatian serius Kabupaten Sumedang. Data tahun 2024 bahwa sekitar 75% dari total bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum di Kabupaten Sumedang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya membutuhkan pemeliharaan berkala hingga renovasi besar. Upaya peningkatan persentase bangunan dalam kondisi baik dilakukan melalui program rutin pemeliharaan dan rehabilitasi fisik gedung.

Tabel 2.39 Persentase dan Jumlah Bangunan dan Gedung dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024



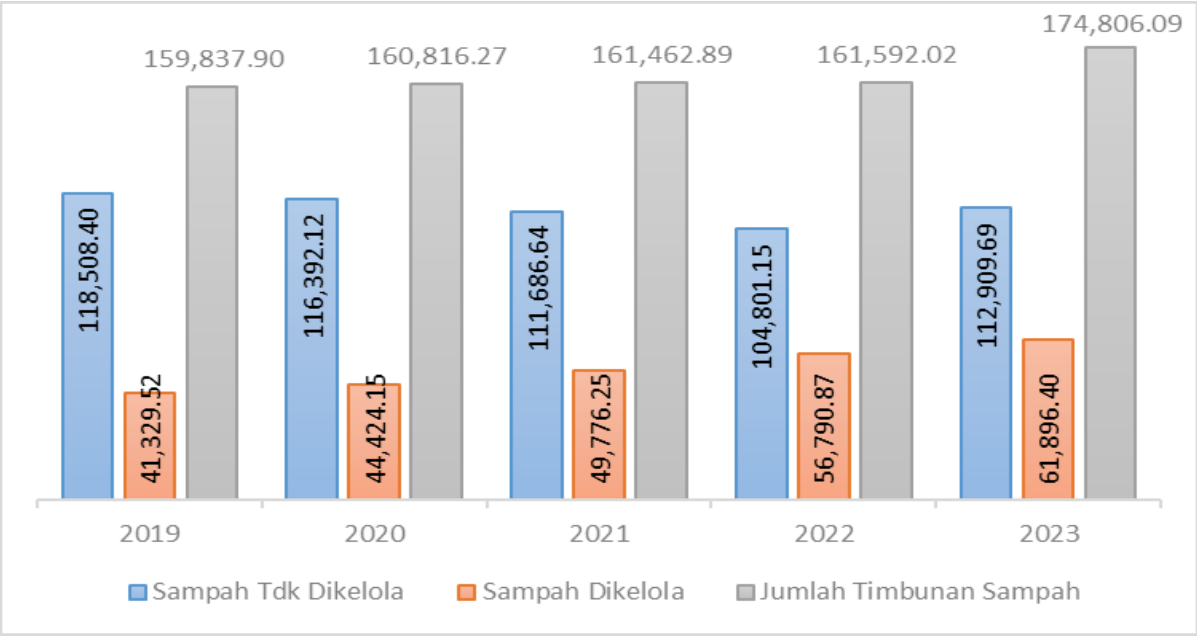
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

Persampahan

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta berbagai masalah perkotaan.

Metode pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia melalui metode *open dumping* dan *landfill*, namun ada juga metode lain seperti pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan. Berikut adalah data Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.65 Jumlah Timbunan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas DLHK Kabupaten Sumedang (2024)

Timbunan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Faktor yang mempengaruhi timbunan sampah adalah jumlah penduduk, sistem pengumpulan/pembuangan sampah, jenis sampah dan kebiasaan masyarakat. Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di hampir seluruh wilayah Sumedang, yang jika tidak dikelola akan berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya ialah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola meningkat 5.105,53 ton dari tahun sebelumnya menjadi 61.896,40 ton. Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

4). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas hidup, kesejahteraan, serta ketertiban lingkungan sosial. Ketersediaan hunian yang layak, terjangkau, dan tertata dengan baik mencerminkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mencakup penataan lingkungan, peningkatan infrastruktur dasar, serta pengurangan kawasan kumuh. Sehingga menjadi sangat penting memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai simbol pemulihan, keamanan, dan pemulihan psikososial pasca-bencana. Oleh karena itu, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana menjadi salah satu prioritas dalam upaya penanganan pascabencana yang menyeluruh. Melalui program penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana memastikan pemulihan kehidupan masyarakat dengan pembangunan kembali hunian yang rusak atau hancur akibat bencana. Berikut adalah data penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.40 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun (KK)			
		2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	30	0	6	7

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, jumlah keluarga yang terdampak bencana tersebut berjumlah 135 kepala keluarga. Pasca bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menindaklanjuti program Pemerintah Pusat, baru merelokasi sekitar 30 kepala keluarga yang termasuk ke dalam daftar warga terdampak bencana prioritas I (satu), melalui penyediaan rumah khusus yang

diperuntukan bagi warga terdampak bencana. Adapun untuk Tahun 2022, Pemerintah Daerah belum melakukan relokasi sisa warga yang terdampak bencana dikarenakan belum tersedianya lokasi pembangunan pemukiman di daerah sekitar yang jauh dari zona merah bencana. Dan pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah menyediakan dan rehabilitasi rumah yang ditujukan kepada warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung sebanyak 6 (enam) Kepala Keluarga. Adapun pada tahun 2024, merupakan bantuan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan melakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 7 (tujuh) KK di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung .

Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Relokasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang wilayah, Pemerintah kerap melakukan program relokasi bagi masyarakat yang menempati kawasan rawan bencana, daerah aliran sungai, atau wilayah yang terdampak proyek strategis. Namun, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap individu dan keluarga. Rumah yang layak menjadi fondasi utama dalam menciptakan kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat. Namun, masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, yakni rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, luas minimum, serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu indikator ketimpangan sosial dan ekonomi, serta tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terus mendorong program perbaikan dan rehabilitasi RTLH.

Jumlah RTLH yang direhabilitasi di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Jumlah RTLH yang direhabilitasi meningkat tajam pada Tahun 2021 menjadi 2.592 unit, dan mencapai jumlah tertinggi di tahun 2022 sebanyak 3.172 unit. Namun, tren ini mengalami penurunan drastis di tahun 2023 hanya 580 unit RTLH yang direhabilitasi. Bahkan di tahun 2024 hanya 81 unit. Penurunan yang terjadi di Tahun 2023 diakibatkan adanya penurunan pagu anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut baik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi maupun DAK. Selain adanya penurunan alokasi anggaran, diasumsikan adanya perubahan kebijakan dalam penentuan program prioritas. Padahal berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) masih terdapat 120 ribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumedang, dan baru 10 % dari jumlah tersebut yang telah diintervensi atau sekitar 10 ribu unit rumah. Sedangkan RP3KP ini merupakan acuan bagi seluruh kepentingan di bidang Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.66 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

Backlog Rumah

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Hal ini pun diperparah dengan semakin tingginya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga tingginya tingkat urbanisasi menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

Backlog rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Daerah yang terkait bidang perumahan. Tujuannya adalah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Perhitungan *backlog* rumah diperoleh dari jumlah keluarga eksisting dikurangi dengan jumlah rumah eksisting. Apabila ada selisih, maka keluarga tersebut belum memperoleh rumah dan masuk kedalam kategori *backlog*. *Backlog* perumahan di Kabupaten Sumedang masih relatif tinggi, analisis *backlog* rumah dilakukan pada Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.41 Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Jumlah Backlog (unit)
Sumedang	342.413	137.718

Sumber: Buku Analisa RP3KP Kabupaten Sumedang, 2024

Analisis *backlog* rumah di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui survei dalam kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang dilakukan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi backlog eksisting di Kabupaten Sumedang mencapai 137.718 unit dengan backlog tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Perkotaan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungsari, Cimanggung, dan Jatinangor.

Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan komponen vital dalam mendukung terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Adapun jenis PSU yang harus tersedia sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Prasarana perumahan dan permukiman meliputi: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana perumahan dan permukiman meliputi: sarana perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir
- c. Utilitas perumahan dan permukiman meliputi: jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum.

Peningkatan akses terhadap PSU menjadi bagian penting dalam pembangunan perumahan rakyat. Penyediaan PSU yang memadai mampu mempercepat integrasi kawasan permukiman dengan pusat pertumbuhan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman difasilitasi oleh pemerintah jika perumahan tersebut memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bantuan PSU. Adapun kriteria perumahan yang berhak mendapatkan bantuan PSU antara lain : 1) Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2) Telah memiliki izin; 3) Masih dalam tahap pengembangan; 4) Luas minimal dan jumlah unit tertentu; 5) Pengembang atau pelaku usaha berkomitmen menyelesaikan pembangunan; dan 6) Telah atau akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Berikut adalah jumlah perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 2.42 Jumlah Perumahan yang Telah Diserahterimakan kepada Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah	11	12	15	9	6

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

Jumlah perumahan yang dibangun di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024 mencapai 343 perumahan, dan sampai dengan tahun ini pun baru 53 perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah. Terhambatnya proses serah terima perumahan kepada Pemerintah Daerah disebabkan oleh rendahnya ketaatan para pengembang perumahan seperti 1) banyaknya kondisi perumahan yang sudah tidak sesuai dengan siteplan yang diajukan; 2) belum adanya pemindahan kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu syarat serah terima perumahan dikarena tingginya biaya atas pemindahan kepemilikan tanah tersebut dan 3) keberadaan pengembang perumahan sudah tidak ada atau perumahan sudah terbengkalai sehingga proses permohonan serah terima dilakukan oleh warga.

Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan. Permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, kualitas bangunan yang buruk, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta drainase yang memadai. Selain itu, kawasan ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk tekanan terhadap penyediaan permukiman yang layak pun semakin besar. Tanpa intervensi yang tepat, kawasan kumuh akan terus berkembang dan memperburuk permasalahan lingkungan, sosial, serta pelayanan publik.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi permukiman kumuh. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang tahun 2022-2023 adalah 164,69 Ha yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan

Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Berikut adalah tabel luasan kawasan kuluh di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.43 Luas Kawasan Kumuh (Ha) di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Variabel Data	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Kumuh	Masih dalam pendataan		169,64 Ha		151,46 Ha

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

Adapun Tahun 2024, berdasarkan perhitungan dan penetapan luasan kumuh di Kabupaten Sumedang mengalami pengurangan sebesar 13,23 Ha di Desa Lebak Biru-Pasigaran-Talun, sehingga luasan menjadi 151,46. Berikut Data pengurangan luasan kumuh di Kabupaten Sumedang

Tabel 2.44 Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN KUMUH
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 8 / 62 / 600.2.7.4 / 1 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua puluhdua empat (2024) bertempat di aula Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh tingkat Kabupaten yang dihadiri Sekretaris Daerah, Lurah dan Kepala Desa, Bappppeda Kabupaten Sumedang.

Hasil penghitungan pengurangan luasan kumuh Tahun 2024 Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat menetapkan hasil sebagai berikut :

No	Desa/Kel	Luas Kumuh SK (Ha)	Status Luasan Kumuh 2023 (Ha)	Pengurangan Kumuh 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Karasak	2.44	2.44	-	2.44
2	Cisempur-Cibungur-Cipajaran	18.70	18.70	-	18.70
3	Mandalangu	8.55	8.55	-	8.55
4	Dungdur-Simagalih	16.40	16.40	-	16.40
5	Sayang	2.52	2.52	-	2.52
6	Depok	7.70	7.70	-	7.70
7	Pamapersari - Mariak	15.65	15.65	-	15.65
8	Lebak Biru-Pasigaran-Talun	13.23	13.23	13.23	-
9	Pagaden	6.85	6.85	-	6.85
10	Citalampa	5.87	5.87	-	5.87
11	Gordah	2.78	2.78	-	2.78
12	Lembang	6.30	6.30	-	6.30
13	Panday	4.14	4.14	-	4.14
14	Singaparna	3.21	3.21	-	3.21
15	Ciraja	4.24	4.24	-	4.24
16	Ciranggon	5.87	5.87	-	5.87
17	Nalegong	6.34	6.34	-	6.34
18	Burujul	2.81	2.81	-	2.81
19	Gemeng Pacing-Cibunut	7.70	7.70	-	7.70
20	Leles-Kebon Seureuh	2.83	2.83	-	2.83
21	Warung Cina II	4.35	4.35	-	4.35
22	Legok Cibe	3.54	3.54	-	3.54
23	Talun	7.59	7.59	-	7.59
24	Situ	5.08	5.08	-	5.08
Jumlah Luasan (H)		164.69	164.69	13.23	151.46

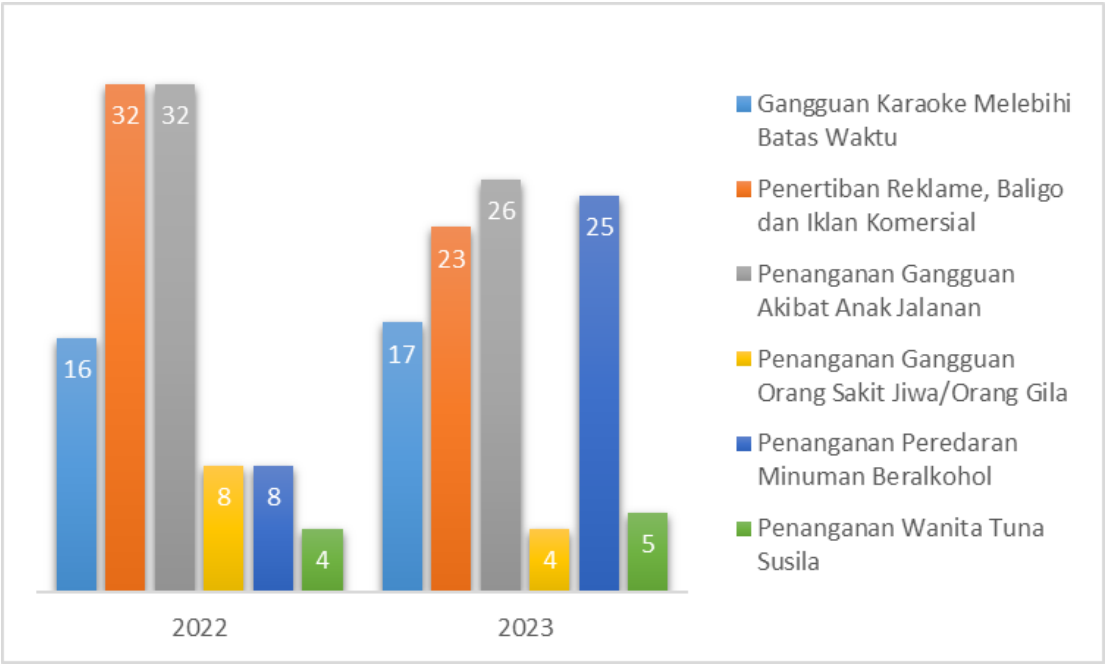
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

5). Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur sehingga pembangunan di berbagai sektor akan terlaksana secara optimal. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum meliputi berbagai aspek, mulai dari penegakan peraturan daerah (perda), pengawasan terhadap potensi gangguan sosial, penanganan kerawanan sosial, hingga pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan ketentraman dan ketertiban tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui pendekatan edukatif dan pembinaan kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Beberapa jenis gangguan yang sering ditemukan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.67 Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%) Tahun 2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Jumlah gangguan yang terjadi sepanjang Tahun 2023 didominasi oleh gangguan akibat anak jalanan sebesar 26%. Anak jalanan tetap menjadi permasalahan sosial serius terutama di kota besar, meskipun di Kabupaten Sumedang tahun ini mengalami penurunan sebesar 6% dari tahun

sebelumnya. Kerjasama antar *stakeholder* di Pemerintahan Daerah sangat membantu proses penanganan gangguan anak jalanan, selain itu adanya program reintegrasi keluarga melalui mediasi, konseling dan bantuan sosial antara anak jalanan dengan keluarga menjadi salah satu cara penanganan permasalahan. Selain gangguan anak jalanan, kenaikan yang signifikan terjadi pada permasalahan peredaran minuman beralkohol. Pada tahun 2022 diketahui penanganan peredaran minuman beralkohol hanya sekitar 8%, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 25%. Kurangnya pengawasan peredaran serta longgarnya regulasi terkait dengan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol mengakibatkan peningkatan angka peredaran. Selain itu juga perubahan gaya hidup, pengaruh sosial dan pengaruh budaya pun ikut berperan dalam peningkatan minuman beralkohol di Kabupaten Sumedang.

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana dengan memberikan informasi tentang bagian wilayah yang rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana serta wilayah yang berpotensi terpapar bencana. Jenis informasi rawan bencana dapat berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yang dilakukan melalui berbagai media, termasuk situs resmi Pemerintah Daerah, aplikasi *mobile*, media sosial, pusat informasi bencana di tingkat desa dan kelurahan, serta penyuluhan langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata terhadap informasi yang dapat menyelamatkan jiwa dan harta benda Berikut adalah data pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021-2023.

Tabel 2.45 Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (orang)	691.534	715.525	719.102

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2024)

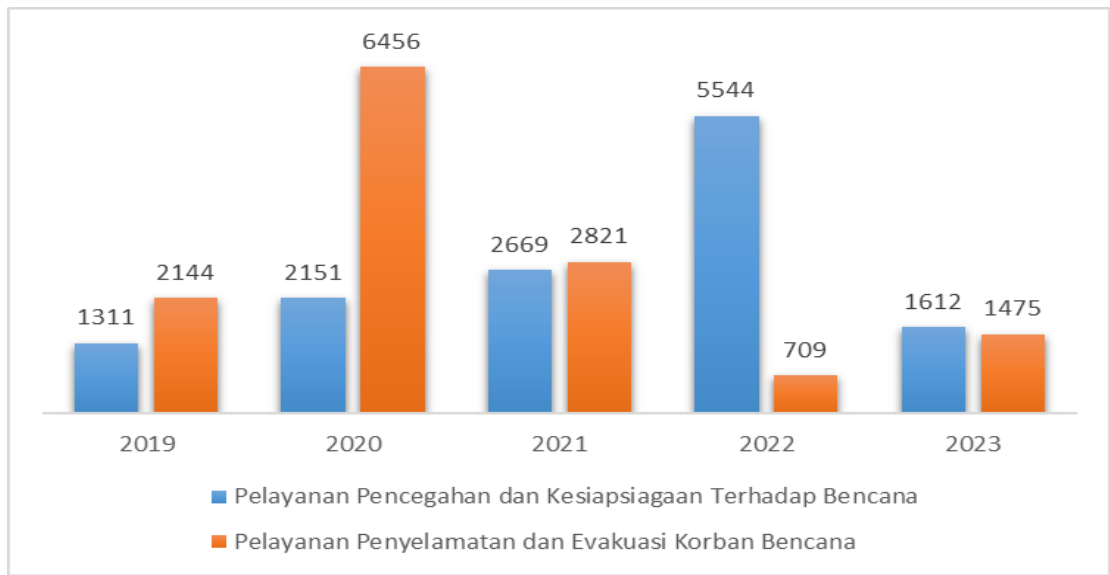
Pada tahun 2021 di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk layanan informasi rawan bencana. Layanan tersebut berupa informasi terkait perubahan iklim, titik lokasi rawan bencana dan layanan pengaduan serta laporan ke tingkat kabupaten. Diawal tahun pembentukan, informasi rawan

bencana sudah tersampaikan kepada 691.634 orang dan terus meningkat hingga mencapai 719.102 orang di Tahun 2023. Informasi rawan bencana dilakukan melalui sosialisasi dan media sosial. Kenaikan tingkat pelayanan informasi pada tahun 2023 karena pada tahun tersebut terjadi 223 kejadian bencana di Kabupaten Sumedang seperti longsor dan pergerakan tanah, banjir dan banjir bandang, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran hutan, sehingga untuk mengantisipasi serta mitigasi kejadian bencana dilakukan sosialisasi informasi rawan bencana terutama di daerah-daerah yang berpotensi bencana serta dilakukan juga melalui media sosial sehingga dapat menjangkau semua jenis usia terutama usia produktif yang aktif menggunakan media sosial.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, sedangkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan tindakan setelah adanya kejadian bencana. Tujuan utama pelayanan ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana melalui langkah-langkah antisipatif dan penguatan kapasitas masyarakat. Tren Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana disajikan pada gambar berikut.

Grafik 2.68 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang) Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan data diatas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan melalui pemberian edukasi kebencanaan

terhadap masyarakat terutama di daerah daerah rawan dan daerah berpotensi bencana terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2022 pelayanan mencapai 5.544 orang, namun pelayanan menurun di Tahun berikutnya yaitu hanya 1.512 orang. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya angka kejadian bencana serta kurangnya pemberian pelayanan berupa sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat yang hanya dilakukan ketika terjadi bencana saja. Berbeda halnya dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang meningkat sebanyak 766 orang dari tahun sebelumnya menjadi 1.475 orang di tahun 2023. Kenaikan angka pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terjadi karena banyaknya kejadian bencana terutama evakuasi korban bencana longsor dan kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu jenis SPM yang termasuk ke dalam bidang trantibum linmas. Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang saat ini belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap implementasi aturan yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.69 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023



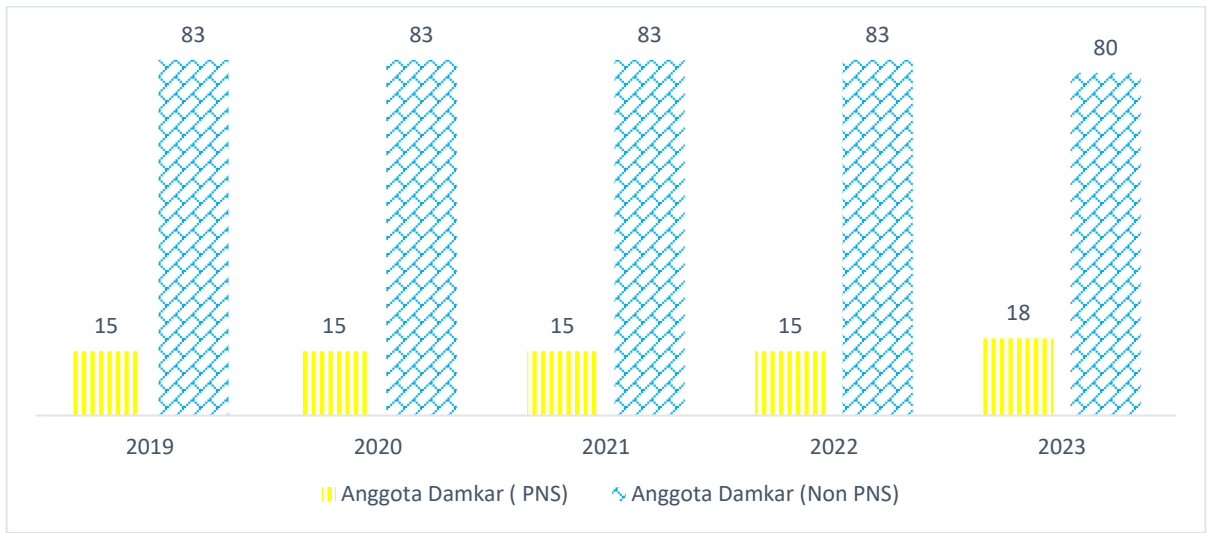
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan grafik diatas, jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2023 terjadi

lonjakan jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meningkat sebanyak 289 kejadian dari tahun sebelumnya. Perubahan iklim global mengakibatkan cuaca menjadi lebih panas dan kering dan dampak adanya *el nino* pun menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Selain itu juga kebakaran seringkali terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik.

Rendahnya kecepatan waktu dalam penanganan kejadian kebakaran dikarenakan terbatasnya jumlah armada pemadam kebakaran. Bahkan tidak semua wilayah/kecamatan yang difasilitasi atau disediakan mobil pemadam, sehingga jarak jangkauan tim pemadam pun akan berdampak terhadap jumlah dan waktu kejadian kebakaran yang tertangani. Selain itu juga jumlah SDM pun berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan kejadian kebakaran. Tren jumlah anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.70 Tren Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah anggota pemadam kebakaran masih sangat sedikit terutama untuk pegawai ASN, sehingga perekrutan secara formal sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi satuan pemadam kebakaran.

Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam mengatur tata kelola pemerintahan, perekonomian, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat setempat. Namun, keberadaan Perda tidak akan

bermakna jika tidak disertai dengan upaya penegakan yang konsisten dan berkelanjutan. Penegakan Perda merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, ketertiban umum, serta kepastian pelaksanaan pembangunan.

Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2) Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait adanya keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede.

Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani tren nya menunjukkan ada kenaikan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 87 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 95 kasus yang tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.

Pananganan gangguan akibat anak jalanan, penanganan peredaran minuman beralkohol dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersil tetap menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani pada Tahun 2023. Berikut adalah tren Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani.

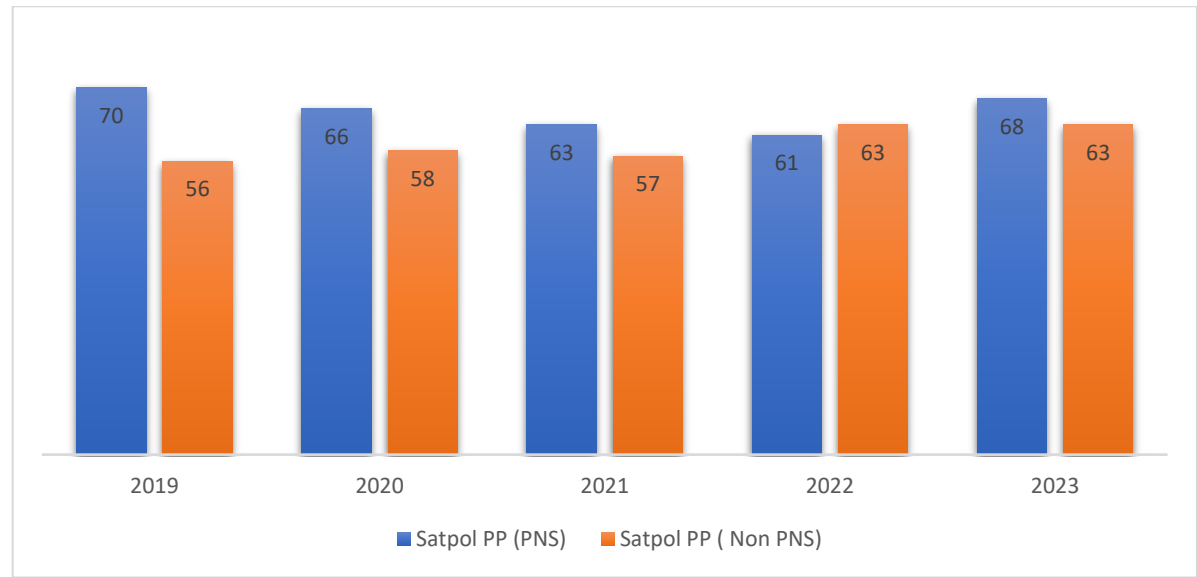
Grafik 2.71 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Dengan tingginya kasus pelanggaran di Kabupaten Sumedang, maka perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat, sehingga sampai dengan Tahun 2023 jumlah anggota Satpol PP ASN sebanyak 68 orang yang dibantu oleh tenaga non ASN sebanyak 63 orang. Sebagaimana pada grafik berikut.

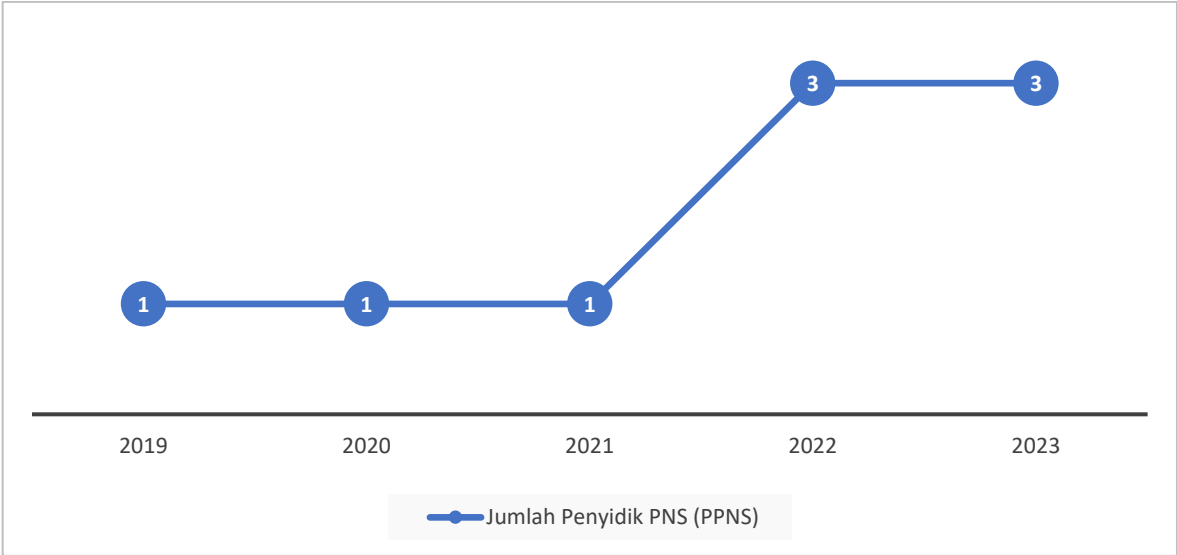
Grafik 2.72 Jumlah Personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023



Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

Salah satu tugas Satpol PP ialah mengawasi dan mengendalikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah, oleh karena itu diperlukan SDM yang berfungsi sebagai penyidik atas pelanggaran Perda. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan. Adapun anggota PPNS di Kabupaten Sumedang masih terbilang sangat minim karena sejak Tahun 2022 jumlah PPNS di Kabupaten Sumedang hanya 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) orang diantaranya merupakan anggota linmas yang telah memiliki kualifikasi sebagai PPNS. Dibawah ini adalah tren Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.73 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2024)

6). Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS digunakan sebagai database bagi pemerintah daerah guna menangani PPKS.

PPKS yang direhabilitasi tetapi untuk penanganannya dikembalikan ke keluarga PPKS (reunifikasi). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk data PPKS dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.46 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)
Tahun 2019-2023**

PPKS	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Bayi terlantar	6	6	6	1	1
Anak terlantar	83	83	407	317	224
Anak yang berhadapan dengan hukum	15	40	40	16	30
Anak jalanan	52	0	0	0	1
Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	0	0	57	70	15
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	15	15	15	1	-
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	0	19	-
Lanjut usia terlantar	3.729	3.729	874	736	464
Penyandang disabilitas	1.053	993	442		318
Tuna susila	0	0	0	17	10
Gelandangan	0	0	5	5	5
Pengemis	0	13	2	3	3
Pemulung	10	0	8	0	3
Kelompok minoritas	0	0	0	0	7
Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	0	0	0	0	1
Korban penyalahgunaan NAPZA	0	91	14	1	1
Korban trafficking	0	1	0	1	3
Korban tindak kekerasan	0	56	6	52	0
Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	0	0	1

PPKS	2019	2020	2021	2022	2023
Korban Bencana Alam	2.253	2.253	1.053	5.283	1.378
Fakir miskin	59.100	33.411	44.744	58.863	54.562
Keluarga bermasalah sosial psikologis	0	0	0	0	0

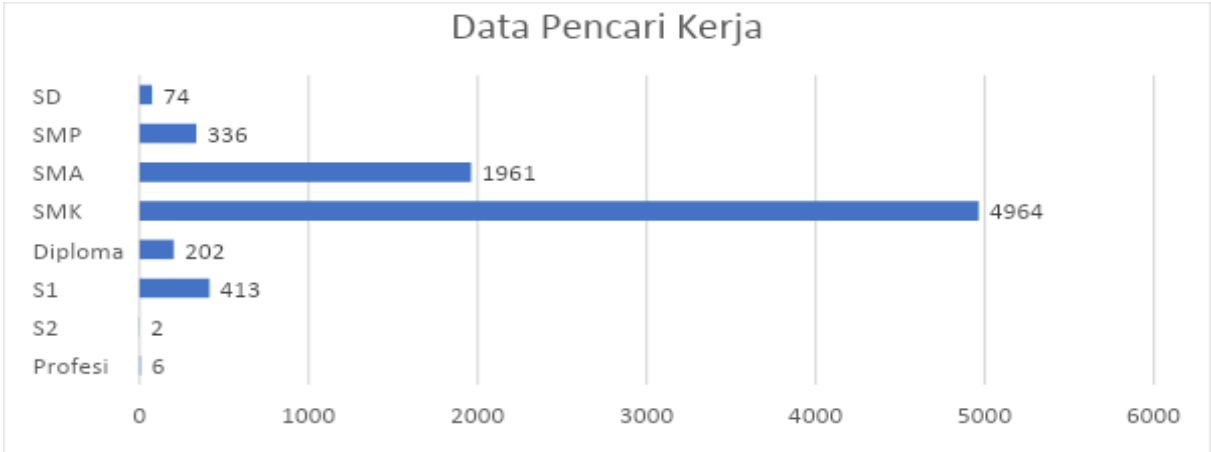
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang (2024)

7). Urusan Tenaga Kerja

Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Pencari kerja di Kabupaten Sumedang berdasarkan data lulusan pendidikan pada Tahun 2023 didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 4.909 orang. Dikarenakan SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan tujuan mempersiapkan lulusannya bisa langsung bekerja. Daftar Pencari Kerja Berdasarkan lulusan dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.74 Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2024)

Hubungan Industri

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan

penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan grafik 2.61, peningkatan kasus konflik tertinggi terjadi pada Tahun 2023 mencapai 141 kasus atau meningkat sebanyak 131 kasus dari tahun sebelumnya. Banyak faktor yang mengakibatkan peningkatan kasus konflik ini terutama oleh PHK yang dilakukan oleh beberapa Perusahaan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan antara pekerja dengan dengan pengusaha. Jenis masalah yang terjadi dalam kasus konflik tersebut antara lain: 1) PHK secara sepihak; 2) Hak pesangon; 3) hak uang kompensasi; 4) Hak upah; 5) Hak pensiun dan 6) PHK. Berikut adalah tren Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha di Kabupaten Sumedang.

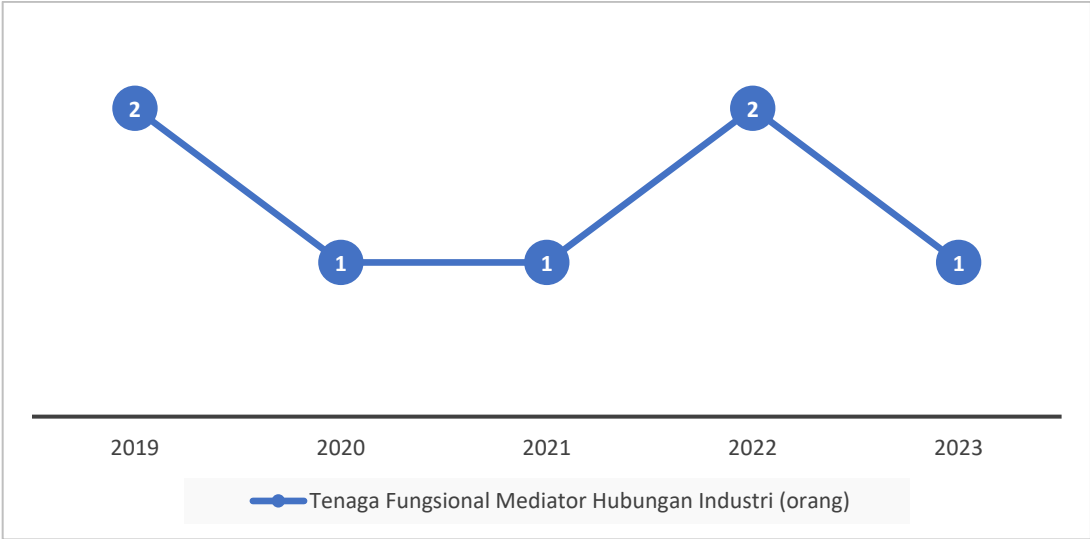
Grafik 2.75 Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2024)

Penyelesaian kasus konflik tersebut dapat berupa Perjanjian Bersama (PB) dan anjuran dan upaya ini tidak lepas dari peran atau dukungan Sumber Daya Manusia dalam hal ini fungsional Mediator Hubungan Industri yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada grafik berikut.

**Grafik 2.76 Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industri (Orang)
Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumedang sangat minim tenaga fungsional Mediator Hubungan Industri dan pada Tahun 2023 hanya mempunyai 1 (satu) orang mediator. Hal ini dikarenakan adanya promosi di lingkungan Pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya alih jabatan.

8). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, dan pada tahun 2024 menjadi 96,22 poin atau naik 0,09 poin dibanding tahun 2023. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik.

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan

dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai 76,99 poin, meningkat disbanding tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.

Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan keadaan yang lebih baik.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,438 poin. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458 poin. Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang masuk katagori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan upaya di berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan, akan tetapi dengan adanya peran DPPKBP3A dalam penanganan korban kekerasan serta dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data tindak kekerasan perempuan dan anak yang tertangani.

Grafik 2.77 Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang Tertangani Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2024)

Berdasarkan data dari grafik diatas, pada Tahun 2023 merupakan penanganan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Korban kekerasan pada anak didominasi oleh kasus kekerasan yang terjadi pada anak perempuan, sedangkan untuk korban kekerasan pada perempuan didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun jenis kasus yang ditangani oleh DPPKBP3A Kabupaten Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) jenis kasus yang terdiri dari: 1) Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2) Kasus Penganiayaan; 3) Kasus Perselingkuhan; 4) Kasus kekerasan; 5) Kasus pencurian; 6) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 7) Kasus Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur; 8) Kasus Persetubuhan Dibawah Umur; 9) Kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur; 10) Kasus pengeroyokan dan penganiayaan.

Berbagai metode dilakukan oleh DPPKBP3A dalam upaya percepatan dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak melalui: 1) hotline

cerita dunia pengaduan untuk masyarakat; 2) konseling dengan psikolog ataupun hipnoterapis; 3) pengetesan psikologi; 4) mediasi; 5) penjangkauan kasus; 6) pendampingan kasus; 7) sosialisasi. Metode ini dilakukan secara terintegrasi dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan.

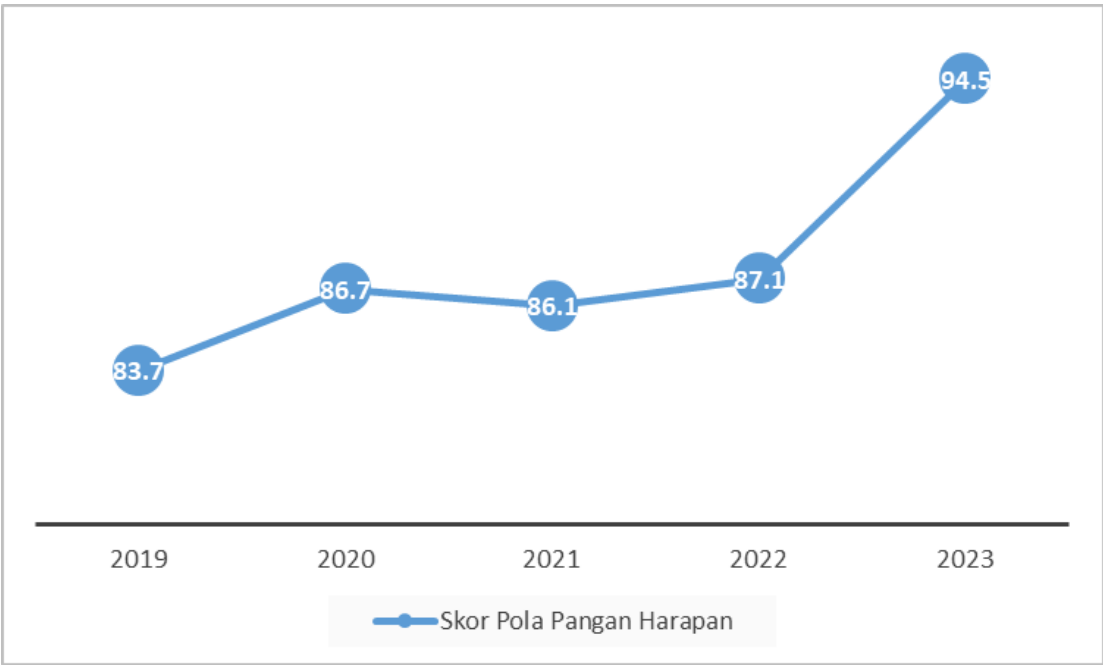
9). Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan terdiri dari jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga serta tingkat pendidikan.

Grafik 2.78 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



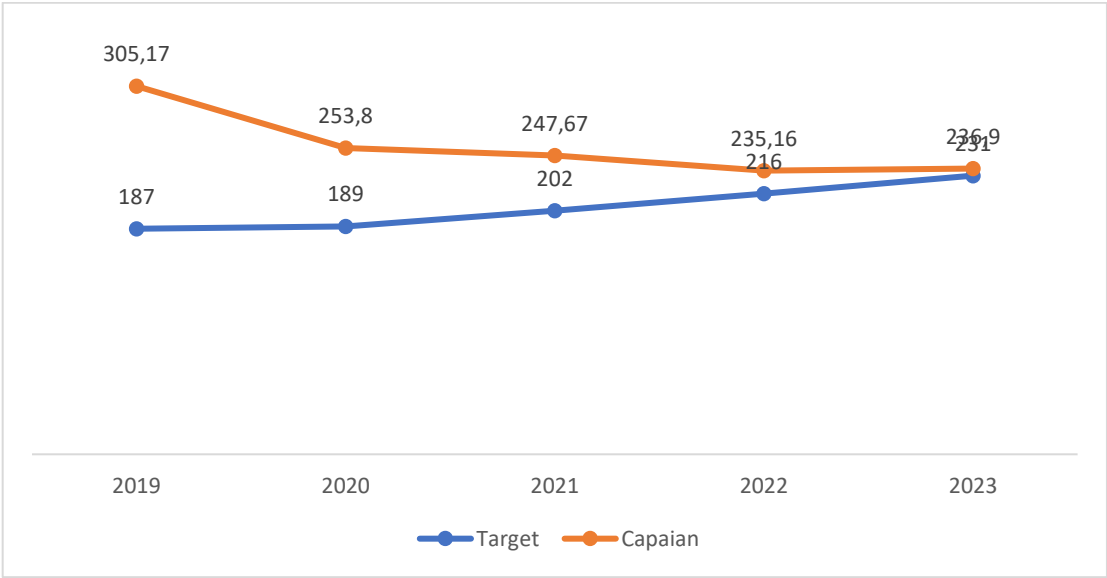
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2024)

Berdasarkan grafik 2.64 menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan di Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan meskipun belum mencapai skor maksimal. Namun ini berarti bahwa belum mencapai skor ideal yaitu 100, hal ini disebabkan hampir semua kelompok pangan belum mencapai konsumsi energi yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan keberagamannya melalui gerakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pemenuhan asupan gizi lebih seimbang.

Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok

Dalam menjamin ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Sumedang diperlukan memantau tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan grafik 2.71 dibawah dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan, meskipun di Tahun 2023 jumlah ketersediaan pangan pokok mencapai 236,9 kg/kapita/tahun atau naik 1, 74 kg/kapita/tahun dari tahun sebelumnya. Namun jika didasarkan pada target tahunan yang telah ditetapkan, jumlah ketersediaan pangan pokok selalu melebihi target sehingga pasokan pangan di Kabupaten Sumedang masih relatif aman.

**Grafik 2.79 Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2024)

10). Urusan Pertanahan

Pengelolaan urusan pertanahan merupakan aspek strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan pertanahan meliputi administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa

dan konflik pertanahan, fasilitasi redistribusi tanah dan reforma agraria, serta pendataan dan pemetaan bidang tanah. Tugas ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, kebutuhan perumahan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang semakin kompleks. Selain itu juga percepatan legalisasi aset, penyusunan data pertanahan, dan penerbitan surat keterangan tanah pun menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah.

Jumlah Lahan Milik Pemerintah Yang Sudah Bersertifikat

Lahan milik Pemerintah merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah. Lahan ini digunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi publik seperti fasilitas umum, pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang mendukung keberlanjutan Pembangunan. Hasil verifikasi administrasi asset Peremrintah Daerah Kabupaten Sumedang, lahan milik Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 2.371 bidang tanah, dan yang telah bersertifikat sebanyak 83,127 bidang atau sekitar 28,52 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya pembebasan lahan yang dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Data lahan milik Pemerintah yang sudah bersertifikasi disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 2.80 Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%)
Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu aspek penting yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut adalah penyelesaian masalah ganti kerugian tanah, yang merupakan salah satu kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas koordinasi antar pihak. Berikut adalah tren Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Sumedang.

Grafik 2.81 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Sumedang (%) Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam persentase penyelesaian masalah ganti kerugian tanah oleh pemerintah daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 dan 2022 mencatat penyelesaian sempurna (100%), yang menandakan keberhasilan dalam penanganan sengketa atau ganti rugi tanah secara tuntas. Namun penurunan terjadi di Tahun 2021, persentasenya hanya 80% dan Tahun 2024 hanya sebesar 75%. Beberapa penyebab dapat menjadi latar belakang penurunan persentase ganti keruguan tanah di Kabupaten Sumedang, antara lain :

- a. Alokasi dana untuk pembebasan lahan atau ganti rugi yang tidak mencukupi sehingga menghambat penyelesaian sengketa tanah;

- b. Masyarakat menuntut nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan oleh tim appraisal pemerintah; dan
- c. Penolakan dari masyarakat terhadap relokasi atau pembangunan proyek tertentu.

11). Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index/WQI*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran perairan yang cukup efektif dengan informasi yang komprehensif, mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat (*Bardolo et al, 2006; Alam & Pathak, 2010*). Kategori IKA dikembangkan menjadi lima kategori sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu.

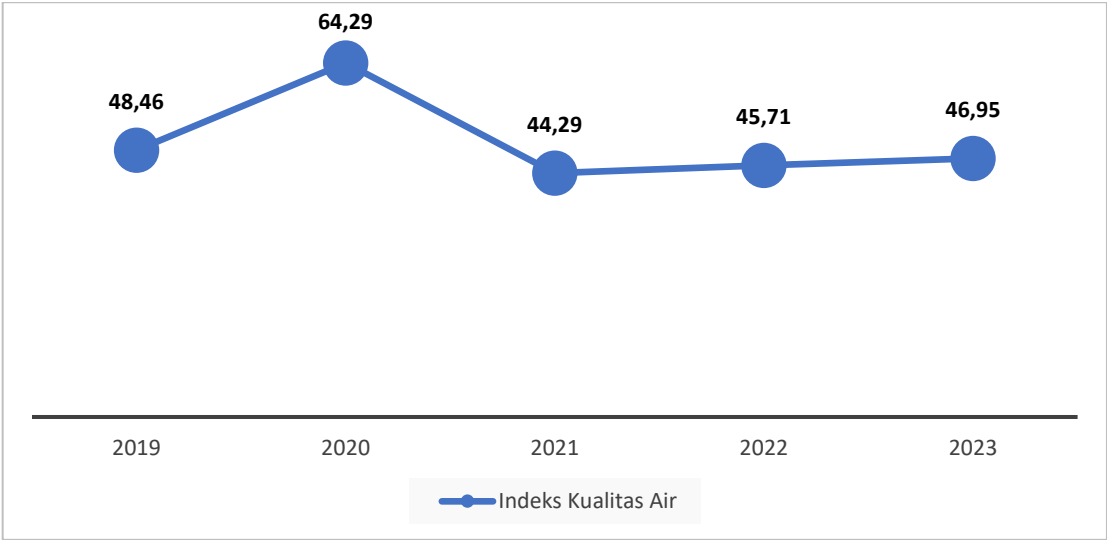
Tabel 2.47 Kategori Indeks Kualitas Air

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Memperhatikan grafik 2.67 di bawah, bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 indeks kualitas air meningkat menjadi 46,92 poin dari 45,71 poin di tahun 2022. Jika melihat rentang angka kategori indeks, maka kualitas air di Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam kategori **“Kurang”** karena masih dibawah 50 poin.

Penurunan kualitas air ini dapat diakibatkan oleh eksploitasi air yang dilakukan oleh manusia, limbah rumah tangga serta kegiatan industri, yang mengakibatkan semakin banyaknya pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Di Kabupaten Sumedang sendiri, perbaikan sanitasi sudah melampaui target, hanya saja untuk mencapai sanitasi yang aman dalam artian pengelolaan limbah rumah tangga yang baik masih belum optimal. Hal ini berdampak pula pada kualitas air yang dihasilkan. Selain itu perindustrian yang mulai Kembali menggeliat juga berdampak terhadap peningkatan jumlah limbah industri yang dihasilkan.

Grafik 2.82 Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2024)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa bersih atau tercemarnya udara serta potensi efek kesehatannya dalam jangka pendek di suatu daerah. Untuk pengukuran kategori indeks kualitas udara (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel dibawah ini.

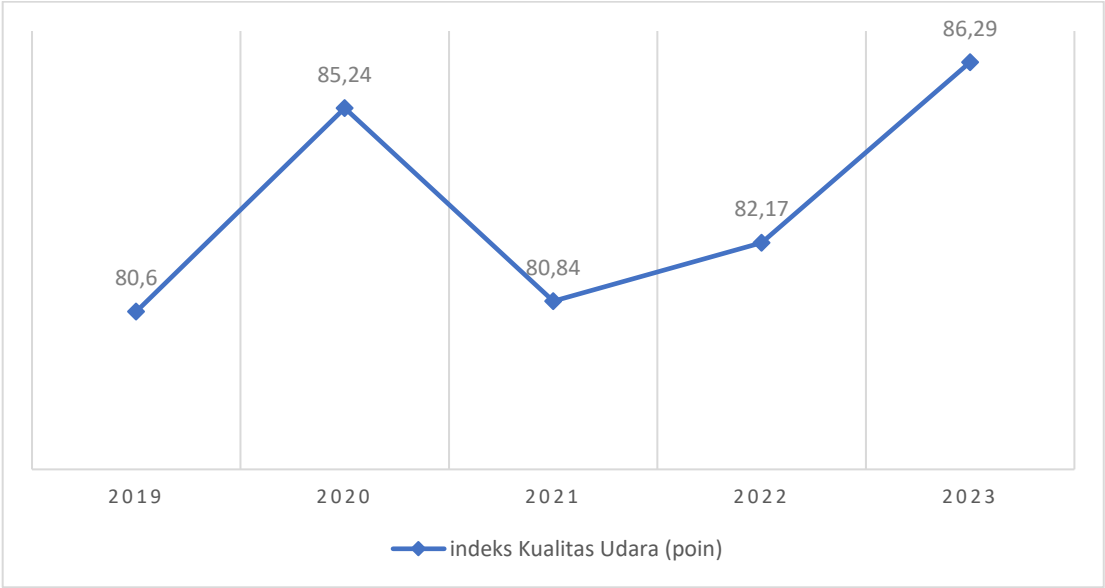
Tabel 2.48 Kategori Indeks Kualitas Udara

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Memperhatikan grafik 2.68 di bawah Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 mencapai 86,29 atau kategori **baik**, yang artinya bahwa kualitas udara berada pada tingkat baik untuk kesehatan masyarakat dan dengan kategori tersebut juga menunjukkan komitmen

Pemerintah Daerah terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan publik. Namun perlu diperhatikan juga dengan diefektifkannya kembali beberapa roda perindustrian dan perekonomian akan berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.83 Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2024)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

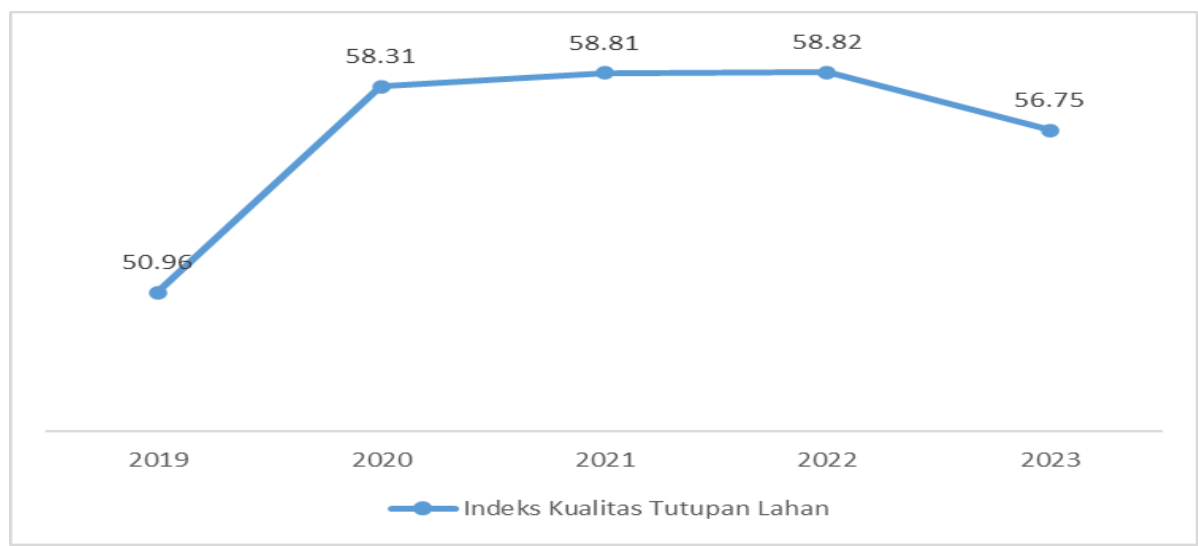
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

IKTL Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 mengalami penurunan 2,06 poin dari tahun sebelumnya menjadi 56,75 poin yang dapat diinterpretasikan dengan skala kualitas IKTL nya berada pada kategori “**sedang**”. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab penurunan poin tersebut seperti 1) penurunan keanekaragaman hayati atau degradasi vegetasi; 2) adanya perubahan yang signifikan terhadap penggunaan lahan sehingga mempengaruhi kualitas lahan secara keseluruhan; dan 3) adanya pencemaran atau degradasi akibat aktivitas manusia. Meskipun tidak berada

dalam kondisi buruk namun perlu dilakukan berbagai tindakan pengelolaan dan konservasi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, IKTL Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada grafik dibawah.

Grafik 2.84 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2024)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

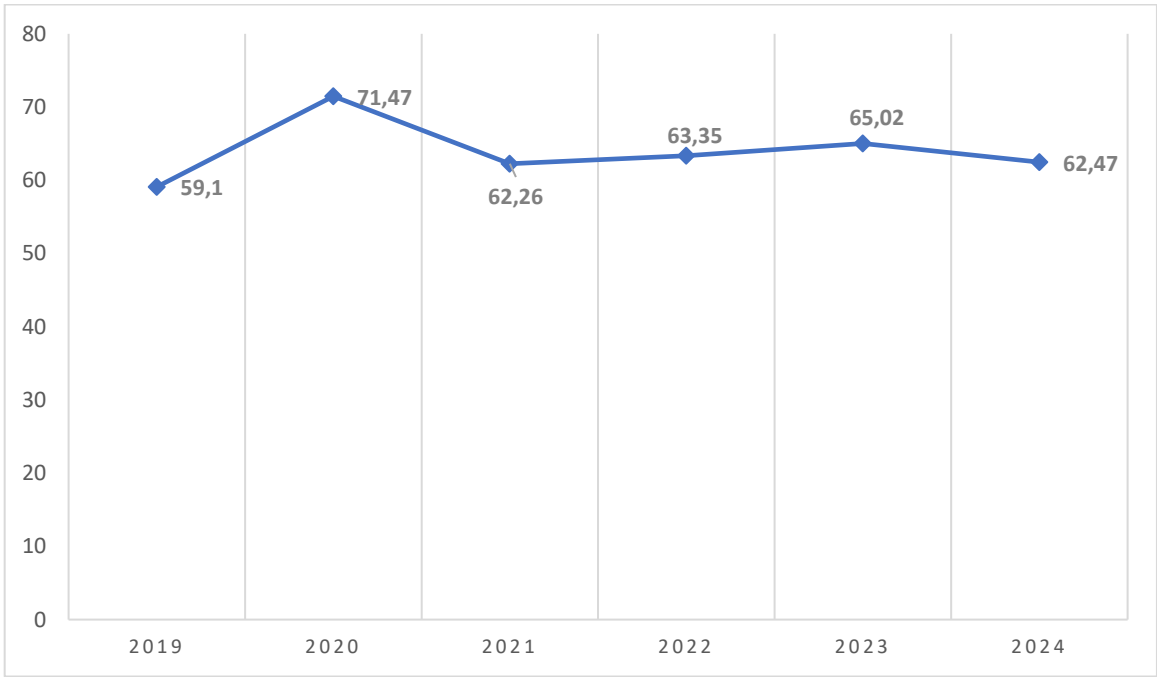
Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 mencapai 62,47 mengalami penurunan

dibanding tahun 2023 yang mencapai 65,02 poin dan berada dalam kategori “**sedang**”. Capaian IKLH dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.85 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2025)

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berkenaan hal tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

2.1.5.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran dari jenis pelayanan dasar untuk Pendidikan PAUD adalah bagi anak usia dini 1 (satu) tahun pra SD/MI/ sederajat, yang artinya setiap anak usia 5–6 tahun wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6 tahun harus terlayani PAUD yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-6 tahun yang terdaftar di Lembaga PAUD formal maupun non formal (TK, KB, SPS dan TPA).

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu 1) layanan pendidikan dasar SD/MI/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 7-12 tahun; 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan SMP/MTs/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan Pendidikan dasar.

3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia 16-21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi, geografis, dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui Pendidikan kesetaraan meliputi : 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket B (setara SMP); dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Untuk menghitung hasil capaian Pendidikan kesetaraan dihasilkan dari target atau jumlah warga yang terdata.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang untuk urusan Pendidikan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.49 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah warga	Orang	37.200	34.366	2.834	92,38

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
	negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
2	Pendidikan Dasar - Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	172.757	164.772	7.985	95,38
3	Pendidikan Kesetaraan - Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	7.233	6.001	1.232	82,97

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang pendidikan belum mencapai 100 persen bahkan untuk layanan Pendidikan kesetaraan masih berada dibawah 90 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pendidikan tersebut diatas antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD;
- b. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi;
- c. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD;
- d. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih bersekolah di Tingkat SMP;
- e. Peserta didik yang berada di wilayah perbatasan bersekolah di luar Kabupaten atau dari luar Kabupaten bersekolah ke Kabupaten Sumedang, sehingga angka partisipasi tidak akurat;
- f. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu;

- g. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil;
- h. Kualitas layanan pendidikan belum merata, baik dari segi tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun kurikulum;
- i. Rendahnya minat masyarakat terhadap program kesetaraan karena stigma negatif atau kurangnya informasi; dan
- j. Belum optimalnya pendataan warga yang butuh layanan pendidikan kesetaraan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar;
- b. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan; dan
- c. Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu manfaatnya adalah untuk operasional sekolah, terutama Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.

2.1.5.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 terdiri dari 12 indikator, yaitu

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali pemeriksaan kehamilan (ANC - *Antenatal Care*), yaitu 1 (satu) kali di trimester I, 1 (satu) kali di trimester II dan 2 (dua) kali di trimester III dan pemeriksaan harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau perawat terlatih).

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin persalinan yang aman, pencegahan komplikasi, penanganan

keawatdaruratan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu 1) Pelayanan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan/perawat); dan 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan standar.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan ini merupakan salah satu Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam keadaan sehat dan bertahan hidup, deteksi dini kelainan atau gangguan, dan penanganan dini komplikasi neonatal. Ruang lingkup pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi :

- a. Kunjungan Neonatal (KN) minimal 3 kali dengan jadwal kunjungan
 - 1) KN 1 : 6 – 48 jam setelah lahir;
 - 2) KN 2 : hari ke-3 sampai ke-7;
 - 3) KN 3 : hari ke-8 sampai ke-28.
- b. Imunisasi dasar (Hepatitis);
- c. Pemantauan berat badan, Panjang badan dan status menyusui;
- d. Pemberian edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi;
- e. Deteksi dini gangguan seperti infeksi, hipotermia dan kelainan bawaan.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia mulai 12-59 bulan. Pelayanan Kesehatan balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini masalah gizi, tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian balita.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-15 Tahun. Sasaran dari pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkaran kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-

masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining Kesehatan. Skrining usia produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang Kesehatan yang tujuannya sebagai Upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM), deteksi dini faktor resiko Kesehatan dan peningkatan kualitas hidup usia kerja.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk menekan angka komplikasi akibat hipertensi, mengendalikan tekanan darah penderita dan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas Masyarakat.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM)

Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita *diabetes melitus* adalah penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah terdiagnosis menderita *Diabetes Melitus* Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke *diabetes melitus*. melalui pelayanan.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Sasaran dari pelayanan SPM kali ini adalah penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti *skizofrenia*, *bipolar*, *psikosis*

berat, atau gangguan jiwa kronis lainnya yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan jiwa (dokter atau psikiater), dengan tujuan untuk menjamin ODGJmendapatkan pengobatan dan pemantauan berkala, mencegah kambuh dan kekambuhan yang berulang serta mendukung rehabilitasi social dan integrasi kemabali ke masyarakat.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, ginjal, bahkan otak. Tujuan dari pelayanan Kesehatan ini adalah untuk menemukan kasus secara aktif dan dini, menjamin penderita TBC mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan dan pemutusan mata rantai penularan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus (HIV)*)

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), yaitu tahap akhir infeksi HIV saat daya tahan tubuh sangat lemah. Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada orang dengan risiko tinggi tertular HIV, seperti Pasangan dari Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja seks dan pelanggannya, Homoseksual, pengguna narkoba suntik dan Ibu hamil yang terdiagnosis HIV positif. Adapun tujuan dari pelanyan ini adalah untuk deteksi dini infeksi HIV melalui tes sukarela (VCT) dan skrining, mencegah penularan HIV lebih lanjut ke pasangan atau bayi dan memulai pengobatan dini (ART) bagi yang terdiagnosis HIV.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang dari ke-12 indikator untuk Bidang Kesehatan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.50 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14.673	13.770	903	93.85
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14.673	14.668	5	99,97
3	Pelayanan Kesehatan Bayi	Orang	14.680	14.334	346	97,64

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
	Baru Lahir					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	65.543	62.735	2.808	95,72
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	153.920	153.920	0	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	522.186	413.929	108.257	79,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	181.122	181.122	0	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Orang	143.937	121.808	22.129	84,63
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Orang	21.763	21763	0	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Orang	1.757	1.757	0	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	Orang	25.486	25.486	0	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Orang	22.937	22.937	0	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Kesehatan belum seluruhnya mencapai 100 persen meskipun sudah terdapat beberapa indikator yang 100 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Kesehatan tersebut diatas terutama untuk indikator dengan capaian yang masih dibawah 90 persen, antara lain :

- a. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skirining Kesehatan masih rendah;

- b. Belum semua Perempuan usia produktif (usia 30-50 tahun) terakses pemeriksaan IVA atau papsmear untuk mendeteksi dini kanker leher rahim;
- c. Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan (*Antenatal care*);
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah;
- e. Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang Kesehatan; dan
- f. Belum adanya poli khusus geriatric di Kabupaten Sumedang.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan dilakukan beberapa pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus (PPGDON) serta sosialisasi, seminar dan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas;
- b. Optimalisasi peran bidan desa dan Puskesmas;
- c. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sekolah (UKS/Trias UKS).

2.1.5.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah yang, meliputi

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk menjamin setiap penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan cukup secara kuantitas dan berkelanjutan. Jenis pelayanan ini diberikan kepada penduduk miskin, kelompok rentan (anak-anak, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus), wilayah dengan keterbatasan akses air minum.

2. **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah rumah tangga dapat berupa air sisa deterjen, air sabun dan air tinja. Air limbah rumah tangga berpotensi dapat merusak ekosistem air, mencemari tanah, serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui akses sanitasi aman dan layak serta menurunkan risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air. Adapun hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Orang	4.952	5.584	0	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	4.040	4.040	0	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat rumah tangga masih bergantung pada sumber air tidak aman seperti sumur dangkal dan sungai;
- b. Masih terbatasnya kapasitas PDAM;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman;
- d. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan air limbah; dan
- e. Keahlian atau kemampuan sumber daya manusia terbatas.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan pihak swasta untuk pengembangan infrastruktur.

2.1.5.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman

SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan berupa pemenuhan hunian layak huni dan permukiman yang sehat, meliputi :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana merupakan salah satu alternatif untuk menjamin korban bencana memiliki tempat tinggal yang layak dan aman setelah terjadinya bencana serta mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi akibat kehilangan tempat tinggal dengan tujuan untuk mendorong percepatan pemulihan kehidupan sosial Masyarakat terdampak.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi merupakan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak relokasi akibat program/kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah, dengan cara memfasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dan aman sebagai bentuk perlindungan hak dasar atas tempat tinggal.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.52 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawsan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Orang	81	81	0	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100 persen. Adapun untuk SPM terkait dengan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Namun meskipun capaian telah 100 perman, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Lahan yang akan dijadikan tempat relokasi terkadang tidak sesuai;
- b. Sering adanya penolakan dari warga terkait dengan lokasi relokasi dikarenakan tidak strategis atau jauh dari sumber perekonomian;
- c. Belum optimalnya data dan pemetaan korban pasca bencana.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas terkait, dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan relokasi ataupun pembangunan rumah, serta dengan mengajukan bantuan stimulan atau Pembangunan rumah ke Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2.1.5.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat hidup dengan rasa aman dan tenteram, meningkatkan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan dan menyediakan dukungan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana. Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Jenis pelayanan diberikan diberikan kepada Masyarakat alam bentuk penanganan gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga ketertiban; 2) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman; dan 3) Mencegah dan menindak gangguan ketenteraman, seperti pelanggaran peraturan daerah, keributan di ruang publik dan gangguan fasilitas umum.

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi kepada Masyarakat tentang potensi dan kerentanan wilayah terhadap bencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana dengan cara memberikan akses informasi rawan bencana yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap potensi bencana dan mengurangi risiko dan dampak bencana melalui deteksi dini dan mitigasi. Pelayanan informasi rawan bencana dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana. Jenis pelayanannya berupa pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui upaya preventif, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana dan mewujudkan masyarakat yang tanggap, tangguh, dan siap siaga bencana. Metode pelaksanaan pelayanan SPM ini melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi di masyarakat, sekolah, tempat bekerja maupun di wilayah siaga bencana.

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tujuan dari jenis pelayanan dasar ini adalah untuk memberikan pelayanan penyelamatan jiwa dan evakuasi korban ketika terjadi bencana, agar dapat meminimalkan jumlah korban jiwa dan luka serta kerusakan yang lebih besar.

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, serta evakuasi korban

kebakaran secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa dan luka akibat kebakaran, menyelamatkan masyarakat dari bangunan atau area terdampak kebakaran dan mengurangi kerugian material dan mempercepat proses penanganan kebakaran.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.53 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	16	16	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	802.350	802.350	0	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	856	856	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.483	2.483	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	116.703	116.703	0	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perda/perkada;
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM terutama PPNS di Satpol PP;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian SPM seperti mobil dan peralatan pemadam kebakaran, perahu dan logistik penunjang kebencanaan;

- d. Masih banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi atau sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS);
- e. Belum tersedianya data dan peta rawan bencana yang telah dimutakhirkan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Penguatan koordinasi dengan Babinsa dan Linmas;
- b. Kolaborasi aktif dengan BMKG, BNPB, TNI/POLRI dan Pemerintah daerah;
- c. Pengembangan desa tangguh bencana; dan
- d. Simulasi evakuasi rutin bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan Masyarakat.

2.1.5.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar di bidang kesejahteraan social. Beberapa komponen utama SPM bidang sosial, diantaranya:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar yang tidak berada di dalam panti dapat mandiri. Bentuk layanannya biasanya berupa pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, terapi, dan reintegrasi sosial.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan dasar rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang berada di luar panti agar mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan layanan social, dengan bentuk pelayanan seperti rehabilitasi sosial, konseling dan pengasuhan sementara.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada lanjut usia (lansia) terlantar di luar panti agar tetap dapat hidup mandiri dan layak. Bentuk pelayanannya berupa memberikan bantuan social dan pelayanan medis.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

SPM ini menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis yang hidup di luar panti, dengan tujuan untuk menurunkan jumlah gelandangan dan pengemis. Bentuk pelayanannya berupa pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemulangan ke daerah asal.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana

Tujuan dari pelayanan ini adalah memberikan perlindungan sosial dasar dan jaminan sosial minimum bagi individu atau kelompok masyarakat yang menjadi korban bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca-bencana, agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Bentuk layanannya berupa distribusi bantuan kebutuhan dasar, pelayanan psikososial berupa dukungan mental dan *trauma healing*, bantuan pemulihan social berupa santunan uang dan hunian sementara.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.54 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	206	206	0	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	62	62	0	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	212	212	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	42	42	0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca	Orang	2.638	2.638	0	100

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
	Bencana Bagi Korban Bencana					

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Sosial telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya verifikasi data PPKS di Basis Data Terpadu (BDT) sehingga belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- Tingginya mobilitas dan keberulangan gelandangan/pengemis terutama di wilayah perkotaan;
- Belum adanya keterbatasan jumlah rumah singgah;
- Masih tingginya angka eksploitasi anak di jalanan; dan
- Pada saat terjadi bencana terkadang data korban bencana tidak segera tersedia dan terverifikasi

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Sosial, antara lain dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penyediaan rumah singgah meskipun belum optimal, pelatihan TAGANA dan pekerja sosial untuk respon darurat dan peningkatan integrasi layanan sosial dengan BPBD, PMI, dan LSM.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Data kerja sama pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pola kolaborasi. Pada tahun 2020, total kerja sama tercatat sebanyak 40 kegiatan, yang terdiri dari 19 KESBER, 13 PKS, dan 8 NPHD, tanpa adanya kerja sama luar negeri. Memasuki 2021, jumlah kerja sama meningkat menjadi 57, dengan dominasi PKS sebanyak 28 kegiatan, disusul oleh KESBER (20) dan NPHD (9). Pada 2022, tren peningkatan ini berlanjut dengan total 93 kerja sama, termasuk penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Makinohara sebagai satu-satunya kerja sama luar negeri saat itu.

Lonjakan besar terjadi pada 2023, di mana total kerja sama mencapai puncaknya yaitu 188 kegiatan, didorong oleh peningkatan signifikan pada KESBER (87), PKS (55), dan NPHD (45), serta adanya kerja sama luar negeri dengan Korea. Namun, memasuki 2024, terjadi penurunan drastis dalam jumlah kerja sama menjadi hanya 70 kegiatan, dengan KESBER sebanyak 41, PKS sebanyak 22, dan NPHD sebanyak 7, tanpa adanya kerja sama luar negeri. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kerja sama cenderung meningkat hingga 2023, tetapi mengalami penurunan tajam pada 2024, sementara kerja sama luar negeri masih sangat terbatas dan hanya tercatat dua kali selama periode ini.

Tabel 2.55 Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2020 - 2024

Tahun	KSDD / KSDPK / SINERGITAS			Kerja Sama Luar Negeri	Total
	Kesepakatan Bersama	Perjanjian kerjasama (PKS)	Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD)		
2020	19	13	8	-	40
2021	20	28	9	-	57
2022	37	40	15	LOL dengan Makinohara	93
2023	87	55	45	LOL dengan Korea	188
2024	41	22	7	-	70

Sumber: Bagian Kerjasama SETDA Kabupaten Sumedang, 2025

Terdapat tren peningkatan jumlah kerja sama hingga 2023, tetapi kemudian menurun tajam pada 2024. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, atau kondisi global. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tahun 2023 merupakan periode puncak aktivitas kerja sama. Hal ini bisa dipengaruhi oleh program strategis tertentu, momentum politik, atau dorongan kebijakan yang mendukung peningkatan kolaborasi.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda), antara lain :

1) Penyediaan Layanan Publik

BUMD dapat menyediakan layanan dasar seperti air bersih, layanan perbankan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui keuntungan usaha, BUMD dapat memberikan dividen ke kas daerah yang bisa digunakan untuk program sosial dan infrastruktur.

3) Pendorong Ekonomi Lokal

BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

4) Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Barang Strategis

Dalam kondisi tertentu seperti inflasi atau krisis, BUMD bisa intervensi pasar untuk menstabilkan harga.

5) Digitalisasi Layanan Publik

BUMD berbasis teknologi dapat membantu pemda dalam pelayanan digital, seperti pembayaran pajak online atau layanan perizinan.

Tabel 2.56 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Usaha

No	Nama BUMD	Jenis usaha	Perda pendirian
1	Perumda BPR Bank Sumedang	Jasa keuangan/Perbankan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang
2	Perumda Air Minum Tirta Medal	Air Minum	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang
3	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Jasa keuangan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran

No	Nama BUMD	Jenis usaha	Perda pendirian
			Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
4	PT. Kampung Makmur	Aneka usaha	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda)

Sumber: Bagian Ekonomi SETDA (2025)

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai.

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai sesuai tugas, pokok dan fungsi dengan memperhatikan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2020-2024 sebagai dasar dalam merumuskan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2026-2030.

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2026-2030 ini dilakukan analisis terhadap kinerja APBD dan neraca keuangan daerah tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Pendapatan Transfer, meliputi:
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Transfer antar-daerah.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Klasifikasi Belanja Terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi;
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b. Belanja Modal:
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Belanja Aset Lainnya;
 - c. Belanja Tidak Terduga:
 - 1) Keadaan darurat;

- 2) Keperluan mendesak;
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer:

- 1) Belanja Bagi Hasil; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

e. Pembiayaan Terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan reviu dari BPK RI dengan hasil Opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang baik.

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Sumber: SAP).

Peran masing-masing komponen laporan keuangan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Peran Informasi keuangan yang disajikan dalam LRA terhadap pengambilan keputusan manajerial adalah bahwa data yang terdapat dalam LRA mampu memberikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik (feedback value) dan manfaat prediktif (predictive value) dalam mendukung pengambilan Keputusan manajemen pemerintah daerah.

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*) diperoleh dari data yang menggambarkan tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah/penyerapan anggaran. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi atas kinerja keuangan masa lalu, serta untuk memperbaiki perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*), dapat diperoleh dari informasi pembiayaan surplus/defisit anggaran. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung perkiraan alokasi untuk pembayaran angsuran pinjaman pada anggaran tahun berikutnya atau menaksir pendapatan daerah dari optimalisasi dana idle yang diinvestasikan.

Kedua manfaat tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil Keputusan apabila penyajian kuantitatif dalam LRA tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam CALK disajikan informasi tentang hambatan atau kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah atau penyerapan anggaran belanja, tingkat beban bunga atas pinjaman atau pendapatan bunga dari optimalisasi dana idle yang diinvestasikan.

Informasi yang diperoleh dari LRA dan penjelasan dalam CALK terkait rincian pos-pos yang terdapat dalamnya dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan kebijakan antara lain:

- a. Dari sisi pendapatan daerah, bagaimana kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan/kendala dalam merealisasikan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Bagaimana strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, apakah diperlukan tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui penagihan pajak dan retribusi serta bagaimana koordinasi yang harus dilakukan dalam proses pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- b. Dari sisi belanja daerah, bagaimana kebijakan yang akan diambil dalam rangka efisiensi belanja pegawai yang semakin meningkat, efektivitas dan standarisasi belanja pegawai, efisiensi belanja administrasi perkantoran, serta pemenuhan belanja pelayanan publik

melalui program dan kegiatan yang dapat mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

- c. Dalam pengelolaan pinjaman daerah, dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tentang berapa pinjaman maksimal yang dapat diperoleh, tingkat suku bunga, serta besaran angsuran setiap tahun yang harus dilokasikan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
- d. Dibiidang investasi dalam hal terdapat dana surplus, apakah akan dilaksanakan penyertaan modal pada BUMN/BUMD, atau akan dialihkan pada investasi lainnya yang lebih memberikan manfaat pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

2.2.1 Realisasi Data APBD Tahun 2020-2024

Tabel 2.57 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN DAERAH					
A.	Pendapatan Asli Daerah	444.430.247.449,44	470.281.819.936,29	518.986.812.154,84	518.684.991.990,44	566.312.286.068,16
	Pajak Daerah	180.222.612.157,00	198.326.131.839,00	221.379.897.839,00	222.791.864.642,00	242.774.018.178,00
	Retribusi Daerah	8.300.206.720,00	6.731.513.966,00	9.276.092.781,00	8.473.124.358,00	300.530.090.423,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.929.327.383,00	11.164.520.965,00	12.643.497.231,00	12.491.956.500,00	11.880.680.700,00
	Lain - Lain PAD yang Sah	244.978.101.189,44	254.059.653.166,29	275.687.324.303,84	274.928.046.490,44	11.127.496.767,16
B.	Pendapatan Transfer	2.318.347.156.451,00	2.233.686.395.115,00	2.365.573.220.560,00	2.326.100.313.524,00	2.485.804.727.800,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.628.340.815.970,00	1.892.016.917.253,00	2.039.555.091.538,00	2.020.724.604.782,00	2.216.858.539.145,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	306.391.730.000,00	341.669.477.862,00	326.018.129.022,00	305.375.708.742,00	268.946.188.655,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	134.266.775.232,00	-	-	-	
	Bantuan Keuangan	249.347.835.249,00	-	-	-	
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	3.411.071.029,00	537.133.033,00	4.989.810.365,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.887.971.103.743,84	2.845.322.438.547,44	3.057.106.824.233,16
2.	BELANJA					
A.	BELANJA OPERASI	1.949.881.150.929,00	1.955.814.792.559,00	2.057.716.538.601,00	2.067.545.086.538,00	2.261.695.440.153,00
	Belanja Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.182.261.056.674,00	1.169.624.519.375,00	1.136.204.761.480,00	1.211.094.932.494,00
	Belanja Barang dan Jasa	738.886.933.513,00	709.093.186.272,00	803.235.286.510,00	855.904.168.659,00	924.352.551.239,00
	Belanja Bunga	0	500.587.500,00	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	95.782.500,00	450.000.000,00	700.000.000,00
	Belanja Hibah	33.562.360.500,00	59.369.641.613,00	78.047.993.016,00	65.146.756.399,00	121.284.456.420,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	4.590.320.500,00	6.712.957.200,00	9.839.400.000,00	4.263.500.000,00
B.	BELANJA MODAL	498.497.676.052,00	353.171.282.580,00	480.578.259.481,00	405.717.844.656,00	372.319.512.856,00
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	6.967.211.399,00	1.262.126.299,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
D.	BELANJA TRANSFER	373.484.680.048,00	379.331.582.631,00	389.855.052.943,00	439.705.184.266,00	447.760.897.239,00
	Belanja Bagi Hasil	20.044.107.816,00	23.441.269.922,00	29.486.323.500,00	30.551.038.950,00	31.519.669.750,00
	Belanja Bantuan Keuangan	353.440.572.232,00	355.890.312.709,00	360.368.729.443,00	409.154.145.316,00	416.241.227.489,00
	JUMLAH BELANJA	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.930.935.975.245,00	2.919.935.326.859,00	3.083.037.976.547,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	36.124.202.138,44	123.734.720.436,29	-42.964.871.501,16	-74.612.888.311,56	-25.931.152.313,84
3.	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	161.530.195.031,74	56.002.538.428,18
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	40.614.170.831,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	51.000.000.000,00	0	0	85.231.708,00	0
	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0	7.000.000.000,00	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	232.339.367.075,90	161.615.426.739,74	96.616.709.259,18
	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0
	Penyertaan Modal	9.400.000.000,00	8.870.000.000,00	12.329.670.795,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	73.180.399.442,00	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	71.000.000.000,00	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.180.399.442,00	0	0	0	0
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	7.000.000.000,00	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	27.329.670.795,00	31.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan NETTO	81.350.444.501,17	108.604.646.639,61	205.009.696.280,90	130.615.426.739,74	94.616.709.259,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	162.044.824.779,74	56.002.538.428,18	68.685.556.945,34

Sumber:
1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (audited BPK RI)
2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2024 (Database SIPKD per 31 Desember 2024)

Tabel. 2.58
Neraca Daerah Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	197.856.046.636,21	325.915.892.336,96	266.311.138.675,32	184.640.788.747,37	297.198.292.444,25	19,18
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	117.474.983.002,61	232.029.252.155,90	161.546.137.893,74	56.002.538.428,18	181.987.119.135,88	56,69
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Piutang Pendapatan	82.648.849.278,33	97.685.121.249,00	112.260.901.550,88	136.619.697.167,00	128.036.467.290,12	12,13
1.1.4.	Piutang Lainnya	247.336.700,00	122.416.700,00	8.383.300,00	51.500.000,00	51.500.000,00	92,66
1.1.5.	Penyisihan Piutang	(28.539.322.500,29)	(35.964.394.510,67)	(41.862.755.145,35)	(49.225.746.431,53)	(49.225.746.431,53)	15,00
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	315.939.700,31	259.198.630,14	131.698.630,14	57.236.438,36	479.311.780,82	153,43
1.1.7.	Persediaan	25.708.260.455,25	31.784.298.112,59	34.226.772.445,91	41.135.563.145,36	35.869.640.668,96	9,68
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	108.755.751.125,34	138.049.272.383,73	145.306.878.217,91	155.958.119.420,18	155.958.119.420,18	9,88
1.2.1	Investasi Non Permanen	1.161.713.218,25	1.013.282.596,00	1.000.932.571,62	890.688.754,25	890.688.754,25	(6,25)
1.2.2	Investasi Permanen	107.594.037.907,09	137.035.989.787,73	144.305.945.646,29	155.067.430.665,93	155.067.430.665,93	10,03
1.3.	ASET TETAP	2.999.729.426.716,04	3.060.050.155.275,52	3.306.846.836.622,22	3.445.043.021.626,89	3.548.846.406.015,04	4,32
1.3.1.	Tanah	422.896.537.255,73	433.690.528.646,73	582.116.454.610,77	779.803.484.596,70	774.792.744.641,68	17,52
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1.251.587.053.191,91	1.359.768.122.700,89	1.525.702.360.148,95	1.620.650.976.708,34	1.684.910.232.112,98	7,76
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.282.934.922.612,71	1.372.194.664.552,32	1.541.028.614.238,83	1.669.060.803.578,38	1.681.778.633.519,38	7,08
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.765.379.833.035,32	2.850.481.458.311,11	3.051.233.809.417,23	3.230.891.609.798,35	3.260.884.786.146,59	4,23
1.3.5.	Aset tetap lainnya	183.651.455.691,37	196.060.575.980,47	212.813.927.498,19	231.399.529.043,12	231.400.507.293,12	6,01
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	11.508.274.800,00	83.336.411.117,00	42.865.020.217,00	13.664.221.546,00	12.633.462.680,00	124,98
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(2.918.228.649.871,00)	(3.235.481.606.033,00)	(3.648.913.349.508,75)	(4.100.427.603.644,00)	(4.097.553.960.378,71)	8,99
1.4.	ASET LAINNYA	45.381.383.891,37	3.795.589.724,56	4.986.722.898,75	6.985.501.044,99	8.650.501.044,99	0,92
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	40.125.412,00	254.472.912,00	342.006.312,00	346.289.612,00	346.289.612,00	142,46
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak Ketiga	-	69.173.543,00	69.173.543,00	69.173.543,00	69.173.543,00	-
1.4.4.	Aset Tidak Berwujud	43.397.510.805,59	44.753.675.421,89	46.127.823.312,26	49.464.493.935,26	51.129.493.935,26	4,20
1.4.5.	Aset Lain-lain	33.225.567.830,49	33.378.205.820,49	43.926.696.727,67	42.718.990.580,32	42.738.197.580,32	7,34
1.4.6.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.281.820.156,71)	(41.474.370.496,33)	(42.951.089.531,93)	(44.216.328.631,59)	(44.216.328.631,59)	9,77
1.4.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(33.185.567.476,49)	(42.527.887.464,25)	(41.397.117.994,00)	(41.416.324.994,00)	6,38
	JUMLAH ASET DAERAH	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	3.723.451.576.414,20	3.792.627.430.839,43	4.010.653.318.924,46	4,60
2	KEWAJIBAN						
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	91.757.733.513,40	54.253.007.721,49	50.217.040.528,49	17,22
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	336.363,00	9.987.632.008,00	3.277.500,00	-	-	742.275,41
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	607.619.000,00	1.202.786.157,15	2.367.125.480,40	2.209.452.472,49	1.894.934.072,49	43,46
2.1.5.	Utang Belanja	38.583.836.380,00	34.329.288.637,00	82.764.944.871,00	51.810.728.979,00	48.322.106.456,00	21,48
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.850.000,00	248.278.850,00	6.622.385.662,00	232.826.270,00	-	865,40
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	91.757.733.513,40	54.253.007.721,49	50.217.040.528,49	17,22
3	EKUITAS						
3,1	EKUITAS	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.631.693.842.900,80	3.738.374.423.117,94	3.960.436.278.395,97	4,57
3.1.1.	Ekuitas	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.631.693.842.900,80	3.738.374.423.117,94	3.960.436.278.395,97	4,57
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.631.693.842.900,80	3.738.374.423.117,94	3.960.436.278.395,97	4,57
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	3.723.451.576.414,20	3.792.627.430.839,43	4.010.653.318.924,46	4,60

Sumber:
Diolah BKAD Kabupaten Sumedang

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 2.59
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026 - 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	566.312.286.068,16	668,520,581,838.08	698,424,887,188.68	730,167,471,059.75	763,932,440,746.74	799,936,993,404.48
04.01.01	Pajak Daerah	242.774.018.178,00	328,358,112,686.06	340,657,988,370.13	353,562,878,664.27	367,102,783,857.07	381,309,197,429.31
04.01.02	Retribusi Daerah	300.530.090.423,00	316,559,139,155.90	333,637,317,808.68	351,907,916,154.56	371,518,561,689.96	392,647,081,717.53
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.880.680.700,00	12,437,316,835.00	12,497,003,419.17	12,556,988,436.27	12,617,273,378.45	12,677,859,745.34
04.01.04	Lain - Lain PAD yang Sah	11.127.496.767,16	11,166,013,161.12	11,632,577,590.70	12,139,687,804.65	12,693,821,821.26	13,302,854,512.30
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.485.804.727.800,00	2,378,389,568,331.35	2,411,043,253,858.91	2,444,287,645,333.50	2,478,136,332,395.27	2,512,603,266,208.36
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.216.858.539.145,00	2,243,143,532,586.45	2,273,372,297,399.11	2,304,143,269,744.51	2,335,469,069,294.50	2,367,362,657,845.57
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.946.188.655,00	135,246,035,744.90	137,670,956,459.80	140,144,375,588.99	142,667,263,100.77	145,240,608,362.79
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.989.810.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.057.106.824.233,16	3,046,910,150,169.43	3,109,468,141,047.59	3,174,455,116,393.25	3,242,068,773,142.01	3,312,540,259,612.84
5	BELANJA						
05.01	BELANJA OPERASI	2.261.695.440.153,00	2,262,489,835,198.28	2,291,570,737,376.58	2,321,601,654,205.99	2,352,610,930,950.86	2,384,627,763,543.84
05.01.01	Belanja Pegawai	1.211.094.932.494,00	1,212,306,027,426.49	1,209,881,415,371.64	1,207,461,652,540.90	1,205,046,729,235.82	1,202,636,635,777.34
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	924.352.551.239,00	979,498,901,638.48	1,008,883,868,687.63	1,039,150,384,748.26	1,070,324,896,290.71	1,102,434,643,179.43
05.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
05.01.04	Belanja Subsidi	700.000.000,00	721,000,000.00	742,630,000.00	764,908,900.00	787,856,167.00	811,491,852.01
05.01.05	Belanja Hibah	121.284.456.420,00	66,446,600,787.00	68,439,998,810.61	70,493,198,774.93	72,607,994,738.18	74,786,234,580.32
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	4.263.500.000,00	3,517,305,346.31	3,622,824,506.70	3,731,509,241.90	3,843,454,519.16	3,958,758,154.73

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
05.02	BELANJA MODAL	372.319.512.856,00	379,765,903,113.12	387,361,221,175.38	395,108,445,598.89	403,010,614,510.87	411,070,826,801.09
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.262.126.299,00	12,567,788,187.52	13,196,177,596.90	13,855,986,476.74	14,548,785,800.58	15,276,225,090.61
05.04	BELANJA TRANSFER	447.760.897.239,00	443,356,350,015.41	447,122,670,061.19	451,018,524,587.18	455,058,727,805.57	459,261,114,166.51
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	31.519.669.750,00	31,655,913,915.59	33,363,731,780.87	35,190,791,615.46	37,151,856,169.00	39,264,708,171.75
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.241.227.489,00	411,700,436,099.82	413,758,938,280.32	415,827,732,971.72	417,906,871,636.58	419,996,405,994.76
	JUMLAH BELANJA	3.083.037.976.547,00	3,098,179,876,514.33	3,139,250,806,210.05	3,181,584,610,868.80	3,225,229,059,067.88	3,270,235,929,602.04
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-25.931.152.313,84	-51,269,726,344.90	-29,782,665,162.46	-7,129,494,475.55	16,839,714,074.13	42,304,330,010.80
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	96.681.587.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.002.538.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.614.170.831,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.614.170.831,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	64.878.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00
	Pembiayaan NETTO	94.681.587.819,18	-11,000,000,000.00	-11,500,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00	-2,385,829,169.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.750.435.505,34	-62,269,726,344.90	-41,282,665,162.46	-4,129,494,475.55	19,339,714,074.13	39,918,500,841.80

Sumber:

BAPENDA dan BKAD Kabupaten Sumedang (2024) diolah BAPPPPEDA

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan kabupaten Sumedang mencakup (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (4) Aspek Daya Saing dan (5) Aspek Pelayanan Umum. Aspek-aspek tersebut sesungguhnya saling berhubungan satu dengan lainnya. Permasalahan dari setiap aspek diidentifikasi berdasarkan gambaran umum wilayah dan hasil analisis capaian/kinerja penyelenggaraan pembangunan yang menyertakan catatan-catatan kondisi dan permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Sumedang di periode pembangunan sebelumnya.

2.3.1.1. Aspek Geografi

a. Struktur Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berada di daerah dengan topografi pegunungan dan berbukit yang memiliki ketinggian 25 sampai 1.667 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumedang merupakan daerah dengan tingkat gerakan tanah rendah hingga tinggi. Luas kawasan rawan bencana gerakan tanah mencapai kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten. Struktur geologi Kabupaten Sumedang tersusun dari jenis batuan aluvial, produk gunung api muda, dan produk gunung api tua. Proses pelapukan yang terjadi pada batuan vulkanik akan menyebabkan terbentuknya batuan lapuk dan tanah yang bersifat residual. Sifat dari tanah residual sendiri yaitu mudah terlepas dan rentan akan terjadinya proses tanah longsor.

Disamping itu, Kabupaten Sumedang dilalui sejumlah sumber gempa patahan aktif yang berpotensi menyebabkan terjadinya gempa di antaranya Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo. Pada akhir tahun 2023 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang yang bersumber dari sesar baru yang aktif akibat dari aktivitas sesar aktif yaitu Sesar Cileunyi-Tanjungsari. Akibat gempa bumi tersebut ditemukan sesar aktif baru yang melewati Sumedang yaitu Sesar Cipeles (Sumber BMKG, Tahun 2024).

b. Ancaman Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain dipengaruhi struktur

geologi, risiko bencana pergerakan tanah longsor semakin meningkat ketika curah hujan tahunan ekstrim diatas 3.000 mm atau saat fenomena la nina terjadi di wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat. Bencana banjir juga kerap terjadi pada wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Sumedang Selatan saat curah hujan tinggi.

Ketika terjadi perubahan iklim dengan curah hujan yang rendah atau saat adanya fenomena el nino beberapa wilayah di timur dan utara Kabupaten Sumedang rentan mengalami kekeringan. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor rentan kekeringan akibat daya dukung air yang telah melampaui ambang batas.

Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan kekeringan menyebabkan kerugian pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan permukiman. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

c. Alih Fungsi Lahan Khususnya Lahan Produktif

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah pertanian di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata 20% dari total PDRB Kabupaten Sumedang. Dalam dua dekade terakhir terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang mengharuskan terjadinya alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Sumedang. Proyek strategis nasional tersebut antara lain Bendungan Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Sadawarna, dan Bendungan Cipanas.

Meskipun alih fungsi lahan pertanian mencapai lebih dari 1.000 hektar, namun Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian dan pencetakan sawah baru. Namun disisi lain alih fungsi lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan petani gurem di Kabupaten Sumedang.

Alih fungsi lahan produktif juga disebabkan urban sprawl atau penyebaran permukiman yang tidak terkendali dari Kawasan Metropolitan Bandung telah menyebabkan. Urban Sprawl akan berpotensi meningkat di wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Segitiga Emas Rebana. Pembangunan permukiman di Kabupaten Sumedang juga mendesak ke lahan yang berada di lereng dengan kemiringan landai dan agak curam.

2.3.1.2. Aspek Demografi

Pertambahan penduduk yang eksponensial akan berdampak pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan peluang dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Dengan proyeksi rata-rata pertambahan penduduk 3,81% hingga tahun 2045, diperlukan peningkatan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hunian, sanitasi, air bersih, pangan dan energi. Peningkatan pelayanan dasar perlu memperhatikan pada kelompok perempuan dan usia lanjut yang diproyeksi akan semakin meningkat.

Kabupaten Sumedang tetap memperoleh bonus demografi pada rentang usia 30-44 tahun. Bonus demografi akan menjadi modal dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu infrastruktur konektivitas dan mobilitas masyarakat akan semakin dibutuhkan. Infrastruktur jalan harus dapat menghubungkan seluruh wilayah simpul-simpul perekonomian. Begitu pula jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Peningkatan kepadatan penduduk diproyeksikan masih berada di Kecamatan Jatinganor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Kepadatan di empat kecamatan tersebut akibat peningkatan kebutuhan hunian di Wilayah Metropolitan Bandung. Kepadatan penduduk juga tetap terkonsentrasi di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Sumedang. Peningkatan kepadatan penduduk dapat terjadi di Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo sebagai dampak pengembangan Kawasan Segitiga Rebana.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah perlu dipersiapkan sebagai eksternalitas pertambahan penduduk dan aktivitas sosial ekonominya. Pengelolaan sampah harus dimulai dengan mengurangi timbunan sampah dari rumah tangga dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga perlu menjaga kawasan lindung dalam tata ruang sehingga tetap dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2.3.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Kemiskinan

Tren kemiskinan absolut di Kabupaten Sumedang menurun dalam 20 tahun terakhir. Namun demikian persentase penduduk miskin sebesar 9,36% (tahun 2023) masih menjadi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Sumedang terkonsentrasi pada penduduk yang bermata pencaharian petani atau penduduk yang tergantung pada sektor pertanian. Dengan sumber daya alam yang mendukung hampir sepertiga rumah tangga di Kabupaten Sumedang bergantung pada sektor pertanian. Jika diproporsikan, kelompok penduduk miskin di sektor pertanian mencapai sebesar 35,71% pada tahun 2022.

Secara kewilayahan proporsi penduduk miskin tertinggi berada di sentra pertanian seperti Jatinunggal dan Jatigede. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya.

Beberapa akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif.

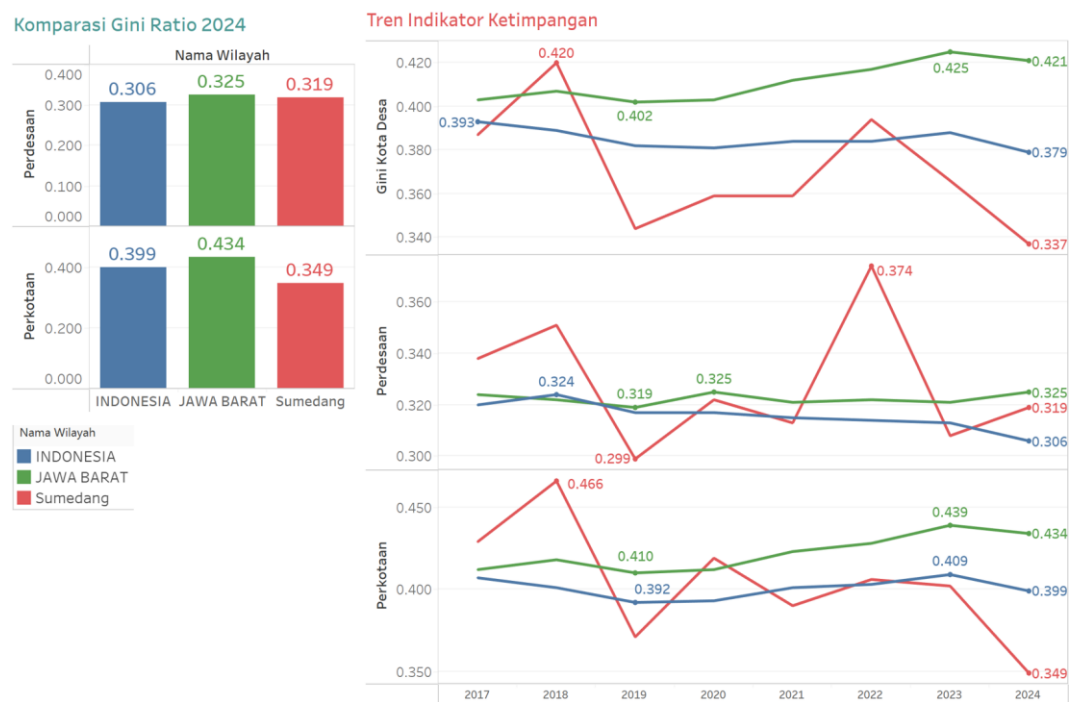
b. Ketimpangan

Gini Ratio ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, di mana semakin rendah nilai Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Pada tahun 2024, Sumedang mencatatkan Gini Ratio sebesar 0,337 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan; 0,349 untuk wilayah perkotaan; dan 0,319 untuk wilayah perdesaan. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam ketimpangan, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat (0,434 untuk perkotaan) dan Indonesia (0,399 untuk perkotaan). Hal ini mencerminkan bahwa Sumedang telah berhasil mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara keseluruhan, lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.

Namun, meskipun ada perbaikan secara keseluruhan, terdapat fluktuasi yang lebih besar di wilayah perdesaan, terutama pada tahun 2022

yang mencatatkan ketimpangan yang lebih tinggi. Gini Ratio untuk perdesaan Sumedang sempat mencapai 0,374 pada tahun 2022, yang menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih tinggi di daerah pedesaan. Meskipun demikian, ketimpangan di perdesaan menunjukkan penurunan kembali di 2024 menjadi 0,319, yang mengindikasikan adanya perbaikan meskipun fluktuasi masih terlihat.

Grafik 2.86 Komparasi Gini Ratio



c. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi permasalahan pembangunan daerah dalam periode RPJPD 2005-2025. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,89% dan TPT terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,41%. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja serta pembatasan aktivitas pada saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT.

TPT Kabupaten Sumedang masih didominasi penduduk usia 15-24 tahun dengan proporsi diatas 50% dari keseluruhan angkatan kerja. Tingginya TPT juga didominasi para pengangguran terdidik sebesar akibat ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja (job-education mismatch). Ketidaksiapan mental bagi angkatan kerja usia muda menjadi faktor yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran. Selepas masa pandemi jumlah pengangguran dengan

karakteristik putus asa semakin meningkat, sedangkan pengangguran dengan karakteristik sedang mencari pekerjaan jumlahnya menurun.

Rendahnya tingkat serapan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang dipengaruhi pula oleh tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tergolong tinggi. UMK Kabupaten Sumedang hampir setara dengan UMK Kabupaten Bandung dan UMK Kabupaten Bandung Barat yang tergolong daerah industri. Hal ini menyebabkan penanaman modal untuk industri padat karya lebih bergeser ke arah pengembangan Kawasan Segitiga Rebana terutama Kabupaten Majalengka dengan UMK lebih rendah dari Kabupaten Sumedang.

d. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang sejak tahun 2010 menunjukkan tren yang positif meningkat meskipun kontraksi perekonomian yang dalam pernah terjadi saat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 hingga mencapai -1,12%. Pertumbuhan ekonomi daerah pada rentang antara 4,0 – 6,5 %, belum dapat menjadi akselerator penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Tiga kontributor PDRB terbesar yaitu Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan menjadi kantung kemiskinan dikarenakan distribusi dari pertumbuhan yang tidak inklusif. Daya lenting (resiliensi) perekonomian Kabupaten Sumedang juga tergolong lambat. Tercatat perlu waktu enam tahun untuk memulihkan ekonomi kembali diatas 6% sejak perekonomian tertekan pada tahun 2014. Begitu pula sejak disrupsi ekonomi akibat Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang belum dapat kembali tumbuh diatas 6%. Beberapa faktor penyebab tingkat resiliensi perekonomian Kabupaten Sumedang yang lambat antara lain ketergantungan ekonomi pada sektor padat karya, infrastruktur yang belum merata, serta begitu kompleksnya penanganan krisis ekonomi karena tidak hanya ditataran lokal tapi dipengaruhi juga oleh pengaruh regional yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan pemerintah daerah.

2.3.1.3.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia untuk menumbuhkan produktivitas. Pada aspek pendidikan, Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah. Pembangunan pendidikan selama dua puluh tahun terakhir menghantarkan capaian RLS tahun 2024 sampai dengan 8,74 tahun dan HLS tahun 2024 sampai dengan 13,02 tahun.

Adapun pengeluaran per kapita yang mengindikasikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baru mencapai 11,59 juta rupiah pada tahun 2024.

Pembangunan manusia yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 mencapai 74,57 poin meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,02 poin.

Selain itu Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Meleak Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 sebesar 96,22 poin, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 96,13 poin. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai 76,99 poin, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,438 poin. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458 poin. Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang masuk katagori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan upaya di berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang. Faktor lainnya adalah keterbatasan dan ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

b. Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya

Keseimbangan pembangunan selain pembangunan secara fisik tapi harus juga di perkuat dan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal tersebut akan membangun kekuatan secara mental dan spiritual sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif dan harmonis dalam berbagai aspek pembangunan.

Selain dukungungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

Selain itu upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang.

Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan.

2.3.1.4. Aspek Daya Saing

2.3.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang masih lambat, hal tersebut dikarenakan Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan), sehingga sangat rentan terhadap guncangan eksternal dapat di cirikan ketergantungan terhadap Industri pengolahan yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB sebesar 19,32% pada Tahun 2024 yang terus menurun dari tahun 2023, dikarenakan Kawasan industri hanya di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Sedangkan untuk sektor pertanian masih mendominasi tenaga kerja namun secara proporsi terus menurun sejak tahun 2020 dikarenakan profesi sebagai petani bukan menjadi harapan untuk generasi muda. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 19,27%. Sementara untuk sektor perdagangan berkontribusi sebesar 15,82%.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan masih terbatasnya kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor- sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan skala kecil (IKM/UMKM).

2.3.1.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena mempunyai kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menentukan daya saing SDM adalah tingkat Pendidikan.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 berdasarkan data dari BPS baru 8,74 tahun. Capaian ini masih lebih rendah dibanding RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat. Harapan lama

sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 13,02 tahun. Lebih tinggi dibanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.

Salah satu indikator lainnya yang dapat menggambarkan daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 mencapai 69,24%, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 67,76%, artinya bahwa pada tahun 2024 menggambarkan semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan.

2.3.1.4.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang menandakan keberhasilan dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 87,54%. Adanya penambahan ruas jalan baru serta kerusakan akibat bencana alam atau cuaca serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi salah satu faktor penurunan capaian.

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya yang dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 tercatat panjang jembatan dalam kondisi mantap adalah 2.819,08 meter.

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata, berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai 2.115.811 meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang terairi irigasi baik dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat sangat fluktuatif. Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi kondisi baik semakin bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di tahun 2023. Hal ini akibat dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan kondisi irigasi yang rusak berat. Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi irigasi dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 3.765 Ha menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan panjang irigasi primer dan sekunder yang mengalami peningkatan panjang irigasi dengan kondisi baik di tahun 2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air. Adapun sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten Sumedang berasal dari 15 titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses Masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 persentase cakupan pelayanan akses air minum layak baru 82,34% yang terus diupayakan

melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dari sisi penanganan persampahan, Kabupaten Sumedang dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah I Jatinangor meliputi 8 kecamatan;
2. Wilayah II Sumedang Kota meliputi 9 kecamatan;
3. Wilayah III Jatigede meliputi 9 kecamatan.

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta berbagai masalah perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola meningkat 5.105,53 ton dari tahun sebelumnya menjadi 61.896,40 ton (35,41%). Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m²; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Persentase RTHL Kabupaten Sumedang 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2023) terus menurun, Tahun 2022 pada angka 66,75 dan terakhir pada angka 59,63 di tahun 2023.

Sebelum tahun 2021 penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan *Sustainable Development Goals (SDG)*.

2.3.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Saat ini telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi Covid-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Pencapaian di tahun 2023 sebesar 4,83 mengindikasikan untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 4,83 triliun investasi. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi pada tahun 2023 hampir kembali ke tingkat pra-pandemi (2019). Namun demikian pada tahun 2024 ICOR Kabupaten Sumedang Kembali mengalami kenaikan menjadi 5,72 artinya untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 5,72 triliun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya berbagai upaya untuk perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi.

2.3.1.5. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.5.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas

birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 89,62. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3. Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya juga sangat baik mencapai 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2024 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Namun dengan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang yang sudah cukup baik belum dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.5.2. Pelayanan Publik

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan public di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2024 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan public yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar

pelayanan. Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A. Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

Dari hasil penilaian tersebut belum berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap wilayah karena perlu dukungan sarana prasarana dan Sumber Daya aparatur pelayanan yang memadai.

2.3.1.5.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indicator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

2.3.1.5.4. Inovasi Daerah

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan

harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyusunan inovasi di Kabupaten Sumedang. Dalam kurun waktu 2021-2022 telah tersusun sebanyak 330 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori Kabupaten Terinovatif

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan

kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, pada gambar berikut dapat dilihat skematis rangkuman permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek-aspek sebagaimana telah dijelaskan. Selanjutnya dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikenali akar permasalahan pada setiap aspek sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Kerangka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
1.	Geografi	Struktur Geologi	Struktur geologi yang rawan bencana	· Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan gempa yaitu Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo serta sesar patahan baru (sesar cipeles). · Secara geografis menjadi zona merah kawasan rawan longsor. · Belum optimalnya kinerja penanggulangan bencana terutama pada aspek kelembagaan, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan sistem pemulihan pasca bencana.
		Ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrim	Bencana hidrometeorologi	· Resiko Banjir masih tinggi di beberapa wilayah (Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Sumedang Utara dan Selatan). · Tingginya ancaman kekeringan terhadap produktivitas pertanian. · Masih rendahnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.
		Alih fungsi lahan khususnya lahan produktif	Berkurangnya Lahan produktif	· Proyek Strategis Nasional (Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, Waduk Sadawarna dan Waduk Cipanas) yang mengurangi lahan produktif. · Masih Rendahnya mencetak lahan pertanian dan sawah baru. · Masuk ke Kawasan strategis Nasional (Kawasan Rebana dan Cekungan Bandung). · Peningkatan penyebaran Kawasan permukiman dan perumahan. · Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
2.	Aspek Demografi	Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	· Tingginya tingkat kelahiran. · Penanganan penduduk usia tua belum optimal. · Tingginya angka urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Ekonomi	Kemiskinan	· Tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif. · Kebijakan yang belum menerapkan konsep <i>pro poor, pro job, pro growth</i>, dan <i>pro environment</i> dengan memperhatikan <i>community empowerment</i>. · Masih ditemukan belum tepat sasaran terkait bantuan Sosial. · Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam.
			Ketimpangan	· Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi karena disparitas upah tenaga kerja yang lebih lebar dan diversitas jenis pekerjaan yang lebih beragam. · Ketimpangan akses pemerataan pembangunan ekonomi. · Kebijakan yang mengatur redistribusi pendapatan dan pajak belum menjadi instrumen yang mengurangi ketimpangan.
			Pengangguran	· Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah. · Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan). · Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja. · Belum <i>link and match</i> nya antara Pendidikan dengan dengan kebutuhan pasar kerja. · Keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan kaum disabilitas ke dunia kerja.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
			Pertumbuhan Ekonomi	· Masih tergantungnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. · Masih rendahnya Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata. · Kinerja ekosistem ekonomi digital yang belum optimal karena belum meratanya infrastruktur digital dan literasi digital bagi pelaku usaha. · Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan terutama di sektor ekonomi kreatif, lapangan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
		Kesejahteraan Sosial Budaya	Kualitas Sumber Daya Manusia.	· Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar. · Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. · Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. · Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kesehatan mental. · Masih Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi. · Belum Optimalnya pelayanan menuju New Zero Stunting. · Belum meratanya Pelayanan jaminan Kesehatan. · Rendahnya partisipasi angkatan kerja Perempuan dibanding laki-laki karena aspek kesempatan kerja dan penghasilan. · Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten Sumedang masih pada kategori menengah kebawah.
			Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	· Rendahnya peran ekonomi budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi pendidikan, serta ketahanan sosial yang dapat menciptakan sikap toleran dan rasa aman bagi masyarakat. · Belum optimalnya peran nilai agama dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, motivasi, dan kontrol sosial kehidupan bermasyarakat. · Menurunnya nilai budaya lokal akibat perkembangan teknologi. · Menurunnya tingkat mental para generasi muda dalam kehidupan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
4.	Aspek Daya Saing	Daya Saing Ekonomi	Lambatnya Pertumbuhan ekonomi	· Belum meratanya infratraktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. · Proyek Strategis Nasional belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. · Masih rentannya sektor-sektor ekonomi akibat dampak dari resesi global maupun regional. · Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor ekonomi kreatif, Perdagangan, Industri padat modal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasar Induk dan UMKM. · Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya alam.
		Daya Saing Sumber Daya Manusia	Capaian IPM Kabupaten Sumedang masih rendah.	· Rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah. · Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM. · Kurangnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja. · Masih Rendahnya usia kerja yang memperoleh pekerjaan. · Pengeluaran per kapita masih rendah di bawah provinsi dan nasional.
		Daya Saing Infrastruktur Wilayah	Masih rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	· Cakupan Pelayanan Irigasi belum memadai dengan luas lahan pertanian yang terairi irigasi teknis. · Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih dan bersanitasi layak masih rendah. · Infrastruktur Konektivitas pendukung perekonomian belum merata. · Kualitas permukiman dan Perumahan serta sarana prasarana pendukungnya masih rendah. · Kecepatan penanganan terhadap kerusakan infrastuktur belum optimal. · Perencanaan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah dan limbah belum optimal. · Infrastruktur pengembangan Digital belum merata. · Masih rendahnya Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. · Belum meratanya Infrastruktur Ruang Publik terbuka hijau yang Ramah anak dan Lansia di setiap Kecamatan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
		Daya saing Investasi	Tingkat Investasi masih rendah	· Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal. · Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial.
5.	Aspek Pelayanan Umum	Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintah berintegritas.	· Sistem Tata Kelola pemerintahan belum terpadu. · Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai di beberapa perangkat daerah · Profesionalisme aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang belum merata. · Distribusi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi. · Kapasitas birokrasi yang belum adaptif dan responsive terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat. · Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal dan merata.
		Pelayanan Publik	Tingkat pelayanan publik belum optimal	· Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat belum merata. · Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. · Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik.
				· Belum terpadu penerapan SPBE di setiap perangkat daerah.
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya dampak Penerapan SPBE terhadap Tata kelola Pemerintahan	· Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD sehingga tingkat sangat tergantung pada server pemerintah pusat (kemendagri).

Sumber: Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

2.3.1.6 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai	Pelayanan Pendidikan belum Optimal yang didukung sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia yg memadai	Literasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum mencapai 62,20% di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sehingga masih perlu peningkatan (Capaian Literasi)
		Masih rendahnya Numerasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi mencapai 51,92% pada tahun 2023 di Kabupaten Sumedang (Capaian Numerasi)
		Karakter peserta didik pada jenjang SD sebesar 89,74% dan jenjang SMP 47,93% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu dikembangkan (Capaian Surver Karakter)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Dasar (Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru PAI, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 50,30% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 6.313 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 4.269 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 2.044 orang)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Menengah Pertama (Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru PKn, Guru B.Indo, Guru Math, Guru IPA, Guru IPS, Guru Ing, Guru SenBud/Muatan Lokal, Guru Prakarya, Guru BK, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 45,58% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2.145 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 1.484 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 661 orang)
		Masih rendahnya Jumlah pendidik yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada jenjang PAUD yaitu 37,16% dari total pendidik di seluruh satuan PAUD formal maupun nonformal (Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4)
		Masih rendahnya Rasio Penilik PAUD DIKMAS yang saat ini 1:27 lembaga sedangkan rasio ideal adalah 1:10 lembaga
		Masih rendahnya Rasio Pengawas TK yang saat ini 1:20 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:15 satuan Pendidikan
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SD yang saat ini 1:14 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:10 satuan Pendidikan
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SMP yang saat ini 1:11 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:7 satuan Pendidikan
		Rendahnya Persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, yaitu 49,22% dari seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD (Angka Kesiapan Sekolah)
		Masih terdapat sekolah yang kekurangan RKB terutama di wilayah padat penduduk
		Masih terdapat bangunan sekolah yang rusak dan membahayakan siswa dan membahayakan warga sekolah
		Masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan TIK dalam mendukung proses belajar mengajar contohnya dlam melaksanakan AKM. Serta msih terdapat sekolah sekolah yang tidak terjangkau oleh jringan internet

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kesehatan		
Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah	Pelayanan kesehatan belum optimal	Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian Balita (AKI/AKB)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan
		Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan Kesehatan
		Jumlah tempat tidur di RSUD masih belum ideal
		Belum optimalnya UHC (Universal Health Coverage)
	Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	Masih terdapatnya kasus stunting
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) dan Tidak Menular
	Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal	Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Masih kurang Memadai	Lebar Jalan Kabupaten dan jalan strategis rata- rata kurang memenuhi standar Jalan Kabupaten
		Akses Jalan menuju akses ke Pariwisata kondisi nya rusak sedang
		Akses Jalan menuju akses ke Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE kondisinya rusak sedang
		Kondisi Jalan dan Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang terlintasi oleh akses jalur tol kondisinya rusak berat
		Jalan Kabupaten yang berada di perbatasan wilayah kondisinya masih rusak berat.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya Sumber daya air	Cakupan Area Irigasi masih Rendah	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal
		Jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan
		Banyak sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang terdampak oleh bencana banjir/longsor
		Perubahan fungsi ruang pertanian menjadi perumahan/permukiman dan infrastruktur lainnya
	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara merata	Penurunan Kapasitas sumber air baku karena alih fungsi lahan
		Berkurangnya kapasitas sumber air baku pada saat musim kemarau
		Kondisi WTP yang sudah tidak optimal
		Tingkat kebocoran air pada jalur transmisi dan distribusi yang masih cukup tinggi
		Bangunan SPAM perdesaan terbangun ada yang terbengkalai
		Pembinaan terhadap keberlanjutan kelompok masyarakat pengelola SPAM kurang optimal
	Rumah Tangga Bersanitasi	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat
		Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes)
		Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal sangat sulit sehingga saat ini limbah domestik masih dibuang ke sungai
	Masih Rendah kondisi bangunan yang sesuai standar	Gedung pemerintahan belum memiliki PBG dan SLF
		Kurangnya pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Umum

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Dokumen Tata Ruang belum sesuai dengan perubahan regulasi dan perkembangan pembangunan	Perlu dilaksanakan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah dikarenakan banyaknya dinamika regulasi
		Investasi belum berjalan secara optimal dikarenakan baru ada 1 (satu) RDTR yang sudah terkoneksi dengan OSS
		Perkembangan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya pemutakhiran data
		Perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen Rencana Detail Tata Ruang karena adanya peraturan perundangan terbaru mengenai penataan ruang
		Perlu disusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang
	Masih Rendahnya Ketaatan Penata Ruangan	Terdapat pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat dan dunia usaha belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang, khususnya terkait dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga perlu dilaksanakan pengendalian terhadap rencana tapak yang sudah disahkan
Masih rendahnya Pelayanan Jasa Kontruksi	Belum tertibnya pelayanan Jasa Konstruksi	Tenaga kerja Konstruksi belum bersertifikat
		Layanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada SIMJAKON belum Optimal (Profil Tenaga Kerja Konstruksi dan BUJK, Pasar Jasa Konstruksi, Materal dan Peralatan Jasa Konstruksi, Pelatihan Jasa Konstruksi, Profil Kecelakaan Kerja proyek Jasa Konstruksi, Peraturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
		Penyedia Jasa Konstruksi belum mempunyai SBU
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi belum Optimal.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar, Perumahan dan pemukiman	Penanganan Infrastruktur Perumahan dan pemukiman belum optimal	Belum optimalnya penanganan limbah domestic, tidak berfungsinya IPLT, belum adanya operator khusus yang mengelola Air Limbah domestik, kesadaran masyarakat terhadap sanitasi masih rendah
		Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh
		Belum adanya database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi standar
		Belum tersusunnya Dokumen RP3KP selaku dokumen perencanaan sektoral bidang perumahan permukiman serta legalisasinya (Perda/Perbup)
		Backlog Rumah di Kabupaten Sumedang Masih Tinggi
		Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih rendah
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belum Optimalnya Penguatan Penegakan regulasi Daerah	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah
		Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Terdapatnya Regulasi yang tumpang tindih
		Daya Dukung pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas kurang optimal. Banyak anggota Linmas yang telah berusia lanjut sehingga berpengaruh kepada kualitas SDM Satlinmas
		Kurang minatnya warga masyarakat pemuda/pemudi yang ingin menjadi anggota linmas
Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Penanggulangan dan Penanganan Bencana belum optimal	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana
		Belum memadainya Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana
		Kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Sosial		
Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid)
		Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
		Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa
		Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
Tenaga kerja		
Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Kompetensi Pencari Kerja masih rendah	Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja
	Tidak sebandingnya antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan Kerja	Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja
		Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha
		Masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha
	Belum memadainya SDM Pndukung Ketenaga kerjaan	Kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial
		Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja
		Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Responsif Gender	Rendahnya kualitas hidup perempuan	Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan
		Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif
		Partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum masih rendah
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak
	Masih Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan
		Kurangnya sosialisasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak
Pangan		
Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
		Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan
		Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan.
		Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
		Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.
		Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga.
		Belum optimalnya sosialisasi keamanan PSAT kepada masyarakat, produsen, dan pelaku usaha.
		Kesadaran pelaku usaha untuk registrasi PSAT-PDUK masih rendah, karena kesadaran dan pemahaman keamanan PSAT masih rendah.
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk uji lab keamanan PSAT.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Rendahnya diversifikasi pangan	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.
		Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat.
		Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
		Kurangnya Promosi Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di tingkat masyarakat.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
Pertanahan		
Belum optimalnya kinerja bidang Pertanahan	Proses Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, penanganan sengketa tanah dan pemanfaatan Tanah belum optimal	Terkendalanya pembebasan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana pelayanan umum lainnya
		Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Tol CISUMDAWU, Bendungan Jatigede, dan Bendungan Sadawarna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
		Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Eks HGU serta Sengketa Penguasaan Hutan, dan permasalahan LC Kelurahan Situ
Lingkungan Hidup		
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan timbulan sampah
		Penyelenggaraan prasarana sarana persampahan belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Belum meratanya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	Belum Optimalnya proses pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Jangkauan pelayanan yang sangat luas
		Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
		Belum optimalnya proses pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.
		Belum Optimalnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
		Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya
		Akses ke Data Center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan Data Kependudukan
		Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Daring
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masih rendahnya jumlah Desa Mandiri	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa
		Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa
		Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa dari mulai penyusunan RPJMDes, RKPdes, RAPBDes dan APBDes
		Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Masih Tingginya Angka TFR	Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB	Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda
		Struktur penduduk usia muda tinggi
		Masih cukup tinggi angka kelahiran
		Masih tingginya cakupan yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need)
		Tingginya pernikahan dibawah usia 20 tahun
		Rendahnya kesertaan KB Pria
		Masih rendahnya capaian KB MKJ
Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi	Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha
		Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera
		Bantuan modal untuk usaha masih terkendala
Perhubungan		
Masih rendahnya kenyamanan, Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor
		Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar
		Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada dan Belum Adanya Terminal Barang sesuai kewenangan kabupaten
		Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain
		Belum memadainya Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Program Prioritas daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan
		Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk
		Belum adanya Dokumen Perencanaan Tataan Transportasi Lokal sesuai perkembangan Tata ruang dan perubahan regulasi.
		Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan kualifikasi teknis dalam bidang Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika		
Literasi Digital masih belum optimal	Layanan komunikasi dan informasi masih perlu peningkatan	Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal;
		Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi;
		Peran dan fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya dalam diseminasi informasi belum optimal;
		Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
		Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik masih rendah
		Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi public
		Kurangnya kapasitas Back Up listrik untuk NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Infrastruktur pendukung NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Kapasitas Bandwidth Internet untuk mengcover kebutuhan Internet setiap OPD Kabupaten Sumedang;
		Kurangnya Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi di bidang Informatika.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi Koperasi dan UMKM	Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT
		Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
		Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
		Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi
		Lemahnya manajemen koperasi
		Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi
	Peningkatan UMKM belum optimal	Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha
		Database UMKM belum tersedia secara akurat
		Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing
		Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan
Penanaman Modal		
Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah	Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi	Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah
		Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis
		Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
		Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kepemudaan Dan Olahraga		
Masih Rendahnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan
		Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan
		Rendahnya daya kreasi generasi muda
		Masih tingginya kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi pemuda maupun kelompok kepemudaan berprestasi
	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan
		Pembinaan maupun pembibitan belum terencana dengan baik
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
		Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan
		Belum optimalnya Pembinaan maupun pembibitan para atlet;
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
		Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana olahraga

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Statistik		
Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	Masih rendahnya kualitas Data dan realtime	Masih kurangnya pemahaman terhadap Pengelolaan Data dari setiap produsen data
		Masih banyak data yang belum disampaikan oleh Produsendata kepada walidata
		Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dimensi kualitas data
		Masih adanya perbedaan konsep dan defisini data antara produsen data
		Masih terdapat kesalahan dalam Proses input data dari produsen data
		Masih banyak Perangkat Daerah selaku produsen data yang belum melakukan Updating data secara periodik sesuai dengan waku rillis data
		Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan data
Persandian		
Pengamanan Informasi daerah	Masih Rendahnya Pengamanan Skor Informasi daerah	Pemahaman pengguna aplikasi dalam aspek keamanan informasi masih renda
		Belum optimalnya penggunaan tahapan dalam pembangunan sistem elektronik yang ada
		Sarana prasarana masih belum memadai, seperti: laptop, pc, lisensi aplikasi pentest, lisensi windows, lisensi antivirus.
		Kurangnya alat pendukung dalam menjalankan monitoring keamanan informasi
Kebudayaan		
Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
		Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya
		Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas
		Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara)
		Belum optimalnya sosialisasi dan implemntasi Sumedang Puseur Budaya Sunda;

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perpustakaan		
Masih Rendahnya Indeks Literasi	Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai	Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
		Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai
		Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka
		Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang
		Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas
		Minat baca masyarakat masih rendah
Kearsipan		
Rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan	Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap kearsipan
		Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip
		Belum adanya fitur pada aplikasi Super e-Office untuk penyusutan arsip
		Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan
Kelautan Dan Perikanan		
Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan
		Penggunaan pakan yang tidak tepat
		Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan
		Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Perubahan iklim dan cuaca
		Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Perairan Umum Daratan (PUD)
		Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan dan pengolahan perikanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan
		Belum optimalnya kelembagaan perikanan
		Rendahnya kualitas benih ikan
	Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, sebagai akibat terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi utuh ikan, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil
Pariwisata		
Rendahnya kunjungan wisata	Sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai	Akses menuju destinasi wisata kurang memadai
		Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya
		Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan
		Masih rendahnya atraksi pariwisata
		Belum tersedianya amenitas dilokasi wisata
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang	Pengetahuan masyarakat dan ASN mengenai ekonomi kreatif masih kurang
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI)
		Masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi kreatif
		Belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif
		Peran komunitas pelaku ekonomi kreatif belum maksimal
		Kualitas SDM ekonomi kreatif masih kurang
		Masih kurangnya event-event untuk apresiasi dan promosi ekonomi kreatif
		Masih kurangnya konsumsi dan pemanfaatan produk ekonomi kreatif
		Belum terciptanya sistem distribusi produk ekonomi kreatif yang efektif
		Forum komunitas pelaku ekonomi kreatif belum terbentuk sampai tingkat kecamatan
Pertanian		
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dirantai pasokan atau monopoli
	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian	Rendahnya kualitas SDM petani
		Rendahnya regenerasi petani.
		Rendahnya kapasitas petani milenial
		Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan
		Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Produksi komoditas pertanian yang rendah	Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida non organik
		Sulitnya akses terhadap pupuk
		Biaya produksi yang tinggi
		Terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bersertifikat
		Belum optimalnya penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
		Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
		Rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya pertanian yang baik, Good Handling Practices (GHP) dalam penanganan pascapanen yang baik, dan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan (Pemetaan Cluster Pertanian).
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam baik kuantitas maupun kualitas.
		Teknologi bidang pertanian dan Digitalisasi Pertanian masih rendah
		Alih Fungsi Lahan Pertanian.
		Minimnya Akses terhadap permodalan.
		Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim
	Persaingan dengan produk impor	Rendahnya kualitas produk pertanian
	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	Terbatasnya Pengolahan Hasil Pertanian dan promosi produk pertanian
		Kurangnya investasi dalam teknologi bidang pertanian

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Peternak	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya negosiasi harga
		Kurangnya akses ke pasar
		Tidak adanya jaminan kualitas
	Persaingan yang tidak sehat	Struktur pasar yang tidak sehat
		Belum optimalnya kelembagaan peternakan.
	Kurangnya akses teknologi modern	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi dan inovasi.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.
	Rendahnya produksi peternakan	Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan proyek strategis nasional, pemukiman, dan pembangunan lainnya
		Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan / belum berorientasi bisnis
		Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sumber Air Peternakan, Puskesmas / Klinik Hewan, Pusat Promosi, Instalasi Pembibitan, Kawasan Peternakan dan sebagainya.
		Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.
		Masih adanya serangan wabah penyakit ternak
		Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.
	Rendahnya nilai tambah produk peternakan	Rendahnya kualitas pakan ternak
		Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
		Kurangnya manajemen peternakan yang baik
		Biaya produktifitas yang tinggi.
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kehutanan		
Belum Optimalnya Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura);
		Hutan Kota belum dikembangkan
Perdagangan		
Usaha Perdagangan yang kurang berkembang	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha
		Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar
		Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar
		Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang
	Akses permodalan	Kurangnya informasi permodalan bagi pelaku usaha
	Kurangnya infrastruktur yang memadai	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan
Perindustrian		
Laju Pertumbuhan Industri pengolahan masih rendah	Kurangnya tingkat investasi	Kurangnya akses terhadap permodalan
		Kondisi ekonomi yang kurang stabil
		Biaya produksi yang tinggi
		Kurangnya dukungan infrastruktur
		Sertifikasi hasil industri belum menyeluruh
		Masih kurangnya promosi peluang investasi
	Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi	Kurangnya SDM yang terampil
		Resistensi dari pekerja
	Kurangnya pemasaran	Masih kurangnya promosi produk IKM
		Belum optimalnya pemasaran produk IKM

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Transmigrasi		
Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi
		Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi
		Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi
		Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Perencanaan		
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat Beberapa Program pada Perencanaan yang tidak terdani pada Penganggaran	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik
		Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan
		Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan
Keuangan		
Belum sebandingnya antara pendapatan dan kebutuhan	Kebutuhan Belanja tidak sebanding dengan pendapatan	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendapatan Daerah		
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pembangunan Daerah	Pengelelolaan Potensi PAD dan Pajak Daerah belum optimal	Belum optimalnya pelayanan pajak
		Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah
		Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
		Kualitas layanan pendataan masih rendah
		Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur
		Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian
		Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah
		Belum memiliki data potensi pendapatan daerah
		Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah
		Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar
		Ketersediaan data piutang yang tidak valid
		Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik
		Pembayaran pajak belum tepat waktu;
		Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan
		Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan		
Belum Optimalnya Indeks Profesionalitas ASN	Kualitas dan Kompetensi ASN belum Merata	Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil
		Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja
		Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas
		Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi
		Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani
		Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi
		Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian
Penelitian dan Pengembangan		
Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan	Dokumen Kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya fungsional peneliti
		Belum optimalnya penyebaran informasi arah rencana penelitian dan pengembangan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sekretariat Daerah		
Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	- Bagian Tata Pemerintahan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan
		Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD
		- Bagian Hukum
		Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan
		Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan
		- Bagian Organisasi
		Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan
		Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru
		Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP
		Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Kerjasama
		Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah
		Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD
		Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti
		Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi
		Belum tersedianya data potensi kerjasama
		- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Masih adanya BUMD dengan status Tidak Sehat
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah
		Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal
		Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah
		- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Administrasi Pembangunan
		Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait
		Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD
		- Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ
		Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal
		Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ
		Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa
		- Bagian Umum
		Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah
		Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal
		Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah
		Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis
		Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan
		Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal
		Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah
		Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda
		Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencanaan
		Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya kajian produk hukum terkait permasalahan daerah sebagai bahan Raperda Inisiatif DPRD
		Kurangnya tenaga fungsional analisis hukum
		Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah masih bersifat administrasi belum sampai ke tingkat teknis operasional dilapangan
		Kurangnya SDM pengolah data dan informasi berbasis teknologi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Inspektorat Daerah		
Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	Belum Meratanya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;
		Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah
		Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal
		Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal
		Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) kapasitas APIP, khususnya dalam sertifikasi perjenjangan dan DIKLAT substansif pengawasan akibat minimnya sumber daya anggaran
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) infrastruktur penunjang pengawasan, khususnya alat uji dan teknisnya
		Masih belum optimalnya manajemen pengawasan, khususnya penegakan kode etik bagi APIP, sehingga masih terindikasikan terdapat oknum yang menerima gratifikasi dan suap
		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas
		Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Belum optimalnya tingkat cipta kondisi kondusif	Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa	Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Gangguan PEKAT masih tinggi
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
		Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
		Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
		Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
		Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
		Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi
		Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)
		Peran ormas di masyarakat belum optimal
		Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
		Belum terbentuknya sistem informasi ormas
		Sinergitas antar lembaga masih kurang terutama forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)
	Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol
		Belum optimalnya pendidikan politik
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Sumedang

Sumber: Analisia BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang 2024 (diolah)

2.3.2 Isu Strategis Daerah

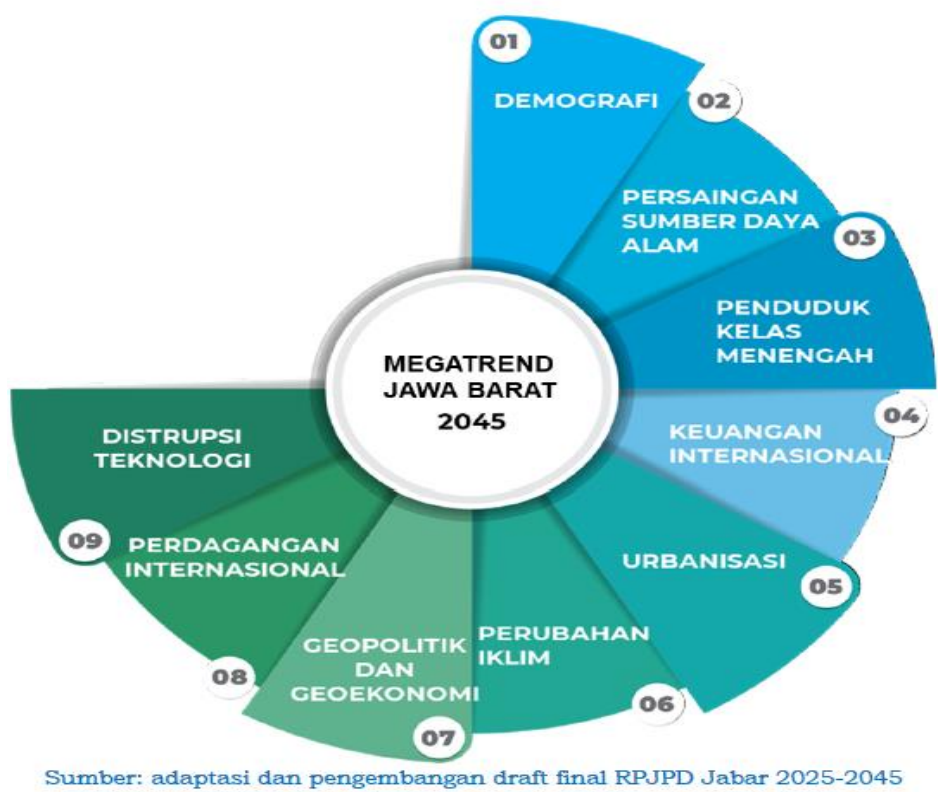
2.3.2.1 Isu Sesuai Konteks

2.3.2.1.1 Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025- 2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut. Berdasarkan Draft RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat sejumlah isu global yang perlu diperhatikan, disebut sebagai “*megatrend* Jawa Barat 2045”.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat sejumlah isu global yang perlu diperhatikan, disebut sebagai “*megatrend* Jawa Barat 2045”.

Gambar 2.21
Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat
Dalam “*Megatrend* Jawa Barat 2045”



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C

pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1(satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di

kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Dalam bonus demografi dimana mencermati dinamika penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Jawa Barat agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif diberbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai comfort, vitality and high quality life.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Perdagangan

internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

2.3.2.1.2 Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu besarnya

jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produkproduk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isuisu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang

berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan

umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

2.3.2.1.3 Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah

satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

2.3.2.1.4 Isu Berdasarkan *West Java Development Forum* (WJDF)

West Java Development Forum (WJDF) 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta daerah menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045. WJDF 2023 melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, inohong Jabar, Forkopimda, media, hingga generasi milenial. Dilibatkannya stakeholders dari berbagai kalangan diharapkan dapat membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan mewakili harapan seluruh masyarakat. Semua stakeholders yang mewakili memberikan pandangan bagaimana Jawa Barat di tahun 2045. Berdasarkan hasil WJDF tersebut, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan generasi muda, setidaknya ada tiga

sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai stakeholder tersebut kemudian distrukturkan dan menjadi isu yang diharapkan dapat memberi masukan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah isu yang dihasilkan dari WJDF diuraikan berikut ini.

A. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; stunting; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat; pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan. Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup: ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; digital skill kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai

kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi logistic global value chain dan blue economy.

B. Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai engine of growth; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi

energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung green economy dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan continue, serta penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan pelayanan sistem irigasi.

C. Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link and match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

D. Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat);

penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (digital skill); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan digital divide/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.

E. Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia; meminimalisir gangster; dan awareness terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; platform kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

F. Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung; pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona megathrust pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di

pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

G. Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi pentahelix dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; environmental leadership; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan greater metro pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

2.3.2.1.5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDG's) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses yang dilalui dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Dari hasil KLHS, telah disepakati terdapat 9 (sembilan) isu pembangunan berkelanjutan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, yaitu:

1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital;
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif;

3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan;
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas;
5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah;
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim , serta upaya penurunan gas rumah kaca;
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat;
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air; dan
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut.

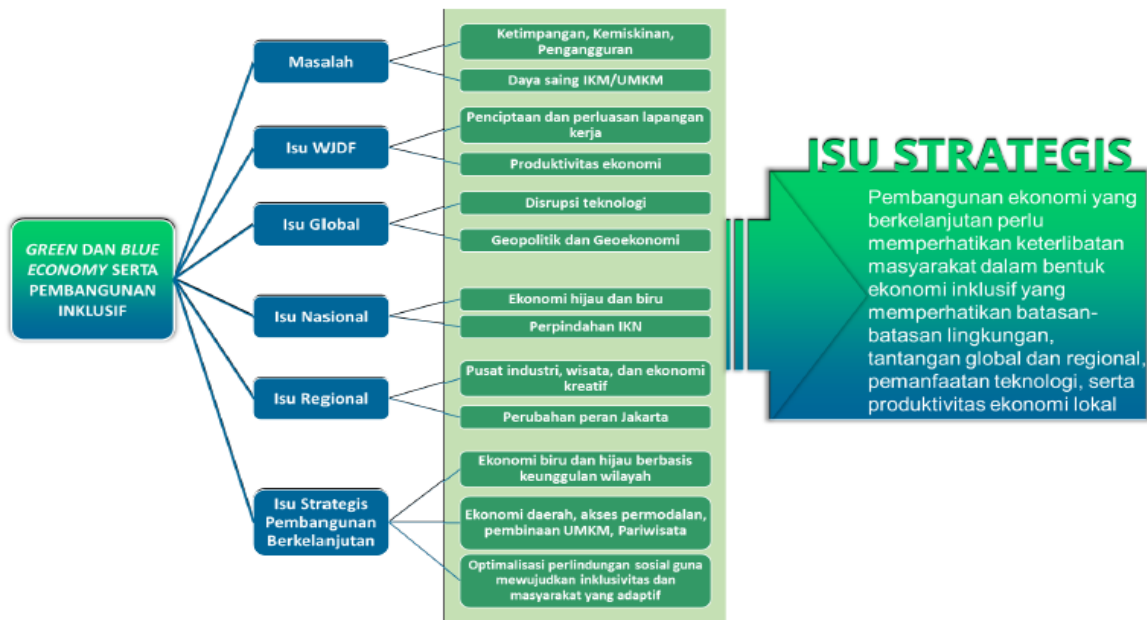
2.3.2.2 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat.

2.3.2.2.1. Isu *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green and blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.

Gambar 2.22
Isu Strategis Terkait Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy*, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. *Blue economy* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

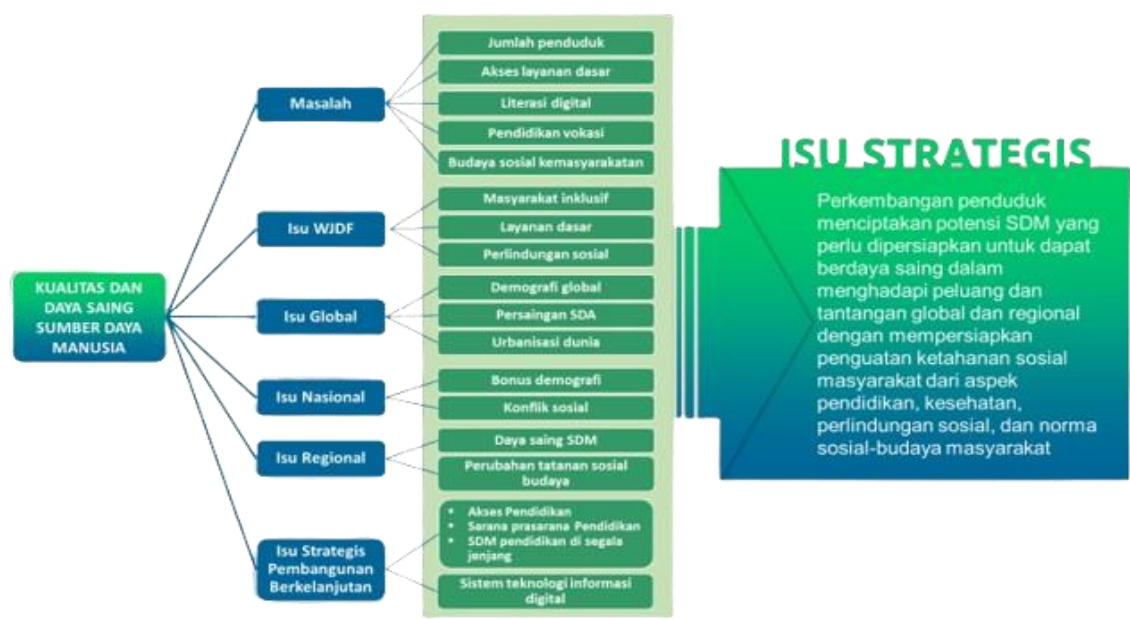
Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa green dan blue economy dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.3.2.2.2 Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Gambar 2.23
Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia :

1. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

2. Relevansi Keterampilan

Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

3. Inovasi dan Kreativitas

Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktor-faktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.

4. Kesejahteraan dan Motivasi

Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

5. Pemberdayaan dan Keterlibatan

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.

6. Adaptasi terhadap Perubahan

Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif.

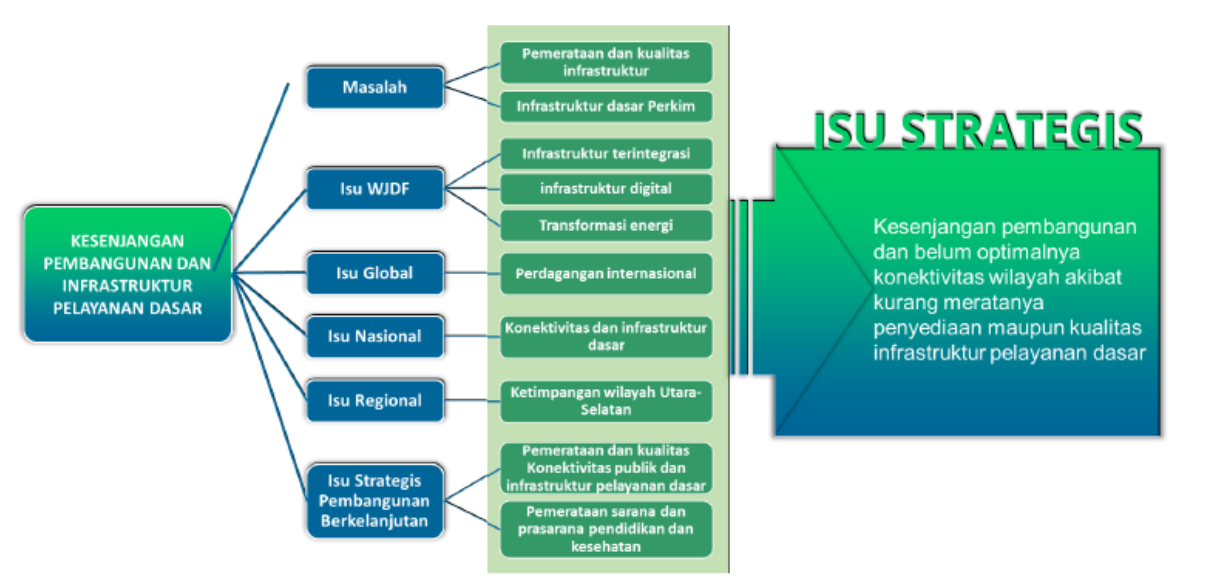
Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2.3.2.2.3 Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Gambar 2.24
Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa

poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar :

1. Akses yang Tidak Merata

Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

2. Dampak pada Kualitas Hidup

Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.

3. Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.

4. Inklusivitas Sosial

Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.

5. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.

6. Pemerataan Pembangunan

Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

7. Tantangan Finansial

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.

Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

2.3.2.2.4 Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini

untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain, mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

2. Overexploitasi Sumber Daya

Salah satu masalah utama adalah overexploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrem cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

4. Manajemen Sumber Daya

Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.

5. Kehidupan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

6. Kolaborasi Global

Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

7. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

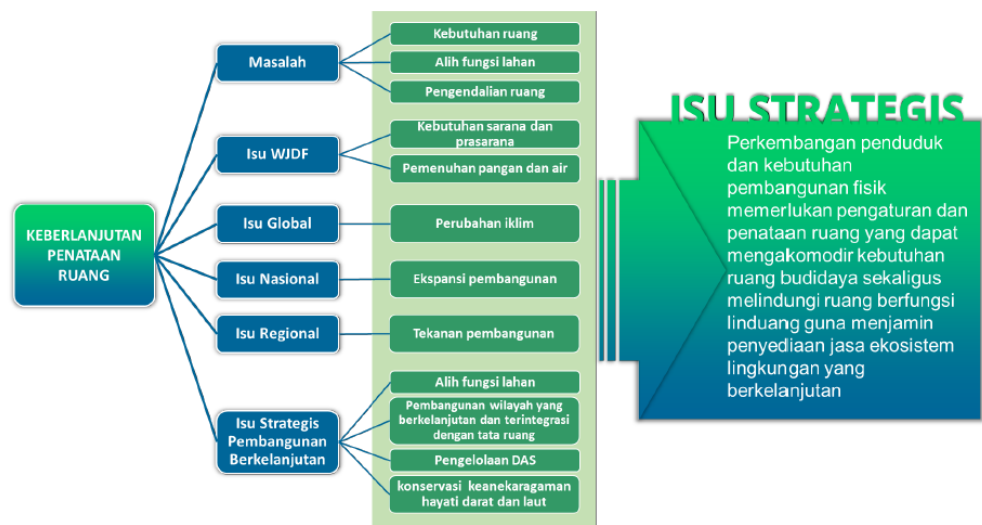
Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.3.2.2.5 Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir

kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

Gambar 2.26
Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang :

1. Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan

Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

2. Perlindungan Lingkungan

Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.

3. Keadilan Sosial

Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan

layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.

5. Penggunaan Lahan yang Efisien

Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

7. Kolaborasi Antar Pemerintah

Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

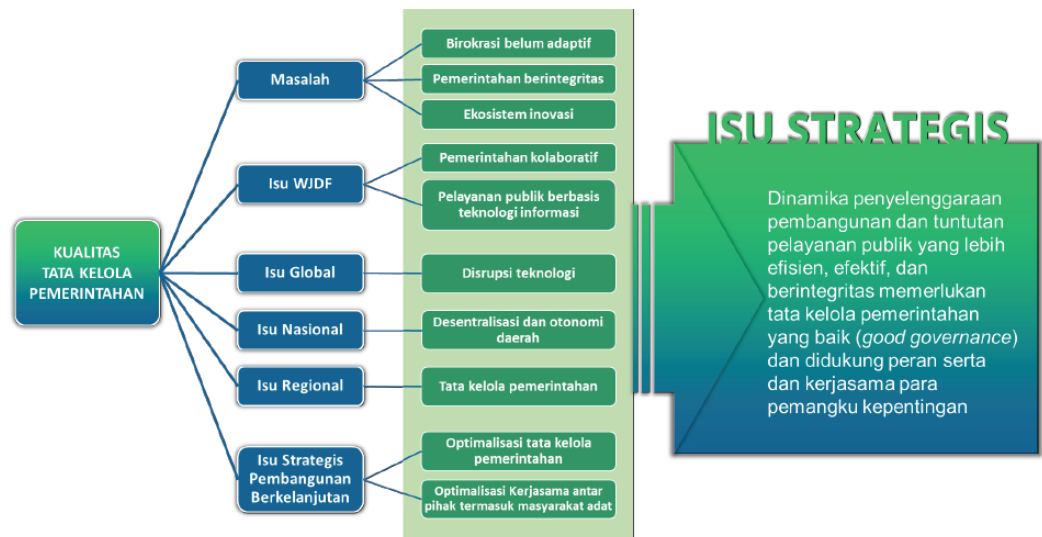
Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

2.3.2.2.6 Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Gambar 2.27
Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan



Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

2. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

3. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

5. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

6. Inovasi dan Teknologi

Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

7. Kolaborasi dan Kemitraan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

2.3.2.3 Isu Strategis Kabupaten Sumedang

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan potensial untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta dengan memperhatikan isu Pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD selain memperhatikan pula isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045. Isu Pembangunan berkelanjutan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang meliputi:

1. Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga;
2. Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah;
3. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata;
4. Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata;
5. Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati;
6. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Tabel 2.62 Penentuan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penduduk Usia Produktif Masih Dominan dan puncaknya sampai Tahun 2030 (Berdasarkan Proyeksi Data BPS) Terdapat peluang untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pembelajaran serda Keberadaan Kawasan Pendidikan Tinggi di Jatinangor	RLS dan HLS masih Rendah	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal	Demografi memainkan peran penting karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan kebutuhan infrastruktur pendidikan serta kualitas SDM di masa depan	Bonus Demografi bagi Kabupaten Sumedang memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi SDM unggul yang siap bersaing di pasar kerja regional maupun global	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia berkaitan dengan pendidikan dan SDM. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	SDM dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	Akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan					
	Angka Stunting masih tinggi (14,4% Data SSGI)	Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata				
	Kasus TBC Masih tinggi					
	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Reformasi Birokrasi berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi	1) Beberapa layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital. 2) Kapasitas ASN belum merata, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil. 3) Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan skor kategori rentan				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pembangunan.	Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur
Ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan dan sentra perekonomian	Infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama di daerah yang terhubung dengan wilayah perdesaan yang terpencil	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar perubahan iklim dan energi terbarukan	Penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan ekonomi hijau	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air)	Penurunan kualitas air, konversi lahan pertanian untuk pembangunan, dan risiko bencana alam	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan penyediaan air dengan dua DAS besar (Cimanuk dan Citarum)	Ketidakmampuan beberapa kecamatan dalam mencapai ambang batas ketersediaan pangan dan air yang memadai, serta potensi pengurangan kapasitas daya dukung lingkungan akibat pembangunan	Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air.	Perubahan iklim secara langsung memengaruhi pola tanam, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan ekstrem, dapat memengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan Inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marjinal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

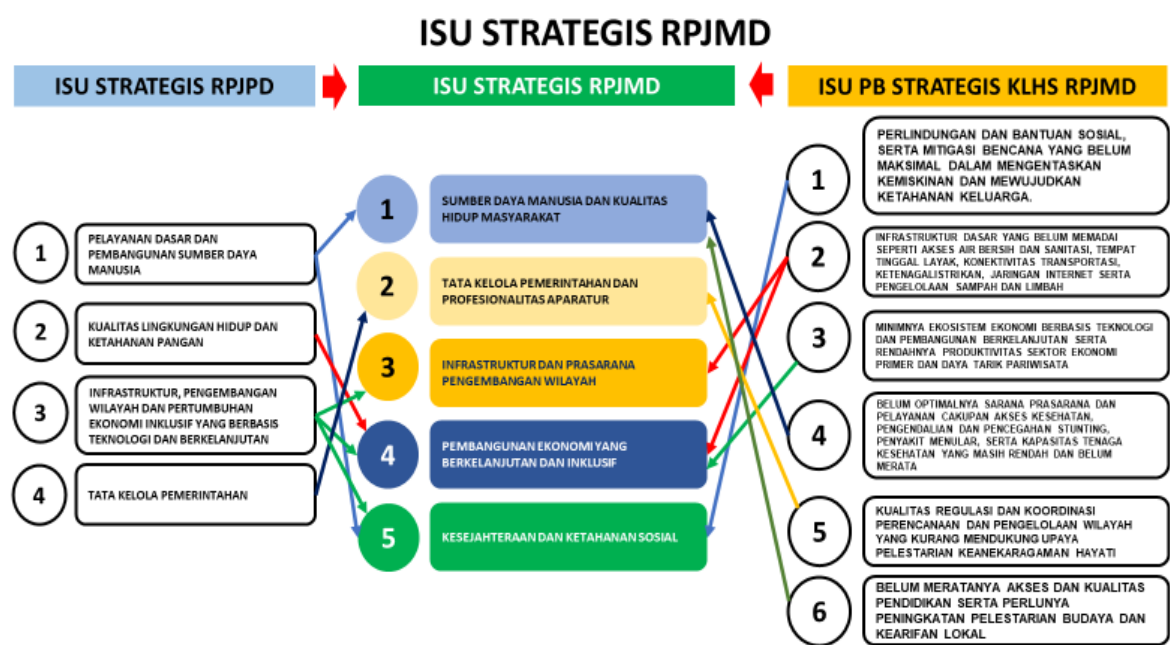
POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kabupaten Sumedang memiliki potensi dalam sektor ekonomi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertanian	Terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan antara daerah perkotaan (seperti Jatinangor) dan daerah pedesaan, yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan layanan dasar	Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin	Perubahan tren pasar global yang mempengaruhi pendapatan sektor informal.	Ketimpangan ekonomi yang masih signifikan di berbagai daerah, termasuk ketimpangan akses layanan dan pendapatan	Ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada sektor pertanian	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Sumedang berada di kawasan dengan kerentanannya terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan	Kurangnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di beberapa wilayah.	Meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana	Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam	Kebijakan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas adaptasi di daerah rawan bencana	Kerentanan terhadap bencana alam yang semakin meningkat di wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Potensi besar dalam mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang berkelanjutan, serta pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan digital	Keterbatasan keterampilan tenaga kerja di sektor formal, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, yang mengurangi daya saing tenaga kerja Sumedang di pasar global	Pengembangan pelatihan yang berbasis pada teknologi hijau dan sumber daya alam lokal untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri masa depan	Perkembangan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan baru dan adaptif	Proses industrialisasi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dalam bidang manufaktur dan teknologi	Keterbatasan kesempatan kerja di daerah pedesaan yang mendorong urbanisasi.	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang sudah berjalan dan berpotensi lebih ditingkatkan, terutama dengan pendekatan berbasis lingkungan	Tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan, terutama di daerah perbatasan, yang memerlukan intervensi sosial-ekonomi lebih cepat	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Krisis ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang memperburuk situasi masyarakat miskin dan memengaruhi akses pangan	Strategi pengurangan kemiskinan dengan pendekatan yang holistik dan terpadu antara sosial-ekonomi dan lingkungan	Tantangan daerah pedesaan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan	Kesejahteraan dan ketahanan sosial

Dari Tabel di atas, maka isu strategis Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat
2. Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur
3. Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah
4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Kesejahteraan dan ketahanan sosial

Gambar 2.28
Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJPD serta Isu Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD



2.3.2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan SDM yang unggul dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan isu strategis tersebut melalui aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang relatif masih rendah dibandingkan dengan standar regional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya : a. Minimnya akses pendidikan di wilayah terpencil. Banyak masyarakat di daerah pedesaan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas

atau perguruan tinggi karena keterbatasan fasilitas dan biaya; b. Tingginya angka putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga sering menjadi alasan utama anak-anak tidak melanjutkan Pendidikan; c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan industri menyebabkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menurun.

2. Pemerataan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Kualitas Pendidikan relatif masih tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil dan tenaga pengajar profesional cenderung memilih bekerja di wilayah perkotaan. Sarana prasarana yang minim di beberapa sekolah di pedesaan yang tidak memiliki fasilitas memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional masih mendominasi, sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa.

3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan di setiap wilayah

Pemerataan pelayanan kesehatan di setiap wilayah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Isu ini menjadi prioritas karena kesehatan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas ekonomi, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Namun, kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi kabupaten Sumedang memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks, dengan wilayah dataran tinggi, pegunungan, hingga dataran rendah. Kondisi ini menyebabkan distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, sehingga masyarakat di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengakses layanan kesehatan.

4. Penguatan Akhlak dan Nilai-nilai Budaya

Penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya merupakan hal yang sangat relevan dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta memperkuat akhlak masyarakat menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. Kabupaten Sumedang, yang kaya akan warisan budaya tradisional, memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam pembangunan manusia

(SDM) yang unggul dan berkepribadian luhur. Namun, di tengah arus perubahan zaman, terjadi erosi nilai-nilai budaya lokal dan moralitas yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas daerah, tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis karakter.

5. *Zero New Stunting* dan Pencegahan Penyakit Menular

Zero new stunting (nol kasus baru stunting) dan pencegahan penyakit menular sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, memerlukan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerahnya.

Adanya tantangan seperti tingginya angka stunting dan penyebaran penyakit menular masih menjadi kendala serius di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penanganan kedua aspek ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan produktif.

6. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak hanya menjadi indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga cerminan dari kualitas layanan kesehatan, aksesibilitas fasilitas kesehatan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan maternal dan neonatal. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, membutuhkan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung visi pembangunannya. Oleh karena itu, penurunan AKI dan AKB menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

2.3.2.3.2 Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur yang menjadi tulang punggung

pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait isu Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur :

1. Penguatan Integritas & Profesionalitas Aparatur

Penguatan integritas dan profesionalitas aparatur merupakan solusi strategis yang sangat relevan dalam menangani isu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Penguatan Inovasi, Digitalisasi dan Kemudahan Akses Layanan Publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan keberhasilan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kemudahan akses layanan publik, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kaitan yang sangat erat dengan penanganan isu strategis pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang, dalam konteks Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur. PAD adalah salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Penguatan Akuntabilitas

Dalam menangani isu-isu terkait tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur di Kabupaten Sumedang. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam *good governance* yang menjamin bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam hal proses maupun hasilnya.

Dengan memperkuat akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan akuntabilitas juga akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko praktik korupsi.

2.3.2.3.3 Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah

Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar dalam pengembangan wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek penting terkait isu strategis Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan yang baik dan merata tidak hanya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, peningkatan infrastruktur jalan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

2. Pembukaan Akses Jalan Baru, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur jalan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan wilayah menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan secara strategis. Ketiga aspek ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Kabupaten Sumedang dapat menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan inklusif.

3. Peningkatan Kualitas Irigasi Pertanian

Memiliki potensi pertanian yang besar, dengan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor ini. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan peningkatan kualitas

infrastruktur irigasi pertanian sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan irigasi tidak hanya berdampak langsung pada produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi kunci dalam menangani isu strategis terkait infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang.

4. Pemerataan konektivitas jaringan internet

Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius. Minimnya konektivitas digital di wilayah pedesaan menghambat transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Digitalisasi layanan publik juga memerlukan jaringan internet yang stabil.

5. Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Masalah persampahan masih memerlukan penanganan serius. Terutama sampah makanan menjadi penyumbang terbesar masalah sampah, sementara sistem pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Untuk itu infrastruktur pengelolaan sampah memang merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Permasalahannya tidak hanya terkait dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

6. Akses Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Akses air bersih dan sanitasi merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penerapan teknologi inovatif dan kebijakan yang tepat.

7. Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan

Tata ruang merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan

secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sementara itu, alih fungsi lahan sering kali menjadi isu strategis karena dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, tata ruang dapat menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, sementara pengendalian alih fungsi lahan dapat melindungi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

8. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan potensi EBT, Kabupaten Sumedang dapat mencapai kemandirian energi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan teknologi dan kebijakan yang tepat.

9. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup, pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan akses terhadap rumah layak huni, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2.3.4 Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan transformasi ekonomi, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengidentifikasi isu strategis serta memberikan solusi dalam mendorong ekonomi Kabupaten Sumedang yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan, disajikan beberapa aspek penting sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Perekonomian

Dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi teknologi, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengembangan kawasan perkonomanian baru memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya kapasitas SDM, dan kurangnya investasi, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi lokal, dukungan kebijakan, dan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan SDM, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan perkonomanian baru dapat menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Sumedang.

2. Peningkatan Nilai Inverstasi Daerah

Investasi daerah tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dapat menjadi tujuan investasi yang menarik bagi pelaku usaha domestik maupun internasional. Peningkatan nilai investasi daerah merupakan solusi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sumedang.

3. Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil, Ekonomi Kreatif dan Koperasi

Pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK), Ekonomi Kreatif, serta Koperasi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan akses permodalan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun sinergi antar-sektor.

4. Digitalisasi Ekonomi

Pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam upaya digitalisasi ekonomi. Tanpa akses internet yang memadai, potensi digitalisasi tidak akan tercapai. Dengan memanfaatkan teknologi digital,

pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memberdayakan masyarakat secara lebih merata. Digitalisasi ekonomi di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Perluasan Lapangan Pekerjaan
Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta perluasan lapangan pekerjaan menjadi elemen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengembangan Sektor Pertanian dan Peternakan untuk mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat secara kuantitas dan kualitas, aman, merata, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

Pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumedang harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, petani, peternak, akademisi, hingga pelaku industri. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Sumedang dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mencapai ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

7. Penanganan dan Pengelolaan Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Ini berdampak pada kerusakan ekosistem lokal, seperti sungai yang tersumbat sampah atau lahan yang terkontaminasi

limbah. Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas dapat mendukung pertanian lokal dan energi terbarukan.

8. Penanganan Bencana

Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, memang dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, topografi, serta aktivitas manusia yang dapat memperburuk kerentanan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan bencana menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Penanganan bencana di kabupaten Sumedang bukan hanya soal respons terhadap kejadian bencana, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memperhatikan aspek keberlanjutan serta inklusivitas, Sumedang dapat mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.

9. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam dan budaya setempat. Dengan mengelola pariwisata secara bijak, Sumedang dapat memanfaatkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus melindungi keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal.

10. Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, sayuran, dan lainnya adalah elemen dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang ini sangat krusial untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan mendukung

pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.2.3.5 Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Kabupaten Sumedang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil menengah (IKM). Namun, pertumbuhan ekonominya masih dipengaruhi oleh tantangan seperti kesenjangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih menjadi perhatian serius. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan UMKM. Berikut beberapa aspek penting terkait dengan Isu Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial adalah:

1. Efektivitas Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial

Beberapa kebijakan yang dimiliki Kabupaten Sumedang telah dirancang untuk melindungi masyarakat rentan dan memberikan bantuan kepada kelompok miskin atau terdampak bencana, meliputi: a. Program Keluarga Harapan (PKH): Program nasional yang juga dilaksanakan di Sumedang untuk membantu keluarga miskin, b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan dalam bentuk voucher atau kartu elektronik untuk membeli kebutuhan pangan, c. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 atau bencana alam, d. Jaminan Sosial: Termasuk program jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin, e. Program Inovatif Lokal: Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menciptakan program inovatif seperti "Sumedang Simpati" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, maka distribusi bantuan dan perlindungan sosial dapat terhambat.

2. Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak mencakup berbagai aspek, termasuk kekerasan, ketimpangan gender,

minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta faktor budaya. Solusi yang efektif adalah memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan melibatkan edukasi, penguatan institusi, peningkatan akses ekonomi dan kesehatan, serta dorongan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, keluarga miskin, dan kelompok lain yang memerlukan perlindungan sosial. Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, program ini telah memberikan manfaat signifikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan data yang tidak akurat perlu di atasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata.

4. Penguatan Peran Kelembagaan Sosial

Penguatan Peran Kelembagaan Sosial dalam menangani isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi perlu melakukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan pemberdayaan, isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial dapat ditangani secara efektif.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029. Visi dan misi yang dimaksud dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025 – 2029. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *Cascading* (penurunan) kinerja.

3.1.1. Visi dan Misi

3.1.1.01. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

”Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

SIMPATI adalah **Sejahtera** Masyarakatnya, **Agamis** Akhlaqnya, **Maju** Daerahnya, **Profesional** Aparaturnya dan **Kreatif** Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata.

Agamis : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertata kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : Pemerintah Kabupaten Sumedang mewujudkan *good governance* dimana penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang lebih ~~baik~~ unggul secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Kreativitas dan produktivitas ini akan ditunjang dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi ini adalah proses pembangunan yang akan semakin menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-

kutub pertumbuhan ini akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai arus utama dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sasaran Visi.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, terdapat lima Sasaran Visi, Indikator Visi dan targetnya yang harus dicapai selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Sasaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Pendapatan per kapita
- 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan;
- 3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing;
- 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

Untuk lebih rinci Sasaran visi dan target kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Sasaran Visi dan Target Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2029

Sasaran Visi	Indikator	Target (Tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	39.55 - 39.91*	44.3 - 45.27*	47.7 - 49.45*	51.33 - 54.13*	51.33 - 54.13*	59.5 - 65.71*
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19.62*	19.71*	19.8*	19.89*	19.99*	20.09*
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8.23 - 9.09*	7.64 - 8.34*	6.62 - 7.48*	5.39 - 6.46*	5.39 - 6.46*	3.59 - 4.92*
	b. Rasio Gini (Poin)	0.352 - 0.359*	0.342 - 0.403*	0.343 - 0.424*	0.346 - 0.397*	0.353 - 0.379*	0.357 - 0.38*
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1.64*	1.65*	1.65*	1.65*	1.65*	1.65*
	d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.79 - 5.20*	4.77 - 6.03*	4.84 - 7.42*	4.88 - 7.57*	5.04 - 7.89*	5.08 - 5.61*
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing	a. Indeks Inovasi Daerah	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (%)	74.48*	74.73*	75.00*	75.31*	75.66*	76.02*
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	6.05*	6.44*	6.87*	7.42*	7.96*	8.40*
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	66.25*	66,5	66,76	67,01	67.26*	67,51

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

3.1.1.02. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Misi juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan, langkah-langkah akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter.

Misi ini mendorong pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, sehat secara fisik dan mental, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. SDM yang agamis dan berkarakter akan menjadi pondasi dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi Kedua : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif.

Misi ini mendorong upaya membentuk birokrasi pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Birokrasi yang profesional dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi Ketiga : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, pengelolaan sampah akan langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Namun, disparitas akses dan kualitas infrastruktur antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang **merata dan berkeadilan** menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat pembangunan.

Misi Keempat : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak disertai pemerataan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat **inklusif** (merangkul semua golongan, termasuk masyarakat rentan, miskin, dan UMKM) serta **berkelanjutan** (tidak merusak lingkungan, memperhatikan generasi mendatang). Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan industri pengolahan serta perdagangan, Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi itu agar **pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kawasan tertentu**, tetapi bisa dirasakan secara merata dan adil.

Misi Kelima : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari **tingkat kesejahteraan dan ketahanan sosial** masyarakat. Kesejahteraan menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup, sementara ketahanan sosial merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, konflik sosial, dan berbagai persoalan kehidupan (kerentanan sosial, ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan pelayanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diatas pada implementasinya dilandasi oleh 3 (tiga) pondasi yaitu

1. **Agama**, agar implementasi perwujudannya agar terarah sesuai dengan kaidah nilai-nilai agama;
2. **Budaya**, agar implementasi perwujudannya membumi dengan menekankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
3. **Teknologi**, agar implementasi perwujudannya lebih akseleratif dan sesuai dengan perkembangan teknologi global.

3.1.1.03. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2025. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visiantara menuju visi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah **“Sumedang Yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil Dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)”** diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **”Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Keselaran Misi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun2025-2045

MISI RPJPD	MISI RPJMD
Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif	Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 3 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel	Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata.	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

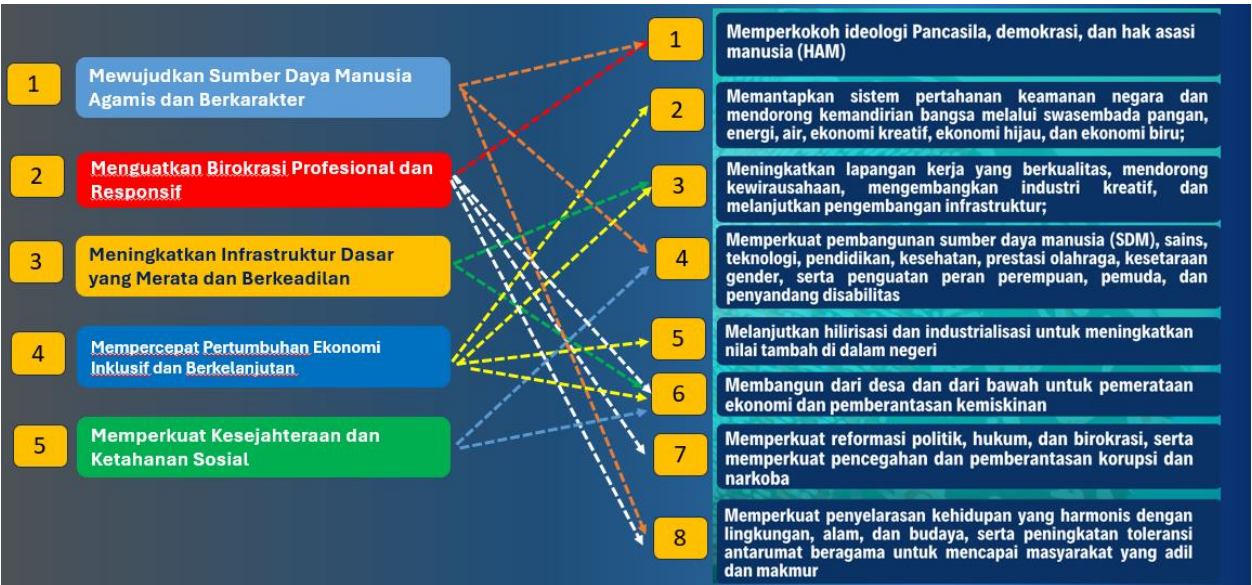
MISI RPJPD	MISI RPJMD
Misi 7 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas.	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

3.1.1.04.Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita).

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029 tentunya harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Visi **”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, sedangkan visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah **”Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Keselarasan visi dan misi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1.
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita)



Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

3.1.1.05. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan Visi **“Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”**. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Visi **”Jabar Istimewa -Lembur diurus Kota di Tata”**. Pernyataan **Jawa Barat Istimewa** mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.
- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan , maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.
- **LEMBUR DIURUS**, Lembur dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan Diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata serta sektor lainnya

yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.

- **KOTA DITATA** memiliki arti pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah.

Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana.

Ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

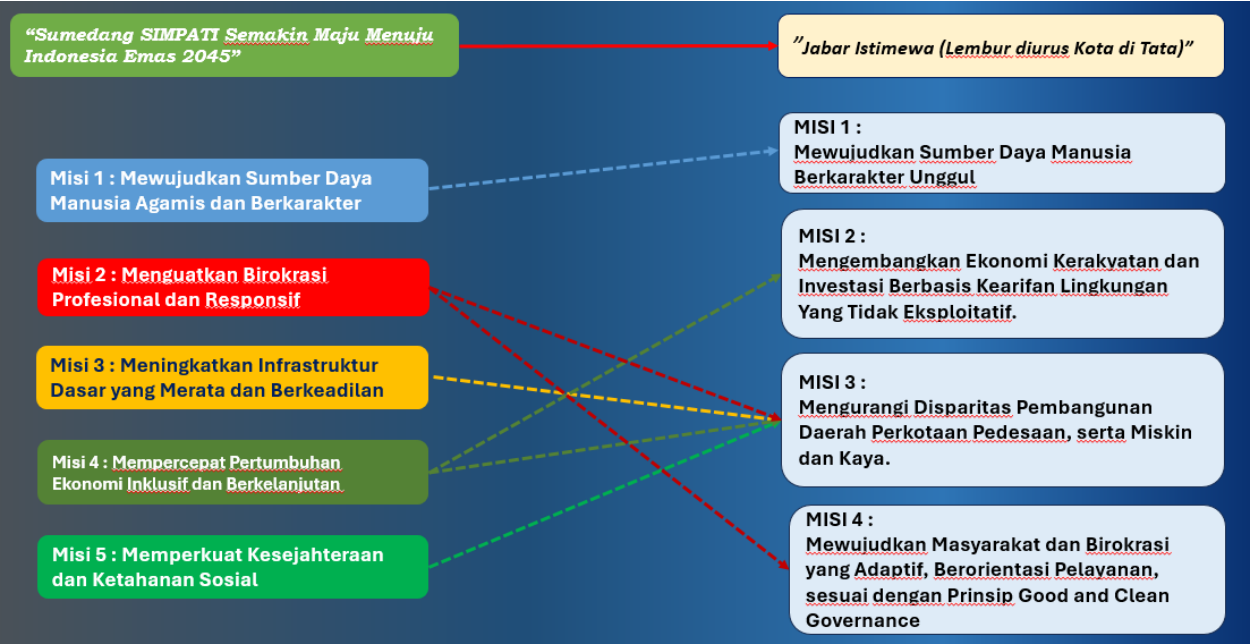
Secara keseluruhan, "Lembur Diurus, Kota Ditata" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kotakota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup. Visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Dalam pencapaian Visi tersebut di dukung oleh 4 (empat) misi sebagai berikut :

- Misi 1** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
- Misi 2** : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif.
- Misi 3** : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
- Misi 4** : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi-misi provinsi dengan visi-misi kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi-misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2.
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029



Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat

Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter**
- Tujuan : Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter.
- Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatkan Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat
- Sasaran 3 : Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis
- Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif**
- Tujuan : Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital.
- Sasaran 1 : Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.
- Sasaran 2 : Meningkatkan pemanfaatan transformasi digital.
- Sasaran 3 : Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat.
- Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Sasaran 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah
- Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan**
- Tujuan : Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.
- Sasaran 2 : Meningkatkan ketahanan air
- Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**
- Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi.
- Sasaran 2 : Terkendalinya Stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah
- Sasaran 3 : Meningkatkan ketahanan pangan daerah
- Sasaran 4 : Meningkatkan penerapan ekonomi hijau
- Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Sasaran 6 : Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
- Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial**

- Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial.
- Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang menjabarkan kepada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045											
Misi 1 : 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	74,57	74,48*	74,73	75,00	75,31	75,66	76,02	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	75,42	75,62	75,81	76	76,2	76,39	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,4	12,58	11,82	11,11	10,45	9,82	9,23	
			Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	N/A	91	91	91	91	91	91	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	N/A	91	91	91	91	91	91	
		Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,74	8, 75 - 8,92	8,77 - 9,01	8,79 - 9,11	8,81 - 9,2	8,83 - 9,29	8,85 -9,39	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,02	13,09	13,13	13,17	13,21	13,25	13,29	
		Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,6	76,95 - 77,7	77,7 - 78,2	78,2 - 78,7	78,7 - 79,2	79,2 - 79,7	79,7 - 80,2	
			Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100	100	100	100	100	100	100	
			Tingkat Bina Demokratisasi	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	19	22	25	27	30	33	
			Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan (%)	N/A	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 2 : 'Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital		Indeks daya Saing Daerah	3,86	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893	
			Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	89,65	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
		Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	81	81	82	83	84	85	87	
			Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %	68,6	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
			Indeks Inovasi Daerah	73,23	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	
			Indeks Desa (%)	N/A	80	82	84	86	88	90	
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,51	4,6	4,65	4,7	4,75	4,80	4,85	
		Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya Peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Indeks Kepatuhan Daerah	N/A	65	66	67	68	69	70	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,71	4,71	4,73	4,74	4,75	4,76	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Skor LPPD Kabupaten	3,64 (2023)	3,647	3,648	3,649	3,650	3,651	3,652	
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah		Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	75,59	76,02	76,46	76,90	77,34	77,79	78,24	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	N/A	7,02	12,4	17,77	23,15	28,52	33,9	
			Persentase kemantapan Jalan (%)	87,54	88,85	90,18	91,53	92,91	94,30	95,70	
		Meningkatnya Ketahanan air	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	N/A	2,26	2,61	2,95	3,31	3,66	4.02	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N/A	32,55	35,92	39,29	42,67	46,04	49,41	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,05	4.79 - 5.20	4.77 - 6.03	4.84 - 7.42	4.88 - 7.57	5.04 - 7.89	5.08 - 5.61	
			PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	39,7	39.55-39.91	44.3-45.27	47.7-49.45	51.33-54.13	55.18-59.33	59.5-65.71	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	N/A	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,4	
			Indeks Resiko Bencana	127,24	137,5	136,47	135,44	134,41	133,38	132,35	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Poin)	N/A	49,6	51,19	51,87	52,63	53,41	54,21	
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,32	19,62	19,71	19,8	19,89	19,99	20,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,49	5,24	5,34	5,45	5,56	5,68	5,8	
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	15,82	17,93	19,63	21,33	23,03	24,73	26,43	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	N/A	3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,16	6.13 - 6.68	5.89 - 6.44	5.88 - 6.43	5.86 - 6.4	5.84 - 6.38	5.8 - 6.34	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	N/A	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
			Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	N/A	-1,5 sd -0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Nilai Tukar Petani (NTP)	N/A	105,85	106,70	107,55	108,40	109,25	110,10	
		Terkendalnya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	N/A	0,709	0,715	0,742	0,791	0,866	0,863	
			Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) (%)	N/A	90	92	95	97	100	100	
			Total kredit/PDRB (%)	N/A	19,13	19,63	21,48	23,04	24,57	27,650	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	N/A	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,8	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,47	66,25*	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51	
			Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)	N/A	456726,86	501743,13	549988,17	606325,34	672001,06	743714,08	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,54	0,56	0,57	0,58	0,6	0,61	
Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial		Tingkat Kemiskinan (%)	9,1	9,09 - 8,23	8.34 - 7,64	7.48 - 6,62	6,46 - 5,39	5,35 - 3,96	4,92 - 3,59	
			Rasio Gini (Poin)	0,337	0.352-0.359	0.342-0.403	0.343-0.424	0.346-0.397	0.353 0.379	0.357-0.38	
		Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Juta/Tahun)	11,59	11,430 - 12,325	11,632 - 12,713	11,858 - 13,092	12,035 - 13,536	12,235 - 13,971	-	
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,217	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	
			Indeks Pembangunan Gender								
			Indeks Pemberdayaan Gender								
			Indeks Perlindungan Anak	68,44	69,80	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	

Sumber : hasil Analisis, Bappppeda 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sumedang, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi

harus dijalankan dalam kurun 2025-2029 sebagai periodisasi dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan periodisasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode pertama. Arah kebijakan yaitu pada RPJPD “**Sumedang Yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil Dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)**”

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.2.1.1. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari

isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah internal atau eksternal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan.
6. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan merata.
7. Pengembangan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan/non formal.
8. Peningkatan Literasi Masyarakat Secara Menyeluruh untuk Mendukung Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
9. Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis.
10. Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila.
11. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
12. Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi.
13. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital.
15. Penyederhanaan dan Peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
16. Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif.
17. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja Terintegrasi dan transparan.
18. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah daerah.
19. Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah.

20. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni), bangunan tahan bencana dan infrastruktur konektivitas daerah, serta peningkatan Kualitas permukiman.
21. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
22. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pengembangan dan pembangunan proyek strategis regional maupun Nasional.
23. Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja.
24. Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan Koperasi.
25. Peningkatan pengelolaan, Pengembangan dan Penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
26. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis.
27. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Komoditas Daerah serta digitalisasi perdagangan
28. Penerapan Ekonomi hijau (Green economy).
29. Mendorong Stabilitas Keuangan dan Daya Saing Investasi Daerah.
30. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.
31. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan.
32. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
33. Memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
34. Mempercepat Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan.
35. Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.
36. Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang pembangunan.

Strategis dan Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada 5 (lima) tahun kedepan harus selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4.
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan	1	Meningkatkan status Pustu Menjadi Puskesmas dan pemerataan Tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap Desa
						2	Penguatan regulasi dalam upaya pengadaan tenaga kesehatan di setiap wilayah
						3	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
				2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	1	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
						2	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
						3	Peningkatan kualitas pendidikan tenaga Kesehatan
				3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	4	Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan yang terutama di daerah perbatasan.
						1	Memperluas layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
						2	Meningkatkan cakupan layanan kesehatan universal
						3	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
						4	Pengendalian dan pencegahan eliminasi penyakit manular dan penyakit tropis yang terabaikan melalui upaya preventif dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat bidang kesehatan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						5	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
			Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	4	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
				5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan	1	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
						2	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
						3	Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga pendidik
						4	Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan.
						5	Penguatan dan penataan regulasi dalam upaya pengadaan guru dan tenaga kependidikan di setiap wilayah
				6	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
						2	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
						3	Pemenuhan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
						4	Pembangunan manajemen Talenta dan prestasi peserta didik

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				7	Pengembangan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan/non formal	1	Pembangunan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
						2	Pembangunan Sekolah terbuka dan Pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
				8	Peningkatan Literasi Masyarakat Secara Menyeluruh untuk Mendukung Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Pengembangan dan revitalisasi perpustakaan daerah, desa dan ruang publik (digital dan fisik) didukung dengan distribusi buku dan bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan bermuatan lokal.
						2	Penyediaan akses internet di ruang publik.
						3	Kampanye literasi keluarga, mendorong orang tua menjadi pendidik literasi awal bagi anak-anak.
						4	Kolaborasi dengan lembaga nonformal untuk kelas belajar masyarakat.
			Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	9	Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis	5	Pelatihan literasi digital bagi pelajar dan masyarakat.
						6	Integrasi program literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan kerja.
						1	Peningkatan kerukunan antar etnis, umat beragama dan golongan
				10	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	2	Peningkatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah
						3	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
						1	Peningkatan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
						2	Integrasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Pancasila dalam Pendidikan dan Kehidupan Sosial

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				11	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1	Penguatan kelembagaan pemuda dan olahraga
						2	Peningkatan kapasitas pemuda dan atlet
2	Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.	12	Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi	1	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
						2	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
						3	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara efektif.
						4	Meningkatkan kapasitas APIP dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja.
			Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik	13		1	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam etika pemerintahan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik.
						2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	14	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital	1	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.
						2	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.
			Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman,	15	Penyederhanaan dan Peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan Ketentraman,	1	Penyederhanaan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
						2	Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Ketertiban dan perlindungan Masyarakat		Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	3	Peningkatan efektivitas penegakan hukum.
						4	Penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
						5	Penguatan layanan darurat dan pengaduan masyarakat.
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif	1	Peningkatan kepatuhan atas implementasi standar pelayanan publik.
						2	Mengembangkan berbagai layanan publik melalui platform digital terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi.
						3	Peningkatan edukasi penggunaan layanan publik digital bagi masyarakat.
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	17	Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja Terintegrasi dan transparan	1	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi
						2	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan.
						3	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
						4	Penguatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan
				18	Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah daerah	1	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah
						2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan
						3	Penguatan regulasi dan kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.	19	Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah	1	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
						2	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
				20	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni), bangunan tahan bencana dan infrastruktur konektivitas daerah, serta peningkatan Kualitas Permukiman	1	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
						2	Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan pendukungnya
						3	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta kawasan strategis kabupaten lainnya.
						4	Perluasan Cakupan dan Peningkatan kecepatan akses internet
						5	Rekonstruksi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
						6	Perluasan cakupan layanan air minum Perkotaan
						7	Peningkatan dan Pemerataan akses layanan air Bersih dengan jaringan perpipaan dan sanitasi
						8	Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penilaian standarisasi bangunan yang tahan bencana dan iklim

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						9	Peningkatan akses kepemilikan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan
						10	Peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
						11	Pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten
						12	Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
				21	Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pengembangan dan pembangunan proyek strategis regional maupun Nasional	1	Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon
						2	Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon
						3	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung
						4	Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						5	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di kawasan cincin tampomas, waduk jatigede dan waduk cipanas untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
			Meningkatnya Ketahanan air	22	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana	1	Peningkatan infrastruktur air baku dan sistem irigasi

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	2	Peningkatan konservasi air yang terintegrasi dari hulu ke hilir
						3	Penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam pengelolaan air
						4	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air
4	Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	23	Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling
						2	Penguatan Pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
				24	Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan Koperasi	1	Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan
						2	Peningkatan keterkaitan usaha mikro dan kecil pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif
						3	Penyiapan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
				25	Peningkatan pengelolaan, Pengembangan dan Penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif	1	Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif
						2	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
						3	Penguatan kelembagaan mitra strategis pariwisata
						4	Peningkatan konektivitas kawasan pariwisata
						5	Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
						6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan <i>Geo Heritage</i>

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				26	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis	1	Pengembangan Industri Berbasis Keunggulan Wilayah dan ramah lingkungan
						2	Penguatan rantai pasok lokal dengan melibatkan UMKM dan industri kecil menengah dalam ekosistem industri
						3	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri
						4	Pengembangan Kawasan Industri BUTOM
				27	Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Komoditas Daerah serta digitalisasi perdagangan	1	Pengembangan diversifikasi produk komoditas unggulan daerah dalam upaya meningkatkan nilai tambah
						2	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen produksi dan kualitas produk.
						3	Meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pameran, promosi dagang, dan misi dagang nasional maupun internasional.
						4	Peningkatan standarisasi produk melalui sertifikasi
						5	Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, gudang, dan pusat distribusi terpadu.
						6	Digitalisasi sistem informasi perdagangan dan logistik (tracking, e-payment, e-logistics).
						7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				28	Penerapan Ekonomi hijau (Green economy)	1	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk sektor pertanian dan perikanan budidaya
						2	Penyiapan regulasi dan pengelola pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau yang berkelanjutan
						3	Pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian organik, pengelolaan limbah, energi bersih, dan bangunan hijau.
						4	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat melalui edukasi pentingnya ekonomi hijau, melibatkan pelaku usaha dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan
						5	Pemanfaatan energi terbarukan di sektor publik dan swasta.
						6	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
		Terkendalnya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah		29	Mendorong Stabilitas Keuangan dan Daya Saing Investasi Daerah	1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (KPBU dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional
						2	Peningkatan pengendalian inflasi daerah
						3	Peningkatan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
						4	Penyediaan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian
						5	Penguatan dan restrukturisasi BUMD

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						6	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	30	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	1	Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
				31	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan	1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
						2	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
						3	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
						4	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity
						5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
						6	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring
						7	Modernisasi sarana dan prasarana perikanan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		32	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	8	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional
						1	Penegakan regulasi terhadap pencemaran udara, air, dan tanah serta Pengawasan ketat terhadap limbah industri, domestik, dan pertanian
						2	Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, hutan, dan daerah aliran sungai (DAS) dan Perlindungan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati
						3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular
						4	Kemitraan dengan dunia usaha dalam implementasi program CSR berbasis lingkungan
						5	Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		33	Memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
						2	Pemanfaatan data dan kajian ilmiah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan adaptif
5		Mewujudkan Kesejahteraan		34	Mempercepat Penanggulangan dan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program perlindungan masyarakat

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Masyarakat dan Ketahanan Sosial	Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat		penuntasan kemiskinan	2	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah
						3	Meningkatkan infrastruktur dasar di kantung-kantung kemiskinan
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	35	Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	
					2	Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	
					1	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	
				36	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan		

Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

Ket : Cetak Tebal arah kebijakan Transformasi

Pelaksanaan strategi dilaksanakan melalui pentahapan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan periode 2025-2029. Pentahapan ini merupakan bagian dari tahap pertama atau pondasi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045. Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan pertama atau pondasi di atas, maka perumusan pentahapan pembangunan pada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5.
PentahapanPembangunan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia Yang Berdaya saing dan Reformasi Birokrasi <i>(Infrastruktur pelayanan dasar, Infrastruktur jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)</i>	Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia Yang Berdaya saing dan Reformasi Birokrasi <i>(Infrastruktur pelayanan dasar, Infrastruktur jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)</i>	Akselerasi pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi <i>(Peningkatan Produktifitas Pertanian, perikanan dan peternakan, Peningkatan Industri pengolahan didukung penguatan Usaha Mikro Kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, Hilirisasi industri, Pengembangan Kawasan Pariwisata, Sosial Budaya (Nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat).</i>	Optimalisasi Pembangunan Daerah berkelanjutan <i>(Peningkatan Produktifitas Pertanian, perikanan dan peternakan, Peningkatan Industri pengolahan didukung penguatan Usaha Mikro Kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, Hilirisasi industri, Pertumbuhan sektor pariwisata berbasis budaya, Daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)</i>	Perwujudan Sumedang SIMPATI semakin Maju <i>SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan ketahanan daerah</i>	Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan <i>Pemantapan SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan ketahanan daerah</i>

Sumber : Hasil Perumusan, Bapppeda 2025

3.1.1.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang mempedomani RTRW Kabupaten Sumedang melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPJMD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan Dokumen RPJMD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial.

a. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten.

Dalam Upaya mendorong pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mengacu kepada terminologi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari
- b. Pusat Pelayanan Kawasan BUTOM meliputi: Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Tomo. Dalam mendukung pengembangan wilayah ini telah terbit Peraturan Bupati Sumedang

Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Detil tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujungjaya Tahun 2024-2044.

- c. Pusat Pelayanan Kawasan Jatigede meliputi Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Cisitu
- d. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Ibu Kota Perkotaan Sumedang yang telah didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040.

b. Pengembangan Kewilayahan dalam Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Sesuai arak kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, bahwa untuk pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumedang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung.
- 2. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
- 3. Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari
- 4. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.
- 5. Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.
- 6. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasanstrategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau DaerahAfirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).

c. Pengembangan Kewilayahan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional Tahun 2025-2029.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, bahwa dalam rencana pembangunan di wilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten

Sumedang sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 pada tabel di bawah ini

Tabel 3.6
Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kawasan swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum cimanuk Cisanggarung	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Jatiluhur, D.I. Rentag, D.I. Cihea, D.I. Cikeusik, D.I. Seuseupan, D.I. Cipanas II, D.I. Cipancuh, D.I. Cileuleuy, D.I. Leuwinangka. b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi). d. Peningkatan produktifitas Peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangkn kawasan peternakan). e. Pengeembangan dan peningkatan produktifitas hortikultura. f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i>, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean.

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, waduk Saguling, waduk Jatigede, Waduk Darea, Waduk Sadawama, Waduk Ciparrcuuh, Situ Iembang, Situ Patenggang, Situ Chanti, Situ Cipanunjang-Cileunca. i. Pembangunan Infrastruktur PLTP Tampomas. j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik. k. Peningkatan produktifitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses pertanian modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		Eelalui peningkatan prasarana pascapanen. l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui : peningkatan literasi keuangan pctani dan penguatan manajemen poktan/gapokan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layaran sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktifitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Sumber : Dokumen RPJPN TAHUN 2025-2029

Sebagaimana diketahui bahwa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 dalam proses revisi. Maka untuk secara detail akan di sajikan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah.

Program Prioritas atau Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar

bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Program prioritas atau Program Unggulan disusun dengan mempertimbangkan Strategi yang akan dijalankan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada periode 2025-2029.

Adapun Program Prioritas atau Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Jawara Anti Korupsi (Pencapaian Zona Integritas : Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Program ini merujuk pada semangat, strategi, dan implementasi nyata dalam mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan layanan publik secara optimal. Dengan penjabaran sebagai berikut :

- **"Jawara"** di sini bisa dimaknai sebagai tokoh utama atau pelopor yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi. Konsep ini mendukung pencapaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Makna dari **"Jawara"** adalah :

- a. **Jujur** : Aparatur menjunjung kejujuran dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran.
- b. **Amanah** : Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.
- c. **Waspada** : Selalu siaga terhadap potensi fraud atau penyalahgunaan wewenang.
- d. **Aktif** : Proaktif melakukan perbaikan sistem dan pelayanan.
- e. **Responsif** : Cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
- f. **Anti Korupsi** : Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyimpangan.

2. Program Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan (terawat bangunannya, asri pekarangannya, santun gurunya, kreatif muridnya, akuntabel tata kelolanya serta terbuka kontrol sosialnya).

Program ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan (sekolah atau pesantren) yang berdaya guna (produktif) serta berwawasan lingkungan (ramah lingkungan), dengan menekankan enam pilar utama berikut:

- a. **Terawat Bangunannya**, bangunan sekolah yang representatif (aman, bersih, sehat dan nyaman) dengan perawatan yang berkala dengan melibatkan warga sekolah.

- b. **Asri Pekarangannya**, lingkungan sekolah yang hijau, asri, bersih dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang baik (3R/ reduce, reuse, recycle) dengan didukung sarana edukasi lingkungan (Bank sampah, kompos, hidropinik dll).
- c. **Santun Gurunya**, guru menjadi teladan dalam bersikap, berbahasa, dan bertindak dengan mengedepankan etika, empati, dan pembinaan karakter siswa dan pendekatan pembelajaran yang humanis dan berintegritas.
- d. **Kreatif Muridnya**, siswa harus aktif dalam kegiatan kewirausahaan, seni, teknologi, dan inovasi dengan proses pembelajaran berbasis proyek, riset kecil, dan eksplorasi bakat dengan ditunjang lingkungan belajar yang mendukung ekspresi dan pertumbuhan minat siswa.
- e. **Akuntabel Tata Kelolanya**, Sistem manajemen sekolah transparan, efektif, dan efisien melalui perencanaan dan pelaporan keuangan/administrasi dilakukan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan serta melibatkan semua elemen dalam pengambilan keputusan.
- f. **Terbuka Kontrol Sosialnya**, Sekolah harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan dengan adanya saluran untuk menerima pengaduan atau aspirasi dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Melanjutkan kegiatan Magrib Mengaji Online (MMO).

Program ini merupakan pembelajaran atau pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan secara *virtual (live streaming atau video conference)* setiap waktu magrib, bertujuan melestarikan budaya mengaji sambil memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

4. Melanjutkan Ta'lim Aparatur dan Pesantren Aparatur.

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan integritas pada para pegawai pemerintahan:

- **Ta'lim aparatur**, kegiatan pembinaan keagamaan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintahan melalui pengajian rutin, Ceramah keagamaan Diskusi atau kajian kitab yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.
- **Pesantren Aparatur**, Program ini merupakan bentuk pelatihan intensif yang mengadaptasi sistem pesantren dalam membina aparatur berupa pelatihan karakter dan spiritual berbasis pesantren bagi ASN atau

pejabat pemerintahan, yang biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Program memulyakan dan memperkuat ASN sebagai upaya memajukan dan meninggikan harkat ASN birokrasi.

Program merupakan menempatkan ASN bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai pilar utama pembangunan dan teladan moral di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya melalui :

- a. Keterbukaan dan kepastian jenjang jabatan dan karier serta pendapatan ASN berbasis kinerja.
- b. Menjamin kenyamanan dan kepuasan kerja serta perlindungan hukum bagi ASN.
- c. Fasilitasi ASN menjelang pensiun / MPP melalui pemberdayaan usaha dan atau *social preneurship*.
- d. Pamong SIMPATI Award (prioritas pada: penyuluh berprestasi, petugas gizi berprestasi, guru berprestasi, bidan desa berprestasi, karyawan kantor.

6. Jalan Leucir nepi ka Desa. Membangun infrastruktur pelayanan dasar penunjang pertumbuhan ekonomi.

Program ini merupakan upaya untuk membangun infrastruktur baik infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur konektivitas wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui :

- a. Jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik.
- b. Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
- c. Pembukaan Akses Jalan Baru seperti pembangunan jalan poros Sukasari – Lembang.

7. Memajukan Gerakan Wirausaha Pemuda/kaum milenial untuk pendayagunaan & kejayaan melinial Sumedang.

Program ini merupakan upaya sistematis dan kolaboratif untuk mendorong, membina, dan memberdayakan pemuda/milenial agar terjun dalam dunia wirausaha produktif, kreatif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dapat melalui :

- a. Bimbingan teknis kreatifitas milenial pd berbagai cabang ekonomi kreatif.
- b. Fasilitasi jejaring dan permodalan ekonomi kreatif.
- c. Pendirian dan pembinaan kelembagaan, kelompok ekonomi kreatif.
- d. Optimalisasi Gedung Creative Centre untuk kreativitas milenial.

8. Revolusi Pertanian (*Revolper*) atau Program 3A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih) agar mampu memajukan sektor pertanian serta Peternakan agar petani dan peternak berusaha dengan lebih menguntungkan.

Program ini merupakan transformasi pertanian dan peternakan secara sistemik, dengan fokus pada **penyediaan sarana produksi yang lengkap dan berkelanjutan**, serta pemberdayaan petani/peternak agar dapat berproduksi optimal, berdaya saing tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan, melalui :

- a. Membangun irigasi guna penyediaan air sepanjang musim.
- b. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), mekanisasi pertanian dan bioteknologi.
- c. Asuransi usaha tani dan ternak.
- d. Pelayanan Kesehatan ternak.
- e. Membangun jalan usaha tani (JUT).
- f. Penyediaan saprotan, pupuk, benih & bibit sepanjang musim.
- g. Fasilitasi insentif permodalan berusaha tani ternak dan perikanan.

9. Program Usaha Mikro Kecil Unggul. Memajukan Sektor perdagangan, koperasi dan UKM guna meningkatkan omzet dan keuntungan pelaku usaha.

Program ini memperlakukan UMKM bukan hanya sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang perlu pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan, melalui :

- a. Fasilitasi insentif perizinan dan permodalan.
- b. Revitalisasi pasar tradisional, membangun pasar induk dan tempat usaha lainnya.
- c. Fasilitasi bantuan teknologi produksi & pemasaran.
- d. Membuat market place produk unggulan.

10. Memajukan Sektor Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan dan Pariwisata.

Program ini merupakan strategi untuk penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui :

- a. Fasilitasi kemudahan perizinan dan insentif berusaha lainnya.
- b. Fasilitasi solusi masalah /kesulitan dihadapi investor yg telah lama berusaha di Sumedang melalui forum pertemuan rutin *anual meeting/maintenance investor existing*

11. Program Kadeudeuh Simpati

Program ini salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam membantu penguatan pembangunan di Desa dan pemberian insentif bagi para penggerak masyarakat serta bantuan bagi lembaga keagamaan, berupa :

- a. Penguatan Keuangan Desa melalui bantuan keuangan desa yang merata.
- b. Melanjutkan Program Insentif Guru ngaji.
- c. Melanjutkan Insentif bagi RT/RW.
- d. Insentif bagi PKK.
- e. Melanjutkan Insentif bagi Kader Posyandu.
- f. Melanjutkan Bantuan kepada Pesantren.
- g. Insentif bagi Linmas.
- h. Dukungan administrasi Guru Honorer

12. Optimalisasi Pelayanan Rumah SIMPATI untuk Fakir miskin dan lansia.

Program ini merupakan program inklusif pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ibu hamil dan mendorong terbentuknya pelayanan lansia (Geriatri), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melalui :

- a. Program Stunting untuk anak dan ibu hamil.
- b. Program Rantang Simpati (pemberian makan gratis bagi fakir miskin Lansia)
- c. Layanan Geriatri/ Lansia di semua rumah sakit pemerintah.
- d. Pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang.

13. Program Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) pada lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, bahwa sebagai pesemaian untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan budaya sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat peran pelaku seni budaya, kelompok kreatif dan komunitas seni tradisi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kekayaan alam dan kebudayaan dalam rangka implementasi SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda), melalui :

- a. Menggiatkan acara-acara kesenian dan kebudayaan.
- b. Pembuatan pusat kuliner dan seni kreatif;
- c. Kerjasama pembukaan wisata alam dan budaya;
- d. Dukungan pendidikan dan pelestarian seni tradisi Sumedang.

Tabel berikut memperlihatkan keterkaitan perencanaan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran hingga menghasilkan Program Prioritas sebagaimana dimaksud.

Tabel 3.7
Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
Misi 1 : 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan menjangkau layanan) dan kualitas (standar pelayanan yang diterima) secara adil di seluruh wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
				Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan kesehatan	
			Meningkatnya pengendalian dan eliminasi Tuberkulosis (TBC).	Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	Program Sumedang Bebas TBC	
			Menurunnya prevalensi stunting melalui pelaksanaan aksi konvergensi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data di seluruh wilayah intervensi.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Program Optimalisasi Aksi Konvergensi Stunting	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
		Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	Meningkatnya Partisipasi sekolah dalam upaya menciptakan SDM yang berwawasan dan berdayasaing	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Program Pengembangan Pendidikan dasar yang beretika dan berkarakter	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	Program Penguatan Literasi Digital dan Informasi (Program Sumedang Resep Maca)	
		Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	Terciptanya kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang yang harmonis, toleran, dan rukun dalam keberagaman melalui penguatan moderasi beragama, pelestarian budaya, dan internalisasi nilai kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program penguatan moderasi beragama, pemajuan kebudayaan dan nilai kebangsaan dalam mewujudkan Sumedang Harmonis dan Kondusif	
				Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan (%)		
				Tingkat Cipta Kondisi Kondusif		
				Tingkat Bina Demokratisasi		
		Terwujudnya generasi muda yang berkarakter kuat, berdaya saing danberjiwa kepemimpinan,		Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan (%)	Program Penguatan karakter kepemudaan ('Program Pemuda Sumedang Motekar)	
Misi 2 : 'Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital			Indeks daya Saing Daerah		
				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa	Meningkanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif hingga tingkat desa melalui transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Profesionalisme ASN	Program Tranformasi birokrasi dalam mewujudkan <i>good governance</i> sampai tingkat desa	
				Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %		
				Indeks Inovasi Daerah		
				Indeks Desa		
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
		Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	dan efektivitas pembangunan.	Indeks Kepatuhan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten		
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah			Indeks Kualitas Infrastruktur		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, aman, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Program Peningkatan Kualitas permukiman layak dan berkelanjutan (Program Imah Merenah)	
			Meningkatnya konektivitas antarwilayah hingga ke desa	Tingkat Konektivitas Jalan (%)	Program Jalan Leucir nepi ka desa	
		Meningkatnya Ketahanan air	Terpenuhinya kebutuhan air secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas untuk mendukung kehidupan masyarakat, pertanian, dan ekosistem.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Program Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Air	
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)		
				Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)		
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Poin)		
				Indeks Resiko Bencana		
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Meningkatnya industri yang kompetitif dan berdaya saing tinggi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Program Pengembangan dan Penguatan Industri	
			Meningkatnya destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing, yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, serta kesejahteraan masyarakat lokal.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Program Penguatan Pariwisata Unggulan	
			Terciptanya sistem distribusi dan rantai pasok perdagangan yang efisien, inklusif, dan terintegrasi secara digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing pelaku usaha	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	Program penguatan efektivitas distribusi dan rantai pasok perdagangan serta pengembangan ekosistem Perdagangan Digital	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
			Terciptanya pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mandiri, berdaya saing, inovatif, dan mampu naik kelas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Program Usaha Mikro Kecil Unggul	
			Terciptanya generasi muda yang produktif, kompeten, dan mandiri melalui peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta terbukanya lebih banyak peluang kerja layak di berbagai sektor	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda (Memajukan Gerakan Wirausaha Pemuda / kaum milenial)	
			Terciptanya iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Program Peningkatan Investasi Daerah	
			Meningkatnya jumlah produk unggulan yang memenuhi standar mutu nasional/internasional	Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Unggulan Daerah	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha tani melalui terpenuhinya sarana dan prasarana produksi pertanian secara tepat, merata, dan terintegrasi.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui 4A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih, Ada Alat Mesin Pertanian)	
		Terkendalnya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	Terciptanya stabilitas fiskal daerah yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh terhadap dinamika ekonomi.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Program Peningkatan Stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	
				Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) (%)		
				Total kredit/PDRB (%)		
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta meningkatnya kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya emisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup serta mitigasi GRK (Sumedang Pro Iklim)	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Keterangan
			Gas Rumah Kaca (GRK) guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan adaptif terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)		
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Terwujudnya masyarakat dan wilayah Kabupaten Sumedang yang tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana secara terintegrasi dan partisipatif.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Sumedang Tangguh Bencana	
Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial			Tingkat Kemiskinan (%)		
				Rasio Gini (Poin)		
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial serta meningkatnya kualitas hidup keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan yang inklusif bagi kelompok rentan	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Juta/Tahun)	Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan (Perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas)	
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks Perlindungan Anak		

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Rencana Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program ini kemudian diimplementasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, dengan memastikan bahwa pelaksanaannya berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Program Perangkat Daerah disusun sesuai dengan susunan Perangkat Daerah yang tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Program Perangkat Daerah disusun berdasarkan urusan yang meliputi urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi 6 (enam) urusan, urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan; unsur urusan pemerintahan pilihan meliputi 7 (tujuh) urusan; unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur; unsur penunjang urusan pemerintahan 4 (empat) unsur; unsur pengawasan urusan pemerintahan 1 (satu) unsur; unsur kewilayahan 1 (satu) unsur yang meliputi 26 Kecamatan; dan unsur pemerintahan umum 1 (satu) unsur dan non urusan Perangkat Daerah.

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Program, indikator dan target kinerja dan pagu indikatif Perangkat Daerah telah disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2025-2030. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan daerah pada Tahun 2030 merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034. Adapun program Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					789.818.256.304,00		829.450.976.408,00		898.855.805.237,00		920.846.945.194,00		974.526.074.844,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					68.513.235.960,00		77.184.559.556,00		80.844.711.656,00		84.870.878.966,00		89.299.663.007,00	
Program Pengelolaan Pendidikan					67.613.235.960		76.194.559.556		79.755.711.656		83.672.978.966		87.981.973.007	Dinas Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD	persen	97,31	97,39	21.136.725.960,00	97,51	24.090.398.556,00	97,59	24.090.398.556,00	97,61	24.090.398.556,00	97,67	24.090.398.556,00	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP	persen	91,55	91,63	20.123.360.000,00	91,75	23.115.696.000,00	91,83	23.778.001.600,00	91,85	24.506.537.760,00	91,91	25.307.927.536,00	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD	persen	91,40	91,48	6.180.000.000,00	91,60	6.798.000.000,00	91,68	7.477.800.000,00	91,70	8.225.580.000,00	91,76	9.048.138.000,00	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	persen	59,61	59,69	20.173.150.000,00	59,81	22.190.465.000,00	59,89	24.409.511.500,00	59,97	26.850.462.650,00	60,09	29.535.508.915,00	
Program Pengembangan Kurikulum					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan lokal	persen	N/A	0,25	500.000.000,00	0,25	550.000.000,00	0,25	605.000.000,00	0,25	665.500.000,00	1,00	732.050.000	
Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	85,53	88,83	400.000.000,00	92,14	440.000.000,00	95,44	484.000.000,00	98,74	532.400.000,00	100	585.640.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					311.864.809.612,00		332.645.590.074,00		347.076.463.282,00		378.849.811.541,00		13.097.750.836,00	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					305.814.809.612,00		325.990.590.074		339.755.963.282		372.920.206.541		406.575.185.336	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar	Persen	0,61	0,67	170.318.000.000,00	0,7	187.699.800.000,00	0,73	206.769.780.000,00	0,76	227.696.758.000,00	0,79	250.666.433.800,00	
	Kesehatan Ibu dan Anak (IUP)													
	a, Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (IUP)	Jumlah	21	24	64.616.674.158,00	21	71.078.341.574,00	19	78.186.175.732,00	18	86.004.793.305,00	16	94.605.272.635,00	
	b, Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Tahun	Jumlah	187	171	6.767.020.000,00	161	7.428.722.000,00	154	8.154.094.200,00	146	8.949.503.620,00	146	9.821.953.982,00	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular	Persen	100	100	3.270.655.000,00	100	3.597.721.506,00	100	3.957.492.828,00	100	5.353.242.000,00	100	5.888.566.000,00	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	Persen	94,88	100	4.335.455.460,00	100	4.769.000.000,00	100	5.245.900.829,00	100	6.770.491.022,00	100	7.447.540.324,00	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar (RSUD Umar Wirahadi Kusumah)	Nilai	94,17	94,17	56.507.004.994,00	94,17	51.417.004.994,00	95	37.442.519.694,00	95	38.145.418.594,00	96	38.145.418.594,00	RSUD Umar Wirahadi Kusumah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					1.595.000.000,00		1.754.500.000,00		1.929.950.000,00		0,00		0,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	0,88	0,89	1.595.000.000,00	0,9	1.754.500.000,00	0,9	1.929.950.000,00	0,91		0,91		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					2.475.000.000,00		2.722.500.000,00		2.994.750.000,00		3.294.225.000,00		3.623.647.500,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	0,87	0,88	2.475.000.000,00	0,89	2.722.500.000,00	0,89	2.994.750.000,00	0,90	3.294.225.000,00	0,90	3.623.647.500,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					1.980.000.000,00		2.178.000.000,00		2.395.800.000,00		2.635.380.000,00		2.898.918.000,00	
Meningkatnya kualitas pemeberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	0,31	0,39	1.980.000.000,00	0,43	2.178.000.000,00	0,45	2.395.800.000,00	0,48	2.635.380.000,00	0,5	2.898.918.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					331.821.800.132,00		324.735.721.118,00		368.651.394.573,00		347.898.060.387,00		360.469.486.771,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11.660.000.000,00		11.660.000.000,00		11.660.000.000,00		11.660.000.000,00		11.660.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadp irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (IKK)	Persen		1,30%	11.660.000.000,00	1,95%	11.660.000.000,00	2,60%	11.660.000.000,00	3,25%	11.660.000.000,00	3,90%	11.660.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13.520.000.000,00		15.560.000.000,00		17.770.000.000,00		20.365.000.000,00		23.625.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui SPAM jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Persen	82,33	82,80	13.520.000.000,00	83,03	15.560.000.000,00		17.770.000.000,00	83,5	20.365.000.000,00	83,74	23.625.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.765.000.000,00		10.345.000.000,00		31.049.000.000,00		2.440.000.000,00		2.470.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya Kapasitas Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	23	65	2.765.000.000,00	70	10.345.000.000,00	85	31.049.000.000,00	90	2.440.000.000,00	91	2.470.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					20.536.250.000,00		14.222.000.000,00		28.475.550.000,00		17.974.882.500,00		21.024.214.875,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (diluar kawasan kumuh)	Persen	87,08	87,34%	20.536.250.000,00	87,48%	14.222.000.000,00	87,61%	28.475.550.000,00	87,74%	17.974.882.500,00	87,88%	21.024.214.875,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.495.000.000,00		4.030.000.000,00		4.620.000.000,00		5.345.000.000,00		6.125.000.000,00	
Meningkatnya Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (IKK)	Persen	100	100,00%	3.495.000.000,00	100,00%	4.030.000.000,00	100%	4.620.000.000,00	100,00%	5.345.000.000,00	100,00%	6.125.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					12.190.000.000,00		14.015.000.000,00		16.110.000.000,00		18.550.000.000,00		21.350.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang sesuai standar	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan (kantor pemerintahan)	Persen	0,55	0,64	12.190.000.000,00	0,68	14.015.000.000,00	0,73	16.110.000.000,00	0,77	18.550.000.000,00	0,82	21.350.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					261.855.550.132,00		249.198.721.118,00		253.486.844.573,00		264.508.177.887,00		264.985.271.896,00	
Meningkatnya Struktur Jalan dan Jembatan,	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (IKK)	Persen	87,54%	88,80%	261.855.550.132,00	89,44%	249.198.721.118,00	90,07%	253.486.844.573,00	90,70%	264.508.177.887,00	91,33%	264.985.271.896,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.250.000.000,00		2.325.000.000,00		2.450.000.000,00		2.575.000.000,00		2.650.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga terampil konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (IKK) dan Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Persen		29,95%	2.250.000.000,00	47,46%	2.325.000.000,00	64,97%	2.450.000.000,00	82,49%	2.575.000.000,00	100%	2.650.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang	Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Persen		33,33%		50,00%		66,67%		83,33%		100,00%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.550.000.000,00		3.380.000.000,00		3.030.000.000,00		4.480.000.000,00		6.580.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas RTR	Persentase Kesesuaian Tahapan Penyusunan RTR yang sesuai dengan peraturan	Persen	100%	1	3.550.000.000,00	100%	3.380.000.000,00	100%	3.030.000.000,00	100%	4.480.000.000,00	100%	6.580.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	Persen		82,50%		85,00%		90,00%		95,00%		97,50%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					37.951.000.000,00		46.771.000.000,00		47.471.000.000,00		47.676.000.000,00		44.096.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.100.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen		48,48%	1.855.000.000,00	72,73%	3.625.000.000,00	96,97%	3.625.000.000,00	100%	3.625.000.000,00			
Terfasilitasinya Relokasi Rumah Yang Layak Huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen		50%	245.000.000,00	65%	375.000.000,00	80%	375.000.000,00	100%	375.000.000,00			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					14.701.000.000,00		14.621.000.000,00		15.321.000.000,00		15.426.000.000,00		15.746.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	persen		4,58%	14.701.000.000,00	7,50%	14.621.000.000,00	10,43%	15.321.000.000,00	13,35%	15.426.000.000,00	16,27%	15.746.000.000,00	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					16.550.000.000,00		16.550.000.000,00		16.550.000.000,00		16.550.000.000,00		16.550.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAW AB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tertatanya Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	persen		9,39%	16.550.000.000,00	9,71%	16.550.000.000,00	10,03%	16.550.000.000,00	10,34%	16.550.000.000,00	10,66%,	16.550.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.600.000.000,00		11.600.000.000,00		11.600.000.000,00		11.700.000.000,00		11.800.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)	persen		44,44%	4.600.000.000,00	53,70%	11.600.000.000,00	62,96%	11.600.000.000,00	72,22%	11.700.000.000,00	100%	11.800.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					23.223.500.600,00		26.825.850.660,00		30.631.135.726,00		34.654.249.300,00		38.919.674.230,00	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.586.870.670,00		10.725.557.737,00		12.918.113.511,00		15.169.924.863,00		17.486.917.349,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persenatse Perda dan Perkada yang Ditegakan	Persen	100%	100%	918.000.000,00	100%	1.009.800.000,00	100%	1.110.780.000,00	100%	1.221.858.000,00	100%	1.344.043.800,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100%	100%	4.006.667.170,00	100%	4.407.333.887,00	100%	4.848.067.276,00	100%	5.332.874.004,00	100%	5.866.161.405,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100%	100%	3.530.000.000,00	100%	5.163.000.000,00	100%	6.799.300.000,00	100%	8.439.230.000,00	100%	10.083.153.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya	Persen	6%	6%	132.203.500,00	6%	145.423.850,00	6%	159.966.235,00	6%	175.962.859,00	6%	193.559.144,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					3.936.629.930,00		4.330.292.923,00		4.766.022.215,00		5.242.624.437,00		5.766.886.881,00	Dinas Pemadam Kebakaran
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	22%	28%	1.245.000.000,00	30%	1.369.500.000,00	35%	1.509.150.000,00	40%	1.660.065.000,00	45%	1.826.071.500,00	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	75,11%	95%	2.691.629.930,00	95%	2.960.792.923,00	95%	3.256.872.215,00	95%	3.582.559.437,00	95%	3.940.815.381,00	
Program Penanggulangan Bencana					10.700.000.000,00		11.770.000.000,00		12.947.000.000,00		14.241.700.000,00		15.665.870.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100%	100%	350.000.000,00	100%	385.000.000,00	100%	423.500.000,00	100%	465.850.000,00	100%	512.435.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100%	100%	6.350.000.000,00	100%	6.985.000.000,00	100%	7.683.500.000,00	100%	8.451.850.000,00	100%	9.297.035.000,00	
Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	100%	1.750.000.000,00	100%	1.925.000.000,00	100%	2.117.500.000,00	100%	2.329.250.000,00	100%	2.562.175.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan Pasca Bencana	Persentase warga negara Terdampak Bencana Yang Mendapat Pendampingan Pasca Bencana	Persen	100%	100%	2.250.000.000	100%	2.475.000.000,00	100%	2.722.500.000,00	100%	2.994.750.000,00	100%	3.294.225.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					16.443.910.000,00		21.288.255.000,00		24.181.100.000,00		26.897.945.000,00		28.643.500.000,00	
Program Pemberdayaan Sosial					3.950.000.000,00		5.175.000.000,00		6.700.000.000,00		8.250.000.000,00		8.700.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	58,33	75	3.950.000.000,00	83,33	5.175.000.000,00	91,67	6.700.000.000,00	100	8.250.000.000,00	100	8.700.000.000,00	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	N/A	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	
	Jumlah Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	Orang	N/A	5	35.000.000,00	7	40.000.000,00	9	45.000.000,00	11	50.000.000,00	13	55.000.000,00	
Program Rehabilitasi Sosial					6.256.000.000,00		8.452.000.000,00		8.944.000.000,00		9.480.000.000,00		10.016.000.000,00	
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	Persen	71,66	78,02	6.256.000.000,00	84,33	8.452.000.000,00	90,64	8.944.000.000,00	96,95	9.480.000.000,00	100	10.016.000.000,00	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					3.692.910.000,00		4.306.255.000,00		4.452.100.000,00		4.592.945.000,00		4.772.500.000,00	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Masyarakat (DTKS) yang menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	56,76	63,19	3.692.910.000,00	63,55	4.306.255.000,00	63,91	4.452.100.000,00	64,27	4.592.945.000,00	64,27	4.772.500.000,00	
Program Penanganan Bencana					2.095.000.000,00		2.275.000.000,00		2.695.000.000,00		2.875.000.000,00		3.245.000.000,00	
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	2.095.000.000,00	100	2.275.000.000,00	100	2.695.000.000,00	100	2.875.000.000,00	100	3.245.000.000,00	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					380.000.000,00		1.000.000.000,00		1.300.000.000,00		1.600.000.000,00		1.800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	Persen	100	100	380.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.800.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					319.857.175.813,00		755.093.642.130,00		811.196.862.965,00		876.425.924.557,00		979.656.865.433,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.031.560.000,00		11.034.716.000,00		12.138.187.600,00		13.352.006.360,00		14.687.206.996,00	
Program Perencanaan Tenaga Kerja					330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		483.153.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terkelolahnya informasi tenaga kerja	Jumlah dokumen rencana Kerja	Dokumen		2	330.000.000,00	2	363.000.000,00	2	399.300.000,00	2	439.230.000,00	2	483.153.000,00	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					4.510.000.000,00		4.961.000.000,00		5.457.100.000,00		6.002.810.000,00		6.603.091.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		20	4.510.000.000,00	20	4.961.000.000,00	20	5.457.100.000,00	20	6.002.810.000,00	20	6.603.091.000,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja					929.060.000,00		1.021.966.000,00		1.124.162.600,00		1.236.578.860,00		1.360.236.746,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen		20	929.060.000,00	20	1.021.966.000,00	20	1.124.162.600,00	20	1.236.578.860,00	20	1.360.236.746,00	
Program Hubungan Industrial					1.815.000.000,00		1.996.500.000,00		2.196.150.000,00		2.415.765.000,00		2.657.341.500,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar	Laporan		167	1.815.000.000,00	168	1.996.500.000,00	169	2.196.150.000,00	170	2.415.765.000,00	171	2.657.341.500,00	
	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui bipartit/mediasi	Laporan		10		10		10		10		10		
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		2.662.000.000,00		2.928.200.000,00		3.221.020.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan yang di fasilitasi	Hektar		1,5	2.200.000.000,00	1,5	2.420.000.000,00	1,5	2.662.000.000,00	1,5	2.928.200.000,00	1,5	3.221.020.000,00	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					214.500.000,00		235.950.000,00		259.545.000,00		285.499.500,00		314.049.450,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah transmigran lokal yang dibina	KK		3	214.500.000,00	3	235.950.000,00	3	259.545.000,00	3	285.499.500,00	3	314.049.450,00	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	KK		30	33.000.000,00	30	36.300.000,00	30	39.930.000,00	30	43.923.000,00	30	48.315.300,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.785.000.000,00		5.840.000.000,00		6.218.000.000,00		6.611.300.000,00		7.020.630.000,00	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					1.360.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) *(IKK)	Persen	41,34	57,62	450.000.000,00	65,76	550.000.000,00	73,90	550.000.000,00	82,04	550.000.000,00	90,18	550.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	34,62	41,89	910.000.000,00	46,08	1.500.000.000,00	50,69	1.500.000.000,00	55,75	1.500.000.000,00	61,32	1.500.000.000,00	
Program Perlindungan Perempuan					875.000.000,00		1.020.000.000,00		1.166.500.000,00		1.314.650.000,00		1.464.615.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif *(IKK)	Persen	53,84	63,46	875.000.000,00	71,15	1.020.000.000,00	76,92	1.166.500.000,00	82,69	1.314.650.000,00	90,38	1.464.615.000,00	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					950.000.000,00		1.045.000.000,00		1.142.500.000,00		1.242.650.000,00		1.346.015.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraangender, pemenuhan hak, serta pelindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	10,000	23	950.000.000,00	35	1.045.000.000,00	53	1.142.500.000,00	80,000	1.242.650.000,00	121	1.346.015.000,00	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		66.000.000,00		72.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	53,70	74,07	50.000.000,00	83,33	55.000.000,00	92,59	60.000.000,00	96,29	66.000.000,00	100	72.000.000,00	
Program Pemenuhan Hak Anak					550.000.000,00		590.000.000,00		634.000.000,00		682.000.000,00		734.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara kompherensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	66,24	68,92	550.000.000,00	70,29	590.000.000,00	71,70	634.000.000,00	73,13	682.000.000,00	74,60	734.000.000,00	
Program Perlindungan Khsuus Anak					1.000.000.000,00		1.080.000.000,00		1.165.000.000,00		1.256.000.000,00		1.354.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif *(IKK)	Persen	43,10	62,06	500.000.000,00	74,13	530.000.000,00	87,93	560.000.000,00	94,82	591.000.000,00	98,27	623.000.000,00	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	79,17	82,37	500.000.000,00	84,02	550.000.000,00	85,7	605.000.000,00	87,41	665.000.000,00	89,16	731.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.475.000.000,00		4.122.500.000,00		4.204.750.000,00		4.625.225.000,00		5.087.747.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					260.000.000,00		286.000.000,00		314.600.000,00		346.060.000,00		380.666.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan pokok	Kg/ Kapita/ Tahun	236,9	239,27	260.000.000,00	240,47	286.000.000,00	241,67	314.600.000,00	242,88	346.060.000,00	244,10	380.666.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.810.000.000,00		3.141.000.000,00		3.400.100.000,00		3.740.110.000,00		4.114.121.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	94,6	2.810.000.000,00	94,65	3.141.000.000,00	94,7	3.400.100.000,00	94,75	3.740.110.000,00	94,8	4.114.121.000,00	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					180.000.000,00		448.000.000,00		217.800.000,00		239.580.000,00		263.538.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	11,55	11,45	180.000.000,00	11,40	448.000.000,00	11,35	217.800.000,00	11,30	239.580.000,00	11,25	263.538.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	N/A	100	225.000.000,00	100	247.500.000,00	100	272.250.000,00	100	299.475.000,00	100	329.422.500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					140.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					140.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	Persen	100	100	140.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					26.256.075.000,00		23.041.348.750,00		21.576.436.000,00		22.475.602.000,00		23.761.417.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAW AB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					400.000.000,00		400.000.000,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00							
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,00		1.435.000.000,00		680.000.000,00		780.000.000,00		730.000.000,00	
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Persentase pemantauan kualitas air dan kualitas udara	Persen	100	100	300.000.000,00	100	1.435.000.000,00	100	680.000.000,00	100	780.000.000,00	100	730.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					661.825.000,00		961.098.750,00		984.436.000,00		1.132.102.000,00		1.301.917.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen	75	76	661.825.000,00	77	961.098.750,00	78	984.436.000,00	79	1.132.102.000,00	80	1.301.917.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					345.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		185.000.000,00		205.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase pelaku usaha yang mengelola Limbah B3 sesuai ketentuan	Persen	100	100	345.000.000,00	100	160.000.000,00	100	170.000.000,00	100	185.000.000,00	100	205.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					90.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izzin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izzin PPLH	Persen	15	20	90.000.000,00	22	105.000.000,00	23	120.000.000,00	24	135.000.000,00	25	150.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					150.000.000,00		230.000.000,00		325.000.000,00		465.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen		23	150.000.000,00	28	230.000.000,00	31	325.000.000,00	33	465.000.000,00	36	600.000.000,00	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Peningkatan Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Persen	0	50	100.000.000,00	56	125.000.000,00	57	150.000.000,00	59	175.000.000,00	60	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					24.159.250.000,00		19.565.250.000,00		19.077.000.000,00		19.523.500.000,00		20.484.500.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Governance Dalam Pengelolaan Sampah	Poin	20	28	24.159.250.000,00	32	19.565.250.000,00	34	19.077.000.000,00	35	19.523.500.000,00	35	20.484.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.919.065.000,00		5.909.065.000,00		5.574.065.000,00		5.389.065.000,00		5.404.065.000,00	
Program Pendaftaran Penduduk					3.896.565.000,00		3.621.565.000,00		3.421.565.000,00		3.221.565.000,00		3.221.565.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKK)	persen	17,24%	20%	3.596.000.000,00	22,50%	3.321.000.000,00	25%	3.121.000.000,00	27,50%	2.921.000.000,00	30%	2.921.000.000,00	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (IKK)	persen	60%	65%	300.565.000,00	70%	300.565.000,00	75%	300.565.000,00	80%	300.565.000,00	85%	300.565.000,00	
Program Pencatatan Sipil					1.272.500.000,00		1.332.500.000,00		1.392.500.000,00		1.402.500.000,00		1.412.500.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (IKK)	persen	50%	60%	422.500.000,00	70%	432.500.000,00	70%	442.500.000,00	80%	452.500.000,00	80%	462.500.000,00	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (IKK)	persen	97%	97%	725.000.000,00	97%	775.000.000,00	98%	800.000.000,00	98%	800.000.000,00	98%	800.000.000,00	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (IKK)	persen	N/A	65%	125.000.000,00	70%	125.000.000,00	75%	150.000.000,00	80%	150.000.000,00	80%	150.000.000,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					750.000.000,00		955.000.000,00		760.000.000,00		765.000.000,00		770.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	N/A	80%	750.000.000,00	87%	955.000.000,00	90%	760.000.000,00	93%	765.000.000,00	95%	770.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					11.256.303.793,00		13.507.564.550,00		16.209.077.460,00		19.450.892.952,00		23.341.071.543,00	
Program Penataan Desa					363.000.000,00		435.600.000,00		522.720.000,00		627.264.000,00		752.716.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kualitas penataan desa	Jumlah sarana dan prasarana yang terfasitasi		1	1	363.000.000,00	2	435.600.000,00	1	522.720.000,00	2	627.264.000,00	1	752.716.800,00	
Program Peningkatan Kerja Sama Desa					231.000.000,00		277.200.000,00		332.640.000,00		399.168.000,00		479.001.600,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		0	30	231.000.000,00	40	277.200.000,00	50	332.640.000,00	60	399.168.000,00	70	479.001.600,00	
Program Administrasi Pemerintahan Desa					8.737.203.793,00		10.484.644.550,00		12.581.573.460,00		15.097.888.152,00		18.117.465.783,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan		2,73	15,46	8.737.203.793,00	15,99	10.484.644.550,00	16,51	12.581.573.460,00	17,03	15.097.888.152,00	17,56	18.117.465.783,00	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.925.100.000,00		2.310.120.000,00		2.772.144.000,00		3.326.572.800,00		3.991.887.360,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		80	86	1.925.100.000,00	91	2.310.120.000,00	94	2.772.144.000,00	97	3.326.572.800,00	100	3.991.887.360,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					17.176.600.000,00		18.774.839.000,00		20.374.425.000,00		22.173.154.000,00		24.183.534.000,00	
Program Pengendalian Penduduk					397.000.000,00		409.000.000,00		419.000.000,00		429.000.000,00		439.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfesific Fertility Rate/ ASFR *(IKK)	Kelahiran	14,71	143090,0000	397.000.000,00	141.119	409.000.000,00	139.156	419.000.000,00	137.198	429.000.000,00	135.248	439.000.000,00	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					10.245.600.000,00		11.130.839.000,00		11.930.225.000,00		12.811.054.000,00		13.766.514.000,00	
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) *(IKK)	Persen	81,98	76,33	2.342.000.000,00	76,38	2.495.839.000,00	76,44	2.651.725.000,00	76,49	2.824.704.000,00	76,55	3.001.529.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) *(IKK)	Persen	8,69	89.829	7.903.600.000,00	89.787	8.635.000.000,00	89750,0000	9.278.500.000,00	89.722	9.986.350.000,00	89.703	10.764.985.000,00	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					6.534.000.000,00		7.235.000.000,00		8.025.200.000,00		8.933.100.000,00		9.978.020.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	73,43	75,01	6.534.000.000,00	76,32	7.235.000.000,00	77,63	8.025.200.000,00	78,94	8.933.100.000,00	80,25	9.978.020.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					29.627.140.000,00		33.578.900.000,00		33.200.660.000,00		34.297.420.000,00		34.169.180.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					29.627.140.000,00		33.578.900.000,00		33.200.660.000,00		34.297.420.000,00		34.169.180.000,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Konektivitas Angkutan Darat	Konektivitas Darat	Persen	55,50	61,61	9.217.140.000,00	67,39	10.601.400.000,00	72,62	9.480.660.000,00	77,92	9.834.920.000,00	87,83	10.664.180.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi Ideal	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	47,40	61,00	20.410.000.000,00	64,00	22.977.500.000,00	66,57	23.720.000.000,00	69,70	24.462.500.000,00	76,40	23.505.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.998.000.000,00		12.097.800.000,00		13.307.580.000,00		14.638.338.000,00		12.371.645.000,00	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					2.548.000.000,00		2.802.800.000,00		3.083.080.000,00		3.391.388.000,00			
Meningkatnya layanan komunikasi publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan Prioritas Pemerintah dan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	N/A	76 Persen	2.548.000.000,00	77 Persen	2.802.800.000,00	78 Persen	3.083.080.000,00	79 Persen	3.391.388.000,00	80 Persen	3.730.526.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					8.450.000.000,00		9.295.000.000,00		10.224.500.000,00		11.246.950.000,00		12.371.645.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100 Persen	100 Persen	8.450.000.000,00	100 Persen	9.295.000.000,00	100 Persen	10.224.500.000,00	100 Persen	11.246.950.000,00	100 Persen	12.371.645.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					4.460.000.000,00		495.550.000.000,00		545.105.000.000,00		599.615.500.000,00		659.577.050.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya kualitas layanan izim usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	7,97%	11,95 Persen	5.000.000,00	13,94 Persen	550.000.000,00	15,93 Persen	605.000.000,00	17,92 Persen	665.500.000,00	19,91 Persen	732.050.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					5.000.000,00		5.500.000.000,00		6.050.000.000,00		6.655.000.000,00		7.320.500.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	59,76%	100%	5.000.000,00	100%	5.500.000.000,00	100%	6.050.000.000,00	100%	6.655.000.000,00	100%	7.320.500.000,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					10.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	59,76%	100%	10.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.331.000.000,00	100%	1.464.100.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000,00		5.500.000.000,00		6.050.000.000,00		6.655.000.000,00		7.320.500.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	49,80%	69,72%	50.000.000,00	79,68%	5.500.000.000,00	89,64%	6.050.000.000,00	99,60%	6.655.000.000,00	100%	7.320.500.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.125.000.000,00		233.750.000.000,00		257.125.000.000,00		282.837.500.000,00		311.121.250.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	60,16%	100%	2.125.000.000,00	100%	233.750.000.000,00	100%	257.125.000.000,00	100%	282.837.500.000,00	100%	311.121.250.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					380.000.000,00		41.800.000.000,00		45.980.000.000,00		50.578.000.000,00		55.635.800.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	31,36%	32,82%	380.000.000,00	33,55%	41.800.000.000,00	34,28%	45.980.000.000,00	35,01%	50.578.000.000,00	35,74%	55.635.800.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.885.000.000,00		207.350.000.000,00		228.085.000.000,00		250.893.500.000,00		275.982.850.000,00	
Meningkatnya data saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	3,35%	5,28%	1.885.000.000,00	6,24%	207.350.000.000,00	7,20%	228.085.000.000,00	8,16%	250.893.500.000,00	9,12%	275.982.850.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.155.012.800,00		2.578.848.030,00		2.756.185.355,00		2.983.030.530,00		3.229.041.358,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		450.000.000,00		482.000.000,00		516.700.000,00		554.370.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	57,89	53	250.000.000,00	55	450.000.000,00	55	482.000.000,00	55	516.700.000,00	60	554.370.000,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					488.553.105,00		535.000.000,00		595.000.000,00		620.000.000,00		655.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	98	98	488.553.105,00	98	535.000.000,00	98	595.000.000,00	98	620.000.000,00	98	655.000.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					771.227.895,00		908.401.830,00		934.434.155,00		1.014.685.430,00		1.115.700.158,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	93	100	771.227.895,00	100	908.401.830,00	100	934.434.155,00	100	1.014.685.430,00	100	1.115.700.158,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					552.143.200,00		592.357.600,00		651.662.600,00		729.771.200,00		766.441.200,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	30	35	552.143.200,00	40	592.357.600,00	45	651.662.600,00	50	729.771.200,00	55	766.441.200,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					93.088.600,00		93.088.600,00		93.088.600,00		101.873.900,00		137.530.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	85	100	93.088.600,00	100	93.088.600,00	100	93.088.600,00	100	101.873.900,00	100	137.530.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					40.745.000.000,00		15.480.000.000,00		16.215.000.000,00		16.500.000.000,00		51.785.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.275.000.000		2.440.000.000		2.605.000.000		2.770.000.000		2.935.000.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (IKK)	Persen	n/a	5,40%	2.275.000.000	5,40%	2.440.000.000	5,40%	2.605.000.000	5,40%	2.770.000.000	5,40%	2.935.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					37.150.000.000		11.700.000.000		12.150.000.000		12.150.000.000		47.150.000.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (IKK)	Persen	n/a	10%	37.150.000.000	10%	11.700.000.000	10%	12.150.000.000	10%	12.150.000.000	10%	47.150.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.320.000.000,00		1.340.000.000,00		1.460.000.000,00		1.580.000.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	n/a	100%	1.320.000.000,00	100%	1.340.000.000,00	100%	1.460.000.000,00	100%	1.580.000.000,00	100%	1.700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00		1.207.882.500,00	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00		1.207.882.500,00	
Meningktanya Kualitas data Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	Persen	100	100	825.000.000,00	100	907.500.000	100	998.250.000	100	1.098.075.000	100	1.207.882.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.573.000.000,00		1.730.000.300,00		1.903.330.000,00		1.288.408.000,00		1.417.248.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					1.573.000.000,00		1.730.000.300,00		1.903.330.000,00		1.288.408.000,00		1.417.248.800,00	
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Persen	73,64	81,39	1.573.000.000,00	85,27	1.730.000.300,00	89,14	1.903.330.000,00	91,47	1.288.408.000,00	93,02	1.417.248.800,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.950.000.000,00		6.900.000.000,00		6.900.000.000,00		6.900.000.000,00		6.900.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.700.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	40%	60%	3.700.000.000,00	65%	3.650.000.000	70%	3.650.000.000	75%	3.650.000.000	80%	3.650.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	100%	100%	600.000.000,00	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	15%	17%	350.000.000,00	17%	350.000.000	17%	350.000.000	17%	350.000.000	17%	350.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persantase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	Persen	17%	22%	1.300.000.000,00	25%	1.300.000.000	27%	1.300.000.000	30%	1.300.000.000	33%	1.300.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	1,10%	5%	1.000.000.000,00	5%	1.000.000.000	7%	1.000.000.000	8,00%	1.000.000.000	9,00%	1.000.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.742.219.220,00		1.899.140.500,00		2.070.354.550,00		2.257.289.515,00		2.432.518.266,00	
Program Pembinaan Perpustakaan					1.659.219.220,00		1.807.140.500,00		1.969.354.550,00		2.147.289.515,00		2.312.518.266,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (IKK)	Nilai	72,27	72,50	1.659.219.220,00	72,55	1.807.140.500,00	73,00	1.969.354.550,00	74,00	2.147.289.515,00	75,00	2.312.518.266,00	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					83.000.000,00		92.000.000,00		101.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	N/A	7,3	83.000.000,00	7,5	92.000.000,00	8,00	101.000.000,00	9,00	110.000.000,00	10,00	120.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.882.200.000,00		2.141.420.000,00		2.445.562.000,00		2.770.618.200,00		3.081.627.470,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pengelolaan Arsip					1.153.950.000,00		1.313.845.000,00		1.514.729.500,00		1.717.202.450,00		1.936.922.695,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	76,4	77	1.153.950.000,00	77,20	1.313.845.000,00	77,45	1.514.729.500,00	77,60	1.717.202.450,00	77,80	1.936.922.695,00	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					618.250.000,00		697.575.000,00		780.832.500,00		878.415.750,00		954.704.775,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	N/A	100	618.250.000,00	100,00	697.575.000,00	100,00	780.832.500,00	100,00	878.415.750,00	100,00	954.704.775,00	
Program Perizinan Penggunaan Arsip					110.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	N/A	100	110.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	175.000.000,00	100,00	190.000.000,00	
UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					61.717.392.310,00		64.223.164.912,50		68.222.952.281,75		74.703.291.893,63		81.811.302.549,99	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.729.975.000,00		6.300.972.500,00		6.915.257.250,00		7.590.046.475,00		8.332.798.623,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					934.900.000,00		1.028.390.000,00		1.131.229.000,00		1.244.351.900,00		1.368.787.090,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (IKK)	Ton	1,530,83 Ton	1,760,84 Ton	934.900.000,00	1901,70 Ton	1.028.390.000,00	2,063,35 Ton	1.131.229.000,00	2,249,05 Ton	1.244.351.900,00	2,462,71 Ton	1.368.787.090,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.625.225.000,00		3.987.747.500,00		4.386.522.250,00		4.825.174.475,00		5.307.691.923,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (IKK)	Ton	9,037,51 Ton	9,634,44 Ton	3.625.225.000,00	10,019,82 Ton	3.987.747.500,00	10,470,71 Ton	4.386.522.250,00	10,994,24 Ton	4.825.174.475,00	11,598,93 Ton	5.307.691.923,00	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.883.650.000,00		972.015.000,00		1.053.404.000,00		1.142.007.900,00		1.239.956.190,00	
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Persen	5,98%	35,41%	2.883.650.000,00	51,91%	972.015.000,00	71,05%	1.053.404.000,00	92,58%	1.142.007.900,00	100,00%	1.239.956.190,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					286.200.000,00		312.820.000,00		344.102.000,00		378.512.200,00		416.363.420,00	
Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	6,67%	8,70%	286.200.000,00	9,33%	312.820.000,00	9,76%	344.102.000,00	10,00%	378.512.200,00	10,00%	416.363.420,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.665.000.000,00		6.617.000.000,00		6.859.000.000,00		6.951.000.000,00		7.733.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					890.000.000,00		1.242.000.000,00		1.379.000.000,00		1.216.000.000,00		1.708.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	0,51%	5,53%	890.000.000,00	6,22%	1.242.000.000,00	6,80%	1.379.000.000,00	7,19%	1.216.000.000,00	7,40%	1.708.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.425.000.000,00		1.575.000.000,00		1.730.000.000,00		1.985.000.000,00		2.275.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Media Pemasaran	Persen	10%	8,49%	1.425.000.000,00	10,43%	1.575.000.000,00	12,99%	1.730.000.000,00	13,28%	1.985.000.000,00	14,73%	2.275.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					2.350.000.000,00		1.800.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (IKK)	Persen	10%	10%	2.350.000.000,00	10%	1.800.000.000,00	10%	1.750.000.000,00	10%	1.750.000.000,00	10%	1.750.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	Persen	20%	20%	2.000.000.000,00	20%	2.000.000.000,00	20%	2.000.000.000,00	20%	2.000.000.000,00	20%	2.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					41.390.083.875,00		44.676.292.262,50		47.118.921.488,75		51.430.813.637,63		56.303.895.001,39	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					16.180.883.875,00		17.820.972.262,50		19.603.069.488,75		21.563.376.437,63		23.719.714.081,39	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan sarana pertanian	1, Luas Intensifikasi Komoditas Pertanian	Ha	N/A	2.200	11.231.321.875,00	2.420	12.354.454.262,50	2.662	13.589.899.688,75	2.928	14.948.889.457,63	3.221	16.443.777.803,39	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2, Luas Ekstensifikasi Komoditas Pertanian	Ha	N/A	110	287.982.000,00	121	316.780.000,00	133	348.458.000,00	146	383.304.000,00	161	421.635.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Ternak	Persen	7,75	8,84	4.661.580.000,00	9,69	5.149.738.000,00	10,53	5.664.711.800,00	11,38	6.231.182.980,00	12,22	6.854.301.278,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					20.764.950.000,00		21.841.945.000,00		22.221.139.500,00		23.843.253.450,00		26.177.578.795,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitas	Persen	N/A	5,20	14.705.000.000,00	5,40	16.515.500.000,00	5,60	18.002.050.000,00	5,80	19.802.255.000,00	6,00	21.782.480.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Infrastruktur Peternakan yang Tersedia dan Dikembangkan	Persen	65,38	84,62	6.059.950.000,00	100,00	5.326.445.000,00	100,00	4.219.089.500,00	100,00	4.040.998.450,00	100,00	4.395.098.295,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.180.850.000,00		2.448.935.000,00		2.693.828.500,00		2.963.211.350,00		3.259.532.485,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Terkendalinya Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	Persen	99,47	99,63	2.180.850.000,00	99,71	2.448.935.000,00	99,83	2.693.828.500,00	100,00	2.963.211.350,00	100,00	3.259.532.485,00	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					769.000.000,00		673.600.000,00		740.960.000,00		815.056.000,00		896.561.600,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1, Persentase Pengendalian Bencana Pertanian	Persen	100	100	255.000.000,00	100	280.500.000,00	100	308.550.000,00	100	339.405.000,00	100	373.345.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2, Persentase penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	146.410.000,00	
	3, Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	N/A	100	293.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	100	199.650.000,00	
Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis	Persen	100,00	100,00	121.000.000,00	100,00	133.100.000	100,00	146.410.000	100,00	161.051.000	100,00	177.156.100	Dinas Perikanan Dan Peternakan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					179.400.000,00		244.340.000,00		268.774.000,00		295.651.400,00		325.216.540,00	
Terbitnya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	Persen	88,89	100	179.400.000,00	100	244.340.000,00	100	268.774.000,00	100	295.651.400,00	100	325.216.540,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.315.000.000,00		1.646.500.000,00		1.591.150.000,00		1.950.265.000,00		1.925.291.500,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1, Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Persen	N/A	26,88	780.000.000,00	40,32	858.000.000,00	53,76	943.800.000,0	67,20	1.038.180.000,00	80,65	1.141.998.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2, Persentase Peningkatan Kapasitas Petani	Persen	N/A	24	185.000.000,00	28	403.500.000,00	32	223.850.000,0	36	446.235.000,00	40	270.858.500,00	
	3, Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Persen	N/A	26,86	350.000.000,00	33,58	385.000.000,00	40,29	423.500.000,0	47,01	465.850.000,00	53,72	512.435.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					596.667.435,00		759.667.550,00		873.617.683,00		1.629.660.335,00		1.629.660.335,00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			65		596.667.435,00		759.667.550,00		873.617.683,00		1.629.660.335,00		1.629.660.335,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi	Persentase Kelengkapan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persen	65	66	596.667.435,00	66	759.667.550,00	67	873.617.683,00	67	1.629.660.335,00	68	1.629.660.335,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.635.416.000,00		2.898.957.600,00		3.188.853.360,00		3.507.738.696,00		3.858.512.565,60	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	100%	100%	25.000.000,00	100%	27.500.000,00	100%	30.250.000,00	100%	33.275.000,00	100%	36.602.500,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.907.500.000,00		2.098.250.000,00		2.308.075.000,00		2.538.882.500,00		2.792.770.750,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	88,89%	100%	1.907.500.000,00	100%	2.098.250.000,00	100%	2.308.075.000,00	100%	2.538.882.500,00	100%	2.792.770.750,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					457.916.000,00		503.707.600,00		554.078.360,00		609.486.196,00		670.434.815,60	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	persen	100%	100%	457.916.000,00	100%	503.707.600,00	100%	554.078.360,00	100%	609.486.196,00	100%	670.434.815,600	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	persen	83,33%	100%	75.000.000,00	100%	82.500.000,00	100%	90.750.000,00	100%	99.825.000,00	100%	109.807.500,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	36,26%	42,61%	70.000.000,00	44,73%	77.000.000,00	46,85%	84.700.000,00	48,97%	93.170.000,00	51,09%	102.487.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	71,67%	88,33%	100.000.000,00	99,66%	110.000.000,00	99,66%	121.000.000,00	99,66%	133.100.000,00	99,66%	146.410.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					252.750.000,00		278.025.000,00		305.827.500,00		336.410.250,00		370.051.275,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					240.250.000,00		264.275.000,00		290.702.500,00		319.772.750,00		351.750.025,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri		1	1	240.250.000,00	1	264.275.000,00	1	290.702.500,00	1	319.772.750,00	1	351.750.025,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industriyang Diterbitkan	persen	87,50%	91,67%	5.000.000,00	93,34%	5.500.000,00	95,01%	6.050.000,00	96,68%	6.655.000,00	98,35%	7.320.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	persen	8,56%	12,01%	7.500.000,00	13,73%	8.250.000,00	15,45%	9.075.000,00	17,17%	9.982.500,00	18,89%	10.980.750,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					2.447.500.000,00		2.692.250.000,00		2.961.475.000,00		3.257.622.500,00		3.583.384.750,00	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		2.662.000.000,00		2.928.200.000,00		3.221.020.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	persen		3	2.200.000.000,00	5,00	2.420.000.000,00	7,00	2.662.000.000,00	9,00	2.928.200.000,00	9,00	3.221.020.000,00	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					214.500.000,00		235.950.000,00		259.545.000,00		285.499.500,00		314.049.450,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	persen	20	20	214.500.000,00	20,00	235.950.000,00	20,00	259.545.000,00	20,00	285.499.500,00	20,00	314.049.450,00	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	persen	20	20	33.000.000,00	20,00	36.300.000,00	20,00	39.930.000,00	20,00	43.923.000,00	20,00	48.315.300,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					60.128.834.000,00		66.141.704.000,00		72.755.887.860,00		80.031.474.950,00		88.034.622.445,00	
SEKRETARIAT DAERAH					29.076.250.000,00		31.983.875.000,00		35.182.262.500,00		38.700.488.750,00		42.570.537.625,00	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					26.576.250.000,00		29.233.875.000		32.157.262.500		35.372.988.750		38.910.287.625	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	900.000.000,00	100%	990.000.000,00	100%	1.089.000.000,00	100%	1.197.900.000,00	100%	1.317.690.000,00	
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persen	100%	100%	23.951.250.000,00	100%	26.346.375.000,00	100%	28.981.012.500,00	100%	31.879.113.750,00	100%	35.067.025.125,00	
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase implementasi kebijakan urusan hukum	Persen	100%	100%	1.075.000.000,00	100%	1.182.500.000,00	100%	1.300.750.000,00	100%	1.430.825.000,00	100%	1.573.907.500,00	
Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	Persentase implementasi kebijakan urusan kerjasama	Persen	100%	100%	650.000.000,00	100%	715.000.000,00	100%	786.500.000,00	100%	865.150.000,00	100%	951.665.000,00	
Program Perekonomian dan Pembangunan					2.500.000.000		2.750.000.000,00		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase implementasi kebijakan urusan perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.331.000.000,00	100%	1.464.100.000,00	
Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persentase implementasi kebijakan urusan administrasi pembangunan	Persen	100%	100%	750.000.000,00	100%	825.000.000,00	100%	907.500.000,00	100%	998.250.000,00	100%	1.098.075.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)	Kriteria capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori	Baik	Baik	750.000.000,00	Baik	825.000.000,00	Baik	907.500.000,00	Baik	998.250.000,00	Baik	1.098.075.000,00	
SEKRETARIAT DPRD					31.052.584.000,00		34.157.829.000,00		37.573.625.360,00		41.330.986.200,00		45.464.084.820,00	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					31.052.584.000,00		34.157.829.000,00		37.573.625.360,00		41.330.986.200,00		45.464.084.820,00	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	persen	100%	100%	4.569.452.000,00	100%	5.026.395.000,00	100%	5.529.036.700,00	100%	6.081.940.100,00	100%	6.690.134.110,00	
	Persentase penetapan Ranperda Tahun N	persen	100%	100%	2.552.522.000,00	100%	2.807.772.000,00	100%	3.088.551.460,00	100%	3.397.406.300,00	100%	3.737.146.930,00	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100%	100%	23.930.610.000,00	100%	26.323.662.000,00	100%	28.956.037.200,00	100%	31.851.639.800,00	100%	35.036.803.780,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					627.468.844.115,00		692.407.191.827,00		760.607.790.310,00		834.898.334.866,00		917.017.950.111,00	
PERENCANAAN					4.430.000.000,00		6.671.400.000,00		7.460.913.000,00		7.923.266.825,00		8.795.369.366,00	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					1.430.000.000,00		1.775.000.000,00		1.785.000.000,00		1.785.000.000,00		2.220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah	Persen	97,04%	98,52%	1.430.000.000,00	99,26%	1.775.000.000,00	99,30%	1.785.000.000,00	99,50%	1.785.000.000,00	1,00	2.220.000.000,00	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					3.000.000.000,00		4.896.400.000,00		5.675.913.000,00		6.138.266.825,00		6.575.369.366,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	97,98%	99,02%	1.000.000.000,00	99,08%	2.000.000.000,00	99,14%	2.200.000.000,00	1,00	2.420.000.000,00	1,00	2.662.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	91,45%	93,30%	1.000.000.000,00	94,22%	1.805.000.000,00	95,17%	2.330.000.000,00	96,12%	2.515.000.000,00	0,98	2.650.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	98,46%	99,49%	1.000.000.000,00	100%	1.091.400.000,00	1,00	1.145.913.000,00	1,00	1.203.266.825,00	1,00	1.263.369.366,00	
KEUANGAN					611.806.367.000,00		671.380.067.000,00		737.465.580.000,00		809.835.641.000,00		889.479.211.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					589.927.327.000		649.000.067.000,00		713.905.080.000,00		785.280.591.000,00		863.813.656.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penganggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.038.860.000,00	Tepat Waktu	4.442.751.000,00	Tepat Waktu	4.887.030.000,00	Tepat Waktu	5.375.734.000,00	Tepat Waktu	5.913.310.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas	Persen	97%	96,00%	582.584.389.000,00	96,50%	640.922.830.000,00	97,00%	705.020.114.000,00	97,50%	775.507.126.000,00	98,00%	853.062.839.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Persen	98%	94,51%	3.304.078.000,00	95,60%	3.634.486.000,00	96,70%	3.997.936.000,00	97,80%	4.397.731.000,00	98,90%	4.837.507.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					6.229.040.000,00		6.905.000.000,00		7.595.500.000,00		8.355.050.000,00		9.190.555.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	91%	90,00%	6.229.040.000,00	92,00%	6.905.000.000,00	92,00%	7.595.500.000,00	93,00%	8.355.050.000,00	93,00%	9.190.555.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					15.650.000.000,00		15.475.000.000,00		15.965.000.000,00		16.200.000.000,00		16.475.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Perencanaan terhadap Potensi PAD	Persen	22,67	100	1.400.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00	100,00	2.150.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00	
	Persentase Kesesuaian Data Potensi Pajak Asli Daerah	Persen	22,67	100	4.700.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	3.700.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	
	Persentase Penerimaan Pajak Asli Daerah	Persen	22,67	100	6.650.000.000,00	100,00	6.825.000.000,00	100,00	7.190.000.000,00	100,00	7.550.000.000,00	100,00	7.800.000.000,00	
	Persentase Transaksi Pajak dan Retribusi yang Diproses Melalui Sistem Informasi	Persen	22,67	100	2.900.000.000,00	100,00	2.950.000.000,00	100,00	3.175.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	100,00	3.275.000.000,00	
KEPEGAWAIAN					10.232.477.115,00		13.255.724.827,00		14.581.297.310,00		16.039.427.041,00		17.643.369.745,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah					10.232.477.115		13.255.724.827		14.581.297.310		16.039.427.041		17.643.369.745	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	persen	100	100	3.000.000.000,00	100,00	3.280.000.000,00	100,00	3.608.000.000,00	100,00	3.968.800.000,00	100,00	4.365.680.000,00	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	persen	86	88	1.872.608.150,00	89,00	2.600.000.000,00	90,00	2.860.000.000,00	91,00	3.146.000.000,00	92,00	3.460.600.000,00	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	persen		90	4.942.568.965,00	90,00	6.750.000.000,00	90,00	7.425.000.000,00	90,00	8.167.500.000,00	90,00	8.984.250.000,00	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	persen		89	417.300.000,00	99,00	625.724.827,00	99,00	688.297.310,00	99,00	757.127.041,00	99,00	832.839.745,00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					650.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	100%	100%	650.000.000,00	1,00	700.000.000,00	1,00	700.000.000,00	1,00	700.000.000,00	1,00	700.000.000,00	
Program Riset dan Inovasi Daerah					350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Presentase Data Inovasi Kabupaten Sumedang yang Dilaporkan	Persen	75%	76%	350.000.000,00	0,77	400.000.000,00	0,78	400.000.000,00	0,79	400.000.000,00	0,80	400.000.000,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					9.802.815.000,00		10.783.096.500,00		11.861.406.150,00		13.047.546.765,00		14.352.301.442,00	
INSPEKTORAT DAERAH					9.802.815.000,00		10.783.096.500,00		11.861.406.150,00		13.047.546.765,00		14.352.301.442,00	
Program Penyelenggaraan Pengawasan					5.922.950.000,00		6.515.245.000,00		7.166.769.500,00		7.883.446.450,00		8.671.791.095,00	Inspektorat

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Eksternal (BPK)	Persen	81,49	82,5	317.221.000,00	83,00	348.943.000,00	83,5	383.838.000,00	84,00	422.222.000,00	85,00	464.444.200,00	
	Tindakanlanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Internal (APIP Kabupaten)	Persen	73,29	74	5.288.508.000,00	74,5	5.817.359.000,00	75,00	6.399.093.500,00	80,00	7.039.002.450,00	85,00	7.742.902.695,00	
	Tindakanlanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Internal (APIP Lainnya)	Persen	59,93	67	317.221.000,00	70,00	348.943.000,00	75,00	383.838.000,00	80,00	422.222.000,00	85,00	464.444.200,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					3.879.865.000,00		4.267.851.500,00		4.694.636.650,00		5.164.100.315,00		5.680.510.347,00	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	75%	80%	3.879.865.000,00	0,85	4.267.851.500,00	0,88	4.694.636.650,00	0,90	5.164.100.315,00	0,95	5.680.510.347,00	
UNSUR KEWILAYAHAN					35.712.454.903,00		40.759.505.895,00		44.624.031.483,00		49.101.999.553,00		54.282.031.850,00	
KECAMATAN BUAHDUA					903.000.000,00		980.000.000,00		1.012.000.000,00		1.048.000.000,00		1.086.000.000,00	Kecamatan Buahdua
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					553.000.000,00		563.000.000,00		575.000.000,00		587.000.000,00		601.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					185.000.000,00		195.000.000,00		204.000.000,00		214.000.000,00		223.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		33.000.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dislesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					37.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100.000.000,00		130.000.000,00		138.000.000,00		149.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN CIBUGEL					1.531.750.000,00		1.684.925.000,00		1.853.417.500,00		2.038.759.250,00		2.242.635.175,00	Kecamatan Cibugel
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					847.550.000,00		932.305.000,00		1.025.535.500,00		1.128.089.050,00		1.240.897.955,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					352.000.000,00		387.200.000,00		425.920.000,00		468.512.000,00		515.363.200,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		96.630.600,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					46.200.000,00		50.820.000,00		55.902.000,00		61.492.200,00		67.641.420,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN CIMALAKA					782.370.018,00		860.607.020,00		946.667.721,00		1.041.334.495,00		1.145.467.945,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					109.518.796,00		120.470.676,00		132.517.743,00		145.769.518,00		160.346.470,00	Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					514.464.158,00		565.910.574,00		622.501.631,00		684.751.794,00		753.226.974,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		35.431.220,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					42.301.600,00		46.531.760,00		51.184.936,00		56.303.430,00		61.933.773,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					91.885.464,00		101.074.010,00		111.181.411,00		122.299.553,00		134.529.508,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN CIMANGGUNG					1.467.100.000,00		1.506.960.000,00		1.639.806.000,00		1.691.436.600,00		1.870.935.100,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					701.100.000,00		708.360.000,00		716.346.000,00		725.130.600,00		734.793.500,00	Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					423.500.000,00		465.850.000,00		512.435.000,00		563.678.500,00		693.251.350,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		117.128.000,00		128.840.800,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					199.500.000,00		175.450.000,00		237.995.000,00		212.294.500,00		233.523.950,00	Kecamatan Cisarua
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN CISARUA					834.500.000,00		932.950.000,00		1.026.245.000,00		1.128.869.500,00		1.241.756.450,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					498.500.000,00		548.350.000,00		603.185.000,00		663.503.500,00		729.853.850,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					161.000.000,00		192.100.000,00		211.310.000,00		232.441.000,00		255.685.100,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
KECAMATAN CISITU					1.054.900.000,00		1.094.500.000,00		1.140.000.000,00		1.188.000.000,00		1.337.000.000,00	Kecamatan Cisit
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					557.500.000,00		567.500.000,00		575.000.000,00		582.000.000,00		589.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					195.400.000,00		204.000.000,00		224.000.000,00		244.000.000,00		262.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		170.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					152.000.000,00		168.000.000,00		181.000.000,00		197.000.000,00		216.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN CONGGEANG					1.690.550.000,00		1.869.605.000,00		2.056.565.500,00		2.262.222.050,00		2.588.444.255,00	Kecamatan Conggeang
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					748.550.000,00		823.405.000,00		905.745.500,00		996.320.050,00		1.095.952.055,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					511.500.000,00		562.650.000,00		618.915.000,00		680.806.500,00		748.887.150,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					104.500.000,00		114.950.000,00		126.445.000,00		139.089.500,00		152.998.450,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00		164.420.400,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					282.000.000,00		320.200.000,00		352.220.000,00		387.442.000,00		426.186.200,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
KECAMATAN DARMARAJA						902.500.000,00		1.076.750.000,00		1.176.025.000,00		1.285.227.500,00		1.405.350.250,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					563.500.000,00		643.850.000,00		705.835.000,00		774.018.500,00		849.020.350,00	Kecamatan Darmaraja	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					230.000.000,00		283.000.000,00		308.300.000,00		336.130.000,00		366.743.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					62.000.000,00		98.200.000,00		105.020.000,00		112.522.000,00		120.774.200,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik		100%	100%		100%		100%		100%		100%			
KECAMATAN GANEAS						853.500.000,00		905.850.000,00		996.435.000,00		1.146.078.500,00		1.205.697.350,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					498.500.000,00		548.350.000,00		603.185.000,00		663.503.500,00		729.853.850,00	Kecamatan Ganeas	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					190.000.000,00		209.000.000,00		229.900.000,00		252.890.000,00		278.190.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					115.000.000,00		93.500.000,00		102.850.000,00		163.135.000,00		124.448.500,00	Kecamatan Jatigede
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN JATIGEDE					930.500.000,00		1.346.000.000,00		1.480.600.000,00		1.628.660.000,00		1.791.526.000,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					556.128.000,00		618.500.000,00		680.350.000,00		748.385.000,00		823.223.500,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					220.000.000,00		370.000.000,00		407.000.000,00		447.700.000,00		492.470.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					24.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					21.372.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00	Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					109.000.000,00		232.500.000,00		255.750.000,00		281.325.000,00		309.457.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN JATINAGOR					1.234.500.000,00		1.457.950.000,00		1.603.745.000,00		1.764.119.500,00		1.940.531.450,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					593.500.000,00		652.850.000,00		718.135.000,00		789.948.500,00		868.943.350,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					329.500.000,00		362.450.000,00		398.695.000,00		438.564.500,00		482.420.950,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					46.500.000,00		151.150.000,00		166.265.000,00		182.891.500,00		201.180.650,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					215.000.000,00		236.500.000,00		260.150.000,00		286.165.000,00		314.781.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN JATINUNGGAL					930.500.000,00		1.288.500.000,00		1.417.350.000,00		1.559.085.000,00		1.714.993.500,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					558.128.000,00		571.000.000,00		628.100.000,00		690.910.000,00		760.001.000,00	Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					198.000.000,00		360.000.000,00		396.000.000,00		435.600.000,00		479.160.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					15.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					20.892.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					138.480.000,00		232.500.000,00		255.750.000,00		281.325.000,00		309.457.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN PAMULIHAN					1.495.000.000,00		1.724.500.000,00		2.016.950.000,00		2.398.645.000,00		2.908.509.500,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					750.000.000,00		825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					360.000.000,00		476.000.000,00		643.600.000,00		887.960.000,00		1.246.756.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					125.000.000,00		137.500.000,00		151.250.000,00		166.375.000,00		183.012.500,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAW AB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					185.000.000,00		203.500.000,00		223.850.000,00		246.235.000,00		270.858.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN PASEH					1.061.900.000,00		1.168.500.000,00		1.276.800.000,00		1.392.000.000,00		1.525.000.000,00	Kecamatan Paseh
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					611.000.000,00		672.600.000,00		739.700.000,00		811.000.000,00		892.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					200.000.000,00		219.500.000,00		239.000.000,00		259.000.000,00		283.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		66.000.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					33.000.000,00		36.300.000,00		39.000.000,00		42.000.000,00		46.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					172.900.000,00		190.100.000,00		204.100.000,00		220.000.000,00		238.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN RANCAKALONG					776.845.000,00		829.309.500,00		887.020.450,00		950.502.495,00		1.020.332.745,00	Kecamatan Rancakalong
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					621.845.000,00		674.309.500,00		732.020.450,00		795.502.495,00		865.332.745,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN SITURAJA					916.500.000,00		1.148.150.000,00		1.262.965.000,00		1.389.981.500,00		1.528.187.650,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					505.500.000,00		556.050.000,00		611.655.000,00		672.820.500,00		740.102.550,00	Kecamatan Situraja
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					196.000.000,00		215.600.000,00		237.160.000,00		260.876.000,00		286.963.600,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					40.000.000,00		64.000.000,00		70.400.000,00		77.440.000,00		85.184.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					30.000.000,00		133.000.000,00		146.300.000,00		160.930.000,00		177.023.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					145.000.000,00		179.500.000,00		197.450.000,00		217.915.000,00		238.914.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN SUKASARI					1.574.050.000,00		1.731.455.000,00		1.865.275.500,00		2.051.803.050,00		2.256.983.355,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					749.050.000,00		823.955.000,00		906.350.500,00		996.985.550,00		1.096.684.105,00	Kecamatan Sukasari
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					407.000.000,00		447.700.000,00		492.470.000,00		541.717.000,00		595.888.700,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00		120.788.250,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					49.500.000,00		54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.500,00		72.472.950,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					286.000.000,00		314.600.000,00		306.735.000,00		337.408.500,00		371.149.350,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100	100		100		100		100		100		
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN					5.627.300.000,00		6.290.030.000,00		6.919.033.000,00		7.610.936.300,00		8.370.029.930,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					588.500.000,00		657.350.000,00		723.085.000,00		795.393.500,00		872.932.850,00	Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.825.800.000,00		5.326.880.000,00		5.859.568.000,00		6.445.524.800,00		7.090.077.280,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					35.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					138.000.000,00		151.800.000,00		166.980.000,00		183.678.000,00		202.045.800,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN SUMEDANG UTARA					2.759.373.220,00		3.135.310.542,00		3.448.841.596,00		3.793.725.756,00		4.173.098.331,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					596.500.000,00		656.150.000,00		721.765.000,00		793.941.500,00		873.335.650,00	Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.902.873.220,00		2.093.160.542,00		2.302.476.596,00		2.532.724.256,00		2.785.996.681,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					30.000.000,00		133.000.000,00		146.300.000,00		160.930.000,00		177.023.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					180.000.000,00		198.000.000,00		217.800.000,00		239.580.000,00		263.538.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100	100		100		100		100		100		
KECAMATAN SURIAN					1.471.927.410,00		1.619.120.152,00		1.744.732.167,00		1.919.205.383,00		2.211.125.922,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					614.062.865,00		675.469.152,00		743.016.067,00		817.317.673,00		899.049.441,00	Kecamatan Surian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					614.226.285,00		675.648.914,00		743.213.805,00		817.535.186,00		899.288.704,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		35.431.220,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					61.153.400,00		67.268.740,00		73.995.614,00		81.395.175,00		189.534.693,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					158.284.860,00		174.113.346,00		155.224.681,00		170.747.149,00		187.821.864,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN TANJUNGMEDAR					845.186.255,00		929.704.881,00		1.022.675.369,00		1.124.942.906,00		1.237.437.196,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00		193.261.200,00	Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					490.986.255,00		540.084.881,00		594.093.369,00		653.502.706,00		718.852.976,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00		64.420.400,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00		193.261.200,00		212.587.320,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN TANJUNGPERTA					840.033.000,00		859.291.800,00		903.390.980,00		950.225.998,00		1.002.928.599,00	Kecamatan Tanjungkerta
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					137.841.000,00		151.625.100,00		166.787.610,00		183.466.371,00		201.813.008,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					485.805.000,00		497.285.500,00		507.014.050,00		523.715.455,00		536.617.001,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					17.545.000,00		19.299.500,00		21.229.450,00		23.352.395,00		25.687.635,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					45.980.000,00		50.578.000,00		55.635.800,00		61.199.380,00		67.319.318,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					152.862.000,00		140.503.700,00		152.724.070,00		158.492.397,00		171.491.637,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN TANJUNGSARI					856.000.000,00		1.076.600.000,00		1.184.260.000,00		1.302.686.000,00		1.432.954.600,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					546.000.000,00		620.600.000,00		682.660.000,00		750.926.000,00		826.018.600,00	Kecamatan Tanjungsari

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					140.000.000,00		179.000.000,00		196.900.000,00		216.590.000,00		238.249.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					45.000.000,00		59.500.000,00		65.450.000,00		71.995.000,00		79.194.500,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					75.000.000,00		162.500.000,00		178.750.000,00		196.625.000,00		216.287.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakiap desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN TOMO					1.151.000.000,00		1.266.100.000,00		1.392.710.000,00		1.531.980.500,00		1.685.177.800,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					608.500.000,00		669.350.000,00		736.285.000,00		809.913.000,00		890.904.300,00	Kecamatan Tomo
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					197.500.000,00		217.250.000,00		238.975.000,00		262.872.500,00		289.159.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					170.000.000,00		187.000.000,00		205.700.000,00		226.270.000,00		248.897.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					115.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		168.371.500,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakiap desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN UJUNGJAYA					1.928.170.000,00		2.498.987.000,00		2.724.885.700,00		3.115.374.270,00		3.392.911.697,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					963.550.000,00		1.147.905.000,00		1.262.695.500,00		1.388.965.050,00		1.527.861.555,00	Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					471.620.000,00		698.782.000,00		744.660.200,00		837.126.220,00		896.838.842,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					79.000.000,00		86.900.000,00		95.590.000,00		105.149.000,00		115.663.900,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		233.100.000,00		246.410.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					314.000.000,00		455.400.000,00		500.940.000,00		551.034.000,00		606.137.400,00	Kecamatan Wado
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KECAMATAN WADO					1.293.500.000,00		1.477.850.000,00		1.625.635.000,00		1.788.198.000,00		1.967.017.050,00	
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					576.000.000,00		658.600.000,00		724.460.000,00		796.905.500,00		876.596.050,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					360.000.000,00		396.000.000,00		435.600.000,00		479.160.000,00		527.075.250,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					75.000.000,00		92.500.000,00		101.750.000,00		111.925.000,00		123.117.500,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					50.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00	Kecamatan Wado
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					232.500.000,00		255.750.000,00		281.325.000,00		309.457.500,00		340.403.250,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik	persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.400.000.000,00		7.807.228.852,00		10.296.000.000,00		12.105.000.000,00		12.105.000.000,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.400.000.000,00		7.807.228.852,00		10.296.000.000,00		12.105.000.000,00		12.105.000.000,00	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					950.000.000,00		2.490.000.000		2.988.000.000		3.585.600.000,00		3.585.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	88%	100%	950.000.000,00	100%	2.490.000.000,00	100%	2.988.000.000,00	100%	3.585.600.000,00	100%	3.585.600.000,00	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					175.000.000,00		810.000.000,00		972.000.000,00		1.166.400.000,00		1.166.400.000,00	
Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Persentase peningkatan peran parpol yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	persen	100%	100%	175.000.000,00	100%	810.000.000,00	100%	972.000.000,00	100%	1.166.400.000,00	100%	1.166.400.000,00	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					125.000.000,00		450.000.000,00		540.000.000,00		648.000.000,00		648.000.000,00	
Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan	Cakupan Ormas Yang di Bina Kategori Aktif	persen	100%	100%	125.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	540.000.000,00	100%	648.000.000,00	100%	648.000.000,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					50.000.000,00		660.000.000,00		792.000.000,00		950.400.000,00		950.400.000,00	
Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan orang yang terbina	persen	100%	100%	50.000.000,00	100%	660.000.000,00	100%	792.000.000,00	100%	950.400.000,00	100%	950.400.000,00	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					3.100.000.000,00		3.397.228.852,00		5.004.000.000,00		5.754.600.000,00		5.754.600.000,00	
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah	Persentase lokasi rawan konflik yang terdeteksi	persen	100%	100%	3.100.000.000,00	100%	3.397.228.852,00	100%	5.004.000.000,00	100%	5.754.600.000,00	100%	5.754.600.000,00	
NON URUSAN					1.547.808.985.415,00		1.704.839.884.449,00		1.864.214.510.884,00		2.034.584.663.916,00		2.141.744.604.065,40	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.547.808.985.415,00		1.704.839.884.449,00		1.864.214.510.884,00		2.034.584.663.916,00		2.141.744.604.065,40	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	AA	AA	754.803.022.417,00	AA	830.508.324.658,00	AA	913.509.157.124,00	AA	1.004.810.072.837,00	AA	1.104.655.440.120,00	Dinas Pendidikan
		Nilai	90	91	235.097.696.099,00	92,00	254.372.506.359,00	92,00	275.269.626.146,00	93,00	298.460.227.936,00	93,00	323.560.948.722,00	Dinas Kesehatan
		Nilai	85,96	87	36.518.664.148,00	90,00	39.858.441.870,00	92,00	43.008.233.906,00	94,00	46.629.494.785,00	96,00	50.792.894.835,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Nilai	A	A	12.741.000.000,00	A	13.810.650.000,00	A	15.714.150.000,00	A	17.744.550.000,00	A	20.349.300.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai	A	A	27.871.085.582,00	A	30.658.194.140,00	A	33.724.013.554,00	A	37.096.414.910,00	A	40.806.056.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai	A	A	9.538.944.000,00	A	10.492.838.400,00	A	11.542.122.240,00	A	12.696.334.464,00	A	13.965.967.910,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai												Dinas Pemadam Kebakaran
		Nilai	A	A	11.468.900.000,00	A	14.895.000.000,00	A	14.835.000.000,00	A	13.575.000.000,00	A	13.925.000.000,00	Dinas Sosial
		Nilai	A	A	9.622.180.379,00	A	10.584.398.417,00	A	11.642.838.258,00	A	12.807.122.084,00	A	14.087.834.292,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Nilai	80	87,68	9.148.943.211,00	88,03	10.199.518.292,00	88,38	10.892.838.189,00	88,73	11.772.480.858,00	89,08	12.708.629.994,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Nilai	A	A	8.593.787.724,00	A	8.233.787.724,00	A	10.490.000.000,00	A	10.150.500.000,00	A	10.821.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai	A	A	9.833.552.743,00	A	11.800.263.291,00	A	14.160.315.949,00	A	16.992.379.139,00	A	20.390.854.967,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai												Dinas Perhubungan
		Nilai	AA	AA	8.703.287.877,00	AA	8.969.348.110,00	AA	9.262.014.365,00	AA	9.583.947.247,00	AA	9.938.071.416,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
		Nilai	AA	AA	48,626,791,368,60	AA	54,099,731,864,36	AA	58,586,625,988,50	AA	63,730,259,523,27	AA	69,387,256,413,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai	AA	AA	34.747.762.689,00	AA	38.292.300.316,00	AA	41.198.451.286,00	AA	44.603.267.350,00	AA	48.347.565.023,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai	AA	AA	24,900,513,240,60	AA	27,562,344,724,40	AA	29,891,859,355,50	AA	32,628,325,448,00	AA	35,637,438,151,60	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai	84.306	86	10.994.076.327,00	89,00	12.093.483.960,00	91,00	13.302.832.356,00	92,00	14.633.115.591,00	94,00	16.096.427.150,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai	87,43	88,94	19.662.484.187,00	89,78	21.858.632.605,00	91,78	23.726.595.866,00	92,78	26.071.755.452,00	93,61	28.651.430.998,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Nilai	A	A	38.285.232.585,00	A	44.248.755.844,00	A	47.478.131.428,00	A	50.025.944.571,00	A	55.028.539.028,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Nilai	A	A	73.665.846.626,00	A	81.032.431.288,00	A	89.135.674.417,00	A	98.049.241.859,00	A	107.854.166.045,00	Sekretariat Daerah
		Nilai	A	A	57.704.685.529,00	A	63.987.142.274,00	AA	70.385.868.309,00	AA	77.424.453.959,00	AA		Sekretariat DPRD
		Nilai	A	A	4.462.788.016,00	AA	4.916.794.534,00	AA	5.770.683.026,00	AA	6.080.013.563,00	AA	6.080.013.563,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai	A(89,62)	AA(92)	11.506.711.817,00	AA(93)	13.251.850.000,00	AA(94)	13.841.110.000,00	AA(95)	14.384.391.250,00	AA(96)	15.489.440.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
		Nilai	93,80	93,85	140.653.188.000	93,90	154.654.332.000	93,95	170.050.789.000	94,00	186.982.363.000	94,05	205.607.310.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai	A	AA	24.542.231.170,00	AA	25.149.559.787,00	AA	26.469.421.266,00	AA	28.018.823.892,00	AA	29.682.536.282,00	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai	A	A	10.113.398.466,00	A	11.174.738.313,00	A	12.292.212.144,00	A	13.521.433.358,00	A	14.873.576.694,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai	AA	AA	28.139.760.000,00	AA	30.953.736.000,00	AA	34.049.109.600,00	AA	37.454.020.560,00	AA	41.199.422.616,00	Inspektorat
		Nilai	85,83	86,00	3.260.225.673,00	86,50	3.550.798.240,00	87,00	3.932.398.064,00	87,50	4.257.937.871,00	88,00	4.611.831.658,00	Kecamatan Buahdua
		Nilai	90,01	90,20	3.621.931.919,00	90,40	3.984.125.111,00	90,60	4.382.537.622,00	90,80	4.820.791.384,00	91,00	5.302.870.523,00	Kecamatan Cibugel
		Nilai	85,20	86,00	3.701.829.649,00	87,00	3.812.292.773,00	88,00	3.933.802.209,00	89,00	4.067.462.588,00	90,00	4.214.489.006,00	Kecamatan Cimalaka
		Nilai	85,58	86,00	5.472.104.516,00	87,00	5.646.868.516,00	88,00	5.839.106.516,00	89,00	6.050.565.516,00	90,00	6.283.179.216,00	Kecamatan Cimanggung
		Nilai	88,45	88,50	2.660.872.198,00	88,60	3.682.076.398,00	88,70	4.010.284.038,00	88,80	4.371.312.441,00	89,00	4.768.443.685,00	Kecamatan Cisarua
		Nilai	85,90	86,52	3.654.929.152,00	86,74	3.734.030.152,00	86,93	3.862.589.152,00	87,25	3.939.039.152,00	87,53	4.009.589.152,00	Kecamatan Cisitua
		Nilai	85,36	87,14	5.203.601.401,00	88,00	5.913.961.540,00	88,50	6.505.357.695,00	89,57	7.155.893.464,00	89,89	7.456.743.256,00	Kecamatan Conggeang
		Nilai	90,47	90,80	3.041.854.912,00	91,00	3.940.641.003,00	91,20	4.275.245.043,00	91,40	5.027.557.466,00	91,60	5.470.853.151,00	Kecamatan Darmaraja
		Nilai	A	A	2.998.590.889,00	A	3.345.449.978,00	A	3.679.994.976,00	A	4.047.999.473,00	A	4.452.793.921,00	Kecamatan Ganeas
		Nilai	A	A	2.932.907.800,00	A	3.748.439.000,00	A	4.089.232.900,00	A	4.498.156.190,00	A	4.947.971.809,00	Kecamatan Jatigede
		Nilai	A	A	3.177.473.910,00	A	3.986.221.301,00	A	4.384.843.431,00	A	4.823.327.774,00	A	5.305.660.552,00	Kecamatan Jatinangor
		Nilai	A	A	2.932.907.800,00	A	3.586.489.000,00	A	3.911.087.900,00	A	4.302.196.690,00	A	4.732.416.359,00	Kecamatan Jatinunggal
		Nilai	80,83	82,25	4.380.000.000,00	83,07	5.249.500.000,00	83,90	5.607.450.000,00	84,74	6.175.195.000,00	85,58	6.798.714.500,00	Kecamatan Pamulihan
		Nilai	85,07	86,23	3.856.459.373,00	87,06	4.014.134.373,00	88,73	4.188.491.873,00	89,56	4.348.059.373,00	90,00	4.526.659.373,00	Kecamatan Paseh
		Nilai	A	A	3.447.000.767,00	A	3.348.365.604,00	A	3.619.961.924,00	A	3.918.623.377,00	A	4.247.200.475,00	Kecamatan Rancakalong
		Nilai	A	A	3.229.107.987,00	A	4.071.018.786,00	A	4.478.120.664,00	A	4.925.932.731,00	A	5.418.526.004,00	Kecamatan Situraja
		Nilai	82,85	83,08	4.231.284.870,00	84,20	4.522.473.785,00	85,15	4.715.001.322,00	86,00	4.926.781.612,00	87,10	5.159.739.932,00	Kecamatan Sukasari

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai	A	A	6.438.768.806,00	A	7.288.045.687,00	A	8.146.440.255,00	A	8.993.633.281,00	A	9.928.800.509,00	Kecamatan Sumedang Selatan
		Nilai	A	A	7.079.622.851,00	A	7.837.085.136,00	A	8.620.793.650,00	A	9.482.873.015,00	A	10.431.160.316,00	Kecamatan Sumedang Utara
		Nilai	85,75	86,80	3.212.511.999,00	87,75	3.331.173.819,00	88,80	3.461.701.821,00	89,75	3.605.282.624,00	90,00	3.763.221.506,00	Kecamatan Surian
		Nilai	A	A	3.681.886.976,00	A	3.790.355.833,00	A	3.909.671.575,00	A	4.040.918.890,00	A	4.185.290.938,00	Kecamatan Tanjungmedar
		Nilai	A	A	3.372.061.532,00	A	3.709.267.685,00	A	3.793.170.466,00	A	3.912.767.671,00	A	4.044.324.596,00	Kecamatan Tanjungkerta
		Nilai	A	A	3.227.772.033,00	A	4.166.149.236,00	A	4.582.764.160,00	A	5.041.040.576,00	A	5.545.144.634,00	Kecamatan Tanjungsari
		Nilai	85,89	86,60	2.877.870.900,00	87,35	3.165.658.300,00	88,10	3.482.224.600,00	88,95	3.830.448.900,00	89,75	4.213.492.000,00	Kecamatan Tomo
		Nilai	85,78	86,51	4.860.297.549,00	87,29	6.180.091.504,00	88,10	6.820.116.071,00	88,96	6.725.983.471,00	89,86	7.438.735.236,00	Kecamatan Ujungjaya
		Nilai	A	A	3.489.068.361,00	A	3.892.475.507,00	A	4.281.723.528,00	A	4.709.897.721,00	A	5.180.885.703,00	Kecamatan Wado
JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (Rp)					3.456.714.757.860,00		4.171.506.394.973,50		4.542.635.247.170,75		4.895.745.181.694,63		5.263.530.752.740,39	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) indikator sebagaimana telah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Indikator tersebut merupakan indikator terseleksi untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, penetapan indikator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun indikator kinerja utama disajikan dalam tabel 4.2 dan Indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,42	75,58 - 75,62	75,82 - 75,85	76,01 - 76,12	76,21 - 76,66	76,41 - 76,94	Kab. Sumedang
			75,42	75,62	75,81	76	76,2	76,39	Provinsi Jawa Barat
2	a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Orang	26	24	21	19	18	16	Kab. Sumedang
			26	24	21	19	18	16	Provinsi Jawa Barat
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	12,58	12,12	11,65	11,19	10,73	10,26	Kab. Sumedang
			12,58	11,82	11,11	10,45	9,82	9,23	Provinsi Jawa Barat
3	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	91	91	92	92	93	93	Kab. Sumedang
			91	91	91	91	91	91	Provinsi Jawa Barat
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	91	91	92	92	93	93	Kab. Sumedang
			91	91	91	91	91	91	Provinsi Jawa Barat
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	90,43 - 96	96,5	97	97,5	98	99	Kab. Sumedang
			90,43	90,8	91,28	91,71	92,14	92,57	Provinsi Jawa Barat
5	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:								
	i) Literasi Membaca	Persen	63,83	64,26	64,69	65,13	65,56	65,99	
	ii) Numerasi	Persen	61,46	61,74	62,02	62,30	62,58	62,86	
	iii) Karakter	Persen	55,64	55,66	55,69	55,72	55,74	55,77	
	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8, 75 - 8,92	8,77 - 9,01	8,79 - 9,11	8,81 - 9,2	8,83 - 9,29	8,85 -9,39	
	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,09	13, 13 - 13, 32	13, 17 - 13,41	13,21 - 13,51	13, 25 - 13,61	13,3 - 13,7	Kab. Sumedang
			13,09	13,13	13,17	13,21	13,25	13,29	Provinsi Jawa Barat
6	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	91,42	91,48	91,60	91,68	91,70	91,76	
	b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	97,33	97,39	97,51	97,59	97,61	97,67	
	c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	91,57	91,63	91,75	91,83	91,85	91,91	
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	59,63	59,69	59,81	59,89	59,91	59,97	
7	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	9,09 - 8,23	8.73 - 7,87	7.52-8.38	7.16-8.02	6.80-7.66		Kab. Sumedang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			9,09 - 8,23	8.34 - 7,64	7.48 - 6,62	6,46 - 5,39	5,35 - 3,96	4,92 - 3,59	
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	50,02	51,66	53,32	55	56,73		Provinsi Jawa Barat
9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	19,94	20,17	20,4	20,63	20,86		Kab. Sumedang
			19,62	19,71	19,8	19,89	19,99	20,09	Provinsi Jawa Barat
11	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen							Kab. Sumedang
			5,24	5,34	5,45	5,56	5,68	5,8	Provinsi Jawa Barat
	b. Jumlah Pengunjung pada Objek Pariwisata	Orang	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	
12	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Persen	17,93	19,63	21,33	23,03	24,73	26,43	
13	a. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	5,92	6,12	6,32	6,52	6,72	6,92	
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen							Kab. Sumedang
			3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	Provinsi Jawa Barat
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15 - 6,70						Kab. Sumedang
			6,68 - 6,13	6,44 - 5,89	6,43 - 5,88	6,4 - 5,86	6,38 - 5,84	6,34 - 5,8	Provinsi Jawa Barat
15	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	48-52	48-52	48-52	48-52	48-52	49-53	
16	- Indeks Inovasi Daerah	Poin	63	63,5	64	64,5	65	66	
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Persen	49,60	51,19	51,87	52,63	53,41	54,21	Kab. Sumedang
			49,60	51,19	51,87	52,63	53,41	54,21	Provinsi Jawa Barat
18	Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	Persen	90	92	95	97	100	100	
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	23,42	23,47	23,51	23,55	23,51		Kab. Sumedang
		Persen	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	Provinsi Jawa Barat
20	Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	Persen							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	63,22	65,06	66,9	68,74	70,58	72,42	Kab. Sumedang
			63,22	64,66	66,1	67,54	68,96	70,9	Provinsi Jawa Barat
	b. Pengentasan luasan kawasan kumuh	Ha	141,03	132,48	116,08	108,38	92,73	79,5	
	c. Persentase Desa Mandiri	Persen	68,52	74,81	81,11	87,41	93,7	100	Kab. Sumedang
			8,52	-	-	-	11,85	11,85	Provinsi Jawa Barat
22	Indeks Reformasi Hukum*	Poin	80	80,5	81	81,5	82		
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	4,55	
24	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	
25	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
26	a. Indeks Kepatuhan Daerah	Persen	65	66	67	68	69	70	
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	73,00	
27	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100	100	100	100	
28	Tingkat Bina Demokratisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
29	29. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,709	0,715	0,742	0,791	0,866	0,863	
30	Total kredit/PDRB	Persen	19,13	19,63	21,48	23,04	24,57	27,65	
31	a. Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	Kerjasama	1	0	0	0	1	0	
	b. Jumlah Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	Naksah	25	25	25	25	25	25	
32	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	0,56	0,57	0,58	0,6	0,61	
33	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	76,95 - 77,7	77,7 - 78,2	78,2 - 78,7	78,7 - 79,2	79,2 - 79,7	79,7 - 80,2	
34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	61,4 - 61,6	61,6 - 61,8	61,8 - 62	62 - 62,2	62,2 - 62,4	62,4 - 62,6	
35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	
36	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	66,25	66,5	66,75	67,01	67,26	67,51	Kab. Sumedang
			66,25	-	-	-	67,26	-	Provinsi Jawa Barat
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	7,02	10,6	14,17	17,75	21,32	24,9	Kab. Sumedang
			7,02	12,4	17,77	23,15	28,52	33,9	Provinsi Jawa Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c. Pengelolaan Sampah :								
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	2,63	6,66	10,69	14,72	18,74	22,77	Kab. Sumedang
			2,63	2,98	3,38	8,27	22,7	23,96	Provinsi Jawa Barat
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	Persen	76,77	77,9315	79,093	80,25	81,416	82,5775	Kab. Sumedang
			76,77	80,34	84,07	87,97	97,36	100	Provinsi Jawa Barat
37	a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	5,01	4,78	4,54	4,31	4,08	3,85	Kab. Sumedang
			5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,80	Target Jawa Barat
	b. Ketahanan Air								
	- Kapasitas Air Baku	m3/detik	2,26	2,45	2,64	2,83	3,01	3,2	Kab. Sumedang
			2,26	2,61	2,95	3,31	3,66	4,02	Provinsi Jawa Barat
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5		Kab. Sumedang
			32,55	35,92	39,29	42,67	46,04	49,41	Provinsi Jawa Barat
38	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	Poin	137,5	136,47	135,44	134,41	133,38	132,35	
39	Penurunan Emisi GRK/Kumulatif	Ton Co2eq							Kab. Sumedang
			456.726,86	501.743,13	549.988,17	606.325,34	672.001,06	743.714,08	Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin							
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,8	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	32,55	35,92	39,29	42,67	46,04	49,41	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,25*	66,5	66,76	67,01	67,26	67,51	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen RT	7,02	12,4	17,77	23,15	28,52	33,9	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	2,63	2,98	3,38	8,27	22,7	23,96	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	76,77	80,34	84,07	87,97	97,36	100	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,4	
9	Indeks Risiko Bencana	Poin	137,5	136,47	135,44	134,41	133,38	132,35	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	0,56	0,57	0,58	0,6	0,61	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen							
12	Rasio Penduduk	Persen	101,34						
13	Kepadatan Penduduk	Orang/m2							
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.79 - 5.20	4.77 - 6.03	4.84 - 7.42	4.88 - 7.57	5.04 - 7.89	5.08 - 5.61	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,09 - 8,23	8.34 - 7,64	7.48 - 6,62	6,46 - 5,39	5,35 - 3,96	4,92 - 3,59	
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp Juta	39.55 - 39.91	44.3 - 45.27	47.7 - 49.45	51.33 - 54.13	55.18 - 59.33	59.5 - 65.71	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.13 - 6.68	5.89 - 6.44	5.88 - 6.43	5.86 - 6.4	5.84 - 6.38	5.8 - 6.34	
5	Indeks Gini	Poin	0.352 - 0.359	0.342 - 0.403	0.343 - 0.424	0.346 - 0.397	0.353 - 0.379	0.357 - 0.38	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,48*	74,73	75	75,31	75,66	76,02	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,42	75,62	75,81	76	76,2	76,39	
8	Indeks Keluarga Sehat	Poin							
9	Prevalensi Stunting	Persen	12,58	11,82	11,11	10,45	9,82	9,23	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8, 75 - 8,92	8,77 - 9,01	8,79 - 9,11	8,81 - 9,2	8,83 - 9,29	8,85 -9,39	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,13	13,17	13,21	13,25	13,29	
12	Angka Literasi	Persen	63,83	64,26	64,69	65,13	65,56	65,99	
	Angka Numerasi	Persen	61,46	61,74	62,02	62,3	62,58	62,86	
	Angka Karakter	Persen	55,64	55,66	55,69	55,72	55,74	55,77	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin							
14	Indeks Literasi Digital	Poin							
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	50,02	51,66	53,32	55	56,73	61,32	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	76,95 - 77,7	77,7 - 78,2	78,2 - 78,7	78,7 - 79,2	79,2 - 79,7	79,7 - 80,2	
17	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Poin							
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka							
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	
20	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin							
21	Persen Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	1Persen Perusahaan Swasta, 2Persen BUMN/BUMD	1 Persen perusahaan swasta 2 Persen BUMN/ BUMD	1 Persen perusahaan swasta 2 Persen BUMN/ BUMD	1 Persen perusahaan swasta 2 Persen BUMN/ BUMD	1 Persen perusahaan swasta 2 Persen BUMN/ BUMD	1 Persen perusahaan swasta 2 Persen BUMN/ BUMD	Tambahan dari IUP
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,62	19,71	19,8	19,89	19,99	20,09	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	5,24	5,34	5,45	5,56	5,68	5,8	
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan	Persen	48-52	48-52	48-52	48-52	48-52	49 - 53	
5	Indeks Inovasi Daerah	Skor	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	
6	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/ Jiwa	49,6	51,19	51,87	52,63	53,41	54,21	
7	Persen Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	Persen	90	92	95	97	100	100	Proxy dari IUP
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
9	Net Ekspor Impor Antar Daerah	Persen PDRB	-1,5 sd -0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proxy dari IUP
10	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin							
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	7,02	12,4	17,77	23,15	28,52	33,9	
12	Persen Desa Mandiri	Persen	8,52	-	-	-	11,85	11,85	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,709	0,715	0,742	0,791	0,866	0,863	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
14	Total kredit/PDRB	Persen	19,13	19,63	21,48	23,04	24,57	27,65	Tambahan dari IUP
15	Tingkat Jalan Mantap	Persen							Tambahan dari IUP
16	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	5,92	6,12	6,32	6,52	6,72	6,92	Tambahan dari IUP
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum		80	80,5	81	81,5	82	82,5	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8	4,85	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	
4	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Poin	80	80,5	81	81,5	82	82,5	Proxy dari IUP
5	Indeks Kepatuhan Daerah	Persen	65	66	67	68	69	70	Proxy dari IUP
6	Persen Capaian Aksi HAM	Persen	70	70,5	71	71,5	72	73	
7	Tingkat Bina Demokratisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Proxy dari IUP
8	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100	100	100	100	Proxy dari IUP
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,593	3,651	3,71	3,77	3,831	3,893	
11	Indeks Profesional ASN	Poin	73	75	77	79	81	82	Tambahan dari IUP
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
I	PENDIDIKAN								
1	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	84,83	85,07	85,3	85,54	85,78	86,02	Dinas Pendidikan
2	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	80,97	81,21	81,44	81,68	81,92	82,16	
3	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	79,78	80,02	80,25	80,49	80,73	80,97	
4	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	76,5	76,74	76,97	77,21	77,45	77,69	
5	Rata-rata Nilai Karakter SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	62,87	63,11	63,34	63,58	63,82	64,06	
6	Rata-rata Nilai Karakter Karakter SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	55,88	56,12	56,35	56,59	56,83	57,07	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Persen	81,37	82,27	83,17	84,07	84,97	85,87	
8	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Persen	72,89	74,39	75,89	77,37	78,89	80,39	
9	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Persen	76,36	77,35	78,35	79,35	80,35	81,35	
10	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP		72,94	73,18	73,41	73,65	73,89	74,13	
11	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Persen	66,81	69,31	71,81	74,31	76,81	79,31	
12	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Persen	60,2	62,6	65	67,4	69,8	72,2	
13	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen							
14	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	91,42	91,48	91,6	91,68	91,7	91,76	
15	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	97,33	97,39	97,51	97,59	97,61	97,67	
16	Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	91,57	91,63	91,75	91,83	91,85	91,91	
17	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Persen	59,63	59,69	59,81	59,89	59,97	60,09	
18	Angka Partisipasi Murnia SD	Persen	96,46	96,52	96,64	96,72	96,74	96,8	
19	Angka Partisipasi Murnia SMP	Persen	91,36	91,42	91,54	91,64	91,7	91,82	
20	Persen Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	N/A	25	25	25	25	100	
21	Persen Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Pendiidkan Sekolah Dasar	Persen	N/A	25	25	25	25	100	
22	Persen Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Pendiidkan Anak Usia Dini dan Kesetaraan	Persen	N/A	25	25	25	25	100	
23	Persen Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	85,53	88,83	92,14	95,44	98,74	100	
24	Persen PTK yang mengikuti pelatihan/peningkatan kompetensi	Persen							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
II	KESEHATAN								
1	Jumlah Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	26	24	21	19	18	16	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	12,58	12,12	11,65	11,19	10,73	10,26	
3	Persen pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persen pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persen Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persen pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persen Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persen Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persen warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persen Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persen pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Persen pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persen Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Persen Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persen peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	BELUM ADA PENETAPAN KAWASAN RAWAN BANJIR TERMASUK KEWENANGAN						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persen peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	TIDAK ADA PANTAI						
3	Persen Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	
4	Persen Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	71,73	72,28	72,83	73,38	73,93	74,48	
5	Persen peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74	
6	Persen penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	87,21	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88	
7	Persen kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	Persen	88,04	90,01	91,98	93,95	95,92	97,89	
9	Persen tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100,00	
10	Persen Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	30	30	30	30	30	30	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
12	Persen penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
IV	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persen Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	24,24	48,48	72,73	96,97	100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan
2	Persen warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	35	50	65	80	100		
3	Persen Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	1,65	4,58	7,5	10,43	13,35	16,27	
4	Persen Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	9,08	9,39	9,71	10,03	10,34	10,66	
5	Persen Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	35,19	44,44	53,7	62,96	72,22	100	
6	Persen Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
V	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persen penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persen Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	3	5	7	9	11	13	
4	Persen SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	0	6	12	18	24	30	
5	Persen Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persen	0	6	12	18	24	30	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
6	Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	Persen	50	56	62	68	74	80	
7	Persen jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	14	20	26	32	38	44	
8	Persen Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persen Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	Persen	0	100	100	100	100	100	
10	Persen Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	0	6	12	18	24	30	
11	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	Persen	20	25	30	35	40	45	
12	Persen Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	Persen	60	100	100	100	100	100	
13	Persen pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard	Persen	50	60	70	80	30	100	
14	Persen warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Persen warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Persen warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
VI	SOSIAL								
1	Persen sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	Persen Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persen korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persen sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persen pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persen Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persen Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	1,26	1,52	1,77	2,02	2,28	2,53	
8	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Jiwa	640,438	640,438	640,438	640,438	640,438	640,438	
VII	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
1	Persen penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja terdaftar	Persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persen Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	25	25	25	25	25	25	
3	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang ditempatkan	KK	81	84	87	90	93	96	
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	Persen Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	49,48	57,62	65,76	73,90	82,04	90,18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persen Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	57,69	63,46	71,15	76,92	82,69	90,38	
4	Persen Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	51,72	62,06	74,13	87,93	94,82	98,27	
	PANGAN								
1	Persen Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,55	94,6	94,65	94,7	94,75	94,8	
3	Persen Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	11,5	11,45	11,4	11,35	11,3	11,25	
4	Persen Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	
IX	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kelahiran	2,02	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran	14,5069	14,3090	14,1119	13,9156	13,7198	13,5248	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76,27	76,33	76,38	76,44	76,49	76,55	
4	Persen Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8,98	8,9829	8,9787	8,9750	8,9722	8,9703	
X	LINGKUNGAN HIDUP								
1									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah								
XI	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persen Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	50	60	70	70	80	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persen Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	60	65	70	75	80	85	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3	Persen Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	10	20	30	40	50	60	
4	Persen Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	96	96,5	97	97,5	98	98	
5	Persen Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	60	65	70	75	80	80	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persen Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	18,5	20	22,5	25	27,5	30	
XII	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persen peningkatan status desa mandiri	Persen	65	75	85	90	95	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persen Fasilitas Penataan Desa	Persen	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	
3	Persen Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	0,26	0,50	0,62	0,74	0,87	1,00	
4	Persen Fasilitas Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa	Persen	83	86	91	94	97	100	
XIII	PERHUBUNGAN								
1	Cakupan Kelancaran, Keselamatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	54,61	61,30	65,69	69,59	73,81	82,12	Dinas Perhubungan
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persen Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan Prioritas Pemerintah dan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	75	76	77	78	79	80	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
2	Persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persen Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75	80	85	90	95	100	
XV	STATISTIK								
1	Persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	Persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
XVI	PERSANDIAN								
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	73,65	77,52	81,4	85,28	89,15	93	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
XVII	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi								Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal								
XVII	PENANAMAN MODAL								
1	Persen Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	16	18	20	23	25	30	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	30	35	40	45	50	55	
XVIII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persen Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Persen Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	10	10	10	10	10	10	
XIX	KEBUDAYAAN								
1	Persen Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	19	22	25	27	30	33	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Persen Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	25	30	35	40	45	50	
XX	PARIWISATA								
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	N/A	5,24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Persen pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	20	20	20	20	20	20	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
XXI	PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	64,98	64,99	65	66	66,5	70	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72,3	72,5	72,55	73	74	75	
	KERASIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80	82,1	84,2	86	88	90	
XXII	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.637,99	1.760,84	1.901,70	2.063,35	2.249,05	2.462,71	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	9.308,64	9.634,44	10.019,82	10.470,71	10.994,24	11.598,93	
XXIII	PERTANIAN								
1	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
3	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Ha	150	150	150	150	150	150	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	12,17	12,42	12,67	12,92	13,17	13,42	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Persen wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
XXIV	KEUANGAN								
1	Persen Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	33	32	30	29	28	27	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persen Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	19	35	30	30,5	31	31,5	
3	Persen Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	5,52	1,82	0,73	0,29	0,12	0,05	
4	Persen Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	27,58	33	40	40,5	41	41,5	
5	Persen Penurunan SILPA	Persen	17,62	13,62	10,62	8,62	7,62	6,62	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	KEPEGAWAIAN								
1	Persen perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	86	88	90	92	94	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persen ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	87	88	89	90	91	92	
3	Persen pengembangan karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	93	94	95	96	97	98	
4	Persen pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen	94	95	96	97	98	99	
XXV	PERDAGANGAN								
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota (IKK)								Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Persen alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)								
XXVI	PERINDUSTRIAN								
1	Persen jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan (IKK)								Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (IKK)								
	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	24,95	25	25,02	25,04	25,06	25,08	Sekretariat Daerah
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	15	18	21	24	27	30	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai							
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun N	Tepat /Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	Persen Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan daerah pada Tahun 2030 merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- A. RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- B. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor...Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- C. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- D. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Sumedang dalam menyusun RPJMDesa harus selaras dengan memperhatikan arah kebijakan, target dan program prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- E. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sumedang sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2025-2029
- F. Bupati Sumedang selaku Kepala Daerah menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. Mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik, sehingga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah, secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan.

Demikian, penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang menjadi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan diharapkan dapat “mewujudkan Masyarakat Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST.,M.M.